PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025







BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18) Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke Dua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 451);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Rancangan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.366.370.761.800,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp529.884.959.800,- (*Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. pajak daerah;
   b. retribusi daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.466.151.000,- (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.195.787.000,- (*Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,- (*Tiga Puluh milyar rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp278.223.021.800,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.836.485.802.000,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.710.885.802.000,- (*Dua Triliun Tujuh Ratus Sepuluh Milyar*

Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.600.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
   a. pendapatan hibah;
   b. dana darurat; dan
   c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

(3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.408.867.666.146,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 2.384.132.390.457- (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) , yang terdiri atas:

a. belanja pegawai
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.260.994.266.412,- (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 915.867.821.096,- (*Sembilan Ratus Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp0,-(nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.278.069.039,- (*Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.992.233.910,- (*Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 523.070.692.769,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. belanja modal aset tetap lainnya;

f. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.314.120.000,- (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.347.961.221,- (*Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.593.747.003,- (*Seratus Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah*).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp336.951.016.463,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp797.330.777,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp66.517.305,-(*Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.997.200.620,- (*Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta*

Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Rat Rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).*

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2025 Rp42.496.904.346,-,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam rupiah*), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA).

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.983.013.972,- (*Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.486.109.626,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp42.496.904.346,- (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifika Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten Kota;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam Lembar Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 9

NOMOR REGEGISTER PERATURAN DAERAH MUSI BANYUASIN : (8-100/2024)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN

BERITA ACARA

Nomor : 11 /BA/BPKAD/IX/2024
Nomor : 103 /BA/ DPRD/IX/2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-09-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. H. Sandi Fahlepi : Pj. Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. H. Sugondo : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Jonkenedi : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Irwin Zulyani, S.H. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Endi Susanto, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 09 September 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. SANDI FAHLEPI

KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
Selaku
PIHAK KEDUA

H. SUGONDO

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

JONKENEDI

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IRWIN ZULYANI, S.H.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ENDI SUSANTO, S.E.

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DPRD Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 11 /KSB/BPKAD/IX/2024
Nomor : 103 /DPRD/IX/2024
Tanggal : 09 September 2024

Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	668.321.874.091,00	668.321.874.091,00	-
2	Dinas Kesehatan	334.276.542.331,60	334.276.542.331,60	-
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	-
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	-
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00	-
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00	-
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00	-
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	859.000.000,00	-
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	641.408.000,00	-
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00	-
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	-
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00	-
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00	-
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	-
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	-
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00	-
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	-
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	932.395.500,00	-
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00	-
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00	-
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	-
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00	-
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00	-
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	934.886.000,00	-
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00	-
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00	-
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00	-
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	-
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00	-
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00	-
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	605.263.500,00	-
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	149.999.999.929,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.116.319.678,72	389.116.319.678,72	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	228.409.255.813,46	228.409.255.813,46	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.866.072.375,11	14.866.072.375,11	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.402.308.185,65	29.402.308.185,65	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.670.022.827,55	17.670.022.827,55	-
8	Dinas Sosial	73.044.030.886,63	73.044.030.886,63	-
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.705.863.681,00	14.705.863.681,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.885.876.989,44	8.885.876.989,44	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.297.553.504,56	11.297.553.504,56	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.694.443.605,11	47.694.443.605,11	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.471.692.694,29	22.471.692.694,29	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.010.951.732,81	20.010.951.732,81	-

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.899.994.281,71	15.899.994.281,71	-
16	Dinas Perhubungan	18.878.907.178,57	18.878.907.178,57	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.541.448.619,07	27.541.448.619,07	-
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	11.850.517.905,38	11.850.517.905,38	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.600.812.461,67	18.600.812.461,67	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	101.941.941.621,56	101.941.941.621,56	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.156.812.449,00	11.156.812.449,00	-
22	Dinas Perikanan	16.494.925.674,33	16.494.925.674,33	-
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.549.807.214,22	46.549.807.214,22	-
24	Dinas Perkebunan	42.364.296.803,67	42.364.296.803,67	-
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.881.266.906,11	26.881.266.906,11	-
26	Sekretariat Daerah	120.811.591.059,78	120.811.591.059,78	-
27	Sekretariat DPRD	106.813.431.705,37	106.813.431.705,37	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.261.719.593,22	23.261.719.593,22	-
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	522.899.586.810,64	522.899.586.810,64	-
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.567.465.696,44	31.567.465.696,44	-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.250,94	18.775.086.250,94	-
32	Inspektorat	25.621.100.590,30	25.621.100.590,30	-
33	Kecamatan Sekayu	9.724.469.839,35	9.724.469.839,35	-
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	849.999.937,00	-
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	849.999.948,00	-
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	850.000.000,00	-
34	Kecamatan Lais	4.671.575.953,30	4.671.575.953,30	-
35	Kecamatan Babat Toman	5.111.810.736,67	5.111.810.736,67	-
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	849.998.751,00	-
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	849.998.767,00	-
36	Kecamatan Keluang	4.541.453.122,67	4.541.453.122,67	-
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	849.999.875,00	-
37	Kecamatan Sanga Desa	5.231.826.314,57	5.231.826.314,57	-
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	848.720.148,00	-
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	848.564.566,00	-
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.452.126.422,56	3.452.126.422,56	-
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.838.838.954,33	3.838.838.954,33	-
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.729.241.885,60	3.729.241.885,60	-
41	Kecamatan Sungai Lilin	4.992.630.395,90	4.992.630.395,90	-
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	850.000.000,00	-
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.491.388.274,00	4.491.388.274,00	-
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	849.014.113,00	-
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	849.918.355,00	-
43	Kecamatan Lalan	4.164.662.652,67	4.164.662.652,67	-
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.684.002.561,57	4.684.002.561,57	-
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.418.768.712,02	4.418.768.712,02	-
46	Kecamatan Babat Supat	3.548.719.688,11	3.548.719.688,11	-
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.649.926.024,78	2.649.926.024,78	-
TOTAL BELANJA DAERAH		**3.408.867.666.146,00**	**3.408.867.666.146,00**	-

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**69.983.013.972,00**	**69.983.013.972,00**	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**27.486.109.626,00**	-
1	Penyertaan Modal Perumdam PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-
2	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
TOTAL PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**27.486.109.626,00**	-
PEMBIAYAAN NETTO		**42.496.904.346,00**	**42.496.904.346,00**	-
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**3.436.353.775.772,00**	-

SEKAYU, 09 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

H. SUGONDO
KETUA

JONKENEDI
WAKIL KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

ENDI SUSANTO, S.E
WAKIL KETUA

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama
Kepala Daerah dan DPRD Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 11 /KSB/BPKAD/IX/2024
Nomor : 103 /DPRD/IX/2024
Tanggal : 09 September 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.366.370.761.800,00**	**3.366.370.761.800,00**	-	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**529.884.959.800,00**	**529.884.959.800,00**	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	216.466.151.000,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.195.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	278.223.021.800,00	-	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.836.485.802.000,00**	**2.836.485.802.000,00**	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	2.710.885.802.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	125.600.000.000,00	-	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	-	-	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	0,00	0,00	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	**BELANJA**	**3.408.867.666.146,00**	**3.408.867.666.146,00**	-	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.384.132.430.459,00**	**2.384.132.430.459,00**	-	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.261.486.761.478,00	1.261.486.761.478,00	-	(Gaji ASN, KDH, DPRD, PPPK dan BLUD)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.375.366.032,00	915.375.366.032,00	-	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	140.278.069.039,00	-	
	- KONI	27.061.098.300,00	27.061.098.300,00	-	Dispopar
	- Pramuka	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	Dispopar
	- PMI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	Dinkes
	- Parpol	5.461.440.000,00	5.461.440.000,00	-	Kesbangpol
	- KPUD Kab. Musi Banyuasin	1.060.018.372,00	1.060.018.372,00	-	Kesbangpol
	- Polres Kab. Musi Banyuasin (Penyediaan Perlengkapan Jalan 2025)	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Dishub
	- Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.930.034.000,00	4.930.034.000,00	-	Dikbud
	- Hibah pada Dinas Perikanan	3.969.035.500,00	3.969.035.500,00	-	Diskan
	- Hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	696.223.913,00	696.223.913,00	-	Dispusdip
	- Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.086.267.800,00	55.086.267.800,00	-	Disperkim
	- Hibah pada Sekretariat Daerah	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	-	DKP
	- Hibah pada Dinas Koperasi dan UMKM	2.709.500.000,00	2.709.500.000,00	-	Dinkop & UMKM
	- Hibah pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	98.914.320,00	98.914.320,00	-	DPPKB
	- Hibah pada Dinas Perkebunan	20.112.242.824,00	20.112.242.824,00	-	Disbun
	- Hibah pada Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.388.294.010,00	10.388.294.010,00	-	DTPHP
	- Hibah Pada Dinas Perhubungan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	Dishub
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	66.992.233.910,00	-	Dinas Sosial

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.2	**BELANJA MODAL**	**525.370.652.767,00**	**525.370.652.767,00**	-	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	10.314.120.000,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	74.347.961.221,00	-	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.893.707.001,00	102.893.707.001,00	-	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	336.951.016.463,00	-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	797.330.777,00	-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	66.517.305,00	-	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.697.200.620,00**	**4.697.200.620,00**	-	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.697.200.620,00	4.697.200.620,00	-	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**	**494.667.382.300,00**	-	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	270.875.595.300,00	270.875.595.300,00	-	
	Dana Desa	223.791.787.000,00	223.791.787.000,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(42.496.904.346,00)**	**(42.496.904.346,00)**	-	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PEMBAHASAN BANGGAR	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.983.013.972,00**	**69.983.013.972,00**	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.486.109.626,00**	**27.486.109.626,00**	-	
				-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	27.486.109.626,00	-	
	- Perumdam PDAM Tirta Musi	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-	
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
				-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**42.496.904.346,00**	**42.496.904.346,00**	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**3.436.353.775.772,00**	-	

SEKAYU, 09 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

H. SUGONDO
KETUA

JONKENEDI
WAKIL KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

ENDI SUSANTO, S.E
WAKIL KETUA

BUPATI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :930/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentigan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana

KETIGA : Bupati Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Banyuasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Bupati Musi Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Musi Banyuasin menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan Penyempurnaan dan Penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk mendapatkan nomor register.

KEENAM : Bupati Musi Banyuasin menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapat register sebagaimana Diktum Kelima.

KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ELEN SETIADI

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 930 KPTS/BPKAD/2024
TANGGAL : 17 Desember 2024

HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;
C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan ketantuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketantuan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Tabel. I, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

NO	URAIAN	PENETAPAN/PERSETUJUAN/SURAT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5
1	RKPD	27 Tahun 2024	28 Juni 2024	Sesuai (Paling lambat minggu 1 bulan Juli)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	B-900/760/Setda/2024	11 Juli 2024	Tidak Sesuai (Paling lambat minggu I bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B-900/760/Setda/2024	11 Juli 2024	Sesuai (Paling lambat minggu II bulan Juli)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.10/DPRD/VII/2024	31 Juli 2024	Sesuai (Paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.11/DPRD/VII/2024	31 Juli 2024	Sesuai (Paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B-900/1020/BPKAD-II/2024	27 Agustus 2024	Sesuai (Paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	11/BA/BPKAD/IX/2024 dan 103/BA/DPRD/IX/2024	9 September 2024	Sesuai, Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenan
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	B-900/1094/BPKAD-II/2024	11 September 2024	Sesuai, Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. Mengelola belanja secara efektif, efisen, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik.

2. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah, dan
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah pendapatan daerah yang diangarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurang dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa I (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan I (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terkait, dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah;
   a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   c. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   d. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

      Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintahan Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintahan Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

e. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

f. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

g. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah;

a. Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana dimaksud butir 3.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publilk tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang ,telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintahan Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja Mandatory Spending serta permenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

c. Pemerintahan Daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efeklif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintahan Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Point 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah;

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Pembiayaan *netto* digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sesuai butir 3.2.3.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.3.366.370.761.800,00,- sama dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel

Pendapatan Daerah

Uraian (Musi Banyuasin)	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		(%)	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Persentase
1	2	3	4 = 3:2*100	5	6	7=6-5	8=7/5*100
PENDAPATAN DAERAH	**4.078.146.093.777,00**	**3.807.803.252.281,72**	**93,37**	**4.640.568.707.897,00**	**3.366.370.761.800,00**	**(1.274.197.946.097,00)**	**(27,46)**
Pendapatan Asli Daerah	**407.152.294.811,00**	**369.445.863.046,72**	**90,74**	**619.651.955.525,00**	**529.884.959.800,00**	**(89.766.995.725,00)**	**(14,49)**
Pajak Daerah	*103.810.475.000,00*	*86.532.094.400,00*	*83,36*	*123.016.354.000,00*	*216.466.151.000,00*	93.449.797.000,00	**75,97**
Retribusi Daerah	*7.640.360.000,00*	*6.350.653.597,00*	*83,12*	*6.713.287.000,00*	*5.195.787.000,00*	(1.517.500.000,00)	**(22,60)**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	*28.000.000.000,00*	*28.082.895.564,79*	*100,30*	*30.000.000.000,00*	*30.000.000.000,00*	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	*267.701.459.811,00*	*248.480.219.484,93*	*92,82*	*459.922.314.525,00*	*278.223.021.800,00*	(181.699.292.725,00)	(39,51)
Pendapatan Transfer	**3.668.811.786.966,00**	**3.436.298.411.805,00**	**93,66**	**4.020.916.752.372,00**	**2.836.485.802.000,00**	**(1.184.430.950.372,00)**	(29,46)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*3.447.722.807.966,00*	*3.216.650.067.268,00*	*93,30*	*3.736.129.567.384,00*	*2.710.885.802.000,00*	(1.025.243.765.384,00)	(27,44)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	*221.088.979.000,00*	*219.648.344.537,00*	*99,35*	*284.787.184.988,00*	*125.600.000.000,00*	(159.187.184.988,00)	(55,90)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**2.182.012.000,00**	**2.058.977.430,00**	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   PAD dalam Rancanan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.529.884.959.800,00,- atau 15,74% dari total Pendapatan Daerah.

   Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

   a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

      1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.216.466.151,00 atau 6,43% dari total Pendapatan Daerah yang diuraikan sebagai berikut :
         a) Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp.2.729.859.000,00
         b) Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00
         c) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp.332.697.000,00
         d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp.2.029.103.000,00
         e) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dianggarkan sebesar Rp.29.904.394.000,00
         f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dianggarkan sebesar Rp.25.139.938.000,00
         g) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dianggarkan sebesar Rp.65.910.160.000,00
         h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dianggarkan sebesar Rp.40.000.000.000,00
         i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000,00

      2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.5.195.787.000,00,- atau 0,98% dari total Pendapatan Daerah. yang diuraikan sebagai berikut:
         a) Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp.447.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
         b) Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp.2.248.787.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
         c) Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 atau 0,89% dari total pendapatan daerah.

Hasil tersebut berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintahan Daerah (deviden) atas penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang kinerjanya belum memadai *(perfomance based)* harus dilakukan antara lain langkah-langkah Optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercatat dalam ikhtisar laporan

keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.278.223.021.800,00 atau 8,26% dari total pendapatan daerah.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

1) Jasa Giro dianggarkan dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.5.500.000.000,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2) Pendapatan Bunga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dianggarkan sebesar Rp.5.550.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6) Pendapatan Denda Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.317.200.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
8) Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp.234.332.000,00 dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9) Pendapatan BLUD dianggarkan dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.245.486.489.800,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 3.3.1.3.16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.836.485.802.000,00,- atau 84,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.2.710.885.802.000,00,00 atau 80,53% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp.125.600.000.000,00 atau 3,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 dan untuk Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal tanggal 19 September 2024 sebagaimana 3.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, 6dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah tidak dianggarkan dari total pendapatan daerah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan tidak dianggarkan lagi dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yangg menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.3.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Kebijakan Belanja Daerah;

   Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.408.867.666.146,00 sebagaimana Tabel.4 sebagai berikut:

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	% dari Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	90,27%	4.737.255.290.507,58	1.812.092.523.162,50	38,25%	3.408.867.666.146,00	(1.328.387.624.361,58)	-28,04%	53,16%
Belanja Operasi	2.664.497.036.394,00	2.368.483.329.746,10	88,89%	2.981.370.124.867,08	1.339.493.227.977,30	44,93%	2.384.132.430.459,00	(597.237.694.408,08)	-20,03%	56,18%
Belanja Pegawai	1.202.497.619.868,00	1.049.080.026.130,18	87,24%	1.368.657.646.364,58	744.826.324.203,50	54,42%	1.261.486.761.478,00	(107.170.884.886,58)	-7,83%	59,04%
Belanja Barang	1.347.412.961.344,00	1.204.877.864.227,92	89,42%	1.424.196.391.639,50	509.743.716.643,80	35,79%	915.375.366.032,00	(508.821.025.607,50)	-35,73%	55,69%
Belanja Bunga	2.605.134.089,00	2.229.803.709,00	85,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
Belanja Hibah	111.781.321.093,00	112.095.635.679,00	100,28%	167.750.420.863,00	84.773.187.130,00	50,54%	140.278.069.039,00	(27.472.351.824,00)	-16,38%	60,43%
Belanja Bantuan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	20.765.666.000,00	150.000.000,00	0,72%	66.992.233.910,00	46.226.567.910,00	222,61%	0,22%
Belanja Modal	819.927.010.107,00	756.123.871.417,92	92,22%	1.222.271.513.103,50	195.716.832.735,20	16,01%	525.370.652.767,00	(696.900.860.336,50)	-57,02%	37,25%
Belanja Modal	24.244.723.000,00	14.994.980.293,00	61,85%	28.773.940.611,00	11.237.783.365,00	39,06%	10.314.120.000,00	(18.459.820.611,00)	-64,15%	108,96%
Belanja Modal	144.897.284.230,00	127.634.008.214,00	88,09%	129.091.063.794,50	34.513.621.148,00	8,71%	74.347.961.221,00	(54.743.102.573,50)	-42,41%	15,12%
Belanja Modal	176.960.192.426,00	165.490.547.392,58	93,52%	193.795.061.445,00	52.687.524.956,20	27,19%	102.893.707.001,00	(90.901.354.444,00)	-46,91%	51,21%
Belanja Modal	460.715.165.634,00	434.337.839.983,34	94,27%	853.396.850.492,00	97.078.519.266,00	11,38%	336.951.016.463,00	(516.445.834.029,00)	-60,52%	28,81%
Belanja Modal Aset	13.109.644.817,00	13.666.495.535,00	104,25%	17.199.706.111,00	199.384.000,00	1,16%	797.330.777,00	(16.402.375.334,00)	-95,36%	25,01%
Belanja Modal Aset	0,00		0,00%	14.890.650,00	0,00	0,00%	66.517.305,00	51.626.655,00	0,00%	0,00%
Belanja Tidak	4.233.206.000,00	21.000.000,00	0,50%	5.126.878.272,00	2.095.380.600,00	40,87%	4.697.200.620,00	(429.677.652,00)	-8,38%	44,61%
Belanja Tidak	4.233.206.000,00	21.000.000,00	0,50%	5.126.878.272,00	2.095.380.600,00	40,87%	4.697.200.620,00	(429.677.652,00)	-8,38%	44,61%
Belanja Transfer	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	94,92%	528.486.774.265,00	274.787.081.850,00	52,00%	494.667.382.300,00	(33.819.391.965,00)	-6,40%	55,55%
Belanja Bagi Hasil	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	94,92%	528.486.774.265,00	274.787.081.850,00	52,00%	494.667.382.300,00	(33.819.391.965,00)	-6,40%	55,55%

Tabel 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
		Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	68.636.480.020,00	489.618.168.628,00	117.674.021.075,00	-	-	607.292.189.703,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	-	243.965.744.962,00	39.925.215.000,00	-	-	283.890.959.962,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	31.996.763.661,00	161.428.453.103,00	13.380.375.637,00	-	-	174.808.828.740,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.639.716.359,00	32.676.102.975,00	60.135.501.989,00	-	-	92.811.604.964,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	17.731.410.364,00	3.223.430.000,00	-	-	20.954.840.364,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	25.897.447.727,00	920.860.249,00	-	-	26.818.307.976,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	7.919.009.497,00	88.638.200,00	-	-	8.007.647.697,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.225.700.571,00	106.452.380.691,00	11.863.329.777,00	-	-	118.315.710.468,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	6.263.531.627,00	271.316.360,00	-	-	6.534.847.987,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	7.559.422.705,00	408.497.398,00	-	-	7.967.920.103,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.423.200.571,00	15.436.102.062,00	178.391.500,00	-	-	15.614.493.562,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	460.802.250,00	7.737.225.750,00	-	-	8.198.028.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.752.960.000,00	13.913.901.669,00	1.318.376.200,00	-	-	15.232.277.869,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	7.415.724.468,00	806.819.000,00	-	-	8.222.543.468,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	9.267.978.916,00	108.515.000,00	-	-	9.376.493.916,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	2.603.147.000,00	-	-	-	2.603.147.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.025.540.000,00	6.985.535.456,00	366.681.000,00	-	-	7.352.216.456,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	11.484.465.787,00	219.212.619,00	-	-	11.703.678.406,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	3.509.605.813,00	-	-	-	3.509.605.813,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	7.036.148.245,00	300.679.600,00	-	-	7.336.827.845,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	24.000.000,00	8.856.329.799,00	-	-	-	8.856.329.799,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	355.000.000,00	-	-	-	355.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	805.000.000,00	-	-	-	805.000.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	1.652.100.000,00	-	-	-	1.652.100.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	2.672.230.580,00	147.615.350,00	-	-	2.819.845.930,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	175.354.314,00	-	-	-	175.354.314,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.960.600.000,00	24.829.995.219,00	6.197.700.600,00	-	-	31.027.695.819,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.360.000.000,00	12.004.692.785,00	4.108.961.800,00	-	-	16.113.654.585,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-	2.415.587.304,00	37.540.000,00	-	-	2.453.127.304,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	9.770.484.330,00	2.051.198.800,00	-	-	11.821.683.130,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.600.600.000,00	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	639.230.800,00	-	-	-	639.230.800,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	-	147.623.537.263,00	17.491.641.484,00	-	-	165.115.178.747,00
SEKRETARIAT DAERAH	-	83.398.362.962,00	8.948.851.484,00	-	-	92.347.214.446,00
SEKRETARIAT DPRD	-	64.225.174.301,00	8.542.790.000,00	-	-	72.767.964.301,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1262024186845	79.304.128.442,00	2.756.169.502,00	4.000.000.000,00	295.198.799.943,00	381.259.097.887,00
PERENCANAAN	-	10.750.907.076,00	207.304.900,00	-	-	10.958.211.976,00
KEUANGAN	1262024186845	38.875.281.107,00	2.538.344.602,00	4.000.000.000,00	295.198.799.943,00	340.612.425.652,00
KEPEGAWAIAN	-	25.242.226.735,00	-	-	-	25.242.226.735,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	1.220.027.500,00	-	-	-	1.220.027.500,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	3.215.686.024,00	10.520.000,00	-	-	3.226.206.024,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	12.587.317.062,00	-	-	-	12.587.317.062,00
INSPEKTORAT DAERAH	-	12.587.317.062,00	-	-	-	12.587.317.062,00
UNSUR KEWILAYAHAN	-	35.549.127.646,00	2.766.455.586,00	-	-	38.315.583.232,00
KECAMATAN	-	35.549.127.646,00	2.766.455.586,00	-	-	38.315.583.232,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	5.662.789.768,00	184.289.750,00	-	-	5.847.079.518,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	5.662.789.768,00	184.289.750,00	-	-	5.847.079.518,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**1.350.846.967.436,00**	**901.627.444.719,00**	**158.933.607.774,00**	**4.000.000.000,00**	**295.198.799.943,00**	

1) Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
   a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-ndang Nomor 6 Tahun 2024.
   b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahzs.
2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

   Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:
   a. SPM Pendidikan

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp22.180.091.281,00 atau 3,37% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp657.766.944.238,00.

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

      1) Pendidikan Anak Usia Dasar sebesar Rp19.766.196.781,00;
      2) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp2.413.894.500,00;

      harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

      1) 100% warga negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
      2) 100% warga negara Usia 7-15 berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
      3) 100% warga negara Usia 7-18 berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan;

      harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta butir 5.2.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   b. SPM Kesehatan

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp876.946.666,00 atau 0,15% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp594.763.031.261,00.

      Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar sebagai berikut:

      1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp74.232.000,00;

2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar Rp83.673.000,00;
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp46.778.000,00;
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp84.493.000,00;
5. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp36.240.000,00;
6. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp49.980.000,00,
7. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis sebesar Rp57.865.000,00,00;
8. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp62.040.000,00;
9. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp50.000.000,00;
10. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp109.256.000,00;
11. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp136.505.000,00;
12. Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp95.696.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

1) 100% ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan;
2) 100% ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan;
3) 100% bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan;
4) 100% balita mendapatkan layanan kesehatan;
5) 100% usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan;
6) 100% usia produktif mendapatkan layanan kesehatan;
7) 100% usia lanjut mendapatkan layanan kesehatan;
8) 100% penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan;
9) 100% penderita diabetes melitus mendapatkan layanan kesehatan;
10) 100% orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan layanan kesehatan;
11) 100% orang terduga tuberkulosis mendapatkan layanan kesehatan;
12) 100% orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) mendapatkan layanan kesehatan;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.432.071.512,00 atau 3,69% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp499.606.041.015,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp8.795.004.600,00;
2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp9.637.066.912,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten yang terdiri dari:

1) 100% warga negara memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp5.485.523.050,00 atau 6,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp90.399.534.477,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar Rp5.485.523.050,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten yang terdiri dari;

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp5.173.010.271,00 atau 11,69% dari total belanja Urusan

Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp44.268.380.561,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp1.133.167.250,00;
2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp1.576.907.321,00;
3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana sebesar Rp1.819.546.700,00;
4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp643.389.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantiblinmas untuk Kabupaten yang terdiri dari 100% warga Negara yang memeperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp8.828.633.800,00 atau 12,09% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp73.044.030.887,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan sebagai berikut:

1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00
2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp367.767.000,00
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp 2.115.216.700,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial untuk Kabupaten yang terdiri dari:

1) 100% warga negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Sosial;
2) 100% warga negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
3) 100% warga negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;

4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5) 100% warga negara korban bencana kota mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah:

a) mengembalikan Momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator :
   (1) Pertumbuhan Ekonomi 4,25%-4,75%
   (2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,5%
   (3) Rasio Gini 0,286% dan
b) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
   (1) Indeks Pembangunan Manusia 70,25% dan
   (2) Tingkat Kemiskinan 13,85%

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 meliputi:

a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.43.061.617.945 atau 1,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila.

   Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN1) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Publik dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.902.256.442 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.35.159.361.503 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.61.181.486.526 atau 1,795% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN2) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Untuk sasaran: Peningkatan Kesejahteraan Petani dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.956.537.265 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.51.811.659.311 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.71.413.289.950 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.588.463.446.086 atau 17,263 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN3) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.897.010.000 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2) Untuk sasaran: Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp569.566.436.086 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.1.336.186.305.877 atau 39,197% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN4) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.269.560.512.065 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.886.073.237 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3) Untuk sasaran: Penyediaan Lapangan Kerja yang Didukung oleh Tenaga Kerja Terampil dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.739.720.575 dari total belanja daerah.

e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.37.045.981.037 atau 1,087% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN5) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

   1) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.045.981.037 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

f. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.63.959.501.591 atau 1,876% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

   1) Untuk sasaran: Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.959.501.591 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.1.216.403.861.104 atau 35,684% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

   1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.604.084.950.545 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah;

2) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.612.318.910.559 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.62.565.465.980 atau 1,835% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.62.565.465.980 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel.6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025.

NO	PRIORITAS NASIONAL	RAPBD 2025 (Rp.)	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	43.061.617.945	1,26%
2	Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	61.181.486.526	1,795%
3	Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	588.463.446.086	17,263%

4	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	1.336.186.305.877	39,197%
5	Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	37.045.981.037	1,087%
6	Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	63.959.501.591	1,876%
7	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	1.216.403.861.104	35,684%
8	Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	62.565.465.980	1,835%
	TOTAL	3.408.867.666.146	100,00%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas alokasi anggaran dimaksud, harus diupayakan untuk diingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 sesuai maksud Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 meliputi:

a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3,38%;
b. Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 11,12%;
c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3,30%;

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Sumatera 71,23% s.d 77,23%.

1) Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2025 sebagaimana Tabel.7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

NO	PRIORITAS DAERAH	RAPBD 2025 (Rp.)	RASIO TERHADAP BELANJA DAERAH (%)
1	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Produktivitas Dan Hilirisasi Komoditas Unggulan Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	116.089.151.439	3,406%
2	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Pendapatan Dan Mengurangi Beban Masyarakat Untuk Menurunkan Kemiskinan	106.906.608.025	3,136%
3	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	624.903.342.874	18,332%
4	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	62.215.155.980	1,825%
5	Prioritas Daerah 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.352.009.193.050	39,662%
6	Prioritas Daerah 6 : Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.146.744.214.778	33,640%
	TOTAL	3.408.867.666.146	100,000%

2) Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai butir E.2.ab.3)a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi daerah Rp9.992.553.200,00;

a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Rp.72.800.000;
b) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rp. 256.556.000;
c) Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Rp.596.173.000;
d) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Rp. 62.960.000;
e) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 1.450.163.000;
f) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 1.809.265.000;
g) Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Rp. 348.692.000;
h) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pasca Panen Hortikultura Rp. 780.232.200;
i) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp. 3.213.902.000;
j) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 78.307.000;
k) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp.78.307.000;
l) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp.1.245.196.000.

3) Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang besaranya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp756.756.543.967,00 atau 22,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel.8
Alokasi Fungsi Pendidikan

No.	URAIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE TERHADAP BELANJA DAERAH
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000	0,0988%
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	337.050.000	0,0099%
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.200.000.000	0,0352%
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.234.000.000	0,0949%
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000	0,0029%
6	Pengadaan Mebel Sekolah	1.889.300.000	0,0555%
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000	0,0161%
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.579.082.000	0,0464%
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000	0,0176%
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	341.066.850	0,0100%
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.025.386.200	0,1475%
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	506.850.000	0,0149%
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.887.200.750	0,0848%
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.387.500.000	0,0994%
15	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.107.450.000	0,0325%
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.350.000.000	0,0396%
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	918.187.050	0,0270%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.400.000.000	0,0411%
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	481.950.000	0,0141%
20	Pengadaan Mebel Sekolah	2.520.000.000	0,0740%
21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000	0,0147%
22	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.055.787.200	0,0310%
23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.800.000.000	0,0528%
24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	152.648.700	0,0045%
25	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	199.999.700	0,0059%
26	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.428.203.581	0,0419%
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.012.500.000	0,0591%
28	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	910.000.000	0,0267%
29	Pengadaan Mebel PAUD	130.000.000	0,0038%
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	723.310.800	0,0212%
31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.290.583.700	0,0379%
32	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	89.916.600	0,0026%
33	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000	0,0117%
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	324.547.000	0,0095%
35	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000	0,0059%
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		0,0059%

		200.000.000	
37	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	446.083.600	0,0131%
38	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22.980.200	0,0007%
39	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000	0,0025%
40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	0,0012%
41	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	99.999.700	0,0029%
42	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	550.078.483.467	16,1475%
43	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	0,0009%
44	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.998.000	0,0026%
45	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.385.000	0,0029%
46	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.993.640	0,0009%
47	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.191.500	0,0058%
48	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	0,0018%
49	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	0,0088%
50	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000	0,0032%
51	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	0,0012%
52	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	0,0015%
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	0,0059%
54	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.800.000	0,0130%
55	Pengadaan Mebel	100.632.000	0,0030%
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.040.582.400	0,0893%
57	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.101.500.000	1,6175%
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.499.600	0,0157%
59	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.230.608.000	0,0655%
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.787.000	0,0041%
61	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	326.408.000	0,0096%
62	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.333.591.850	0,0685%
63	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	868.250.000	0,0255%
64	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	275.000.000	0,0081%
65	Pemanfaatan Cagar Budaya	299.995.000	0,0088%
66	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	345.716.000	0,0101%
67	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6.105.969.000	0,1792%
68	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	98.889.000	0,0029%
69	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	47.007.828	0,0014%
70	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	411.313.686	0,0121%
71	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	68.363.374	0,0020%
72	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	156.021.032	0,0046%
73	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	665.719.777	0,0195%
74	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541.408.883	0,0159%
75	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		0,0133%

		453.217.333	
76	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	71.725.365	0,0021%
77	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	622.485.000	0,0183%
78	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	233.216.500	0,0068%
79	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	207.637.000	0,0061%
80	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	614.690.000	0,0180%
81	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	27.378.966.823	0,8037%
82	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12.495.500.399	0,3668%
83	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	706.507.500	0,0207%
84	Seleksi Atlet Daerah	85.006.000	0,0025%
85	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	11.358.923.250	0,3334%
86	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	27.061.098.300	0,7944%
87	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	105.000.000	0,0031%
88	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	274.207.960	0,0080%
89	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1.195.199.879	0,0351%
90	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	147.410.000	0,0043%
91	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	103.670.500	0,0030%
92	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.500.000.000	0,0734%
93	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	245.062.000	0,0072%
94	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	386.424.890	0,0113%
95	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	199.997.600	0,0059%
	TOTAL BELANJA PENDIDIKAN	**756.756.543.967**	**22,2145%**
	Total Belanja Daerah	**3.406.589.652.782**	**100,0000%**

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasintelah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan sebesar Rp668.321.874.088,00 atau 100% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp613.100.460.307,00 atau 78,45% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
2) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp345.716.000,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp594.763.031.261,00 atau 17,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp500.000.000,00;
2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp85.884.666,00;
3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi sebesar Rp 155.968.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, secara konsisten memadai dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjunya alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinginya antara lain:

a) penguatan promosi kesehatan. dan deteksi dini penyakit;
b) peningkatan kesehatan ibu anak dan penurunan stunting:
   (1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
   (2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
   (3) pemeriksaan kehamilan *(Antenatal Core};*
   (4) konsumsi TID ibu hamil;
   (5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);

(6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;

(7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia enam bulan;

(8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);

(9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi *(weight, wasting,* dan stunting);

(10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan

(11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:

(1) Tuberkulosis (TBCI;

(2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);

(3) Malaria; dan

(4) Penyakit menular lainnya.

d) pencegahan dan pengendalian penyakil tidak menular, terutama:

(1) Diabetes Melitus

(2) Hipertensi: dan

(3) Penyakit tidak menular lainnya.

e) Penguatan jejaring layanan primer, melalui pcmenuhan:

(1) Sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);

(2) Sarana prasarana posyandu prima dan posyandu;

(3) Obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan bahan Medis Habis Pakai (BMHP);

(4) Penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke,* jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan

(5) Penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).

f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan:

(1) 9 (sembilan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

(2) Perawat dan bidan pada entitas puskesmas pembantu;

(3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke,*jantung, dan *uronefrology);*

(4) Tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah

(5) Insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di

puskesmas, dan

(6) Peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu;

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebesar Rp77.041.160.340,00 atau 12,95% dari total urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebagaimana maksud butir 5.2.4.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah yang antara lain tercantum pada:

1) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp85.884.666,00;
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp109.256.000,00;
3) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp136.505.000,00;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga. untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinmengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan butir 5.1.3.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel.9
Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik

NO	KODE SUBKEGIATAN	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN	PERSENTASE TERHADAP TOTAL BELANJA DAERAH
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000	0,0988%
2	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	337.050.000	0,0099%
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.200.000.000	0,0352%
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.784.000.000	0,0817%
5	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000	0,0029%
6	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.889.300.000	0,0555%
7	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.765.786.200	0,1399%
8	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	59.600.000	0,0017%

9	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.864.487.000	0,0547%
10	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	52.226.750	0,0015%
11	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.187.500.000	0,0936%
12	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	200.000.000	0,0059%
13	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.107.450.000	0,0325%
14	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000	0,0294%
15	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	481.950.000	0,0141%
16	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	86.237.050	0,0025%
17	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.400.000.000	0,0411%
18	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	481.950.000	0,0141%
19	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	2.520.000.000	0,0740%
20	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	27.400.000	0,0008%
21	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	66.000.000	0,0019%
22	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	667.800.000	0,0196%
23	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	160.403.581	0,0047%
24	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.912.500.000	0,0561%
25	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	130.000.000	0,0038%
26	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	275.000.000	0,0081%
27	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.584.000	0,0046%
28	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.607.500	0,0013%
29	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	73.262.000	0,0022%
30	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.370.000	0,0008%
31	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000.000	0,0440%
32	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	35.000.000	0,0010%
33	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	164.100.000	0,0048%
34	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	30.000.000	0,0009%
35	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000	0,0015%
36	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000	0,0015%
37	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	497.170.000	0,0146%
38	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.098.900.000	0,0323%
39	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	305.585.000	0,0090%
40	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	693.475.000	0,0204%
41	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.499.463.600	0,0440%
42	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	67.836.800	0,0020%
43	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	497.470.000	0,0146%
44	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	497.500.000	0,0146%
45	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	894.610.000	0,0263%
46	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	0,0029%
47	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	142.178.850	0,0042%
48	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	149.794.918	0,0044%
49	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	68.797.800	0,0020%
50	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.275.600	0,0004%
51	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.500.000	0,0003%

52	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	55.636.760	0,0016%
53	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	63.220.000	0,0019%
54	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.386.720	0,0009%
55	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.690.000	0,0012%
56	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.595.730	0,0002%
57	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	35.486.700	0,0010%
58	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	137.945.449	0,0040%
59	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	135.759.200	0,0040%
60	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	22.046.250	0,0006%
61	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.970.000	0,0004%
62	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	47.565.880	0,0014%
63	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.699.000	0,0005%
64	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35.437.860	0,0010%
65	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.829.350	0,0011%
66	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.470.820	0,0018%
67	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.316.779	0,0004%
68	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.545.530	0,0016%
69	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.174.150	0,0010%
70	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	287.500.000	0,0084%
71	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.312.500.000	0,1266%
72	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	55.783.272	0,0016%
73	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	299.600.000	0,0088%
74	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000	0,0587%
75	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	520.000.000	0,0153%
76	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	230.940.000	0,0068%
77	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	50.000.000	0,0015%
78	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	146.281.800	0,0043%
79	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.000.000	0,0035%
80	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.220.000	0,0028%
81	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	304.056.300	0,0089%
82	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	249.095.250	0,0073%
83	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	128.850.000	0,0038%
84	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	128.281.600	0,0038%
85	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	77.022.400	0,0023%
86	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	99.055.800	0,0029%
87	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	169.635.400	0,0050%
88	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	46.000.000	0,0014%
89	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	132.680.426	0,0039%
90	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	70.000.000	0,0021%
91	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	203.308.700	0,0060%
92	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	160.000.000	0,0047%
93	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.506.200	0,0007%
94	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000	0,0029%
95	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	350.000.000	0,0103%
96	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	173.550.000	0,0051%
97	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000	0,0059%
98	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	268.627.732	0,0079%
99	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.860.000	0,0041%
100	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	151.275.720	0,0044%
101	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	156.805.000	0,0046%

102	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	300.000.000	0,0088%
103	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	130.250.000	0,0038%
104	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	111.300.000	0,0033%
105	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	89.800.843	0,0026%
106	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	93.488.600	0,0027%
107	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	340.342.000	0,0100%
108	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	320.000.000	0,0094%
109	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	219.640.484	0,0064%
110	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.000.000	0,0006%
111	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	229.095.250	0,0067%
112	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	125.000.000	0,0037%
113	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	101.377.500	0,0030%
114	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	169.387.050	0,0050%
115	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	124.000.000	0,0036%
116	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100.000.000	0,0029%
117	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60.526.350	0,0018%
118	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	390.000.000	0,0114%
119	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	833.000.000	0,0245%
120	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.200.000.000	0,0352%
121	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	320.000.000	0,0094%
122	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	800.000.000	0,0235%
123	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	524.000.000	0,0154%
124	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	187.000.000	0,0055%
125	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	145.640.000	0,0043%
126	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	872.115.000	0,0256%
127	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.504.264.800	0,1322%
128	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	97.402.500	0,0029%
129	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	800.000.000	0,0235%
130	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	217.382.167.894	6,3812%
131	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	313.000.000	0,0092%
132	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	37.400.309.827	1,0979%
133	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	2.236.390.000	0,0656%
134	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.102.888	0,0003%
135	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169.017.480	0,0050%
136	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.874.742	0,0015%
137	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.566.219	0,0030%
138	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	75.921.780	0,0022%
139	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	21.088.890	0,0006%
140	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.103.882.000	0,1792%
141	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.550.000.000	0,0455%
142	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	27.048.000	0,0008%
143	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	17.258.585.186	0,5066%
144	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	31.230.367.150	0,9168%
145	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000.000	0,1615%
146	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	0,0088%

147	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.975.523.050	0,1461%
148	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus	2.319.610.400	0,0681%
149	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	47.577.837.756	1,3966%
150	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.250.000.000	0,0367%
151	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	0,0029%
152	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.344.700	0,0003%
153	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.432.300	0,0011%
154	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.223.000	0,0016%
155	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	0,0029%
156	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.745.150	0,0031%
157	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.072.280.000	0,2076%
158	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.320.000	0,0014%
159	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.343.200.000	0,0688%
160	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.320.000	0,0014%
161	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	0,0029%
162	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.229.982.500	0,0361%
163	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	120.889.390	0,0035%
164	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	42.940.017	0,0013%
165	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	33.978.099	0,0010%
166	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	95.367.315	0,0028%
167	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.308.821	0,0011%
168	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.300.000	0,0010%
169	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.466.600	0,0015%
170	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.127.521	0,0005%
171	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.365.736	0,0003%
172	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	43.811.700	0,0013%
173	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.436.640	0,0010%
174	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.640.000	0,0058%
175	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.947.737	0,0011%
176	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.355.000.000	0,1278%
177	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.254.850	0,0002%
178	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.899.846	0,0009%
179	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	158.781.338	0,0047%
180	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.682.800	0,0004%
181	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.990.000	0,0007%
182	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.788.100	0,0046%
183	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.029.900	0,0001%
184	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.452.000	0,0007%
185	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	0,0004%
186	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	37.350.000	0,0011%

187	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.890.000	0,0009%
188	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	41.250.000	0,0012%
189	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.752.000	0,0010%
190	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.500.000	0,0008%
191	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.438.000	0,0034%
192	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.530.000	0,0004%
193	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.981.000	0,0002%
194	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.360.000	0,0029%
195	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	87.120.000	0,0026%
196	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	721.408.000	0,0212%
197	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	193.200.000	0,0057%
198	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	86.624.000	0,0025%
199	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.044.490	0,0039%
200	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.000.000	0,0014%
201	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	39.104.000	0,0011%
202	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.807.220	0,0006%
203	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.785.750	0,0006%
204	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	0,0001%
205	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.377.270	0,0006%
206	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.024.200	0,0015%
207	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	700.000	0,0000%
208	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	924.000	0,0000%
209	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.885.000	0,0001%
210	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.167.165	0,0000%
211	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.826.500	0,0002%
212	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.141.840	0,0005%
213	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.536.010	0,0035%
214	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	97.071.720	0,0028%
215	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	165.767.400	0,0049%
216	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	400.000.000	0,0117%
217	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.400.000.000	0,0411%
218	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	27.282.000	0,0008%
219	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	24.038.000	0,0007%
220	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.079.997.150	0,0317%
221	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	688.000.000	0,0202%
222	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.400.000.000	0,0411%
223	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	15.000.000	0,0004%
224	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	9.805.000	0,0003%
225	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	220.000.000	0,0065%
226	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	13.348.800	0,0004%
227	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.780.800	0,0034%
228	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.645.500	0,0021%

229	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.400.000	0,0003%
230	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	0,0029%
231	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	106.560.000	0,0031%
232	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.000.000	0,0002%
233	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	499.877.400	0,0147%
234	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	818.950.230	0,0240%
235	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	572.260.500	0,0168%
236	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	83.872.675	0,0025%
237	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	678.986.220	0,0199%
238	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.530.000	0,0001%
239	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.590.000	0,0002%
240	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.833.000	0,0056%
241	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.725.140	0,0007%
242	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.719.500	0,0001%
243	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	0,0147%
244	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000	0,0352%
245	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000	0,0294%
246	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	0,0015%
247	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.192.776	0,0009%
248	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.083.230	0,0038%
249	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.128.519	0,0006%
250	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.043.150	0,0009%
251	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.253.480	0,0013%
252	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.640.000	0,0008%
253	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	87.017.000	0,0026%
254	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	729.476.800	0,0214%
255	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.639.100	0,0049%
256	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.857.110	0,0010%
257	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	62.796.000	0,0018%
258	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.216.000	0,0010%
259	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000	0,0881%
260	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	499.500.000	0,0147%
261	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	766.033.200	0,0225%

262	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.089.350	0,0001%
263	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	95.460.000	0,0028%
264	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3.442.378	0,0001%
265	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	17.760.000	0,0005%
266	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	37.851.000	0,0011%
267	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	59.940.000	0,0018%
268	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	83.250.000	0,0024%
269	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.062.250	0,0006%
270	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.310.000	0,0007%
271	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.314.281	0,0021%
272	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.940.475	0,0008%
273	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.860.800	0,0002%
274	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.697.048	0,0010%
275	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.851.140	0,0003%
276	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	150.753.207	0,0044%
277	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	279.078.740	0,0082%
278	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	109.250.000	0,0032%
279	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	257.217.303	0,0076%
280	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.677.854	0,0007%
281	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.254.674	0,0021%
282	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.223.576	0,0026%
283	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.660.545	0,0005%
284	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.750.000	0,0008%
285	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50.781.390	0,0015%
286	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0,0059%
287	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	3.850.000	0,0001%
288	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	92.966.558	0,0027%
289	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	22.388.200	0,0007%
290	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.615.025	0,0008%
291	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.049.470	0,0011%
292	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.939.500	0,0008%
293	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.620.000	0,0008%
294	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.600.000	0,0003%
295	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.942.400	0,0016%
296	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.898.100	0,0010%
297	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.009.000	0,0004%
298	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.326.000	0,0003%
299	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.165.000	0,0008%
300	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.500.000	0,0007%
301	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.987.400	0,0015%
302	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.716.996	0,0052%
303	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.735.015	0,0008%
304	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.000.000	0,0161%
305	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	798.490	0,0000%
306	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.015.000	0,0085%

307	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	0,0001%
308	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.362.500	0,0008%
309	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.762.500	0,0055%
310	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	0,0021%
311	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.481.320	0,0010%
312	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820.000.000	0,0241%
313	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000	0,0000%
314	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.000.000	0,0007%
315	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	22.743.900	0,0007%
316	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.196.200	0,0014%
317	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.207.410	0,0014%
318	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	125.000.000	0,0037%
319	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	6.650.000	0,0002%
320	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	65.780.000	0,0019%
321	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	14.105.692.900	0,4141%
322	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000	0,0007%
323	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	11.550.000	0,0003%
324	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	153.800.000	0,0045%
325	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	13.797.500	0,0004%
326	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	86.000.000	0,0025%
327	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	15.000.000	0,0004%
328	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	51.285.000	0,0015%
329	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	335.470.000	0,0098%
330	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.618.400	0,0009%
331	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.482.800	0,0027%
332	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.110.400	0,0022%
333	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	34.219.080	0,0010%
334	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	181.263.460	0,0053%
335	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	100.239.317	0,0029%
336	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.359.950	0,0007%
337	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.256.404	0,0002%
338	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.295.000	0,0011%
339	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.920.146	0,0013%
340	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.588.396	0,0005%
341	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.000.000	0,0004%
342	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.835.000	0,0002%
343	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.412.100	0,0001%
344	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	28.242.563	0,0008%
345	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	24.735.462	0,0007%
346	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.772.000	0,0002%
347	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.300.000	0,0003%
348	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.800.000	0,0005%

349	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.550.222	0,0002%
350	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.235.878	0,0006%
351	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.424.900	0,0002%
352	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.811.652	0,0020%
353	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.034.454	0,0020%
354	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	74.864.838	0,0022%
355	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.913.163	0,0002%
356	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	240.000.000	0,0070%
357	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	37.800.000	0,0011%
358	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1.040.000	0,0000%
359	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	232.582.740	0,0068%
360	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.040.000	0,0001%
361	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	2.080.000	0,0001%
362	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.160.000	0,0001%
363	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.040.000	0,0000%
364	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	60.000.000	0,0018%
365	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	54.312.300	0,0016%
366	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.445.875	0,0004%
367	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.613.000	0,0016%
368	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.227.488	0,0018%
369	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.975.000	0,0007%
370	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.261.992	0,0023%
371	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.318.610	0,0021%
372	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.665.000	0,0000%
373	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.076.100	0,0014%
374	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	181.047.000	0,0053%
375	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	123.543.000	0,0036%
376	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.899.350.080	0,1145%
377	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.130.550	0,0029%
378	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.185.231	0,0008%
379	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.993.000	0,0002%
380	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	57.114.750	0,0017%
381	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.494.000	0,0003%
382	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.173.800	0,0016%
383	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.440.000	0,0029%
384	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	310.178.400	0,0091%
385	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	175.720.000	0,0052%
386	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.519.784.450	0,1033%
387	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000	0,0003%
388	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.407.921	0,0001%
389	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.001.516	0,0011%
390	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.799.750	0,0002%
391	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.092.580	0,0031%
392	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.935.806	0,0011%
393	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.964.360	0,0003%
394	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.655.000	0,0003%
395	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	20.992.320	0,0006%

396	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.532.000	0,0058%
397	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12.610.544	0,0004%
398	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	922.490.494	0,0271%
399	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	972.160.000	0,0285%
400	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.272.996	0,0019%
401	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.763.107	0,0006%
402	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.695.911	0,0083%
403	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.725.000	0,0015%
404	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.239.100	0,0063%
405	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.269.350	0,0014%
406	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.866.000	0,0007%
407	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	976.302.891	0,0287%
408	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628.348.335	0,0184%
409	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.566.180	0,0009%
410	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.660.400	0,0047%
411	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	387.176.373	0,0114%
412	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.514.000	0,0012%
413	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.022.000	0,0030%
414	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	583.571.900	0,0171%
415	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	0,0018%
416	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	178.493.755	0,0052%
417	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	482.683.470	0,0142%
418	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.769.147	0,0025%
419	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	189.108.480	0,0056%
420	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	23.523.120	0,0007%
421	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	487.738.652	0,0143%
422	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	40.592.700	0,0012%
423	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	102.753.680	0,0030%
424	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	102.368.640	0,0030%
425	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12.401.600	0,0004%
426	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	211.700.000	0,0062%
427	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	10.000.000	0,0003%
428	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	235.144.870	0,0069%
429	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	337.241.150	0,0099%
430	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.540.000	0,0005%
431	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.178.624	0,0058%
432	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.609.556	0,0027%
433	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.960.000	0,0044%
434	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.050.000	0,0018%
435	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	516.861.510	0,0152%
436	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.174.200	0,0021%
437	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.585.028	0,0024%
438	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	119.880.000	0,0035%
439	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	602.851.878	0,0177%
440	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	373.626.000	0,0110%
441	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	648.717.300	0,0190%
442	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	299.700.000	0,0088%
443	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	425.982.015	0,0125%

444	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.629.228	0,0009%
445	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.904.120	0,0026%
446	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.144.472	0,0015%
447	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	80.572.680	0,0024%
448	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.195.130	0,0002%
449	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.140.782	0,0033%
450	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.346.588	0,0019%
451	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.852.810	0,0001%
452	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.301.488	0,0029%
453	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.299.959.998	0,0675%
454	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6.555.000	0,0002%
455	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	47.501.900	0,0014%
456	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.034.000	0,0000%
457	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.805.000	0,0020%
458	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.729.500	0,0022%
459	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	83.011.700	0,0024%
460	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.807.670	0,0055%
461	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.734.360	0,0037%
462	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.207.500	0,0021%
463	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.822.320	0,0056%
464	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.861.120	0,0006%
465	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	89.552.580	0,0026%
466	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.900.000	0,0051%
467	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.740.900	0,0027%
468	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.475.000	0,0016%
469	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.503.000	0,0015%
470	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.038.000	0,0029%
471	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.656.000	0,0003%
472	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63.129.483	0,0019%
473	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.032.214	0,0002%
474	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.876.424	0,0010%
475	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.678.956	0,0009%
476	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.808.630	0,0002%
477	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	42.612.900	0,0013%
478	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.205.650	0,0010%
479	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.118.406	0,0009%
480	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.846.344	0,0009%
481	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	47.073.879	0,0014%
482	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25.086.000	0,0007%
483	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	197.536.000	0,0058%
484	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	152.464.000	0,0045%
485	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.077.920	0,0001%

486	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.531.800	0,0000%
487	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.146.999	0,0006%
488	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.729.148	0,0003%
489	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.639.800	0,0001%
490	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000	0,0003%
491	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.760.190	0,0015%
492	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.128.519	0,0006%
493	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.940.832	0,0014%
494	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.803.479	0,0015%
495	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.351.419	0,0002%
496	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.738.249	0,0004%
497	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.962.145	0,0001%
498	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.762.632	0,0015%
499	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.729.680	0,0010%
500	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.351.419	0,0002%
501	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.046.807	0,0010%
502	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.126.975	0,0003%
503	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.696.726	0,0006%
504	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7.351.419	0,0002%
505	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.020.750	0,0002%
506	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.769.850	0,0014%
507	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.597.494	0,0006%
508	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.141.948	0,0014%
509	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.999.550	0,0002%
510	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.313.500	0,0022%
511	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.637.352	0,0003%
512	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.656.000	0,0003%
513	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	32.567.400	0,0010%
514	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.757.000	0,0006%
515	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0,0015%
516	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.100.000	0,0003%
517	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.714.496	0,0003%
518	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.660.000	0,0002%
519	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.617.260	0,0003%
520	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.893.520	0,0009%
521	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	0,0006%
522	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.262.000	0,0007%
523	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.043.600	0,0001%
524	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.307.885	0,0001%
525	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.273.800	0,0002%
526	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.700.000	0,0005%
527	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	44.250.000	0,0013%
528	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.923.030	0,0021%
529	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.232.900	0,0005%
530	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	19.230.000	0,0006%

531	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.394.582	0,0007%
532	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.759.309	0,0013%
533	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.873.444	0,0005%
534	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.983.511	0,0002%
535	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.099.895	0,0001%
536	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.678.307	0,0004%
537	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.857.248	0,0002%
538	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.020.750	0,0002%
539	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.079.916	0,0001%
540	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.850.250	0,0003%
541	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.586.730	0,0005%
542	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.122.958	0,0009%
543	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.791.493	0,0014%
544	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	48.433.407	0,0014%
545	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.549.782	0,0000%
546	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.320.000	0,0004%
547	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.402.695	0,0004%
548	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.330.000	0,0001%
549	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.731.600	0,0001%
550	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.220.000	0,0001%
551	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.996.000	0,0001%
552	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.549.782	0,0000%
553	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.320.000	0,0004%
554	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.890.982	0,0005%
555	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.158.500	0,0002%
556	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.897.500	0,0001%
557	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	0,0003%
558	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.825.000	0,0005%
559	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.351.600	0,0013%
560	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	38.142.000	0,0011%
561	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.982.000	0,0003%
562	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.062.250	0,0006%
563	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.342.630	0,0008%
564	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.379.047	0,0005%
565	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.757.000	0,0006%
566	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	8.961.030	0,0003%
567	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	18.534.780	0,0005%
568	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	7.402.590	0,0002%
569	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.819.620	0,0001%
570	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.167.940	0,0001%
571	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.041.500	0,0004%
572	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.701.450	0,0001%

573	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.525.106	0,0010%
574	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	28.105.200	0,0008%
575	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.660.000	0,0002%
576	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.933.418	0,0008%
577	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.423.550	0,0008%
578	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	25.330.261	0,0007%
579	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.781.187	0,0009%
580	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.112.296	0,0011%
581	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	54.691.920	0,0016%
582	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.280.000	0,0098%
583	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.608.000	0,0214%
584	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.350.000	0,0006%
585	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	155.216.000	0,0046%
586	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.380.000	0,0004%
587	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	36.920.000	0,0011%
588	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.150.000	0,0003%
589	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.380.000	0,0194%
590	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.992.000	0,0056%
591	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.380.000	0,0004%
592	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.940.000	0,0010%
593	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	516.880.000	0,0152%
594	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.007.097.000	0,0589%
595	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.979.220.000	0,1168%
596	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.491.105.000	0,0438%
597	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	392.605.000	0,0115%
598	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.848.765.000	0,0543%
599	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000	0,0440%
600	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	1.700.000.000	0,0499%
601	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	4.827.544.640	0,1417%
602	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.000.000.000	0,0294%
603	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	22.256.230.580	0,6533%
604	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	548.470.000	0,0161%
605	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.878.000	0,0081%
606	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.960.000	0,0007%
607	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.481.000	0,0022%
608	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	400.000.000	0,0117%
609	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	148.440.000	0,0044%
610	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.620.000	0,0134%

611	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.454.000	0,0041%
612	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.770.000	0,0009%
613	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.431.120	0,0003%
614	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	0,0007%
615	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	924.050.000	0,0271%
616	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	0,0005%
617	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.112.000	0,0044%
618	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%
619	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.690.000	0,0005%
620	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	0,0003%
621	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.230.000	0,0023%
622	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896.790.000	0,0263%
623	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.920.000	0,0050%
624	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.240.000	0,0006%
625	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.804.862	0,0025%
626	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000	0,0004%
627	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.910.000	0,0067%
628	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.258.000	0,0042%
629	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	0,0004%
630	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.830.000	0,0077%
631	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.940.000	0,0044%
632	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.380.000	0,0004%
633	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.900.000	0,0016%
634	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.850.000	0,0024%
635	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.873.000	0,0028%
636	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%

637	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	0,0005%
638	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.600.000	0,0054%
639	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.101.000	0,0034%
640	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.330.000	0,0009%
641	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.070.000	0,0045%
642	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.906.000	0,0042%
643	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	0,0007%
644	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	51.132.150	0,0015%
645	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	224.710.000	0,0066%
646	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.150.220.000	0,0338%
647	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	210.000.000	0,0062%
648	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	300.000.000	0,0088%
649	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	111.140.000	0,0033%
650	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.910.000	0,0067%
651	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.234.000	0,0040%
652	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.264.700	0,0010%
653	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.855.000	0,0010%
654	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	47.286.000	0,0014%
655	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.610.000	0,0057%
656	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.930.600	0,0029%
657	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.008.800	0,0023%
658	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.910.000	0,0067%
659	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.025.000	0,0027%
660	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%

661	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.698.500	0,0007%
662	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	37.500.000	0,0011%
663	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.070.000	0,0061%
664	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.874.000	0,0018%
665	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000	0,0004%
666	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	250.800.000	0,0074%
667	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.640.000	0,0003%
668	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	80.808.000	0,0024%
669	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	423.090.000	0,0124%
670	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	7.190.000	0,0002%
671	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	742.020.000	0,0218%
672	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.760.000	0,0011%
673	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.239.192	0,0060%
674	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	0,0007%
675	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.230.000	0,0091%
676	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.711.250	0,0036%
677	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.040.000	0,0011%
678	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.230.000	0,0023%
679	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%
680	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.281.700	0,0005%
681	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	0,0018%
682	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.990.000	0,0090%
683	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226.196.000	0,0066%
684	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.680.000	0,0009%
685	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.160.000	0,0024%
686	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.560.000	0,0089%
687	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.462.000	0,0049%

688	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000	0,0004%
689	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.910.000	0,0067%
690	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.925.000	0,0078%
691	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.960.000	0,0006%
692	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.450.000	0,0008%
693	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000	0,0002%
694	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.009.700	0,0093%
695	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.978.000	0,0021%
696	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%
697	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.940.000	0,0010%
698	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	516.880.000	0,0152%
699	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.981.000	0,0200%
700	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	0,0003%
701	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.650.000	0,0012%
702	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	560.000.000	0,0164%
703	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.390.000	0,0070%
704	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%
705	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.920.000	0,0013%
706	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.360.000	0,0087%
707	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.380.000	0,0004%
708	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.080.000	0,0005%
709	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.000.000	0,0029%
710	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.249.955.400	0,1248%
711	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.880.000	0,0006%
712	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	532.600.000	0,0156%
713	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.405.299.000	0,0706%

714	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.598.184.000	0,0469%
715	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.420.000	0,0043%
716	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	315.770.000	0,0093%
717	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	0,0029%
718	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.550.000	0,0062%
719	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	923.000.000	0,0271%
720	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	318.070.000	0,0093%
721	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.110.000	0,0010%
722	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.960.000	0,0024%
723	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.750.000	0,0122%
724	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.380.000	0,0058%
725	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.810.000	0,0004%
726	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000	0,0007%
727	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.310.000	0,0012%
728	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	411.360.000	0,0121%
729	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.488.985	0,0058%
730	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.640.000	0,0003%
731	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.715.560	0,0002%
732	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.990.000	0,0011%
733	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000	0,0001%
734	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.620.000	0,0025%
735	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.300.000	0,0078%
736	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.600.000	0,0011%
737	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.830.000	0,0077%
738	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.980.000	0,0015%
739	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000	0,0005%

740	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	458.910.000	0,0135%
741	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.944.000	0,0058%
742	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.390.000	0,0018%
743	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	0,0033%
744	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.365.880	0,0020%
745	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.313.000	0,0006%
746	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0,0004%
747	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0,0004%
748	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	15.000.000	0,0004%
749	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.440.000	0,0001%
750	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	0,0004%
751	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.080.000	0,0023%
752	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.904.800	0,0022%
753	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	0,0003%
754	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.270.000	0,0001%
755	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.000.000	0,0034%
756	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.723.860	0,0022%
757	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	0,0002%
758	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.147.300	0,0011%
759	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.840.000	0,0022%
760	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000	0,0022%
761	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	0,0003%
762	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000	0,0003%
763	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.981.200	0,0012%
764	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.930.020	0,0015%
765	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.380.000	0,0033%
766	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.880.000	0,0010%

767	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	0,0003%
768	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000	0,0004%
769	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.920.000	0,0011%
770	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.775.000	0,0014%
771	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.920.000	0,0011%
772	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.630.000	0,0013%
773	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	0,0033%
774	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.870.000	0,0009%
775	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000	0,0002%
776	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000	0,0002%
777	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.000.000	0,0034%
778	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.590.000	0,0016%
779	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	0,0033%
780	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.382.000	0,0022%
781	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000	0,0003%
782	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	0,0033%
783	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	0,0014%
784	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000	0,0005%
785	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.920.000	0,0011%
786	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	0,0015%
787	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.920.000	0,0011%
788	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.299.620	0,0013%
789	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.460.000	0,0022%
790	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.774.000	0,0022%
791	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.640.000	0,0003%
792	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.980.000	0,0005%
793	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.680.000	0,0017%

794	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.680.000	0,0017%
795	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000	0,0011%
796	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.823.000	0,0022%
797	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.840.000	0,0022%
798	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	799.320.000	0,0235%
799	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	0,0002%
800	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.760.000	0,0033%
801	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.510.000	0,0012%
802	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.380.000	0,0004%
803	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.150.000	0,0003%
804	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.840.000	0,0022%
805	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.112.000	0,0044%
806	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.590.000	0,0003%
807	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.540.000	0,0012%
808	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.992.000	0,0022%
809	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	450.000.000	0,0132%
810	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	0,0059%
811	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	970.487.000	0,0285%
812	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	350.000.000	0,0103%
813	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000	0,0103%
814	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.000.000	0,0176%
815	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	100.000.000	0,0029%
816	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	910.000.000	0,0267%
817	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000	0,0117%
818	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	49.547.000	0,0015%
819	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000	0,0059%
820	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	350.000.000	0,0103%
821	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.500.000.000	0,0440%
822	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.148.944.600	0,1511%
823	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.224.643.200	0,2414%
824	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	9.204.000.000	0,2702%

825	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32.508.680.000	0,9543%
826	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.521.458.372	0,1914%
827	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	195.000.000	0,0057%
828	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	200.000.000	0,0059%
829	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.050.000.000	0,0308%
830	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	98.914.320	0,0029%
831	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	0,0147%
832	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1.400.000.000	0,0411%
833	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2.709.500.000	0,0795%
834	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	27.061.098.300	0,7944%
835	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.500.000.000	0,0734%
836	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	111.852.480	0,0033%
837	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	255.300	0,0000%
838	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	42.707.250	0,0013%
839	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541.408.883	0,0159%
840	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.244.906.250	0,0659%
841	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.235.130.000	0,0363%
842	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	194.999.250	0,0057%
843	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.000.000	0,0086%
844	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.720.671.000	0,0799%
845	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	2.221.000.000	0,0652%
846	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.099.074.000	0,0910%
847	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	279.102.160	0,0082%
848	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	514.129.800	0,0151%
849	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	115.200.000	0,0034%
850	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.140.545.820	0,0335%
851	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	198.571.230	0,0058%
852	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100.000.000	0,0029%
853	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.248.294.000	0,0660%
854	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.545.486.302	0,1628%

855	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	294.582.562	0,0086%
856	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.140.000.000	0,0335%
857	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	270.383.762	0,0079%
858	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	8.720.302.998	0,2560%
859	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.893.193.200	0,0556%
860	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000	0,0065%
861	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.140.000.000	0,0335%
862	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	45.000.000	0,0013%
863	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	105.734.000	0,0031%
864	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	107.110.800	0,0031%
865	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	7.200.000	0,0002%
866	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30.000.000	0,0009%
867	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	22.700.000	0,0007%
868	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	734.265	0,0000%
869	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	582.750	0,0000%
870	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.973.424.000	0,0579%
871	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	520.477.400	0,0153%
872	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	890.000.000	0,0261%
873	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	250.000.000	0,0073%
874	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20.066.700	0,0006%
875	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	66.668.325	0,0020%
876	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000	0,0001%
877	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	145.117.500	0,0043%
878	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.650.000	0,0005%
879	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	40.000.000	0,0012%
880	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	98.756.350	0,0029%
881	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	123.210.000	0,0036%
882	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15.012.000	0,0004%

883	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	17.590.949	0,0005%
884	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	517.785.000	0,0152%
885	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	12.072.225.000	0,3544%
886	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	25.495.000	0,0007%
887	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	40.445.960	0,0012%
888	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	44.668.879	0,0013%
889	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	189.071.600	0,0056%
890	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	93.660.000	0,0027%
891	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	11.988.000	0,0004%
892	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	13.736.250	0,0004%
893	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	8.658.000	0,0003%
894	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	48.000.000	0,0014%
895	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	41.853.027	0,0012%
896	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	450.000.000	0,0132%
897	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	272.000.000	0,0080%
898	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	594.000.000	0,0174%
899	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18.000.000	0,0005%
900	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	32.774.138	0,0010%
901	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.880.000	0,0003%
902	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.764.000	0,0004%
903	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	201.608.190	0,0059%
904	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	17.748.051	0,0005%
905	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.320.000	0,0004%
906	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.410.163	0,0044%
907	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.126.500	0,0012%
908	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.685.250	0,0019%
909	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0,0000%
910	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	186.793.020	0,0055%
911	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	226.023.750	0,0066%
912	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.593.088	0,0102%
913	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	310.678.200	0,0091%
914	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0,0000%
915	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000	0,0117%
916	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190.473.225	0,0056%
917	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.575.000	0,0103%

918	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	265.004.730	0,0078%
919	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	582.750	0,0000%
920	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	582.750	0,0000%
921	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51.037.800	0,0015%
922	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.165.500	0,0000%
923	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	217.822.404	0,0064%
924	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13.453.200	0,0004%
925	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117.216.000	0,0034%
926	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.949.700	0,0103%
		TOTAL BELANJA INFRASTRUKTUR	**766.408.814.389**	**22,4978%**
		TOTAL BELANJA DAERAH	**3.406.589.652.782**	**100,0000%**

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memenuhi alokasi anggaran Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengalokasikan anggaran Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40%,(empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan 5.1.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada lnspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp25.621.100.590,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi belanja gaji dan Tunjangan pada SKPD Inspektorat sebesar Rp6.751.522.654,00 atau 0,20% dari total belanja daerah; dan
2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula sebesar Rp18.869.577.936,00 atau 0,55% dari total belanja daerah;

Antara lain tercantum pada :

1. Kegiatan Pengawasan internal sebesar Rp744.999.800,00; dan
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp325.000.000,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengalokasikan anggaran penguatan dan pembinaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan yaitu:
   a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar. Prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemeriksaan kinerja.
   b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, RKA-SKPD:
   c) Pemeriksaan, Pengelolaan Keuangan Derah;
   d) Reviu Laporan Keuangan;
   e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit Reviu* Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
   f) Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepat sasaran dan berbasis *output* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubshsn atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
   g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan lntegritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang di koordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,

pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laparan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua. Puluh) jam/tahun per APIP; dan

3) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp18.775.086.251,00 atau 0,55% dari total belanja daereh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemelihaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp9.428315.152,00 atau 0,28% dari total belanja daerah; dan

2) Alokasi belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp9.3146.771.099,00 atau 0,27% dari total belanja daerah antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi sebesar Rp2.799.999.700,00;

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4) Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Penyediaan anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar

Rp1.178.507.025,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking,* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual:
3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, lndah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diverifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting,* pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan scrta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Theermometer,* insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
   a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
   b) gotong royong;
   c) Pangan
   d) sandang;
   e) perumahan dan tata laksana rumah tangga
   f) pendidikan dan keterampilan
   g) kesehatan;
   h) pengembangan kehidupan berkoperasi;

i) kelestarian lingkungan hidup; dan

j) perencanaan sehat.

7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

8) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting,* pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumuh tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK provinsi/kabupaten/kota, serta kegiatan lainnya;

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah,

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Alokasi Anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum menganggarkan Penyediaan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengalokasikan Anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.

c. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPlMDA)

Penyediaan Anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp527.745.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasj Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..

d. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp627.682.890,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp300.000.000,00;
2) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan Rp227.745.000,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Musi Banyuasin;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum menganggarkan Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial, untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;

Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.398.978.004.625,00 atau 90,40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp1.398.978.004.625,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri danProduk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir 3.3.2.1.3.1.g.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

g. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp 124.810.000,00;
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa sebesar Rp 80.597.000,00;
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebesar Rp 114.380.600,00;
4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa sebesar Rp 180.035.334,00;

h. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 326.408.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

i. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp 622.433.499,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

j. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum mengalokasikan anggaran belanja hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, dalam kode rekening belanja hibah pada SKPKD terkait sesuai tugas dan fungsi

sesuai dengan sesuai dengan butir 5.2.9.h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

k. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:
   1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp 117.162.895.797,00;
   2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp 114.983.832.798,00;
   3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp10.681.752.212,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.3.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8) Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp2.384.132.430.459,00 atau 69,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

   Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp1.261.486.761.478,00 atau 37,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dar TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp1.261.486.761.478,00 atau 37,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dalam mengalokasikan anggaran pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
   Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp786.371.961.977,00 atau 23,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b, dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:
   a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut:
      (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp29.672.641.389,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut :

Tabel. 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO.	Komponen Perhitungan	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp)
1	Penerimaan	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	621.356.835.361,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	53.709.467.363,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.779.258.640,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.952.653.600,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.702.078.470,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	326.574.759.217,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
	i) Belanja Tambahan Penghasilan	0,00

	(Tamsil) Guru PNSD	
2	Jumlah Penerimaan	1.053.075.052.651,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	42.123.002.106,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	29.672.641.389,00
	Selisih kurang (angka 4-angka 3)	(12.450.360.717,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp42.123.002.106,00 atau terdapat selisih kurang Rp12.450.360.717,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Kesehatan bagi ASN Tahun sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir 3.4.1.1.1.d. dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

(2) Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp200.000.000,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut :

Tabel. 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO.	Komponen Perhitungan	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp)

1	Belanja		
	a)	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
	b)	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	13.994.400,00
	c)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.374.408.000,00
	d)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	178.315.200,00
	e)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.367.800,00
2	Jumlah Belanja		2.628.095.400,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		105.123.816,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		200.000.000,00
	Selisih lebih (angka 4-angka 3)		94.875.184,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Raperda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp105.123.816,00 atau terdapat selisih lebih Rp94.875.184,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp19.600.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut :

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

NO.	Komponen Perhitungan	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Rp)
1	Belanja	
	a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.000.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.000.000,00
2	Jumlah Belanja	184.100.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	7.364.000,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19.600.000,00
	Selisih lebih (angka 4-angka 3)	12.236.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seharusnya Rp17.364.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp12.236.000,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di

Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 butir 3.4.1.1.1.d. serta butir 3.4.1.1.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Rp1.564.566.306,00 dan;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp4.195.921.913,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp1.491.256.405,00 atau terdapat selisih lebih Rp73.309.901,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp4.473.769.215,00 atau terdapat selisih kurang Rp277.847.302,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp2.000.000,00;

(b) Belanja Jaminan Kematian Kerja DPRD Rp35.755.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun

201I tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp1.205.928,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp600.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan Medical *Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp8.600.000,00; dan

(2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp180.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada:

(1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan

pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPA yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat;

Sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Surat Menteri Dalam Negeri 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.b.(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, yang diuraikan pada:

a) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp2.292.199.859,00;

b) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp205.985.195,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp25.074.684.780,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14

Belanja Uang Representasi DPRD

NO.	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA.2024			
	Komponen Perhitunagn	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp.)	Jumlah (Rp)
1	Ketua setara dengan gaji pokok Bupati/Walikota	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000,00	5.040.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD	41	1.575.000,00	64.575.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	45		71.715.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan			1.004.010.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD				1.004.010.000,00
Selisih				0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2027 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan Belanja Uang Representasi DPRD telah sesuai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.374.408.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk konsisten mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Jabatan tersebut sebagaimana maksud ketentuan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp178.315.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	45	2.100.000,00	7.938.000.000,00
	Jumlah Pagu			7.938.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah			7.938.000.000,00
3	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai ketentuan amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.323.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16

Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 x dari Uang Representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi)	45	2.100.000,00	1.984.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			1.323.000.000,00
4	Selisih kurang			(661.500.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp5.166.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp6.642.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

Tabel, 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO.	Komponen Perhitungan Rancangan		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	6 x Uang Representatif Ketua DPRD x 12 Bulan	151.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	4 x 3 orang x Uang Representatif Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	241.920.000,00
	Jumlah Dana Operasional		393.120.000,00

	Alokasi Dana Operasonal pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	393.120.000,00
	Selisih	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp600.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 Rp529.884.959.800,00 yaitu Rp794.827.439,70.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (TPP) ASN Rp326.574.759.217,00 atau 9,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp298.797.072.717,00;
b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp13.596.445.000,00;
c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp14.181.241.500,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

a) terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
b) besaran total TPP ASN telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
c) penggunaan kriteria pada penjabaran TPP ASN wajib didasarkan pada kertas kerja dan *evidence* yang memadai serta diinput dalam aplikasi Sistem *Monitoring* Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA); dan

pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN harus sesuai dengan hasil verifikasi dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp2.278.013.364,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.785.518.298,00;

b) Belanja Honorarium Rp492.495.066,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp492.495.066,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.
   Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.1.2.f.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
   Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
   Selanjutnya, khusus untuk Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah yang semula dianggarkan dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Badan Pendapatan Daerah agar dialihkan penganggarannya dalam rincian obyek Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan. dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

d) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp915.375.366.032,00 atau 26,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang Rp156.548.804.748,00 atau 4,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp 149.660.275.981,00 atau 4,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Barang Pakai Habis Rp8.808.812.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;

(2) Belanja Barang Pakai Habis Rp600.635.405,00 pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;

(3) Belanja Barang Pakai Habis Rp1.973.424.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

(4) Belanja Barang Pakai Habis Rp742.149.000,00 pada sub kegiatan Penyediaan Permakanan;

(5) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.408.887.300,00 pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;

(6) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.397.609.000,00 pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp4.949.940.575,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp1.594.813.493,00;

(3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp7.595.488.920,00;

(4) Belanja Bahan-Bahan Baku Rp62.000.000,00;

(5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.945.394.230,00;

(6) Belanja Bahan-Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ikan Rp159.977.743,00;

(7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp1.448.478.363,00;

(8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp88.900.000,00;

(9) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian Rp3.669.660,00;

(10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel Rp715.500.000,00;

(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.936.305.187,00;

(12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp16.504.542.641,00;

(13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp5.146.000,00;

(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.516.705.127,00;

(15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp6.937.599.609,00;

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp6.000.000,00;

(17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp1.671.205.200,00;

(18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp2.221.120.336,00;

(19) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.653.565.650,00;

(20) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp4.444.131.840,00;

(21) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp20.875.051.496,00;

(22) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.635.837.668,00;

(23) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Rp12.231.000,00;

(24) Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya Rp546.629.790,00;

(25) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp7.952.310.842,00;

(26) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp284.622.750,00;

(27) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.591.636.868,00;

(28) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.910.365.900,00;

(29) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp71.350.000,00;

(30) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp5.411.250,00;

(31) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp742.149.000,00;

(32) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp5.963.976.678,00;

(33) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp318.400.000,00;

(34) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.113.750.000,00;

(35) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp337.500.000,00;

(36) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp2.020.982.000,00;

(37) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp1.981.529.000,00;

(38) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp36.000.000,00;

(39) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Rp759.705.000,00;

(40) Belanja Pakaian Penyelamatan Rp1.165.500,00;

(41) Belanja Pakaian Siaga Rp133.900.965,00;

(42) Belanja Pakaian Kerja Laboratorium Rp5.017.200,00;

(43) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp476.500.000,00;

(44) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp986.908.500,00;

(45) Belanja Pakaian Olahraga Rp1.266.900.000,00;

(46) Belanja Pakaian Paskibraka Rp169.960.000,00;

b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp6.888.528.767,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja

(1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp6.597.936.420,00;

(2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Rp290.592.347,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp20.875.051.496,00;
b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp1.635.837.668,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.1.b, butir 3.4.1.2.1.c, butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.1.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp10.567.095.000,00 atau 23,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp4.887.395.000,00;

(2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp5.679.700.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan serta belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:

(1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD;
(2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
(3) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain; dan
(4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa Rp410.643.308.834,00 atau 12,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor Rp285.364.603.284,00 atau 8,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:
   (1) Belanja Jasa Kantor Rp14.424.807.346,00 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   (2) Belanja Jasa Kantor Rp356.400.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan; dan
   (3) Belanja Jasa Kantor Rp2.006.811.111,00 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

   Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp7.156.725.000,00;
   (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp16.458.539.568,00;
   (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp691.580.000,00;
   (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp1.080.000.000,00;
   (5) Honorarium Rohaniwan Rp42.200.000,00;
   (6) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp37.600.000,00;
   (7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp3.215.340.000,00;
   (8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp218.900.000,00;
   (9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp50.121.700.000,00;
   (10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp20.102.750.000,00;
   (11) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp414.588.000,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp47.800.000,00;
(13) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Rp5.468.300.000,00;
(14) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp1.087.700.000,00;
(15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp1.855.111.111,00;
(16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp1.289.600.000,00;
(17) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp915.260.000,00;
(18) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan Rp4.770.480.000,00;
(19) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp1.133.700.000,00;
(20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp2.729.895.790,00;
(21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp16.085.900.000,00;
(22) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp9.555.810.800,00;
(23) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp5.574.470.000,00;
(24) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp30.704.157.956,00;
(25) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp5.706.600.000,00;
(26) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp5.860.844.444,00;
(27) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak Rp433.500.000,00;
(28) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp3.306.600.000,00;
(29) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp151.500.000,00;
(30) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp438.900.000,00;
(31) Belanja Jasa Tata Rias Rp31.650.000,00;
(32) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp344.500.000,00;
(33) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Rp70.923.500,00;
(34) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Rp268.200.000,00;
(35) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp12.681.596.980,00;
(36) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi Rp10.724.950.000,00;
(37) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Rp143.200.000,00;
(38) Belanja Jasa Kalibrasi Rp229.441.750,00;
(39) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Rp262.494.000,00;
(40) Belanja Jasa Pengukuran Tanah Rp39.000.000,00;
(41) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp7.705.860.000,00;
(42) Belanja Tagihan Telepon Rp402.233.433,00;
(43) Belanja Tagihan Air Rp4.349.863.983,00;
(44) Belanja Tagihan Listrik Rp34.563.463.603,00;
(45) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp181.200.000,00;

(46) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp8.663.497.761,00;

(47) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp2.603.465.272,00;

(48) Belanja Pengolahan Air Limbah Rp5.000.000,00;

(49) Belanja Lembur Rp5.208.910.333,00;

(50) Belanja Medical Check Up Rp229.100.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp 59.412.437.761,00 atau 1,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum Pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp36.386.658.000,00;

(b) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp588.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh

penduduk, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.3.1.1.2.c.c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.b.7) dan butir 3.4.1.2.2.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp5.239.600.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp9.548.329.710,00;

(c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp19.545.311,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..

(3) Penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp2.569.226.500,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp 9.882.985.500,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Electric Generating Set Rp37.980.000,00;

(2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp4.258.120.000,00;

(3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp176.000.000,00;

(4) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp265.600.000,00;

(5) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp2.851.511.500,00;

(6) Belanja Sewa Mebel Rp439.677.000,00;

(7) Belanja Sewa Alat Pendingin Rp447.667.000,00;

(8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp1.168.590.000,00;

(9) Belanja Sewa Peralatan Mainframe Rp237.840.000,00;

b) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp 7.980.568.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp2.155.878.000,00;

(2) Belanja Sewa Taman Rp560.310.000,00;

(3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp329.175.000,00;

(4) Belanja Sewa Asrama Rp10.560.000,00;

(5) Belanja Sewa Hotel Rp3.994.645.000,00;

(6) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp930.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp 31.446.426.289,00 atau 0,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp760.000.000,00 pada sub kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Rp348.000.000,00 pada sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan; dan

(3) Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Rp 3.753.001.322,00 pada sub kegiatan Pengelolaan Leger Jalan.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp97.020.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp330.000.000,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior Rp122.000.007,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp4.381.900.000,00;

(5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp220.095.977,00;

(6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp3.736.616.000,00;

(7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp8.908.001.332,00;

(8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Rp5.976.000.000,00;

(9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang Rp866.855.000,00;

(10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp115.000.000,00;

(11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp4.120.449.973,00;

(12) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp150.000.000,00;

(13) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp728.848.000,00;

(14) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Rp500.000.000,00;

(15) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Rp348.000.000,00;

(16) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian Rp10.640.000,00;

(17) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Rp835.000.000,00.

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp3.572.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp1.972.000.000,00;

2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp100.000.000,00;

3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp1.500.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp 925.200.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:

(a) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp608.700.000,00;

(b) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp316.500.000,00;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaanya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp12.059.088.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:

   (a) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp85.000.000,00 pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

   (b) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp200.000.000,00 pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas; dan

   (c) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.835.760.000,00 pada sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

   Selanjutnya, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp10.436.113.000,00;

   (b) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.622.975.000,00;

   dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp3.287.910.499,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektifitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji komptensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/ *Workshop*/kursus/ lokakarya/sosialisasi/ bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..

7) Belanja Pemeliharaan Rp78.249.203.419,00 atau 2,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

   a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp12.564.838.218,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Lainnya Rp2.266.000.000,00;

      (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp533.914.700,00;

      (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp20.589.016.300,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp60.000.000,00;

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp226.560.000,00;

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp228.000.000,00;

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp443.330.000,00;

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya Rp80.808.000,00;

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp17.146.680,00;

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.536.238.000,00;

(11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran Rp14.500.000,00;

(12) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio Rp100.000.000,00;

(13) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah Rp51.132.150,00;

(14) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp47.286.000,00;

(15) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Rp100.000.000,00;

(16) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar Rp250.800.000,00.

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp11.616.099.507,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp730.608.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp679.981.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp4.003.483.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp11.518.599.507,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum Rp97.500.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp40.002.567.220,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp3.979.220.000,00 pada sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai;

2) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.491.105.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing; dan

3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.848.765.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir.

Selanjutnya Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp30.283.775.220,00;

2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp9.718.792.000,00;

d) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp85.804.862,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik Rp85.804.862,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

(a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

(b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

8) Belanja Perjalanan Dinas Rp144.383.121.233,00 atau 4,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp143.892.856.500,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.283.564.000,00 pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.375.693.706,00 pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp737.026.000,00 pada sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional;

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp104.278.764.313,00;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp39.614.092.187,00;

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp490.264.733,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp287.478.365,00 pada sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp490.264.733,00.

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.4.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.4.a.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daerah Rp14.797.662.439,00 atau 13,85% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp106.813.431.705,00; dan

b) Sekretariat DPRD Rp45.638.552.923,00 atau 42,73% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp106.813.431.705;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan *stressing* substansi yang belum memenuhi amanat *mandatory spending* Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah Rp140.278.069.039,00 atau 4,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selanjutnya alokasi belanja Hibah yang tercantum dalam Tabel 18, sebegai berikut:

Tabel. 18

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

TAHUN ANGGARAN	BELANJA HIBAH (Rp)	REALIASAI BELANJA HIBAH (Rp)	%	TOTAL BELANJA DAERAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
APBD 2021	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	90,71%	4.199.063.344.221,00	0,85%
APBD 2022	15.971.784.200,00	28.132.557.225,00	176,14%	3.556.246.375.776,00	0,45%
APBD 2023	111.781.321.093,00	112.095.635.679,00	100,28%	4.013.727.352.101,00	2,78%

APBD 2024	114.468.556.464,00	99.224.267.880,00	86,68%	4.217.812.127.835,00	2,71%
APBD 2025	140.278.069.039,00	-	0,00%	3.408.867.666.146,00	4,12%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp114.468.556.464,00 atau 2,71% dari total Belanja Rp4.217.812.127.835,00 alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00 atau 2,78% dari total belanja daerah Rp4.013.727.352.101,00 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp15.971.784.200,00 atau 0,45% dari total belanja daerah Rp3.556.246.375.776,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga memperhatikan tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp99.224.267.880,00 atau 86,68% dari total Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp114.468.556.464,00;
b. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp112.095.635.679,00 atau 100,28% dari total Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp111.781.321.093,00;
c. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp28.132.557.225,00 atau 176,14% dari total Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp15.971.784.200,00;
d. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Rp32.224.901.964,00 atau 90,71% dari total Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 Rp35.524.367.164,00;

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp9.704.000.000,00 yang antara lain tercantum pada belanja:
   (a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp500.000.000,00 pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
   (b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp9.204.000.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

   Selanjutnya Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   (1) Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat Rp500.000.000,00 yang hanya diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp500.000.000,00;

(2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp9.204.000.000,00 yang hanya diuraikan dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp9.204.000.000,00.

2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.140.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.140.000.000,00 pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Selanjutnya Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.140.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.140.000.000,00;

3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp129.434.069.039,00 yang tercantum pada:

a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp6.521.458.372,00 pada sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp 450.000.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp85.469.023.722,00 yang antara lain diuraikan keda sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp37.582.556.672,00;

(2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp47.886.467.050,00.

b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp38.915.407.084,00 hanya diuraikan keda sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp38.915.407.084,00.

c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp696.223.913,00 yang antara lain diuraikan keda sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial KemasyarakatanRp695.968.613,00;

(2) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp255.300,00.

d) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp2.808.414.320,00 hanya diuraikan keda sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp2.808.414.320,00.

e) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.545.000.000,00 hanya diuraikan keda sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.545.000.000,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp66.992.233.910,00 atau 1,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp47.653.791.910,00 yang antara lain hanya ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp47.653.791.910,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp47.653.791.910,00;

b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp528.442.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp528.442.000,00;

2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp18.810.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp18.810.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menganggarkan

belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

9) Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp525.370.652.767,00 atau 15,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan

b) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

1) Belanja Modal Tanah Rp10.314.120.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Tanah Persil Rp9.464.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal Rp7.072.280.000,00;
   (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Rp49.320.000,00;
   (3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp2.343.200.000,00.

b) Belanja Modal Lapangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
   (1) Belanja Modal Tanah untuk Jalan Rp800.000.000,00;
   (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi Rp49.320.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp74.347.961.221,00 atau 2,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

   a) Belanja Modal Alat Besar Rp4.644.428.398,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
      (1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp3.899.350.080,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Excavator Rp3.899.350.080,00;
      (2) Belanja Modal Alat Bantu Rp745.078.318,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
         (a) Belanja Modal Electric Generating Set Rp572.000.000,00;
         (b) Belanja Modal Pompa Rp173.078.318,00;

   b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp12.393.453.467,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp12.254.234.077,00 yang tercantum pada:

(a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.098.900.000,00 pada sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

(b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.229.982.500,00 pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota;

(c) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.355.000.000,00 pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp83.769.147,00;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.079.997.150,00;

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp189.108.480,00;

(d) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp688.000.000,00;

(e) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp10.213.359.300,00.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp3.330.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp3.330.000,00.

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang Rp15.000.000,00;

(4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Rp120.889.390,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus Rp120.889.390,00.

c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp7.448.490,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp6.650.000,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) Rp6.650.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Ukur Rp798.490,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain Rp798.490,00.

d) Belanja Modal Alat Pertanian Rp175.387.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp175.387.000,00 yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek:

(1) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Rp68.310.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp37.272.000,00;

(3) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp9.805.000,00;

(4) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan Rp60.000.000,00.

e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp21.253.686.521,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Kantor Rp2.090.111.032,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja;

(a) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp23.523.120,00; dan

(b) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp2.066.587.912,00;

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp15.825.820.429,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian belanja:

(a) Belanja Modal Mebel Rp11.137.478.154,00;

(b) Belanja Modal Alat Pembersih Rp263.948.140,00;

(c) Belanja Modal Alat Pendingin Rp1.380.683.820,00;

(d) Belanja Modal Alat Dapur Rp1.072.125.039,00;

(e) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.920.275.442,00;

(f) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp51.309.834,00.

(3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp3.337.755.060,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian belanja:

(a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp984.320.820,00;

(b) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Rp155.771.590,00;

(c) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp882.855.850,00;

(d) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp40.690.000,00;

(e) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Rp1.274.116.800,00.

f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.266.738.148,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada rincian objek Belanja:

(1) Belanja Modal Alat Studio Rp1.148.933.448,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp343.977.285,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp775.091.163,00;

(c) Belanja Modal Peralatan Cetak Rp6.555.000,00;

(d) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp 23.310.000,00.

(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp117.804.700,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Rp75.344.700,00;

(b) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp17.760.000,00;

(c) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF Rp2.500.000,00;

(d) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp22.200.000,00;

g) Belanja Modal Komputer Rp17.891.163.214,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada rincian objek Belanja:

(1) Belanja Modal Komputer Unit Rp14.645.059.528,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian belanja:

(a) Belanja Modal Personal Komputer Rp6.760.115.756,00;

(b) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp7.884.943.772,00.

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.246.103.686,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Rp1.194.158.646,00;

(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp501.457.075,00;

(c) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp1.550.487.965,00.

h) Belanja Modal Alat Pengeboran Rp42.893.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Rp42.893.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Bantu Rp42.893.000,00;

i) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp181.047.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Sumur Rp181.047.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sumur Lainnya Rp181.047.000,00;

j) Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Rp12.610.544,00 atau 0,0004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Rp12.610.544,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya Rp12.610.544,00;

k) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp181.224.887,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan pada rincian objek belanja:

   (1) Belanja Modal Alat Pelindung Rp83.433.887,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (a) Belanja Modal Baju Pengaman Rp70.085.087,00;

      (b) Belanja Modal Sepatu Lapangan Rp13.348.800,00.

   (2) Belanja Modal Alat SAR Rp97.791.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

      (a) Belanja Modal Alat Penolong Rp37.851.000,00;

      (b) Belanja Modal Alat SAR Lainnya Rp59.940.000,00.

l) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp1.444.243.200,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp1.444.243.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (1) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp499.500.000,00;

   (2) Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar Rp849.283.200,00;

   (3) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp95.460.000,00.

m) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp970.408.920,00atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp970.408.920,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

   (1) Belanja Modal Peralatan Permainan Rp348.441.000,00;

   (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp621.967.920,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp102.893.707.001,00 atau 3,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Belanja:

a) Modal Bangunan Gedung Rp98.980.950.648,00 atau 2,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp91.685.817.198,00 atau 2,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp500.000.000,00 pada sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp1.000.000.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.000.000.000,00 pada sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp14.105.692.900,00 pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp4.005.682.850,00 pada sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp922.490.494,00 pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industr;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp2.299.959.998,00 pada sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.364.900.000,00 pada sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja ada yang dihapus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub objek Belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp39.987.488.183,00;

(b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp3.886.213.600,00;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp5.500.000.000,00;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp21.413.840.581,00;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp4.238.265.590,00;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp16.260.009.244,00;

(g) Belanja Modal Taman Rp400.000.000,00.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp7.295.133.450,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp4.975.523.050,00 pada sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp 2.319.610.400,00 pada sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:

(a) Belanja Modal Flat/Rumah Susun Rp2.319.610.400,00; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp4.975.523.050,00;

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.254.748.160,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp1.254.748.160,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp87.017.000,00;

(2) Belanja Modal Pagar Rp1.039.996.800,00;

(3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp127.734.360,00.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp336.951.016.463,00 atau 9,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp305.099.169.477,00 atau 8,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan Rp265.462.469.650,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Jalan Rp 47.577.837.756,00 Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian;

(b) Belanja Modal Jalan Rp152.464.000,00 Pada sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

(c) Belanja Modal Jalan Rp217.382.167.894,00 pada sub kegiatan Pembangunan Jalan.

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp217.382.167.894,00;

(b) Belanja Modal Jalan Desa Rp300.000.000,00;

(c) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp47.780.301.756,00.

(2) Belanja Modal Jembatan Rp39.636.699.827,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jembatan Rp39.636.699.827,00 pada sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;

Selanjutnya, Belanja Modal Jembatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten Rp37.400.309.827,00;

(b) Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp2.236.390.000,00.

b) Belanja Modal Bangunan Air Rp24.197.964.986,00 yang diuraikan pada rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp313.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp313.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp313.000.000,00;

(2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp5.376.379.800,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku Rp5.376.379.800,00;

(3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp18.508.585.186,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor Rp18.508.585.186,00.

c) Belanja Modal Jaringan Rp7.653.882.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jaringan Rp7.653.882.000,00 pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Modal Jaringan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Rp7.653.882.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jaringan Distribusi Rp6.103.882.000,00;

(2) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp1.550.000.000,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp797.330.777,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp281.502.777,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp181.263.460,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum Rp 181.263.460,00;

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Rp100.239.317,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Audio Visual Rp100.239.317,00.

b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga Rp515.828.000,00 yang diurakan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp465.828.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Musik Rp465.828.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Rp50.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah Rp50.000.000,00.

6) Belanja Modal Aset Lainnya Rp66.517.305,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp66.517.305,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp66.517.305,00 yang diuraikan ke dalam sub rinciab objek belanja:

a) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise Rp26.615.025,00;

b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp39.902.280,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan Aset Tetap Lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah maksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp2.609.388.869,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
   1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.597.838.869,00 yang tercantum pada:
      (a) Belanja Modal alat kedokteran Rp2.320.000.000,00pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
      (b) Belanja Modal alat kedokteran Rp137.945.449,00 pada sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

      Selanjutnya Belanja Modal Alat Kedokteran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
      (a) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp1.477.838.869,00;
      (b) Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy Rp320.000.000,00;

(c) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Rp800.000.000,00

2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp11.550.000,00 yang hanya diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga Rp11.550.000,00.

b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp592.087.351,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp584.087.351,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp337.402.500,00;

(b) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp218.442.288,00;

(c) Belanja Modal Laboratorium Kearsipan Rp28.242.563,00

2) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp8.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal System/Power Supply Rp8.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp4.697.200.620,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan

yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10) Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp494.667.382.300,00 atau 14,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada:

a) Belanja Bagi Hasil Rp0,00;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir 3.4.4.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan Rp494.667.382.300,00 atau 14,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja yang tercantum Tabel 19, sebagai berikut:

Tabel. 19

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

TAHUN ANGGARAN	BELANJA BANTUAN KEUANGAN (Rp)	REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN (Rp)	%	TOTAL BELANJA DAERAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
APBD 2021	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	99,56%	4.199.063.344.221,00	11,17%
APBD 2022	466.853.500.349,00	464.366.083.349,00	99,47%	3.556.246.375.776,00	13,13%
APBD 2023	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	94,92%	4.013.727.352.101,00	13,08%
APBD 2024	524.073.457.257,00	388.236.778.370,00	74,08%	4.217.812.127.835,00	12,43%
APBD 2025	494.667.382.300,00	-	0,00%	3.408.867.666.146,00	14,51%

Penyediaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Rp524.073.457.257,00 atau 12,43% dari total belanja daerah Rp4.217.812.127.835,00, alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp525.070.099.600,00 atau 13,08% dari total belanja daerah Rp4.013.727.352.101,00 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp466.853.500.349,00 atau 13,13% dari total belanja daerah Rp3.556.246.375.776,00.

Selain itu, untuk penyediaan alokasi belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin juga memperhatikan tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Rp388.236.778.370,00 atau 74,08% dari total Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Rp524.073.457.257,00;
2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp498.411.709.200,00 atau 94,92% dari total Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp525.070.099.600,00;
3) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp464.366.083.349,00 atau 99,47% dari total Belanja Bantuan Keungan Tahun Anggaran 2022 Rp466.853.500.349,00;

Selanjutnya, penganggaran Belanja Bantuan Keuangan yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp494.667.382.300,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-uandangan, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota untuk diuraikan ke dalam objek, rincian dan sub rincian objek masing-masing desa penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutat dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah
   a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18

Pembiayaan Daerah

Uraian	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	Target APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	% dari Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
	Target	Realisasi Perubahan APBD 2023		Target	Realisasi Per 23 Agustus					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH	**(64.418.741.676)**	**(65.223.526.931)**	**101,25%**	**96.686.582.611**	**107.269.525.634**	**110,95%**	**42.496.904.346,00**	**-54.189.678.264,58**	**-56,05%**	**252,42%**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**63.371.679.556,00**	**62.401.787.597,88**	**98,47%**	**121.636.582.610,58**	**119.544.525.633,58**	**98,28%**	**69.983.013.972,00**	**-51.653.568.638,58**	**-42,47%**	**170,82%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.371.679.556	62.401.787.598	98,47%	121.636.582.611	119.544.525.634	98,28%	69.983.013.972	**-51.653.568.638,58**	**-42,47%**	**170,82%**
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**127.790.421.232,00**	**127.625.314.529,00**	**99,87%**	**24.950.000.000,00**	**12.275.000.000,00**	**49,20%**	**27.486.109.626,00**	**2.536.109.626,00**	**10,16%**	**44,66%**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Penyertaan Modal Daerah	36.952.171.529	36.952.171.529,00	100,00%	24.950.000.000	12.275.000.000,00	49,20%	27.486.109.626	**2.536.109.626,00**	**10,16%**	**44,66%**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703	90.673.143.000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

3. Analisis Akun Pembiayaan sampai dengan Sub Rincian Objek

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp69.983.013.972,00 Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp69.983.013.972,00 atau 2,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00.

   Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2O23 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2O22 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan

   Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp27.486.109.626,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp27.486.109.626,00 dilaksanakan sepanjang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu menyusun analisis invesiasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	RPD	Jumlah Alokasi Angggaran	RKPD	Jumlah Alokasi Angggaran	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran	APBD	Jumlah Alokasi Anggaran
1	Jumlah Program	136	3.657.166.332.444,00	133	3.423.853.775.772,00	133	3.408.867.666.146,00	133	3.408.867.666.146,00
2	Jumlah Kegiatan			266		266		266	
3	Jumlah Subkegiatan			701		701		701	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS yaitu Sub Kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3), Pasal 310

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPD pada Tahun 2025 Rp3.657.166.332.444,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Tahun 2025 sejumlah 136 program tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sejumlah 133 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2025 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025-2026.

VII. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu:
    1. Swasembada pangan, energi, dan air;
    2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
    3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
    4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
    5. Pemberantasan kemiskinan;
    6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
    7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
    8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
    9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
    10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
    11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
    12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;

13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

B. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6 - 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

D. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,25% - 4,75%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,85%, serta menurunnya tingkat pengangggguran terbuka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3,5%. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di wilayah Sumatera sebesar 70,25%.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada Tahun 2025 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada Tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

H. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

I. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan

inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:
   1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
   2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
   3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
   4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.

K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

L. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Schubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau *Buton*) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
   1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electri vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
   2. Mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*).
   3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
   4. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Keadaan darurat meliputi:
   1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   Keperluan mendesak meliputi:
   1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

P. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/rental *online* termasuk bela pengadaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.b.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Q. Terkait penganggaran asumsi pendapatan yang digunakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan angka TKDD Tahun 2025, sebagaimana surat DJPK Kemeterian Keuangan RI Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 tentang penyampaian rincian alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Tahun 2025.

R. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan

berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana dimaksud alam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
   a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
   b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
   c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
   d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
   e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
   f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung

upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

6. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah., sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun Anggaran 2025.
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-3406 Tahun 2024.
8. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengambil langkah-langkah senagai berikut:
   a. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
      1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
      2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
      3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
      4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
      5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
      6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
      7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota: dan
      8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan

fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

b. Mengkooordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/ sub kegiatan antara lain:
   1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
   2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
   3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;
   4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
   5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
   6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
   7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
   8) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
   9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten;
   10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
   11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;

c. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
   1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
   2) Pengelolaan Pendidikan Sekoloah Mengengah Kejuruan.

d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat pemerintah terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
   1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten; dan
   2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

9. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

10. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah danakhlak di daerah dalam belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
11. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
12. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;
2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta

pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk:

1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya.

U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
   1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
   2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
   3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
   4) menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
   5) menyediakan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
   6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan
   7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.

V. Alokasi Anggaran untuk Konektivitas Transportasi Perhubungan Udara
Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi perhubungan udara ke daerah DPN, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk:

1. mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin yaitu antara lain Kendari-Wakatobi;
2. dukungan akses penerbangan ke daerah DPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan *block seat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud;

sebagaimana maksud butir 5.3.24.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

W. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Papua Barat mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;

X. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Z. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Ekonomi Keuangan, dan Pembangunan	
Kepala BPKAD	

Paraf Koordinasi	
Kepala Biro Hukum dan HAM	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jalan Kolonel Wahid Udin No 258 Kel. Serasan Jaya Telp/Fax. (0714) 322568
SEKAYU 30711

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 23 /KEP/PIMP/DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 930/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud Pada huruf a di atas telah ditetapkan melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran pada tanggal 23 Desember 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja di Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);

18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 27);

Menetapkan :

PERTAMA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan ini.

KEDUA : Menyesuaikan program dan kegiatan, objek dan rincian objek pendapatan/belanja/pembiayaan, sumber pendapatan belanja yang dianggarkan lokasi kegiatan dan dasar hukum penganggaran yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan format dan tata cara pengisian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

TIGA : Agar Bupati Musi Banyuasin segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 930/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 23 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

IRWIN ZULYANI, S.H.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

AHMADI

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

EDI PRAMONO

Lampiran I : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 23 /KEP/PIMP/DPRD/2024
Tanggal : 23 Desember 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	3.366.370.761.800,00	-	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	529.884.959.800,00	-	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	216.466.151.000,00	-	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	5.195.787.000,00	-	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	278.223.021.800,00	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	2.836.485.802.000,00	-	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	2.710.885.802.000,00	-	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	125.600.000.000,00	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	0,00	0,00	-	
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	3.408.867.666.146,00	-	
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.430.459,00	2.384.132.390.457,00	(40.002,00)	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.261.486.761.478,00	1.261.486.761.478,00	-	(Gaji ASN, KDH, DPRD, PPPK dan BLUD)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.375.366.032,00	915.375.326.030,00	(40.002,00)	
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	140.278.069.039,00	-	
	- KONI	27.061.098.300,00	27.061.098.300,00	-	Dispopar
	- Pramuka	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	Dispopar

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	- PMI	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	Dinkes
	- Parpol	5.461.440.000,00	5.461.440.000,00	-	Kesbangpol
	- KPUD Kab. Musi Banyuasin	1.060.018.372,00	1.060.018.372,00		Kesbangpol
	- Polres Kab. Musi Banyuasin (Penyediaan Perlengkapan Jalan 2025)	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Dishub
	- Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.930.034.000,00	4.930.034.000,00	-	Dikbud
	- Hibah pada Dinas Perikanan	3.969.035.500,00	3.969.035.500,00	-	Diskan
	- Hibah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	696.223.913,00	696.223.913,00	-	Dispusdip
	- Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.086.267.800,00	55.086.267.800,00	-	Disperkim
	- Hibah pada Sekretariat Daerah	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	-	Sekretariat Daerah
	- Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	-	DKP
	- Hibah pada Dinas Koperasi dan UMKM	2.709.500.000,00	2.709.500.000,00	-	Dinkop & UMKM
	- Hibah pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	98.914.320,00	98.914.320,00	-	DPPKB
	- Hibah pada Dinas Perkebunan	20.112.242.824,00	20.112.242.824,00	-	Disbun
	- Hibah pada Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.388.294.010,00	10.388.294.010,00	-	DTPHP
	- Hibah Pada Dinas Perhubungan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		Dishub
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	66.992.233.910,00	-	Dinas Sosial
5.2	**BELANJA MODAL**	**525.370.652.767,00**	**523.070.692.769,00**	**(2.299.959.998,00)**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	10.314.120.000,00	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	74.347.961.221,00	-	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.893.707.001,00	100.593.747.003,00	(2.299.959.998,00)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	336.951.016.463,00	-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	797.330.777,00	-	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	66.517.305,00	-	
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.697.200.620,00**	**6.997.200.620,00**	**2.300.000.000,00**	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.697.200.620,00	6.997.200.620,00	2.300.000.000,00	
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**	**494.667.382.300,00**	**-**	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	270.875.595.300,00	270.875.595.300,00	-	
	Dana Desa	223.791.787.000,00	223.791.787.000,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(42.496.904.346,00)**	**(42.496.904.346,00)**	**-**	

KODE	URAIAN	PAGU INDIKATIF RANCANGAN APBD TA. 2025	PAGU INDIKATIF SETELAH EVALUASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	27.486.109.626,00	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	27.486.109.626,00	-	
	- Perumdam PDAM Tirta Musi	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-	
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.496.904.346,00	42.496.904.346,00	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
TOTAL RANCANGAN APBD		3.436.353.775.772,00	3.436.353.775.772,00	-	

SEKAYU, DESEMBER 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

Lampiran II : Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 23 /KEP/PIMP/DPRD/2024
Tanggal : 23 Desember 2024

Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin
Penyempurnaan Hasul Evaluasi Provinsi
Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	668.321.874.091,00	668.321.874.091,00	-
2	Dinas Kesehatan	334.276.542.331,60	334.276.542.331,60	-
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	-
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	-
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00	-
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00	-
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00	-
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	859.000.000,00	-
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	641.408.000,00	-
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00	-
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	-
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00	-
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00	-
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	-
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	-
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00	-
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	-
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	932.395.500,00	-
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00	-
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00	-
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	-
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00	-
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00	-
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	934.886.000,00	-
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00	-
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00	-
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00	-
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	-
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00	-
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00	-
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	605.263.500,00	-
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	149.999.999.929,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.116.319.678,72	389.116.319.678,72	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	228.409.255.813,46	228.409.255.813,46	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.866.072.375,11	14.866.072.375,11	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	29.402.308.185,65	29.402.308.185,65	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.670.022.827,55	17.670.022.827,55	-
8	Dinas Sosial	73.044.030.886,63	73.044.030.886,63	-
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.705.863.681,00	14.705.863.681,00	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.885.876.989,44	8.885.876.989,44	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.297.553.504,56	11.297.553.504,56	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	47.694.443.605,11	47.694.443.605,11	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.471.692.694,29	22.471.692.694,29	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.010.951.732,81	20.010.951.732,81	-
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.899.994.281,71	15.899.994.281,71	-
16	Dinas Perhubungan	18.878.907.178,57	18.878.907.178,57	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.541.448.619,07	27.541.448.619,07	-

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
18	Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	11.850.517.905,38	11.850.517.905,38	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.600.812.461,67	18.600.812.461,67	-
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	101.941.941.621,56	101.941.941.621,56	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.156.812.449,00	11.156.812.449,00	-
22	Dinas Perikanan	16.494.925.674,33	16.494.925.674,33	-
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.549.807.214,22	46.549.807.214,22	-
24	Dinas Perkebunan	42.364.296.803,67	42.364.296.803,67	-
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.881.266.906,11	26.881.266.906,11	-
26	Sekretariat Daerah	120.811.591.059,78	120.811.591.059,78	-
27	Sekretariat DPRD	106.813.431.705,37	106.813.431.705,37	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.261.719.593,22	23.261.719.593,22	-
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	522.899.586.810,64	522.899.586.810,64	-
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31.567.465.696,44	31.567.465.696,44	-
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.775.086.250,94	18.775.086.250,94	-
32	Inspektorat	25.621.100.590,30	25.621.100.590,30	-
33	Kecamatan Sekayu	9.724.469.839,35	9.724.469.839,35	-
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	849.999.937,00	-
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	849.999.948,00	-
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	850.000.000,00	-
34	Kecamatan Lais	4.671.575.953,30	4.671.575.953,30	-
35	Kecamatan Babat Toman	5.111.810.736,67	5.111.810.736,67	-
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	849.998.751,00	-
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	849.998.767,00	-
36	Kecamatan Keluang	4.541.453.122,67	4.541.453.122,67	-
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	849.999.875,00	-
37	Kecamatan Sanga Desa	5.231.826.314,57	5.231.826.314,57	-
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	848.720.148,00	-
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	848.564.566,00	-
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.452.126.422,56	3.452.126.422,56	-
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.838.838.954,33	3.838.838.954,33	-
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.729.241.885,60	3.729.241.885,60	-
41	Kecamatan Sungai Lilin	4.992.630.395,90	4.992.630.395,90	-
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	850.000.000,00	-
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.491.388.274,00	4.491.388.274,00	-
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	849.014.113,00	-
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	849.918.355,00	-
43	Kecamatan Lalan	4.164.662.652,67	4.164.662.652,67	-
44	Kecamatan Tungkal Jaya	4.684.002.561,57	4.684.002.561,57	-
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.418.768.712,02	4.418.768.712,02	-
46	Kecamatan Babat Supat	3.548.719.688,11	3.548.719.688,11	-
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.649.926.024,78	2.649.926.024,78	-
TOTAL BELANJA DAERAH		3.408.867.666.146,00	3.408.867.666.146,00	-

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Rancangan APBD TA.2025	Pembahasan Banggar	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4 - 3
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**69.983.013.972,00**	**69.983.013.972,00**	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**27.486.109.626,00**	-
1	Penyertaan Modal Perumdam PDAM Tirta Randik	24.486.109.626,00	24.486.109.626,00	-
2	Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
TOTAL PEMBIAYAAN		**27.486.109.626,00**	**27.486.109.626,00**	-
PEMBIAYAAN NETTO		**42.496.904.346,00**	**42.496.904.346,00**	-
TOTAL RANCANGAN APBD		**3.436.353.775.772,00**	**3.436.353.775.772,00**	-

SEKAYU, 23 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA

H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA

AFITNI JUNAIDI GUMAY, S.E
KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

AHMADI
WAKIL KETUA

EDI PRAMONO
WAKIL KETUA

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

<table>
<tr><th>No.</th><th>Rancangan APBD</th><th>Temuan Evaluasi</th><th>Penjelasan/Tindak Lanjut</th></tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Tabel. I, sebagai berikut: Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="2">PENETAPAN/PERSETUJUAN/SURAT</th><th rowspan="2">KETERANGAN</th></tr>
<tr><th>NOMOR</th><th>TANGGAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RKPD</td><td>27 Tahun 2024</td><td>28 Juni 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu 1 bulan Juli</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah</td><td>B-900/760/Setda/2024</td><td>11 Juli 2024</td><td>Tidak Sesuai (Paling lambat minggu I bul Juli)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B-900/760/Setda/2024</td><td>11 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Juli</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA</td><td>No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.10/DPRD/VII/2024</td><td>31 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Agu</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS</td><td>No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.11/DPRD/VII/2024</td><td>31 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Agu</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B-900/1020/BPKAD-II/2024</td><td>27 Agustus 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan September)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah</td><td>11/BA/BPKAD/IX/2024 dan 103/BA/DPRD/IX/2024</td><td>9 September 2024</td><td>Sesuai, Paling lamba bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenan</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi</td><td>B-900/1094/BPKAD-II/2024</td><td>11 September 2024</td><td>Sesuai, Paling Lamb (tiga) hari kerja setel persetujuan bersam</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="2">PENETAPAN/PERSETUJUAN/SURAT</th><th rowspan="2">KETERANGAN</th></tr>
<tr><th>NOMOR</th><th>TANGGAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>RKPD</td><td>27 Tahun 2024</td><td>28 Juni 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu 1 bulan Juli</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah</td><td>B-900/760/Setda/2024</td><td>11 Juli 2024</td><td>Tidak Sesuai (Paling lambat minggu I bul Juli)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B-900/760/Setda/2024</td><td>11 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Juli</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA</td><td>No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.10/DPRD/VII/2024</td><td>31 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Agu</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS</td><td>No.07/KSB/BPKAD/VII/2024 No.11/DPRD/VII/2024</td><td>31 Juli 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan Agu</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD</td><td>B-900/1020/BPKAD-II/2024</td><td>27 Agustus 2024</td><td>Sesuai (Paling lamba minggu II bulan September)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah</td><td>11/BA/BPKAD/IX/2024 dan 103/BA/DPRD/IX/2024</td><td>9 September 2024</td><td>Sesuai, Paling lamba bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenan</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi</td><td>B-900/1094/BPKAD-II/2024</td><td>11 September 2024</td><td>Sesuai, Paling Lamb (tiga) hari kerja setel persetujuan bersam</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	Keuangan Daerah dan butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		
III.	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan	A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.3.366.370.761.800,00,- Sebagai berikut ; 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD dalam Rancanan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.529.884.959.800,00,- atau 15,74% dari total Pendapatan Daerah; 2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.2.836.485.802.000,00,- atau 84,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan dalam rincian objek	

		pendapatan: a. Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp.2.710.885.802.000,00,00 atau 80,53% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; b. Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp.125.600.000.000,00 atau 3,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal tanggal 19 September 2024 sebagaimana 3.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.408.867.666.146,00 Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan belanja daerah: a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. 1) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berusaha mengalokasikan belanja daerah: a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Terima kasih kami sampaikan atas masukannya terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM . Dapat kami jelaskan bahwa untuk SPM Pendidikan Selanjutnya hal ini akan menjadi catatan kami dalam pengalokasian anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan dikoordinasikan dengan PD terkait untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan SPM pada PD tersebut pada masa yang akan datang, sehingga alokasi SPM Pendidikan di Kabupaten Musi

		Tahun Anggaran 2025, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut: a. SPM Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan sebesar Rp22.180.091.281,00 atau 3,37% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp657.766.944.238,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Pendidikan Anak Usia Dasar sebesar Rp19.766.196.781,00; 2) Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp2.413.894.500,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1) 100% warga negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini; 2) 100% warga negara Usia 7-15 berpartisipasi dalam pendidikan dasar; 3) 100% warga negara Usia 7-18 berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta butir 5.2.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam	Banyuasin dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam memenuhi standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan. Hal ini meliputi pemerataan akses pendidikan, kualitas fasilitas, kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, serta pencapaian hasil pendidikan di daerah tersebut. Evaluasi yang komprehensif akan membantu dalam perbaikan kebijakan dan program pendidikan di masa depan, serta memastikan semua anak di Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. .

		Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp876.946.666,00 atau 0,15% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp594.763.031.261,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar sebagai berikut: 1. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp74.232.000,00; 2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar Rp83.673.000,00; 3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp46.778.000,00; 4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp84.493.000,00; 5. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp36.240.000,00; 6. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp49.980.000,00, 7. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis sebesar Rp57.865.000,00,00; 8. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp62.040.000,00;	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasinya terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM pada Bidang Kesehatan pada Rancangan Perubahan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		9. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp50.000.000,00; 10. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp109.256.000,00; 11. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp136.505.000,00; 12. Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp95.696.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1) 100% ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan; 2) 100% ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan; 3) 100% bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan; 4) 100% balita mendapatkan layanan kesehatan; 5) 100% usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan; 6) 100% usia produktif mendapatkan layanan kesehatan; 7) 100% usia lanjut mendapatkan layanan kesehatan; 8) 100% penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan; 9) 100% penderita diabetes melitus mendapatkan layanan kesehatan; 10) 100% orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan layanan kesehatan; 11) 100% orang terduga tuberkulosis mendapatkan layanan kesehatan; 12) 100% orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	

		tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) mendapatkan layanan kesehatan; Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp18.432.071.512,00 atau 3,69% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp499.606.041.015,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp8.795.004.600,00; 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp9.637.066.912,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten yang terdiri dari: 1) 100% warga negara memperoleh	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasinya terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Rancangan Perubahan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
		d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp5.485.523.050,00 atau 6,07% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp90.399.534.477,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut : 1) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebesar Rp5.485.523.050,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten yang terdiri dari; 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan 2) 100% Warga Negara yang terkena	Terima kasih kami sampaikan atas masukannya terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM pada Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada Rancangan Perubahan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024. Dapat kami sampaikan bahwa untuk untuk alokasi anggaran Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota pada Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 dialokasikan untuk Pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana tersebut juga sudah termasuk infrastruktur fasilitas umum berupa jalan, drainase dan air bersih.

		relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp5.173.010.271,00 atau 11,69% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp44.268.380.561,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum sebesar Rp1.133.167.250,00; 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar Rp1.576.907.321,00; 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Terima kasih kami sampaikan atas masukannya terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM pada Bidang Trantibumlinmas pada Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya hal ini akan menjadi catatan kami dalam pengalokasian anggaran untuk prioritas pemenuhan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku dan akan dikoordinasikan dengan PD terkait untuk pemenuhan SPM pada masa yang akan datang.

		korban Bencana sebesar Rp1.819.546.700,00; 4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar Rp643.389.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantiblinmas untuk Kabupaten yang terdiri dari 100% warga Negara yang memeperoleh layanan akibat penegakan hukum peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp8.828.633.800,00 atau 12,09% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp73.044.030.887,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam jenis pelayanan sebagai berikut: 1) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00 2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	Terima kasih kami sampaikan atas saran terhadap pengalokasian untuk belanja pemenuhan SPM pada Bidang Sosial yang meningkat pada Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk indikator pencapaian SPM 100% warga negara korban bencana kota mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota telah dialokasikan yang sifatnya dicadangkan Ketika terjadinya bencana untuk 100 (seratus) orang terdiri dari bantuan sosial uang, sandang dan pangan, dan fasilitas pengungsian pada subkegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana.

		khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00; 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar Rp2.115.216.700,00; 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp367.767.000,00 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota sebesar Rp 2.115.216.700,00 harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial untuk Kabupaten yang terdiri dari: 2) 100% warga negara penyandang disabilitas terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Sosial; 3) 100% warga negara anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial; 4) 100% warga negara lanjut usia terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial; 5) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; 6) 100% warga negara korban bencana kota mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	

		tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pcmerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah: a) mengembalikan Momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator : (1) Pertumbuhan Ekonomi 4,25%-4,75% (2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,5% (3) Rasio Gini 0,286% dan b) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator: (1) Indeks Pembangunan Manusia 70,25%	Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, ***Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah*** mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		dan (2) Tingkat Kemiskinan 13,85% Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Prioritas Nasional Tahun 2025 meliputi: a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.43.061.617.945 atau 1,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN1) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Publik dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi	

		Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.902.256.442 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.35.159.361.503 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.61.181.486.526 atau 1,795% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN2) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Kesejahteraan Petani dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.956.537.265 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.51.811.659.311 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 3) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.71.413.289.950 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	

		c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.588.463.446.086 atau 17,263 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN3) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.897.010.000 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2) Untuk sasaran: Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp569.566.436.086 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.1.336.186.305.877 atau 39,197% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN4) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.269.560.512.065 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.886.073.237 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 3) Untuk sasaran: Penyediaan Lapangan Kerja yang Didukung oleh Tenaga Kerja Terampil dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.739.720.575 dari total belanja daerah.	
		e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.37.045.981.037 atau 1,087% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		Nasional (PN5) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM, dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp37.045.981.037 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	
		f. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.63.959.501.591 atau 1,876% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.959.501.591 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	
		g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.1.216.403.861.104 atau 35,684% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.604.084.950.545 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah; Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		Rp.612.318.910.559 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	
		h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp.62.565.465.980 atau 1,835% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025, penyelarasan Prioritas Nasional (PN6) dengan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut: 1) Untuk sasaran: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.62.565.465.980 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut.	Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 tersebut

		1) Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2025	Dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ***telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2025***
		2) Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai butir E.2.ab.3)a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi daerah Rp9.992.553.200,00; a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Rp.72.800.000; b) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemerintah Kab. Muba telah mengalokasikan alokasi belanja wajib untuk pengendalian inflasi pada Rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga telah menyediakan anggaran untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

		Keluarga Rp. 256.556.000; c) Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Rp.596.173.000; d) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Rp. 62.960.000; e) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 1.450.163.000; f) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 1.809.265.000; g) Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Rp. 348.692.000; h) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pasca Panen Hortikultura Rp. 780.232.200; i) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp. 3.213.902.000; j) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 78.307.000; k) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp.78.307.000; l) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar	

		reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp.1.245.196.000.	
		3) Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang besaranya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:	
		a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp756.756.543.967,00 atau 22,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasintelah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap berusaha mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh

			persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin.
		b. Alokasi Anggaran Kesehatan Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp594.763.031.261,00 atau 17,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, secara konsisten memadai dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjunya alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinginya Selanjutnya, dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan anggaran fungsi kesehatan dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan terus berupaya untuk memenuhi *mandatory spending* sesuai amanat Undang-Undang juga memprioritaskan pengawalan SPM Kesehatan serta mendukung transformasi kesehatan serta mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan.

		Kabupaten Musi Banyuasin secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan butir 5.1.3.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum memenuhi alokasi anggaran Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengalokasikan anggaran Belanja lnfrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40%,(empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan 5.1.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Berdasarkan hasil penandaan subkegiatan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan public untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD yang dihitung menggunakan aplikasi SIPD-RI didapatkan hasil Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada R-APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 44,88% atau senilai Rp. 1.307.785.869.532,- dari total belanja daerah diluar belanja transfer sebesar Rp. 2.914.200.283.846,-
		c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada lnspektorat	Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol

		Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp25.621.100.590,00 atau 0,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja gaji dan Tunjangan pada SKPD Inspektorat sebesar Rp6.751.522.654,00 atau 0,20% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula sebesar Rp18.869.577.936,00 atau 0,55% dari total belanja daerah; Antara lain tercantum pada : 1. Kegiatan Pengawasan internal sebesar Rp744.999.800,00; dan 2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp325.000.000,00; Telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir 5.3.33 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan akan tetap dipenuhi pada Perubahan APBD Tahun 2025.
		d. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp18.775.086.251,00 atau 0,55% dari total belanja daereh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah

		tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut : 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemelihaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp9.428315.152,00 atau 0,28% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan sebesar Rp9.3146.771.099,00 atau 0,27% dari total belanja daerah antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi sebesar Rp2.799.999.700,00; Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan konsisten dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran	Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		4) Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Penyediaan anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp1.178.507.025,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui: 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking,* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual:	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK dalam Rancangan Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

		3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, lndah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diverifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting,* pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan scrta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Theermometer,* insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil	

		Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;	
		b. Alokasi Anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum menganggarkan Penyediaan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengalokasikan Anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan Anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dala bentuk kegiatan pembinaan.

		Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.	
		c. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPlMDA) Penyediaan Anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp527.745.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasj Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025..	Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPlMDA, telah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten.
		d. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat	Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sudah dialokasikan terkait Penyediaan Anggaran Forum

		Beragama (FKUB) sebesar Rp627.682.890,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada: 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp300.000.000,00; 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada SKPD 15 Kecamatan Rp227.745.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Musi Banyuasin; Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala	Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp627.682.890,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
		e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 belum menganggarkan Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial, untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam	Terima kasih kami sampaikan atas masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Perhutanan Sosial yang belum dianggarkan dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025. Hal ini akan menjadi catatan kami selanjutkan untuk dikoordinasikan dengan PD terkait.

		Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah; Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp1.398.978.004.625,00 atau 90,40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah Rp1.398.978.004.625,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri danProduk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 25 F ebruari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

		Pemerintah Daerah; Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, sesuai maksud butir 3.3.2.1.3.1.g.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		g. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebesar Rp 124.810.000,00; 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa sebesar Rp 80.597.000,00; 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebesar Rp 114.380.600,00; 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa sebesar Rp 180.035.334,00;	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		h. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk memajukan

		yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 326.408.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	kebudayaan Indonesia dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
		i. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp 622.433.499,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Bantuan Hukum dalam Rancangan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		j. Alokasi Anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum mengalokasikan anggaran belanja hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Terima kasih kami sampaikan atas masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . hal ini akan menjadi catatan bagi kami dan dapat kami sampaikan bahwa saat ini, BAZNAS Kab. Muba telah mengelola zakat yang cukup besar yang diperoleh dari zakat penghasilan masyarakat termasuk ASN di Kab. Muba.

		Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan, dalam kode rekening belanja hibah pada SKPKD terkait sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan sesuai dengan butir 5.2.9.h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;	
		k. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp 117.162.895.797,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp 114.983.832.798,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp10.681.752.212,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 5.3.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kab. Muba terhadap pemenuhan alokasi belanja yang bersumber dari BLUD dalam Rancangan Perubahan APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun 2024.
		Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp2.384.132.430.459,00 atau 69,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dalam mengalokasikan anggaran

		Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp1.261.486.761.478,00 atau 37,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dar TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah, yaitu Rp1.261.486.761.478,00 atau 37,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam 5 (lima) tahun dalam mengalokasikan anggaran pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh	pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

		persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	
		Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp915.375.366.032,00 atau 26,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mempedomani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
		Belanja Jasa Penganggaran Belanja Jasa Rp410.643.308.834,00 atau 12,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor Rp285.364.603.284,00 atau	Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

		8,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Jasa Kantor Rp14.424.807.346,00 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; (2) Belanja Jasa Kantor Rp356.400.000,00 pada sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan; dan (3) Belanja Jasa Kantor Rp2.006.811.111,00 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		(1) Penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp2.569.226.500,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah	Penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana

		Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp 925.200.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaanya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaanya tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp12.059.088.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaanya tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1.2.2f.2), butir 3.4.1.2.2f.3) dan butir 3.4.1.2.2f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
		Belanja Pemeliharaan Rp78.249.203.419,00 atau 2,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp12.564.838.218,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp11.616.099.507,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaanya tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp40.002.567.220,00 atau 1,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (4) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp85.804.862,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: (a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan	

		(b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		Belanja Perjalanan Dinas Rp144.383.121.233,00 atau 4,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp143.892.856.500,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp490.264.733,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp287.478.365,00 pada sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 ayat (1)	Belanja Perjalanan Dinas Rp144.383.121.233,00 atau 4,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ***akan dilakukan rasionalisasi*** dan dalam dalam pelaksanaanya tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang Prioritas Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan butir 3.4.1.2.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
		a. Belanja Hibah Penganggaran Belanja Hibah Rp140.278.069.039,00 atau 4,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengalokasikan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024	Terkait belanja hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengganggarkan belanja Hibah dengan mempedomani Pasal 62 PP 12 Tahun 2019, Bab II huruf D.2.e. Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Surat Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2024 dan mempedomani hasil LHP BPK atas Pemeriksaan LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 terkait klasifikasi Belanja. Dan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 246 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah

			Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
		b. Belanja Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Rp66.992.233.910,00 atau 1,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp47.653.791.910,00 yang antara lain hanya ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp47.653.791.910,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp47.653.791.910,00; b) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp528.442.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp528.442.000,00; 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp18.810.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga Rp18.810.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-	Terkait penganggaran Belanja Bantuan Sosial mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 246 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

		Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp525.370.652.767,00 atau 15,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

		Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada: a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan b) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan	yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada: a) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan b) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
		1) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp4.697.200.620,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga menjadi Rp4.697.200.620,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp494.667.382.300,00 atau 14,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada: a) Belanja Bagi Hasil Rp0,00; Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir 3.4.4.1.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. b) Belanja Bantuan Keuangan Rp494.667.382.300,00 atau 14,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja yang tercantum Tabel 19, sebagai berikut:	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dan telah menampung perkiraan belanja Dana Desa APBN Tahun 2025 , Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan

			Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	C. Kebijakan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp69.983.013.972,00 Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp69.983.013.972,00 atau 2,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp3.408.867.666.146,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2O23 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2O22 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran	Merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada BUMD di Kabupaten Musi Banyuasin dengan mempedomani Ketentuan Peraturan Perundangan Sebagaimana diatur oleh PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana maksud dalam Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Adapun distribusi Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal tersebut yaitu kepada : PDAM Tirta Randik dan PT. Bank Sumsel Babel

	b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp27.486.109.626,00 yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp27.486.109.626,00 dilaksanakan sepanjang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu menyusun analisis invesiasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	perundang-undangan. d. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan defisit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

	undangan.		
	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS		
		1. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut: Tabel. 19 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS <table><tr><th>No.</th><th>Keterangan</th><th>RPD</th><th>Jumlah Alokasi Angggaran</th><th>RKPD</th><th>Jumlah Alokasi Angggaran</th><th>KUA-PPAS</th><th>Jumlah Alokasi Anggaran</th><th>APBD</th><th>Jumlah Alokas Anggaran</th></tr><tr><td>1</td><td>Jumlah Program</td><td>136</td><td rowspan="3">3.657.166.332.444,00</td><td>133</td><td rowspan="3">3.423.853.775.772,00</td><td>133</td><td rowspan="3">3.408.867.666.146,00</td><td>133</td><td rowspan="3">3.408.867.666.14</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumlah Kegiatan</td><td></td><td>266</td><td>266</td><td>266</td></tr><tr><td>3</td><td>Jumlah Subkegiatan</td><td></td><td>701</td><td>701</td><td>701</td></tr></table> Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin	Terima kasih kami sampaikan untuk apresiasi yang diberikan terhadap konsistensi kegiatan pada P-RKPD dengan P-KUA PPAS dan RAPBD-P. Hal ini akan terus kami lakukan agar harmonisasi perencanaan dan penganggaran tetap terjaga dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Dengan mempedomani amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

			tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, serta memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dari total belanja daerah dan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

	III. REKOMENDASI Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:		
		A. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi	

		berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	
		B. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6 -3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir butir 4.1.4.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

		Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		C. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk: 1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	C. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menyediakan anggaran untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dengan mendapat apresiasi Dana Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi.
		D. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,25% - 4,75%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,85%, serta menurunnya tingkat pengangggguran terbuka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3,5%. Selain itu, Rancangan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya untuk mepercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,25% - 4,75%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 13,85%, serta menurunnya tingkat pengangggguran terbuka wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 3,5%. Selain itu, Rancangan Peraturan

		Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di wilayah Sumatera sebesar 70,25%. Selain itu, penurunan kemiskinan pada Tahun 2025 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada Tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.	Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus mendukung tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di wilayah Sumatera sebesar 70,25%. Selain itu, penurunan kemiskinan pada Tahun 2025 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada Tahun 2021 pasca pandemi COVID-19.
		E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
		F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat	Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ***telah mempedomani*** ketentuan

		(4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		G. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya memperhatikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		H. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		I. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub	Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub

		rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi menyesuaikan dengan stressing substansi yang belum memenuhi amanat mandatory spending Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		J. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada: 1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2024 TELAH berpedoman pada hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai ASN daerah, berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah mengenai pemberian TPP bagi ASN Daerah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan

		korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.	Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
		K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
		L. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Schubungan dengan hal tersebut, pengadaan	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

		barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau *Buton*) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	PemerintaH Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan Dana Insentif Fiskla Kategori P3DN.
		M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

		N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electri vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. Mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*). 3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan 4. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electri vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*). 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		(Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
		O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila	Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

		ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	
		P. Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/rental *online* termasuk bela pengadaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2.5.b.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
		Q. Terkait penganggaran asumsi pendapatan yang digunakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan angka TKDD Tahun 2025, sebagaimana surat DJPK Kemeterian Keuangan RI Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 tentang penyampaian rincian alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Tahun 2025.	Terkait penganggaran asumsi pendapatan yang digunakan seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan angka TKDD Tahun 2025, sebagaimana surat DJPK Kemeterian Keuangan RI Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024 tentang penyampaian rincian alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Tahun 2025.
		R. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk: 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25	

		November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir 5.2.14.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana	

		dimaksud alam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program	

		diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi,	

		kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. 6. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan	

		dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah., sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun Anggaran 2025. 7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-3406 Tahun 2024. 8. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar mengambil langkah-langkah senagai berikut: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten melalui	

		kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota: dan 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. Mengkooordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/ sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan	

		3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti; 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti; 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; 8) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten; 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan; c. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan	

		Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekoloah Mengengah Kejuruan. d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat pemerintah terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten; dan 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 9. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 antara lain Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15	

		Tahun tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 10. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah danakhlak di daerah dalam belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI. 11. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 12. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran	

		Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1) nama Kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan	Pada Raperda APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, tidak menganggarkan kegiatan tahun jamak.

		Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
		T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mempedomani Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024, untuk: 1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

		kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya	
		U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah; 6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7) menyusun desain olahraga daerah	Terkait Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan berusaha kedepan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;

		berdasarkan DBON.	6) menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerjasama dengan Universitas; dan menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON.
		V. Alokasi Anggaran untuk Konektivitas Transportasi Perhubungan Udara Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi perhubungan udara ke daerah DPN, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk: 1. mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin yaitu antara lain Kendari-Wakatobi; 2. dukungan akses penerbangan ke daerah DPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan *block seat* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud; sebagaimana maksud butir 5.3.24.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	
		W. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin agar	Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

		mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Papua Barat mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang	mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan

		Milik Daerah;	
		X. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Y. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Z. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan kebenaran atas informasi dalam	

		dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.	

Sekayu, 23 Desember 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. SANDI PAHLEFI

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**529.884.959.800,00**
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.836.485.802.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	**3.366.370.761.800,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.384.132.390.457,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.260.994.266.412,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.867.821.096,00
5.1.05	Belanja Hibah	140.278.069.039,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**523.070.692.769,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.593.747.003,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6.997.200.620,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**494.667.382.300,00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00
	Jumlah Belanja	**3.408.867.666.146,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-42.496.904.346,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**69.983.013.972,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.486.109.626,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**69.983.013.972,00**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**27.486.109.626,00**
	Pembiayaan Netto	**42.496.904.346,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	248.223.489.800,00	1.520.438.781.113,00	439.409.181.326,00	0,00	0,00	1.959.847.962.439,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	625.845.580.157,00	31.921.364.081,00	0,00	0,00	657.766.944.238,00
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	625.845.580.157,00	31.921.364.081,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	245.486.489.800,00	569.004.413.838,00	25.758.617.423,00	0,00	0,00	594.763.031.261,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	0,00	326.900.208.586,00	7.376.333.746,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	28.750.000.000,00	26.650.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	25.000.000.000,00	24.624.616.728,00	2.875.383.272,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.007.905.000,00	280.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	Puskesmas Babat Toman	2.662.818.300,00	2.396.536.200,00	266.281.800,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.262.565.700,00	399.276.300,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	730.150.000,00	128.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	513.126.400,00	128.281.600,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.024.835.800,00	176.078.200,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	862.541.600,00	215.635.400,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.500,00	829.864.574,00	202.680.426,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.058.749.300,00	363.308.700,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.381.756.800,00	22.506.200,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.284.530.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.475.768.000,00	373.550.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.514.506.768,00	268.627.732,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	792.535.500,00	139.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0018	Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.109.355.280,00	151.275.720,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.552.361.800,00	156.805.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0020	Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.647.935.700,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0021	Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.177.957.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0022	Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.620.413.157,00	201.100.843,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0023	Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	841.397.400,00	93.488.600,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0024	Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.029.028.000,00	660.342.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0025	Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.253.372.516,00	219.640.484,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0026	Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0027	Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.065.623.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0028	Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	912.397.500,00	101.377.500,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0029	Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	959.859.950,00	169.387.050,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0030	Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.556.339.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0031	Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	544.737.150,00	60.526.350,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0101	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	145.600.359.929,00	4.399.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.000.000,00	181.282.866.659,00	318.323.174.356,00	0,00	0,00	499.606.041.015,00
1	03	1.03.2.15.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.000.000,00	107.562.097.659,00	264.034.222.020,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	73.720.769.000,00	54.288.952.336,00	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.527.000.000,00	33.870.818.121,00	56.528.716.356,00	0,00	0,00	90.399.534.477,00
1	04	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.527.000.000,00	33.870.818.121,00	56.528.716.356,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	37.729.882.451,00	6.538.498.110,00	0,00	0,00	44.268.380.561,00
1	05	1.05.0.00.0.00.08.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	12.917.458.036,00	1.948.614.339,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.1.04.0.00.07.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	24.812.424.415,00	4.589.883.771,00	0,00	0,00	0,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	72.705.219.887,00	338.811.000,00	0,00	0,00	73.044.030.887,00
1	06	1.06.0.00.0.00.09.0000	Dinas Sosial	0,00	72.705.219.887,00	338.811.000,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.343.927.000,00	302.515.028.007,00	56.713.898.718,00	0,00	0,00	359.228.926.725,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	13.098.363.191,00	1.307.500.490,00	0,00	0,00	14.405.863.681,00
2	07	2.07.3.32.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	13.098.363.191,00	1.307.500.490,00	0,00	0,00	0,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	8.740.738.044,00	145.138.945,00	0,00	0,00	8.885.876.989,00
2	08	2.08.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.740.738.044,00	145.138.945,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	11.079.945.775,00	217.607.730,00	0,00	0,00	11.297.553.505,00
2	09	2.09.0.00.0.00.12.0000	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	11.079.945.775,00	217.607.730,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	385.880.000,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
2	10	1.04.1.03.2.10.05.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	385.880.000,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.130.000.000,00	41.951.378.955,00	5.743.064.650,00	0,00	0,00	47.694.443.605,00
2	11	2.11.0.00.0.00.13.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.130.000.000,00	41.951.378.955,00	5.743.064.650,00	0,00	0,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	16.726.788.029,00	5.744.904.665,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00
2	12	2.12.0.00.0.00.14.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	16.726.788.029,00	5.744.904.665,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	19.729.610.578,00	281.341.155,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00
2	13	2.13.4.01.0.00.15.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	19.729.610.578,00	281.341.155,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	11.787.992.272,00	4.112.002.010,00	0,00	0,00	15.899.994.282,00
2	14	2.14.0.00.0.00.16.0000	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	0,00	11.787.992.272,00	4.112.002.010,00	0,00	0,00	0,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	71.500.000,00	26.957.615.257,00	9.441.291.922,00	0,00	0,00	36.398.907.179,00
2	15	1.03.2.15.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	9.839.070.000,00	7.680.930.000,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.17.0000	Dinas Perhubungan	71.500.000,00	17.118.545.257,00	1.760.361.922,00	0,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	23.719.983.154,00	1.275.647.289,00	0,00	0,00	24.995.630.443,00
2	16	2.16.2.20.2.21.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	23.719.983.154,00	1.275.647.289,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	11.575.530.505,00	274.987.400,00	0,00	0,00	11.850.517.905,00
2	17	2.17.0.00.0.00.19.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	11.575.530.505,00	274.987.400,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	16.145.093.131,00	2.455.719.331,00	0,00	0,00	18.600.812.462,00
2	18	2.18.4.01.0.00.20.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	16.145.093.131,00	2.455.719.331,00	0,00	0,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	142.427.000,00	83.462.634.692,00	15.102.456.080,00	0,00	0,00	98.565.090.772,00
2	19	2.19.3.26.0.00.21.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	142.427.000,00	83.462.634.692,00	15.102.456.080,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	1.144.013.017,00	119.204.758,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00
2	20	2.16.2.20.2.21.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.144.013.017,00	119.204.758,00	0,00	0,00	0,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	1.219.935.906,00	62.664.495,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00
2	21	2.16.2.20.2.21.18.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	1.219.935.906,00	62.664.495,00	0,00	0,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	4.119.860.850,00	329.100.000,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	4.119.860.850,00	329.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	9.966.435.098,00	434.169.773,00	0,00	0,00	10.400.604.871,00
2	23	2.23.2.24.0.00.22.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	9.966.435.098,00	434.169.773,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	703.229.553,00	52.978.025,00	0,00	0,00	756.207.578,00
2	24	2.23.2.24.0.00.22.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	0,00	703.229.553,00	52.978.025,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	899.860.000,00	123.785.015.684,00	12.182.131.764,00	0,00	0,00	135.967.147.448,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.000.000,00	16.210.218.567,00	284.707.107,00	0,00	0,00	16.494.925.674,00
3	25	3.25.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perikanan	60.000.000,00	16.210.218.567,00	284.707.107,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	3.376.850.850,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00
3	26	2.19.3.26.0.00.21.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	0,00	3.376.850.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	179.860.000,00	83.367.994.502,00	5.546.109.516,00	0,00	0,00	88.914.104.018,00
3	27	3.27.0.00.0.00.24.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	40.000.000,00	45.563.169.109,00	986.638.105,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.0.00.0.00.25.0000	Dinas Perkebunan	139.860.000,00	37.804.825.393,00	4.559.471.411,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	660.000.000,00	19.138.654.746,00	4.444.054.103,00	0,00	0,00	23.582.708.849,00
3	30	3.30.3.31.0.00.26.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	660.000.000,00	19.138.654.746,00	4.444.054.103,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	1.391.297.019,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	3.298.558.057,00
3	31	3.30.3.31.0.00.26.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	1.391.297.019,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
3	32	2.07.3.32.5.06.10.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	250.000.000,00	217.794.793.847,00	9.830.228.918,00	0,00	0,00	227.625.022.765,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000,00	114.637.078.253,00	6.174.512.807,00	0,00	0,00	120.811.591.060,00
4	01	4.01.5.02.0.00.27.0000	Sekretariat Daerah	250.000.000,00	114.637.078.253,00	6.174.512.807,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	103.157.715.594,00	3.655.716.111,00	0,00	0,00	106.813.431.705,00
4	02	4.02.0.00.0.00.28.0000	Sekretariat DPRD	0,00	103.157.715.594,00	3.655.716.111,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.115.653.485.000,00	99.263.634.483,00	1.681.609.948,00	6.997.200.620,00	494.667.382.300,00	602.609.827.351,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	01		PERENCANAAN	0,00	22.036.879.569,00	249.250.500,00	0,00	0,00	22.286.130.069,00
5	01	5.01.5.05.0.00.44.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	22.036.879.569,00	249.250.500,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	3.115.653.485.000,00	58.020.422.659,00	888.015.928,00	6.997.200.620,00	494.667.382.300,00	560.573.021.507,00
5	02	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	6.105.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.45.0000	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.836.485.802.000,00	20.945.167.093,00	289.836.798,00	6.997.200.620,00	494.667.382.300,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.46.0000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	279.167.683.000,00	30.969.286.566,00	598.179.130,00	0,00	0,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	18.230.742.731,00	544.343.520,00	0,00	0,00	18.775.086.251,00
5	03	5.03.0.00.0.00.47.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	18.230.742.731,00	544.343.520,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	975.589.524,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00
5	05	5.01.5.05.0.00.44.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	975.589.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	25.325.343.690,00	295.756.900,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	25.325.343.690,00	295.756.900,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00
6	01	6.01.0.00.0.00.44.0000	Inspektorat	0,00	25.325.343.690,00	295.756.900,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	77.645.953.605,00	2.651.702.395,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00
7	01		KECAMATAN	0,00	77.645.953.605,00	2.651.702.395,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Sekayu	0,00	9.529.675.232,00	194.794.607,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0001	Kelurahan Serasan Jaya	0,00	816.794.287,00	33.205.650,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0002	Kelurahan Soak Baru	0,00	789.035.198,00	60.964.750,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0003	Kelurahan Balai Agung	0,00	425.762.201,00	424.237.799,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0004	Kelurahan Kayuara	0,00	815.592.053,00	34.407.947,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Lais	0,00	4.538.006.612,00	133.569.341,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Babat Toman	0,00	4.987.192.813,00	124.617.924,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0001	Kelurahan Babat	0,00	807.917.652,00	42.081.099,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0002	Kelurahan Mangun Jaya	0,00	776.776.840,00	73.221.927,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Keluang	0,00	4.419.923.081,00	121.530.042,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0001	Kelurahan Keluang	0,00	844.000.325,00	5.999.550,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Sanga Desa	0,00	5.102.652.063,00	129.174.252,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0001	Kelurahan Ngulak I	0,00	827.963.148,00	20.757.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0002	Kelurahan Ngulak	0,00	848.564.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	3.330.141.147,00	121.985.276,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Batanghari Leko	0,00	3.717.001.669,00	121.837.285,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Sungai Keruh	0,00	3.621.855.956,00	107.385.930,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Sungai Lilin	0,00	4.904.619.550,00	88.010.846,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0001	Kelurahan Sungai Lilin	0,00	824.364.550,00	25.635.450,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0002	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	0,00	811.462.354,00	38.537.646,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Bayung Lencir	0,00	4.364.040.416,00	127.347.858,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0001	Kelurahan Bayung Lencir	0,00	809.464.036,00	39.550.077,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0002	Kelurahan Bayung Lencir Indah	0,00	810.999.091,00	38.919.264,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Lalan	0,00	4.041.464.553,00	123.198.100,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Tungkal Jaya	0,00	4.553.575.675,00	130.426.887,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Lawang Wetan	0,00	4.330.735.456,00	88.033.256,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Babat Supat	0,00	3.469.032.459,00	79.687.229,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Jirak Jaya	0,00	2.527.340.622,00	122.585.403,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	17.363.840.028,00	306.182.800,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	17.363.840.028,00	306.182.800,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00
8	01	1.05.8.01.0.00.06.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	17.363.840.028,00	306.182.800,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**3.366.370.761.800,00**	**2.384.132.390.457,00**	**523.070.692.769,00**	**6.997.200.620,00**	**494.667.382.300,00**	**0,00**

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati

H. SANDI FAHLEPI

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	
4.1.01	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.364.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	450.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.784.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.889.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.066.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.825.386.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	506.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	970.487.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.916.713.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.187.500.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.107.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	568.187.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	481.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.520.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.055.787.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.734.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.648.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	828.203.581,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.912.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	910.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	723.310.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.583.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.916.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	49.547.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	446.083.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.980.200,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi		
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.700,00	

Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	550.078.483.467,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.385.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.993.640,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.191.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.632.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.582.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.101.500.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.499.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.608.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.787.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP		
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE FASYANKES YANG MEMIIKI FASILITASPELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP SESUAI STANDAR Persentase Fasyankes yang memiliki Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.404.485.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	693.475.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.567.300.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	994.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	894.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.178.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.884.666,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.256.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.505.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.232.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.673.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.778.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.493.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.240.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.865.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.983.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.390.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.207.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.262.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.293.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.301.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.379.633.527,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	785.105.127,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.064.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.489.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.892.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.820.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.968.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.009.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar		
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Berjalan PERSENTASE IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN YANG BERJALAN		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.695.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDMK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DAN PROFIL SDMK		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.398.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSI		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.501.700,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman		
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik serta UMOT yang memiliki izin		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah tangga Persentase IRTP yang memiliki sertifikat		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.720.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
Indikator Keluaran	: " Jumlah TPM, jasa boga, rumah makan, dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene "		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.317.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.912.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.928.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.014.980,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL		

Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: JUMLAH KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI TAHUNAN YANG DISUSUN SESUAI PEDOMAN YANG BERLAKU Persenatase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.156.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persenatse Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	239.768.555.073,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.441.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.322.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.297.260,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.702.740,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persenatse Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.624.287.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.663.371,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.336.629,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.269.332.489,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.890.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.212.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.500.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.650.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.787.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.312.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		

Indikator Hasil	: Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.144.616.728,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.783.272,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.600.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.500.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	520.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Ngulak		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.147.422.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.482.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.940.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Babat Toman		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.331.409.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.065.127.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.281.800,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Ulak Paceh		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.428.421.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.144.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.220.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	304.056.300,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Tanah Abang		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	830.317.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.222.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.095.250,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0007 Puskesmas Lubuk Bintialo		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	515.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.850.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0008 Puskesmas Bukit Selabu		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	320.704.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.422.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.281.600,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0009 Puskesmas Cinta Karya		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	583.904.125,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.931.675,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.022.400,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.055.800,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0010 Puskesmas Suka Damai		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	539.088.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.453.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.635.400,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0011 Puskesmas Sido Rahayu		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	517.272.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.592.074,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.680.426,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0012 Puskesmas Tebing Bulang		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.211.029.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	847.720.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.308.700,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0013 Puskesmas Jirak		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	888.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.356.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.506.200,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0014 Puskesmas Balai Agung		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.867.265.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.265.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0015 Puskesmas Lumpatan		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.510.759.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.009.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.550.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0016 Puskesmas Lais		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.391.567.250,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.939.518,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.627.732,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0017 Puskesmas Gardu Harapan		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	466.198.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.337.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.860.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0018 Puskesmas Teluk Kijing		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	630.315.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	479.039.780,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.275.720,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0019 Puskesmas Tanjung Kerang		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	854.594.300,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	697.767.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.805.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0020 Puskesmas Sungai Lilin		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.473.967.850,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.173.967.850,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0021 Puskesmas Sri Gunung		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	659.513.850,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.443.150,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.250.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0022 Puskesmas Karya Maju		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.071.308.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.104.757,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.300.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.800.843,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0023 Puskesmas Mekar jaya		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	560.931.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.465.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.488.600,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0024 Puskesmas Bayung Lencir		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.344.685.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.684.343.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.342.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0025 Puskesmas Suka Jaya		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	773.331.825,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.040.691,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.640.484,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0026 Puskesmas Peninggalan		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	830.317.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.222.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.095.250,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0027 Puskesmas Sumber Harum		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	700.359.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.264.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0028 Puskesmas Berojaya Timur		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	607.387.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.377.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0029 Puskesmas Bandar Agung		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	564.623.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.236.450,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.387.050,00	

Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0030 Puskesmas Karang Mukti		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.174.003.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.335.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0031 Puskesmas Air Balui		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	302.631.750,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.105.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.526.350,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.359.929,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.399.640.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	64.915.767.447,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.084.232.553,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Unit Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.085.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	565.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0077 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0078 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0079 Operasi dan Pemeliharaan Danau		
Indikator Keluaran	: Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		
Indikator Keluaran	: Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.885.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	872.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.735.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.504.264.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap		
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000.010,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.597.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.402.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.805.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	217.695.167.894,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.310.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.636.699.827,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: [deleted] Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat		
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Tenaga Konstruksi yang terampil dan bersertifikat		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Persentase tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah		
Kegiatan	: 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.860.667,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	14.364.480.153,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlindunginya Kendaraan Dinas dan tersertifikasinya Aset Tanah bawah jalan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pakaian dinas dan attribut lainnya serta jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.484.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.561.329,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.330,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.010.670,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.424.807.346,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.413.333,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.878.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.872.120,00	
Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)		
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.346.060.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	5.148.944.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000.000,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)		
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.160.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.434.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.570.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.259.512,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.224.643.200,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
Indikator Hasil	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.180.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.258.585.186,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
Indikator Hasil	: Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani		
Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
Indikator Keluaran	: Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani Persentase Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.108.205.088,00	
5.1.05	Belanja Hibah	41.712.680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.730.367.150,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani		
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangan		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.987.632.400,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab		
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.975.523.050,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksana nya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: persentase terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0003 Pembangunan Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.319.610.400,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
Indikator Hasil	: Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki		
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki		
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.810.000.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Persentase PSU Yang dibangun / direhab		
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
Indikator Keluaran	: n Persentase PSU Yang dibangun / direhab		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.249.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.827.837.756,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel		
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pesentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.192.841.256,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananyaKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.295.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.729.545,00	
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.100.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.454.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.745.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.601.120,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.08.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Laporan Data Kebencanaan yang Akurat		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.637.550,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.523.157.321,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.323.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.623.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.954.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	833.760.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.080.500,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.934.214,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.009.985.878,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.375.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.418.560,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.867.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.958.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.568.678,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.946.458,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.991.994,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.981,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.130.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.248.340,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.640.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.164.790,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.811.111,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.792.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.880.000,00	
Organisasi	: 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.1.04.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten		
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.846.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.557.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.886.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		
Indikator Keluaran	: Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.416.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.513,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.947.737,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.973.460,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.912.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.900.000,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.843.040,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

Indikator Keluaran	: Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.982.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
Indikator Hasil	: Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.389.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.355.000.000,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat		
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.448.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.328.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.702.794.937,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.093.250,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.758.900,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.851.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.397.874,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.973.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.936.034,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.808.486,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.603.223,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.138.871,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.042.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.350.888,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.935.011.111,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.121.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.662.862,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial		
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.09.0000 Dinas Sosial		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS yang mendapat Layanan Persentase PMKS yang mendapat Layanan		
Kegiatan	: 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pemberdayaan Sosial (KAT)		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.052.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	59.055.000,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.222.000,00	
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.631.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.551.495.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.695.670,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.460.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.383.455.700,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.595.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.305.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Serta Gepeng di Luar		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.259.132.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	452.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.292.700,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.959.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.853.721,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	45.785.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.250.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten		
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.767.000,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.948.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI		
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.811.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.852.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.251.712.975,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.778.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.543.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.331.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.485.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.511.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.513.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.329.675,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.132.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.004.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.360.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.675.440,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.854.756,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.280.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah		
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.587.050,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja		
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.366.572.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.894.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.088.352.000,00	

Kegiatan	: 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.962.000,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Pekerja yang ditempatkan		
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.679.925,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.928.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.501.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.823.700,00	

Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.102.900,00	
Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan		
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.940.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.034.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.129.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		

Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.619.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.607.708.665,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.590.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.164.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.355.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.963.364,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.044.490,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.602.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.785.356,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.764.430,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.308.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.735.500,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.104.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.658.568,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.881.333,00	
Kegiatan	: 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.873.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.490.000,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 2.08.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.487.250,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan MeninkatnyaPemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.499.300,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Menurunnya Persentase Kekerasan terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.251.246,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tersedianya [KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.710.000,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak Tersedianya Sistem Profil Gender dan Anak Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin dan umur antara Laki laki dan perempua serta Data Terpilha Anak Perempuan dan Anak Laki laki Tersusunnya Data Gender Gender dan Anak secara terpilah tingkat Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.533.000,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA) penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase Kecamatan Layak Anak		
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di dalam Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Persentase terbentuknya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.500.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.747.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.558.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi		
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Menurunnya Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Dampingan Korban bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.563.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan huku Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.843.500,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
Kegiatan	: 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD		

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.808.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.005.500,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.485.038.425,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PD)		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.274.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.125.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (PD) Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.912.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.494.440,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.621.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.509.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.193.110,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.165,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.150.899,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.788.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhi Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerrintah		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.968.340,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada PD		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.665.920,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.939.644,00	
Kegiatan	: 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan DPPPA		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.101.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.330.000,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.12.0000 Dinas Ketahanan Pangan		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari		
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.556.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	195.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.173.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.508.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.790.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.679.545,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan		
Indikator Keluaran	: Informasi Harga dan Pasokan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
Indikator Keluaran	: Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.983.843,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.405.000,00	
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.964.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.163.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.050.000.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)		
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.902.388,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi		
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.450.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.652.019,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel		
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.098.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.784.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.089.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.973.986.531,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.730.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.545.000,00	

Kegiatan	: 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.965.373,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.536.010,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.913.584,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.839.136,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.613.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.071.720,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.209.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	542.055.556,00	
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.906.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.10.05.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA		
Kegiatan	: 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA		
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.880.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.514.120.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.13.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.13.0000 Dinas Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang disusun		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai		
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.486.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.983.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0014 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.750.774,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.767.400,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi		
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.048.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.451.320.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.998.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.737.000,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.937.000,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.952.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan sampah		
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah		
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.939.287,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.412.802.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.651.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.348.800,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup		
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.914.222.744,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.917.250,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.858.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.873,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.826.300,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.272,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.997.942,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.067.252,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.475.537.911,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.234.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.119.700,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.14.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.363.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.315.419,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.029.402,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.144.701,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.394.436,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.768.507.025,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.998.631,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.417.847,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.315.995,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.504.510,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.996.688,00	

Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.559.690,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.693.000,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan		
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.176.708,00	
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: [deleted] Jumlah Capaian Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.985.404.269,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Diklat PIM dan Bimtek-Bimtek terhadap SDM		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.386.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.953.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.555.360,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.444.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.873.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.085.029,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.744.444,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.610.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.930.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.008.800,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Organisasi	: 2.13.4.01.0.00.15.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Unit Organisasi	: 2.13.4.01.0.00.15.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah Desa yang melakukan kerjasama		
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.223.000,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Desa Tertib Administrasi		
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.701.198,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.939.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.159.740,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.061.078.240,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.952.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.035.334,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.706.316.944,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.597.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.089.980,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.380.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.810.000,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina		
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.366.250,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.427,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.872.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.972.047,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.571.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.507.025,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.985.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.675,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi		
Kegiatan	: 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.919.344.180,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.925.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.252.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.250.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.787.628,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.404.525,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.004.582,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.135,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.925.830,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.969.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.936.630,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoraan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.571.396,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	509.856.267,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.025.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.888.500,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
Unit Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.16.0000 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana		
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.		
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.469.867,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.338.000,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		

Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.966.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.466.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.116.200,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.395.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.020.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	729.476.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.011.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.784.498,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.182.700,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertan Ber-KB		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.523.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.291.203,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina		
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.285.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.928.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	98.914.320,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
Indikator Keluaran	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.528.000,00	
Program	: 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Laporan Yang Dilaksanakan Sangat Tepat		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.713.950,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.198.999.495,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada DPPKB Kab. Muba		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.842.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.355.691,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (100%)		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.952.255,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.496.210,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.996.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.980.343,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.345.625,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.922.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.381.000,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.182.825,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.546.600,00	
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.554.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.000,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Unit Organisasi	: 1.03.2.15.0.00.04.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase lampu jalan dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lampu Jalan dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	416.118.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.653.882.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.422.952.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.048.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.17.0000 Dinas Perhubungan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.265.533.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.634.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.915.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.089.350,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.116.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.084.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.549.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.244.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.148.045,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.859.178,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.398.041,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.442.378,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik		

Kegiatan	: 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perizinan dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.014.000,00	
Kegiatan	: 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabauhan Sungai dan Danau persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.402.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.666.050,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0006 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.799.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.495.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.041.000,00	
Program	: 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 2.15.04.2.01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara		
Sub Kegiatan	: 2.15.04.2.01.0002 Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.860.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah		
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.999.850,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.708.891.232,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.135.750,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.372.994,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.627.006,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.139.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.860.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.160.620,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.548.188,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen enyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.729.655,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.660.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.809.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.919.192,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik		
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah media informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. muba yang menyampaikan informasi kepada masyarakat Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang menyampaikan Informasi Kepada masyarakat		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.924.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.312.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.557.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	882.140.293,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.753.207,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	845.014.002,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.328.740,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten		
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya pelayanan pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informatika Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.218.760,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.056.657.019,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.217.303,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.616.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Sistem perencanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.003.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.452.246.736,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas Meningkaynya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.824.140,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.855.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.427,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.816.649,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.998.117,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.252.473,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.051.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya peralatan mebeleur penunjang kenyamanan kerja Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.531.390,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	407.931.948,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.566.489,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan bekerja		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.711.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.240.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.19.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi aktif		
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.840.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.863.800,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Indikator Hasil	: Jumlah Koperasi sehat		
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP serta UKM berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kota		
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya		
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing		
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	

Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Jumlah UMK yang berdaya saing		
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan , penguatan kelembagaan dan koordinasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.199.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.000.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil		
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	658.679.850,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.709.500.000,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.352.480.321,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.024.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya layanan administrasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.957.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.027.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	

Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.370.268,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.266.666,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.987.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.140.000,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.4.01.0.00.20.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.904.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.072.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.841.000,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.488.000,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Minat Investasi		
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal Presntase Peningkatan Minat Investasi		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.739.000,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan		
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.766.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.526.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.581.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.003.292.600,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Nilai Realisasi investasi PMDN Nilai Realisasi investasi PMA		
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Nilai Realisasi investasi PMA Nilai Realisasi investasi PMDN Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola		
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah data informasi Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Persentase kesediaan data dan informasi		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.604.000,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.999.764,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.758,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.373.488,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Persentase adminitrasi keuangan perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.507.763.187,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.417.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.643.640,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.784.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum perangkat daerah Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.969.087,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.416.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.185.571.821,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.789,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.998.364,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.999.491,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.977.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.147.510,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.705.146,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.866.667,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.556.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.187.200,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
Indikator Hasil	: Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina		
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.216.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.637.000,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Organisasi yang mendapatkan pembinaan		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.690.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga		
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.843.923,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.430.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.105.692.900,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah cabang olahraga yang ditandingkan/ diikuti		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.305.150.399,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	606.710.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.797.500,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cabang Olahraga yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.006.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.972.168.250,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	386.755.000,00	

Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Pembinaan dan Kerjasama Organisasi Olahraga		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	27.061.098.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.207.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.195.199.879,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.410.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi		
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.670.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.062.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.424.890,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.997.600,00	
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Dokumen yang disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.806.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.819.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Administrasi perkantoran berjalan dengan baik		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.052.807.310,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.728.750,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.098.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.386.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.211.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.935.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.999.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.996.000,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaaan barang milik daerah Penyediaan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.219.080,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan jasa penunjang kantor		
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.756.472,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.137.888.889,00	
Kegiatan	: 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.746.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai kan		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.530.017,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.204.758,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	604.073.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.308.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.102.000,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah		
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemkab muba Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.800.401,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.135.505,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	62.664.495,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.408.000,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.784.491.850,00	
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	164.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.250.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		
Kegiatan	: 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.995.000,00	
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Jumlah Koleksi Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum Jumlah Kunjungan		
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Meningkatnya Penegelolaan dan Pemanfaatan Museum		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.716.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.889.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.007.828,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.942.446,00	
5.1.05	Belanja Hibah	112.107.780,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	181.263.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.363.374,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.781.715,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.239.317,00	

Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: meningkatnya gemar membaca di wilayah Kab. Muba		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.012.527,00	
5.1.05	Belanja Hibah	42.707.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	541.408.883,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.217.333,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.725.365,00	
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan		
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.915.165,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.991.633,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi keuangan PD		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.572.257.252,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi kepegawaian PD		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: lancarnya administrasi umum PD		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.994.835,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.554.929,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.419.896,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.503,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.998.249,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.961.651,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.055.030,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.993.000,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.247.100,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.476.250,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.838.400,00	
Kegiatan	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: terpeliharanya barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.410.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.410.000,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolanya Arsip Statis di Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.654.432,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.978.025,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.792.011,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.783.110,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.23.0000 Dinas Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.473.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.494.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.244.906.250,00	
Kegiatan	: 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.704.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.683.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Produksi Perikanan Budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.230.950,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.861.000,00	
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.254.806,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.235.130.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.772.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.216.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Tingkat Partisipasi Pokmaswas		
Kegiatan	: 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	536.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.548.867,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.651.840,00	
5.1.05	Belanja Hibah	194.999.250,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.710.200,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	805.669.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.520.950,00	
5.1.05	Belanja Hibah	294.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.100.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe		
Kegiatan	: 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.219.203,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.118.033,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.945.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.422.861.103,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.371.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.885.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.724.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.057.106,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.245.105,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.355.808,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.884.353,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.304.369,00	

Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.778.001,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.458.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.920.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.609.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.978.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.130.000,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.21.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Jumlah objek wisata		
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: terlaksananya event-event pariwisata daerah Terlaksanya Event-event pariwisata daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.020.000,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku usaha pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.791.600,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Jumlah pelaku usaha pariwisata		
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.039.250,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.24.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.824.353,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.720.671.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.591.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.692.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.221.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.232.200,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.775.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.828.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	3.099.074.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.322.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.800.000,00	

Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)		
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.414.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.622.740,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.032.145,00	
5.1.05	Belanja Hibah	279.102.160,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.528.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	514.129.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.959.180,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.255.745.820,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.160.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.028.770,00	
5.1.05	Belanja Hibah	198.571.230,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.040.000,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.734.500,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.404.200,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.725.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.233.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.04.0007 Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.695.000,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.110.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyuluhan pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.472.381.952,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.692.835,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.919.782,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.537.425,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.312.300,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.178.442.418,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.191.250,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.035.704,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	303.841.965,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.918.025,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.235.028,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.719.421,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.328.104,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.665.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.976.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.044.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.076.100,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.985.145,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.732.622.222,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.981.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan		
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan		
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.476.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.684.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.248.294.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.195.908.025,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.047.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.543.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan		
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.049.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.638.150,00	
5.1.05	Belanja Hibah	6.980.068.864,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.616.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	270.383.762,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan		
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota		

Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.247.131,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.970.833.400,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.720.302.998,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.899.350.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
Program	: 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya		
Kegiatan	: 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPenerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.839.000,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani		
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.148.946,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.948.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.893.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.412.750,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: [deleted]		
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.560.830,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.017.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.679.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	6.262.396.883,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.440.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.616.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.874.729,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.315.781,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.173.561,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.993.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.540.164,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.529.233,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.595.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.608.750,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.766.667,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.613.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.449.000,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
Unit Organisasi	: 3.30.3.31.0.00.26.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit		
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.516.000,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tanda Daftar Gudang yang terbit		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.180.000,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi cara Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.572.378,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik		
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.532.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.005.682.850,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan		
Kegiatan	: 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.307.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.307.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.245.196.000,00	
Kegiatan	: 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.402.000,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan volume penjualan produk		
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.551.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.717.022.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.643.000,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Persentase UTTP Bertanda Tera Sah		
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.483.740,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.414.300,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Jumlah Kemitraan Usaha		
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan Usaha		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.511.050,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.854.080,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.812.378,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.899,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.144.103.874,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.608.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.983.187,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.227.573,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.908.032,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.989.422,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.483.295,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.563.000,00	

Kegiatan	: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.611.680,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perdagangan dan Perindustrian		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.968.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.729.611.111,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.860.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.532.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.541.500,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah		
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Industri		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.725.042,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.610.544,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.894.650.494,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.193.977,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali		
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Pengawasan usaha industri		
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.749.000,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas		
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Informasi Industri yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.629.000,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.5.06.10.0000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.5.02.0.00.27.0000 Sekretariat Daerah		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten		
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.026.070.030,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.625.601,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.963.725,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
Indikator Keluaran	: Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagaamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.604.042.630,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.603.745,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.058.291.566,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.762.664,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.433.499,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.165.965,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.980.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.191.498,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.635.000,00	
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam		
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.868.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.043.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitasi Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.606.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.392.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Terlaksanannya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Terlaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Terlaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.717.950,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.468.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.342.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.834.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.722.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi		
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasni Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.932.015,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.861.993,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.712.528,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.985.081.075,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.969.992,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.567.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.130.540,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.493.101,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Khabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.888.373,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.509.200,00	
5.1.05	Belanja Hibah	220.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.888.885.643,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.514.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.228.875,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.771.125,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.276.392.564,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	979.453.050,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.915.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.422.175.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.064.275.373,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.140.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.877.627,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	756.976.792,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.544.533.480,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.027.837.234,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.982.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.663.483.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.082.094.250,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	357.788.640,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	600.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.493.512.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	806.487.620,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah TerlaKsananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	691.684.540,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.169.990,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.913.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: 0		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.937.643,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		

Indikator Keluaran	: Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhinya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.663.172.071,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.531.323,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.28.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.848.848.050,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.329.463,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.913.503,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.359.913.503,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		

Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.236.591.308,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.672.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	865.238.499,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.971.390.199,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.360.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.949.101.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.789.096.000,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.882.200,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.217.333,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.336.200,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.694.319.655,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.443.500,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.280.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.955.315,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.328.180,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.413.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	879.630.738,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.784.438,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.676.570,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.457.568.923,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.044.775.178,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.046.459,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.074.922.222,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.982.015,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.570.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.547.804.780,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.012.036.150,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000.000,00	
BELANJA DAERAH			

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD		
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.133.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.486.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	846.799.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.926.492,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.277.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.980.894,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.061.856,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.485.139,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan		
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.137.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.910.250,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.598.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.544.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.995.000,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.985.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.751.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.399.000,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.540.872,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.464.260,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.009.695.983,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.264.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.694.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.206.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.962.409,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.677.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.992.295,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.584,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.998.153,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.306.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.463.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.322.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.572.680,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.508.260,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	774.722.222,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terpeliharannya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung kantor		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.850.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan		
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.105.969.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.45.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah		
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan Penatausahan Perbendaharaan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.404.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.587.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.408.900,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.500.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.100.208,00	
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.997.200.620,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.544.780,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Data Aset Yang Akurat		
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.211.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.627.299,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.548.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.930.780,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.574.950,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.802.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

Indikator Hasil	: Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.054,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.979,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	11.779.470.311,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.691.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.096.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.740.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.417,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.328.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.682.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.995.070,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.173.790,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.852.810,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.632.095,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.784.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksankan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.301.488,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.444.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	970.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.528.990,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.165.560,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.46.0000 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.666.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.026.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.090.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	860.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.216.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	22.017.755.485,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.465.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.534.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.988.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.011.700,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.516.267,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	748.988.444,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.893.970,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.542.030,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.979.500,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.47.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Survey Kepuasan ASN		
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Pengelolaan Kenaikkan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Terlaksannya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.850,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.999.850,00	

Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.799.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.999.550,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.800,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.243.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.983.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.459.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.129.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.248.000,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.016.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.901.765.152,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersediannya jaminan barang milik daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.282.500,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.536.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.010.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Cetakan dan Persediaan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.023.558,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261.029.820,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.009.930,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.001.799,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.040.020,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.413.700,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.329.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.522.222,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.330.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.980.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.44.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]		
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersusunnya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.378.346,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.929.981,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.242.387,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.628.332,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.342.332,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.068.146,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat		
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.44.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Opini terhadap laporan keuangan pemda		
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Jumlah Unit Pelayanan Publik Kategori Baik		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	744.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.999.800,00	
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.999.900,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Nilai Maturitas SPIP Level Kapabilitas APIP Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA		
Kegiatan	: 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.999.900,00	

Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Nilai RB bernilai Baik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level 3		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.001.300,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan administrasi		
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.900,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	17.064.693.797,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.316.500,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.697.560,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.599.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.584.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum APIP		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.867.180,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.718.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.725.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.586.904,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.075.793,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.776.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.574.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.038.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.199.012,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.644.444,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.624.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.390.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN		
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN		
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.010.600,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.287.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.785.483,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah Terselenggarakan penegakan peraturan daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.929.730,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terselenggaranya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.695.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.585.642,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.702.260,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.195.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.205,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.587.594,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.909.071,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.023.558,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.039.208,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.037.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.421.530,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.317.600,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	767.941.778,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.045.880,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0001 Kelurahan Serasan Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.794.350,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.205.650,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.937,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0002 Kelurahan Soak Baru		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.035.249,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.964.750,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.999.949,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0003 Kelurahan Balai Agung		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.840.121,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.073.879,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.086.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.536.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.464.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.922.080,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.077.920,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Sekayu		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.29.0004 Kelurahan Kayuara		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.592.053,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.407.947,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Lais		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		

Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.987.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.187.805,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.235.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.076.912,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.875.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.636,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.628.509,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.197.452,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.735.180,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.958.784,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.950.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.940.832,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.521.599,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.960.444,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.904.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.420.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.723.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.251.105,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.992.520,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.007.361,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.372.082.864,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.355.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.989.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.855.292,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.016.075,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.997.851,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.910,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.374.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.762.632,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.336.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.905.467,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.723.860,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0001 Kelurahan Babat		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.270.064,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.729.680,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.208,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.648.380,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.351.419,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Babat Toman		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.31.0002 Kelurahan Mangun Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.129.321,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.870.508,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.999.769,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.647.750,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.351.419,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.918.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: terlaksananaya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.106.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimcam		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.015.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan dan Perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daera Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.965.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.812,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.986.569.938,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.998.436,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.600,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.388.094,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.981.554,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.794,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.996.080,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.141.948,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.190.667,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.130.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Keluang		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.32.0001 Kelurahan Keluang		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.929.709,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.999.550,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.593.088,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.477.528,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		

Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: persentase penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.500.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.524.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: ersentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.780.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.628.499,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.795.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.490.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.463.094.014,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.355.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Adminstrasi Umum Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.988.530,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.606.852,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.724.040,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.485.330,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.662.850,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.126.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.567.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.621.400,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.882.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0001 Kelurahan Ngulak I		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.588.543,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.374.605,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Sanga Desa		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.33.0002 Kelurahan Ngulak		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.708.288,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan		

Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.281.278,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Plakat Tinggi		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.224.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.776.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.894.204.525,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kemampuan aparatur		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.714.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.460.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.449,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.814.496,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.556,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.993.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.999.424,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.543.291,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.170.780,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.001.536,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.820.622,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Batanghari Leko		

Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	519.854.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.412.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.712.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa Yang dibina Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.292.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.291.490.536,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.328.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.941.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.275.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.887.285,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.998.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.986.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.012.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.250.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.429.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.321.333,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Sungai Keruh		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.300.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan PATEN Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.610.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya penegakan peraturan daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.006.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.006.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evalusai kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.166.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya adminstrasi keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.267.058.537,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.372.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.355.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.081.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.155.930,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.229.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.049.972,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.244.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.230.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.129.058,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.506.489,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.062.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	537.584.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.176.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.340.579.804,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.133.744,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	702.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.027.335,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.279.052,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.037.397,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.628.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.880.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.983.511,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhanan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.851.620,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.466.933,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.860.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0001 Kelurahan Sungai Lilin		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.364.550,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.635.450,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.083.090,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	283.916.910,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Sungai Lilin		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.37.0002 Kelurahan Sungai Lilin Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		

Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.462.354,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.537.646,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.125.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.875.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.347.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan terlasananya pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.182.600,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terlaksananya penegakan peraturan kepala daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan (Bayung Lencir Terlaksananya Forkopimda tingkat Kecamatan		

Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase jumlah desa yang dibina terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.565.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: peresentase kualitas pelayanan masyarakat		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggara nya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daera Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.847.999.918,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terselenggaran ya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.460.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.936.150,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.914.451,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.001.090,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.980.758,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.976.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.433.407,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.115.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.328.800,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.774.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.620.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0001 Kelurahan Bayung Lencir		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.727.065,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.272.477,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.755.919,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.281.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	345.981.052,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.996.000,00	

Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Bayung Lencir		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.38.0002 Kelurahan Bayung Lencir Indah		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.213.415,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.760.764,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.835.976,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.158.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.949.700,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Lalan		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.380.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.290.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		

Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinnerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.591.798.099,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.582.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.230.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.074.100,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.093.900,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.967.020,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.929.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.124.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.630.167,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.141.867,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.823.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Tungkal Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintaj di tingkat kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.236.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Penyelenggaraaan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.375.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelenggaraan kegiatan koordinasi penerapan perda		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya) Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Jumlah Desa Yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.929.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan penganggran evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.797.550,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.906.825,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.467.078.162,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.925.065,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.783.927,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.757.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.992.545,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.768.328,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.592.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.874.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.885.960,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.916.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.914.400,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase saranan dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.710.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Lawang Wetan		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	:		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	:		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa yang Dibina Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.510.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.792.156.872,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawaian		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.218.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.696.998,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.268.056,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.089.356,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.016.661,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.982.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.640.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.765.200,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.798.325,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.417.244,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.530.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Babat Supat		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.852.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.099.200,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda		
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.747.000,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase Jumlah Desa yang dibina		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.948,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.979.448.753,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.959.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.927,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.356.968,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.874,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.683.349,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.043.720,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.319.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.330.261,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Pemunuhan Layanan Administrasi		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.626.244,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.960.444,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.792.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.590.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya		
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Jirak Jaya		
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)		
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.354.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.031.000,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak		
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Terselenggarakan penegakan peraturan daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.480.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Indikator Hasil	: Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)		
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Penyelenggaraan Forkompinda tingkat kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan		
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.815.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya		
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase layanan dan perkantoran		
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.206.893.144,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kemampuan aparatur Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.824.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.893.483,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.050.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.275.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.691.920,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.098.578,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 1.05.8.01.0.00.06.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa		
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.815.870.270,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.887.365,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.201.000,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik		
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	6.521.458.372,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.139.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.250.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina		
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.062.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.937.890,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial		
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran		
Kegiatan	: 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.412.700,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	4.848.069.653,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Kendaraan Dinas Operasional yang di Asuransikan Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.902.500,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.638.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.490.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.389.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.040.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.692.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.876.200,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.077.778,00	

Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.910.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.258.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	**URAIAN**	**JUMLAH**	**DASAR HUKUM**
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	0,65 % 1 % 100 % 101,18 % 107,56 % 61,2 % 61,20 % 70,81 % 97,42 % 99,9 % 99,90 %							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-							
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	3.364.900.000,00	0,00	0,00	3.364.900.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	337.050.000,00	0,00	0,00	337.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
4	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	450.000.000,00	2.784.000.000,00	0,00	0,00	3.234.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	1.889.300.000,00	0,00	0,00	1.889.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
7	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	180 Peserta Didik	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
8	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1092 Orang	1.579.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.579.082.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
9	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	479 Satuan Pendidikan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
10	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1004 Orang	341.066.850,00	0,00	0,00	0,00	341.066.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
11	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	200.000.000,00	4.825.386.200,00	0,00	0,00	5.025.386.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
12	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	485 Satuan Pendidikan	506.850.000,00	0,00	0,00	0,00	506.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
13	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	970.487.000,00	1.916.713.750,00	0,00	0,00	2.887.200.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
14	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	0,00	3.387.500.000,00	0,00	0,00	3.387.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-							
15	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	1.107.450.000,00	0,00	0,00	1.107.450.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
16	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	350.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
17	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	350.000.000,00	568.187.050,00	0,00	0,00	918.187.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
18	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah									
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
19	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	481.950.000,00	0,00	0,00	481.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
20	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
21	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1040 Peserta Didik	472.600.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
22	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1563 Orang	1.055.787.200,00	0,00	0,00	0,00	1.055.787.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
23	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162 Satuan Pendidikan	1.734.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
24	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	346 Orang	152.648.700,00	0,00	0,00	0,00	152.648.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
25	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	630 Satuan Pendidikan	199.999.700,00	0,00	0,00	0,00	199.999.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
26	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	600.000.000,00	828.203.581,00	0,00	0,00	1.428.203.581,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Penerimaan Pembiayaan
27	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	100.000.000,00	1.912.500.000,00	0,00	0,00	2.012.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,20 % 23 % 100 %							
28	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	910.000.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
29	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD									
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
30	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	723.310.800,00	0,00	0,00	0,00	723.310.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
31	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	482 Satuan Pendidikan	1.290.583.700,00	0,00	0,00	0,00	1.290.583.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
32	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD									
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	89.916.600,00	0,00	0,00	0,00	89.916.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
34	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 Paket	49.547.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	324.547.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
35	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	460 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
36	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	61,20 % 100 %							
37	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	446.083.600,00	0,00	0,00	0,00	446.083.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
38	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 Orang	22.980.200,00	0,00	0,00	0,00	22.980.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi	100 %							
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
39	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	99.999.700,00	0,00	0,00	0,00	99.999.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
42	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6450 Orang/bulan	550.078.483.467,00	0,00	0,00	0,00	550.078.483.467,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
43	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
44	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	88.998.000,00	0,00	0,00	0,00	88.998.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
45	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	97.385.000,00	0,00	0,00	0,00	97.385.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
46	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.993.640,00	0,00	0,00	0,00	29.993.640,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
47	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	199.191.500,00	0,00	0,00	199.191.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
48	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
49	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
51	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
52	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
53	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
54	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	442.800.000,00	0,00	0,00	0,00	442.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	100.632.000,00	0,00	0,00	100.632.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
56	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.040.582.400,00	0,00	0,00	0,00	3.040.582.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	55.101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.101.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
58	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	535.499.600,00	0,00	0,00	0,00	535.499.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	730.608.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	2.230.608.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
60	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	139.787.000,00	0,00	0,00	0,00	139.787.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Pembinaan Sanggar/Komunitas Seni Budaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11 Kali 15 Kelompok 45 Orang 5 Kali							
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesenian Tradisional yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya	100 % 11 Kali							
61	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang	326.408.000,00	0,00	0,00	0,00	326.408.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
62	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	2.134.491.850,00	199.100.000,00	0,00	0,00	2.333.591.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
63	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	365 Sertifikat	868.250.000,00	0,00	0,00	0,00	868.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15 Unit 25 % 73 %							
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan	73 % 100 %							
64	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	10 Dokumen	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	34 % 68 Unit							
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Meningkatnya Kualitas Cagar Budaya	68 % 100 %							
65	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	7 Objek	299.995.000,00	0,00	0,00	0,00	299.995.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Jumlah Koleksi Penyelenggaraan Kegiatan yang di laksanakan di Museum Jumlah Kunjungan	394 Unit 446 Unit 5 Kali 6838 Orang							
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi Meningkatnya Penegelolaan dan Pemanfaatan Museum	394 Unit 100 %							
66	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	215.716.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	345.716.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100 %							
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 % 100 %							
67	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	6.105.969.000,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %								
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE FASYANKES YANG MEMIIKI FASILITASPELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP SESUAI STANDAR Persentase Fasyankes yang memiliki Fasilitasi Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %							
68	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	2.830.000,00	497.170.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
69	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	2.040.000,00	2.097.960.000,00	0,00	0,00	2.100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
70	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	5.330.000,00	1.567.300.400,00	0,00	0,00	1.572.630.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
71	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	5.030.000,00	994.970.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
72	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	5.390.000,00	894.610.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
73	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	0,00	142.178.850,00	0,00	0,00	142.178.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	103 Paket	8.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	348 Paket	321.000.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR Persentase Peyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai dengan standar	100 % 100 %							
77	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	85.884.666,00	0,00	0,00	0,00	85.884.666,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14519 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	109.256.000,00	0,00	0,00	0,00	109.256.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
80	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69074 Orang	136.505.000,00	0,00	0,00	0,00	136.505.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
81	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	74.232.000,00	0,00	0,00	0,00	74.232.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58 Orang	83.673.000,00	0,00	0,00	0,00	83.673.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29 Orang	46.778.000,00	0,00	0,00	0,00	46.778.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
84	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121228 Orang	84.493.000,00	0,00	0,00	0,00	84.493.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
85	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36283 Orang	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00	36.240.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
86	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1368 Orang	49.980.000,00	0,00	0,00	0,00	49.980.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11295 Orang	57.865.000,00	0,00	0,00	0,00	57.865.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
88	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	18156 Orang	62.040.000,00	0,00	0,00	0,00	62.040.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
89	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	199.983.000,00	0,00	0,00	0,00	199.983.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
90	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	122.390.500,00	0,00	0,00	0,00	122.390.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
91	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	48.430.000,00	0,00	0,00	0,00	48.430.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
92	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	92.207.000,00	0,00	0,00	0,00	92.207.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
94	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	34.262.000,00	0,00	0,00	0,00	34.262.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
95	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	69.030.000,00	0,00	0,00	0,00	69.030.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
96	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	298.293.900,00	0,00	0,00	0,00	298.293.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
97	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	42.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
98	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	105.301.900,00	0,00	0,00	0,00	105.301.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
99	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	2.879.633.527,00	785.105.127,00	0,00	0,00	3.664.738.654,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	69.595.000,00	0,00	0,00	0,00	69.595.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
101	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2092 Orang	49.064.000,00	0,00	0,00	0,00	49.064.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
102	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115 Orang	51.489.000,00	0,00	0,00	0,00	51.489.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
103	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	58.892.000,00	0,00	0,00	0,00	58.892.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
104	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	33.820.000,00	0,00	0,00	0,00	33.820.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	40 Aplikasi							
105	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	155.968.000,00	0,00	0,00	0,00	155.968.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
106	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	33 Unit	470.009.000,00	0,00	0,00	0,00	470.009.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	80 % 87 %							
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Berjalan PERSENTASE IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN YANG BERJALAN	100 % 100 %							
107	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	39.695.000,00	0,00	0,00	0,00	39.695.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Profil SDMK JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DAN PROFIL SDMK	1 Dokumen 1 DOKUMEN							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	283.398.000,00	0,00	0,00	0,00	283.398.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi PERSENTASE SDM KESEHATAN YANG MENGIKUTI KEGIATAN PENINGKATAN KOPETENSI	80 % 80 %							
109	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	505 Orang	594.501.700,00	0,00	0,00	0,00	594.501.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	50 %							
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik serta UMOT yang memiliki izin	90 Persentase 100 %							
110	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah tangga Persentase IRTP yang memiliki sertifikat	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen	64.720.000,00	0,00	0,00	0,00	64.720.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	" Jumlah TPM, jasa boga, rumah makan, dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene Jumlah TPM, Jasa Boga, Rumah Makan dan DAM yang mempunyai sertifikat laik higiene "	30 Unit							
112	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60 Dokumen	98.317.000,00	0,00	0,00	0,00	98.317.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	214.942 Keluarga							
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN	3 Dokumen 3 DOKUMEN							
113	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	91.912.000,00	0,00	0,00	0,00	91.912.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN PROMOSI KESEHATAN ADVOKASI KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Dokumen							
114	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	87.928.000,00	0,00	0,00	0,00	87.928.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 % 100 %							
115	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	86.014.980,00	0,00	0,00	0,00	86.014.980,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JUMLAH KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI TAHUNAN YANG DISUSUN SESUAI PEDOMAN YANG BERLAKU Persenatase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 DOKUMEN 100 %							
116	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
117	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
118	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	84.156.000,00	0,00	0,00	0,00	84.156.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persenatse Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100 % 100 %							
119	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5044 Orang/bulan	239.768.555.073,00	0,00	0,00	0,00	239.768.555.073,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100 %							
120	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	79.441.000,00	0,00	0,00	0,00	79.441.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
121	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100 %							
122	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	283.322.000,00	0,00	0,00	0,00	283.322.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
123	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	160 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100 % 100 %							
124	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
125	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	59.994.100,00	0,00	0,00	0,00	59.994.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
126	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
127	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
128	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	74.996.000,00	0,00	0,00	0,00	74.996.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
130	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 % 100 %							
131	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1.297.260,00	98.702.740,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenatse Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
132	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.624.287.120,00	0,00	0,00	0,00	1.624.287.120,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
133	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.663.371,00	198.336.629,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
134	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.269.332.489,00	0,00	0,00	0,00	24.269.332.489,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
135	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	696.660.000,00	0,00	0,00	0,00	696.660.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
136	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	189.992.000,00	0,00	0,00	0,00	189.992.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.890.000,00	0,00	0,00	0,00	69.890.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen							
138	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.212.500.000,00	287.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.437.500.000,00	4.312.500.000,00	0,00	0,00	28.750.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan Prevalensi stunting pada balita Jumlah Opersaional Pelayanan Puskesmas Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama Angka kematian bayi Angka kematian ibu Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat Persentase ketersediaan obat essensial Persentase ketersediaan BMHP	100 % 10 Dokumen 12 Dokumen 13 % 29 PKM 2 Dokumen 3 RS 40 Aplikasi 4 PKM 5/1000 KH 52/100000 KH 95 % 96 % 98 %							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UKM DAN UKP RUJUKAN SESUAI DENGAN STANDAR	100 %							
140	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	2.144.616.728,00	355.383.272,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	33 UNIT							
141	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	22.480.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Ngulak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
142	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.007.905.000,00	280.940.000,00	0,00	0,00	2.288.845.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Babat Toman									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
143	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.396.536.200,00	266.281.800,00	0,00	0,00	2.662.818.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Puskesmas Ulak Paceh									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
144	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.262.565.700,00	399.276.300,00	0,00	0,00	2.661.842.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Tanah Abang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
145	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Lubuk Bintialo									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
146	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	730.150.000,00	128.850.000,00	0,00	0,00	859.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Lubuk Bintialo Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Sako Suban Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Pangkalan Bulian	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Bukit Selabu									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
147	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	513.126.400,00	128.281.600,00	0,00	0,00	641.408.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Bukit Selabu	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Cinta Karya									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit							
148	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.024.835.800,00	176.078.200,00	0,00	0,00	1.200.914.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sungai Medak Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sungai Batang Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Rimba Ukur Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Ulu Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sialang Agung Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Cinta Karya Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Air Putih Ilir Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Talang Piase	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Suka Damai									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	862.541.600,00	215.635.400,00	0,00	0,00	1.078.177.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sido Rahayu									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
150	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	829.864.574,00	202.680.426,00	0,00	0,00	1.032.545.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Tebing Bulang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	undefined	1 Tahun							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	undefined	1 Tahun							
151	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.058.749.300,00	363.308.700,00	0,00	0,00	2.422.058.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Jirak									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL undefined	100 % 29 PKM 3 RS undefined undefined							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit							
152	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.381.756.800,00	22.506.200,00	0,00	0,00	1.404.263.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Balai Agung									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 1 unit 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit							
153	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.284.530.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	3.734.530.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Sukarami	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Lumpatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
154	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.475.768.000,00	373.550.000,00	0,00	0,00	2.849.318.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bailangu Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Muara Teladan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bandar Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan 2 Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Baliangu Timur	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Puskesmas Lais									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
155	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.514.506.768,00	268.627.732,00	0,00	0,00	2.783.134.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Gardu Harapan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
156	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	792.535.500,00	139.860.000,00	0,00	0,00	932.395.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Tanjung Agung Barat	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Teluk Kijing									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
157	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.109.355.280,00	151.275.720,00	0,00	0,00	1.260.631.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Rantau Keroya Kab. Musi Banyuasin, Lais, Petaling Kab. Musi Banyuasin, Lais, Teluk Kijing I Kab. Musi Banyuasin, Lais, Teluk Kijing II	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Tanjung Kerang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
158	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.552.361.800,00	156.805.000,00	0,00	0,00	1.709.166.800,00	[object Object]	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sungai Lilin									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	100 % 29 PKM 3 RS							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
159	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.647.935.700,00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.947.935.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sri Gunung									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit							
160	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.177.957.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	1.308.207.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sri Gunung	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Karya Maju									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dilaksanakan dengan tepat Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 100 % 29 PKM 29 PKM 3 RS 3 RS							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	33 UNIT 32 Unit							
161	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.620.413.157,00	201.100.843,00	0,00	0,00	1.821.514.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Mekar jaya									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
162	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	841.397.400,00	93.488.600,00	0,00	0,00	934.886.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Bayung Lencir									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
163	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.029.028.000,00	660.342.000,00	0,00	0,00	4.689.370.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Puskesmas Suka Jaya									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	32 Unit							
164	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.253.372.516,00	219.640.484,00	0,00	0,00	1.473.013.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Sukajaya	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Peninggalan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
165	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	28 Unit Kerja	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Sumber Harum									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.065.623.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	1.190.623.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Sumber Harum	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Berojaya Timur									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	100 % 1 PKM							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit							
167	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	912.397.500,00	101.377.500,00	0,00	0,00	1.013.775.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Beji Mulyo Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Pandan Sari Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Margo Mulyo	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Bandar Agung									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
168	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	959.859.950,00	169.387.050,00	0,00	0,00	1.129.247.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Agung Jaya Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Bumi Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Jaya Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Suka Makmur Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Mandala Sari Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Bandar Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Sari Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Sri Gading Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Suka Jadi	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Karang Mukti									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							
169	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.556.339.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	1.780.339.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Rejo Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Makmur Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Perumpung Raya Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Galih Sari Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Tirta Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Purwo Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karya Mukti Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Sri Karang Rejo Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Mekar Sari Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Sari Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Mulya Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Mukti Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Madya Mulya Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Mulya Jaya Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Sari Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Ringin Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Tri Mulya Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Mekar Jaya	Pendapatan dari BLUD
		Puskesmas Air Balui									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Keuangan, Aset dan Barang Milik Dearah (BMH) tepat waktu Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKRTL	100 % 29 PKM 3 RS							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	JUMLAH PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1 UNIT							
170	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	544.737.150,00	60.526.350,00	0,00	0,00	605.263.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-							
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
171	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.600.359.929,00	4.399.640.000,00	0,00	0,00	9.999.999.929,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Perkantoran	100 %							
172	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	140.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	65 %							
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik	65 % 65 %							
173	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	12 Unit	2.085.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
174	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
175	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai									
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
176	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	5 Lembaga	565.000.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
177	1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Lembaga	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
179	1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau									
			Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Danau	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
180	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi									
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
181	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai									
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	76800 KM	3.997.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.997.010.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
182	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.5 KM	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
183	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing									
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.500 KM	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
184	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	27.885.000,00	872.115.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
186	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	8 Unit	85.735.200,00	4.504.264.800,00	0,00	0,00	4.590.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
187	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir									
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
188	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
189	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase jaringan irigasi, sungai dan penampung air lainnya dalam kondisi baik	65 % 65 %							
190	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 KM	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
191	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	76,52 %							
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap	76,52 %							
192	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan									
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	3 Dokumen	3.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
193	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	4.284.000.010,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000.010,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
194	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa									
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	100 KM	332.597.500,00	97.402.500,00	0,00	0,00	430.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
195	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	1000 KM	3.660.805.000,00	218.495.167.894,00	0,00	0,00	222.155.972.894,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
196	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	10 Jembatan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
197	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	10 Jembatan	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
198	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan									
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	524.310.000,00	39.636.699.827,00	0,00	0,00	40.161.009.827,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
199	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	1.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
200	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
201	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	30.450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.450.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	[deleted] Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	40 %							
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya Tenaga Konstruksi yang terampil dan bersertifikat	200 Orang							
202	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	200 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
203	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
204	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI									
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
205	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi									
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	40 %							
206	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1000 Paket Pekerjaan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
207	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi									
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	82 %							
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase terlaksananya Perencanaan Tata Ruang Daerah	82 % 100 %							
209	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota									
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.845.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
210	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang									
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	30 Orang	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %							
211	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	210 Layanan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
212	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang									
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
213	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	825.000.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan dan kesesuaian pemanfaatan ruang	82 %							
214	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
215	1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
216	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
217	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR									
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
218	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang									
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Rimba Ukur	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %							
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	5 Dokumen							
219	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
220	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
221	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	54.860.667,00	0,00	0,00	0,00	54.860.667,00	[object Object]	Pajak Daerah
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan							
222	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	14.364.480.153,00	0,00	0,00	0,00	14.364.480.153,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlindunginya Kendaraan Dinas dan tersertifikasinya Aset Tanah bawah jalan	1 Dokumen							
223	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian dinas dan attribut lainnya serta jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	96 Orang							
224	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	75.484.000,00	0,00	0,00	0,00	75.484.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
226	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
227	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	331.561.329,00	0,00	0,00	331.561.329,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
228	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
229	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
230	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
231	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
233	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis							
234	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2.989.330,00	97.010.670,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran Terpenuhinya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	2 Dokumen 12 Bulan							
235	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.424.807.346,00	0,00	0,00	0,00	14.424.807.346,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
236	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.769.413.333,00	0,00	0,00	0,00	2.769.413.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	19 Unit							
237	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	646.970.000,00	0,00	0,00	0,00	646.970.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
238	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	276.878.000,00	0,00	0,00	0,00	276.878.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
239	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	111 Unit	108.872.120,00	0,00	0,00	0,00	108.872.120,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lampu jalan dalam kondisi baik	88,73 %							
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Lampu Jalan dalam Kondisi Baik	88.73 %							
240	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	395 Unit	416.118.000,00	7.653.882.000,00	0,00	0,00	8.070.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
241	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	3900 Unit	9.422.952.000,00	27.048.000,00	0,00	0,00	9.450.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	90 %							
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Perpipaan)	90 %							
242	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	60 Unit	6.495.004.600,00	0,00	0,00	0,00	6.495.004.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
243	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	2.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	90 %							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	90 %							
244	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja									
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	42.160.000,00	0,00	0,00	0,00	42.160.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
245	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	2 Penyelenggara	99.434.000,00	0,00	0,00	0,00	99.434.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
246	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	5 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
247	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	477.570.200,00	0,00	0,00	0,00	477.570.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
248	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	3062 Rumah Tangga	8.842.902.712,00	0,00	0,00	0,00	8.842.902.712,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,83 %							
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	87,33 % 87,83 %							
249	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan									
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	99843 M	780.180.000,00	17.258.585.186,00	0,00	0,00	18.038.765.186,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
250	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	85 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani Persentase Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	85 % 85 %							
251	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	97 Dokumen	50.820.885.088,00	37.030.367.150,00	0,00	0,00	87.851.252.238,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
252	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	40 %							
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangan	40 %							
253	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	150 Dokumen	2.987.632.400,00	0,00	0,00	0,00	2.987.632.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	75 %							
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	537 Unit							
254	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	32 Unit Rumah	460.000.000,00	4.975.523.050,00	0,00	0,00	5.435.523.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksana nya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi	100 %							
255	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %							
256	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus									
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1 Unit	80.000.000,00	2.319.610.400,00	0,00	0,00	2.399.610.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	75 %							
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	75 %							
257	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	376 Unit Rumah	19.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.710.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Yang dibangun / direhab	32 %							
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	n Persentase PSU Yang dibangun / direhab	36 %							
258	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian									
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	73 Lokasi	1.805.249.000,00	48.827.837.756,00	0,00	0,00	50.633.086.756,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
259	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang									
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100 %							
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
260	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
261	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
262	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	40 Data	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
263	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.192.841.256,00	0,00	0,00	0,00	8.192.841.256,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PersentaseterlaksananyaKegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
264	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	92.295.000,00	0,00	0,00	0,00	92.295.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
265	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	48.548.000,00	0,00	0,00	0,00	48.548.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
266	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
267	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
268	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
269	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
270	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	66 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
272	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
273	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
274	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
275	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
276	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	552.000.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
277	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.013.729.545,00	0,00	0,00	0,00	1.013.729.545,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
278	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	649.100.200,00	0,00	0,00	0,00	649.100.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	139.454.000,00	105.745.150,00	0,00	0,00	245.199.150,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
280	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	67.601.120,00	0,00	0,00	0,00	67.601.120,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	94,4 % 94.4 %							
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	94,4 % 94.4 %							
281	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	11 Dokumen	285.880.000,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	9.900.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
282	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100 %							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Data Kebencanaan yang Akurat	100 %							
283	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	102.637.550,00	0,00	0,00	0,00	102.637.550,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Koordinasi & pengendalian, Desa Siaga Bencana dan Kesiapsiagaan Petugas	100 %							
284	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	224 Unit	53.750.000,00	1.523.157.321,00	0,00	0,00	1.576.907.321,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1300 Orang	234.323.000,00	0,00	0,00	0,00	234.323.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
286	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	22 Orang	187.660.000,00	0,00	0,00	0,00	187.660.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
287	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	930.623.000,00	0,00	0,00	0,00	930.623.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan Data Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %							
288	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas									
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	51.850.000,00	0,00	0,00	0,00	51.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
289	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	950.810.000,00	0,00	0,00	0,00	950.810.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
290	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	80 Orang	102.950.000,00	0,00	0,00	0,00	102.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
291	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80 Orang	154.954.700,00	0,00	0,00	0,00	154.954.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
292	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit									
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	51.700.000,00	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
293	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	833.760.000,00	0,00	0,00	0,00	833.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %							
294	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana									
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 Laporan	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
295	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	449.741.000,00	0,00	0,00	0,00	449.741.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	210.080.500,00	0,00	0,00	0,00	210.080.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
297	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
298	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.872.000,00	0,00	0,00	0,00	19.872.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
299	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	49.934.214,00	0,00	0,00	0,00	49.934.214,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran	100 %							
300	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.009.985.878,00	0,00	0,00	0,00	4.009.985.878,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah perkantoran	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	185.375.000,00	0,00	0,00	0,00	185.375.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
302	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.418.560,00	0,00	0,00	0,00	35.418.560,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
303	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	149.867.000,00	0,00	0,00	0,00	149.867.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran	100 %							
304	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.958.300,00	0,00	0,00	0,00	19.958.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
305	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	148.568.678,00	0,00	0,00	149.248.678,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
306	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.946.458,00	0,00	0,00	0,00	39.946.458,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
307	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.991.994,00	0,00	0,00	0,00	149.991.994,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
308	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.981,00	0,00	0,00	0,00	85.000.981,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
309	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
310	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
311	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	150.130.000,00	0,00	0,00	0,00	150.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %							
312	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	680.000,00	78.248.340,00	0,00	0,00	78.928.340,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
313	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	198.640.000,00	0,00	0,00	199.320.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Perkantoran	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	302.164.790,00	0,00	0,00	0,00	302.164.790,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
315	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.006.811.111,00	0,00	0,00	0,00	2.006.811.111,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
316	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	1.019.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019.450.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
317	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.792.000,00	0,00	0,00	0,00	149.792.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
318	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	24.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Satuan Polisi Pamong Praja									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
319	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	196.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
320	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	98.846.000,00	0,00	0,00	0,00	98.846.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
321	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	391 Orang	165.557.000,00	0,00	0,00	0,00	165.557.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
322	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	176.850.000,00	0,00	0,00	0,00	176.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
323	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan									
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	4 Orang	145.886.000,00	0,00	0,00	0,00	145.886.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	40 Orang	276.950.000,00	0,00	0,00	0,00	276.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
325	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	421.425.000,00	0,00	0,00	0,00	421.425.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
326	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan	47.416.000,00	0,00	0,00	0,00	47.416.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
327	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah									
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	230.520.000,00	0,00	0,00	0,00	230.520.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
328	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	110 Unit	767.513,00	37.947.737,00	0,00	0,00	38.715.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %							
329	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	88.973.460,00	0,00	0,00	0,00	88.973.460,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
330	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	54.912.000,00	0,00	0,00	0,00	54.912.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
331	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	541.900.000,00	0,00	0,00	0,00	541.900.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1 orang setiap RT							
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %							
332	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	40 Orang	44.843.040,00	0,00	0,00	0,00	44.843.040,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %							
333	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	490.982.000,00	0,00	0,00	0,00	490.982.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
334	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40 Orang	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85 %							
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	100 %							
335	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	643.389.000,00	0,00	0,00	0,00	643.389.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
336	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	0,00	4.355.000.000,00	0,00	0,00	4.355.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilakukan sangat tepat	100 %							
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
337	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	66.985.000,00	0,00	0,00	0,00	66.985.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
338	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	38.448.000,00	0,00	0,00	0,00	38.448.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
339	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	32.328.000,00	0,00	0,00	0,00	32.328.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
340	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	11.702.794.937,00	0,00	0,00	0,00	11.702.794.937,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
341	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	121.093.250,00	0,00	0,00	0,00	121.093.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
342	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	132.758.900,00	0,00	0,00	0,00	132.758.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
343	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	93.851.000,00	0,00	0,00	0,00	93.851.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							
344	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.397.874,00	0,00	0,00	0,00	8.397.874,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
345	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.973.000,00	196.936.034,00	0,00	0,00	208.909.034,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
346	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	52.808.486,00	0,00	0,00	0,00	52.808.486,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
347	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	161.603.223,00	0,00	0,00	0,00	161.603.223,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
348	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.138.871,00	0,00	0,00	0,00	113.138.871,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
349	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
350	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.080.000,00	0,00	0,00	0,00	15.080.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
351	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	212.042.000,00	0,00	0,00	0,00	212.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
352	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	67.350.888,00	0,00	0,00	0,00	67.350.888,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
353	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.935.011.111,00	0,00	0,00	0,00	6.935.011.111,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
354	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	84.230.000,00	0,00	0,00	0,00	84.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
355	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.121.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
356	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	94.662.862,00	0,00	0,00	0,00	94.662.862,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
357	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	78 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %							
358	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	1.815.870.270,00	0,00	0,00	0,00	1.815.870.270,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
359	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	334 Orang	209.887.365,00	0,00	0,00	0,00	209.887.365,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
360	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	24.201.000,00	0,00	0,00	0,00	24.201.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %							
361	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	6.521.458.372,00	0,00	0,00	0,00	6.521.458.372,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
362	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	150.139.000,00	0,00	0,00	0,00	150.139.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
363	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	151.340.000,00	0,00	0,00	0,00	151.340.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
364	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	498.250.000,00	0,00	0,00	0,00	498.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100 %							
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %							
365	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	150.062.000,00	0,00	0,00	0,00	150.062.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %							
366	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	399.937.890,00	0,00	0,00	0,00	399.937.890,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100 %							
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %							
367	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	84.250.000,00	0,00	0,00	0,00	84.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
368	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	130.750.000,00	0,00	0,00	0,00	130.750.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
369	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
370	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %							
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %							
371	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
372	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
373	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	36.412.700,00	0,00	0,00	0,00	36.412.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan 100 %							
374	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.848.069.653,00	0,00	0,00	0,00	4.848.069.653,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kendaraan Dinas Operasional yang di Asuransikan Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	5 Unit 100 %							
375	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	36.902.500,00	0,00	0,00	0,00	36.902.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100 %							
376	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.230.000,00	0,00	0,00	0,00	34.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
377	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	92.250.000,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							
378	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	27.638.100,00	0,00	0,00	0,00	27.638.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
379	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	197.490.800,00	0,00	0,00	197.490.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
380	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
381	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
382	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
383	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
384	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	44.389.200,00	0,00	0,00	0,00	44.389.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	335.040.000,00	0,00	0,00	0,00	335.040.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 % 100 %							
386	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	108.692.000,00	0,00	0,00	108.692.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100 %							
387	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.876.200,00	0,00	0,00	0,00	131.876.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
388	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	349.077.778,00	0,00	0,00	0,00	349.077.778,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
389	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	246.910.000,00	0,00	0,00	0,00	246.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	142.258.000,00	0,00	0,00	0,00	142.258.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
391	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	14.640.000,00	0,00	0,00	0,00	14.640.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Dinas Sosial									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Layanan Persentase PMKS yang mendapat Layanan	79 % 79,00 %							
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Sosial (KAT)	100 %							
392	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT									
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Keluarga	175.107.000,00	0,00	0,00	0,00	175.107.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
393	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8 Dokumen	11.222.000,00	0,00	0,00	0,00	11.222.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	76 Orang	378.631.000,00	0,00	0,00	0,00	378.631.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
395	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	9.551.495.000,00	0,00	0,00	0,00	9.551.495.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
396	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	292 Keluarga	1.702.695.670,00	0,00	0,00	0,00	1.702.695.670,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
397	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	1.400.050.700,00	0,00	0,00	0,00	1.400.050.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
398	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)									
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	60.305.000,00	0,00	0,00	0,00	60.305.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Serta Gepeng di Luar	100 %							
399	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	486 Orang	1.711.924.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.924.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
400	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	403.292.700,00	0,00	0,00	0,00	403.292.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	76,45 %							
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %							
401	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	342.959.800,00	0,00	0,00	0,00	342.959.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
402	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10300 Keluarga	47.002.853.721,00	41.250.000,00	0,00	0,00	47.044.103.721,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %							
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	367.767.000,00	0,00	0,00	0,00	367.767.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA	100 %							
404	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	809.948.000,00	0,00	0,00	0,00	809.948.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI	100 %							
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PD	100 %							
405	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.811.000,00	0,00	0,00	0,00	66.811.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
406	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	19.320.000,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
407	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	26 Data	44.852.000,00	0,00	0,00	0,00	44.852.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PD	100 %							
408	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.251.712.975,00	0,00	0,00	0,00	6.251.712.975,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	100 %							
409	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.778.000,00	0,00	0,00	0,00	40.778.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
410	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	97.543.000,00	0,00	0,00	0,00	97.543.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE ADMINISTRASI UMUM PD	100 %							
411	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.075.000,00	0,00	0,00	0,00	27.075.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
412	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.331.000,00	178.690.000,00	0,00	0,00	187.021.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
413	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	40.485.200,00	19.511.000,00	0,00	0,00	59.996.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
414	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.513.750,00	0,00	0,00	0,00	177.513.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
415	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.329.675,00	0,00	0,00	0,00	101.329.675,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
416	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
417	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	49.132.500,00	0,00	0,00	0,00	49.132.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
418	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 Laporan	250.004.000,00	0,00	0,00	0,00	250.004.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD	100 %							
419	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	0,00	99.360.000,00	0,00	0,00	99.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PD	100 %							
420	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.675.440,00	0,00	0,00	0,00	113.675.440,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
421	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	957.854.756,00	0,00	0,00	0,00	957.854.756,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PD	100 %							
422	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	281.330.000,00	0,00	0,00	0,00	281.330.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
423	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.940.000,00	0,00	0,00	0,00	149.940.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
424	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	69.280.000,00	0,00	0,00	0,00	69.280.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen							
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 % 100 %							
425	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro									
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	418.587.050,00	0,00	0,00	0,00	418.587.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	90 %							
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlatihnya Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	100 %							
426	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	3.366.572.000,00	0,00	0,00	0,00	3.366.572.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
427	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Unit	69.894.600,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	1.158.246.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja Kab. MUBA Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
428	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	119.962.000,00	0,00	0,00	0,00	119.962.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pekerja yang ditempatkan	45,80 %							
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Layanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	100 % 100 %							
429	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan									
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang	257.679.925,00	0,00	0,00	0,00	257.679.925,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Terpenuhinya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 % 100 %							
430	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	51.928.000,00	0,00	0,00	0,00	51.928.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
431	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	273.501.000,00	0,00	0,00	0,00	273.501.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
432	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja									
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	304.823.700,00	0,00	0,00	0,00	304.823.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
433	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	90.102.900,00	0,00	0,00	0,00	90.102.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	5,4 % 56 %							
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
434	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	337.940.000,00	0,00	0,00	0,00	337.940.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HUbungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab. Muba Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
435	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	228.034.000,00	0,00	0,00	0,00	228.034.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
436	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	177.129.000,00	0,00	0,00	0,00	177.129.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %							
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
437	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.360.000,00	0,00	0,00	0,00	62.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
438	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.320.000,00	0,00	0,00	0,00	19.320.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
439	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	40.619.000,00	0,00	0,00	0,00	40.619.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
440	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.607.708.665,00	0,00	0,00	0,00	5.607.708.665,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
441	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	17.590.000,00	0,00	0,00	0,00	17.590.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
442	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	37.164.000,00	0,00	0,00	0,00	37.164.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
443	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	112.355.000,00	0,00	0,00	0,00	112.355.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
444	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.963.364,00	0,00	0,00	0,00	19.963.364,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
445	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	132.044.490,00	0,00	0,00	132.724.490,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
446	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.602.400,00	0,00	0,00	0,00	39.602.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.785.356,00	0,00	0,00	0,00	135.785.356,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
448	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.764.430,00	0,00	0,00	0,00	85.764.430,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
449	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
450	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.308.400,00	0,00	0,00	0,00	45.308.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
451	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	196.735.500,00	0,00	0,00	0,00	196.735.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
452	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00	87.104.000,00	0,00	0,00	87.104.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
453	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.658.568,00	0,00	0,00	0,00	250.658.568,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
454	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	478.881.333,00	0,00	0,00	0,00	478.881.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Umum Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
455	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	89.350.000,00	0,00	0,00	0,00	89.350.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
456	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.873.000,00	0,00	0,00	0,00	96.873.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
457	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	25.490.000,00	0,00	0,00	0,00	25.490.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-							
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
458	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
459	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi									
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	2 Lokasi	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	30 Jumlah 66,9 Indeks							
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Jumlah PD yang menerapkan PUG melalui PPRG Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah	100 % 100 %							
460	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	100 Orang	233.487.250,00	0,00	0,00	0,00	233.487.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan MeninkatnyaPemberday aan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	100 % 100 %							
461	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	185.060.000,00	0,00	0,00	0,00	185.060.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
462	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Organisasi	515.499.300,00	0,00	0,00	0,00	515.499.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	0,011 % 100 %							
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase Kekerasan terhadap Perempuan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	100 % 100 %							
463	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 perusahaan Perangkat Daerah	63.251.246,00	0,00	0,00	0,00	63.251.246,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya layanan Perlindungan lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tersedianya [KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
464	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	209.710.000,00	0,00	0,00	0,00	209.710.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-							
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Terpilah Gender dan Anak Tersedianya Sistem Profil Gender dan Anak Data Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin dan umur antara Laki laki dan perempua serta Data Terpilha Anak Perempuan dan Anak Laki laki Tersusunnya Data Gender Gender dan Anak secara terpilah tingkat Kabupaten	100 % 100 % 100 %							
465	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100% Dokumen	156.533.000,00	0,00	0,00	0,00	156.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA) penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase Kecamatan Layak Anak	100 % 4 Jumlah 70 % 86,66 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di dalam Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Persentase terbentuknya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	100 % 100 %							
466	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	248.500.000,00	0,00	0,00	0,00	248.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan upaya dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 % 100 %							
467	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 kecamatan Orang	150.747.500,00	0,00	0,00	0,00	150.747.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
468	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	93.558.000,00	0,00	0,00	0,00	93.558.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	0,015 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Persentase kekerasan terhadap anak Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Dampingan Korban bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	100 % 100 %							
469	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	7 Orang	645.563.000,00	0,00	0,00	0,00	645.563.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan huku Persentase Menurunannya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan termasuk tindak Pidana, Perdagangan Orang dengan Fokus Pada Pencegahan, Penanganan Korban	100 % 100 %							
470	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	100% Orang	200.843.500,00	0,00	0,00	0,00	200.843.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %							
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Laporan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	100 % 100 %							
471	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	64.931.000,00	0,00	0,00	0,00	64.931.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.808.000,00	0,00	0,00	0,00	19.808.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
473	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	32.005.500,00	0,00	0,00	0,00	32.005.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
474	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.485.038.425,00	0,00	0,00	0,00	4.485.038.425,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Terlaksanaya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (PD)	100 % 100 %							
475	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32.274.000,00	0,00	0,00	0,00	32.274.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
476	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.125.000,00	0,00	0,00	0,00	99.125.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (PD) Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	19.912.850,00	0,00	0,00	0,00	19.912.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
478	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	0,00	113.494.440,00	0,00	0,00	113.494.440,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	39 Paket	34.621.900,00	5.509.000,00	0,00	0,00	40.130.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
480	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	124.193.110,00	1.167.165,00	0,00	0,00	125.360.275,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
481	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.150.899,00	0,00	0,00	0,00	95.150.899,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
482	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
483	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
484	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	222.788.000,00	0,00	0,00	0,00	222.788.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerrintah	100 %							
485	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	24.968.340,00	0,00	0,00	24.968.340,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah pada PD	100 % 100 %							
486	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	101.665.920,00	0,00	0,00	0,00	101.665.920,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
487	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	298.939.644,00	0,00	0,00	0,00	298.939.644,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan DPPPA	100 % 100 %							
488	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	200.100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.100.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
489	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	115.101.000,00	0,00	0,00	0,00	115.101.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
490	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	32.330.000,00	0,00	0,00	0,00	32.330.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Ketahanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.100 Kkal/ Kap/Hari							
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen							
491	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	72.800.000,00	0,00	0,00	0,00	72.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
492	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	195 Keluarga	256.556.000,00	0,00	0,00	0,00	256.556.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
493	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	596.173.000,00	0,00	0,00	0,00	596.173.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
494	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	598.508.700,00	0,00	0,00	0,00	598.508.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
495	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4 Unit	265.790.200,00	0,00	0,00	0,00	265.790.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
496	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota									
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.679.545,00	0,00	0,00	0,00	67.679.545,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
497	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan									
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan	15 Dokumen	62.960.000,00	0,00	0,00	0,00	62.960.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
498	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	47.983.843,00	0,00	0,00	0,00	47.983.843,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten	15 Ton							
499	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	139.380.000,00	0,00	0,00	0,00	139.380.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
500	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	20 Ton	46.405.000,00	0,00	0,00	0,00	46.405.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-							
501	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	136.964.450,00	0,00	0,00	0,00	136.964.450,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
502	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1.450.163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.163.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	21 %							
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen							
503	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	81.902.388,00	0,00	0,00	0,00	81.902.388,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	93 %							
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diawasi	25 item							
504	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.998.000,00	0,00	0,00	0,00	80.998.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
505	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	66.450.900,00	0,00	0,00	0,00	66.450.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
506	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	149.652.019,00	0,00	0,00	0,00	149.652.019,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabel	100 %							
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
507	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	79.098.200,00	0,00	0,00	0,00	79.098.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
508	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	38.784.600,00	0,00	0,00	0,00	38.784.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
509	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	39.089.000,00	0,00	0,00	0,00	39.089.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %							
510	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.973.986.531,00	0,00	0,00	0,00	4.973.986.531,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %							
511	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	40.730.000,00	0,00	0,00	0,00	40.730.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 %							
512	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.020.000,00	0,00	0,00	0,00	30.020.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
513	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	64.545.000,00	0,00	0,00	0,00	64.545.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %							
514	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.965.373,00	0,00	0,00	0,00	29.965.373,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
515	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	120.536.010,00	0,00	0,00	121.216.010,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
516	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.913.584,00	0,00	0,00	0,00	57.913.584,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
517	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	149.839.136,00	0,00	0,00	0,00	149.839.136,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
518	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	99.999.750,00	0,00	0,00	0,00	99.999.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
519	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
520	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.994.000,00	0,00	0,00	0,00	49.994.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
521	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312.613.000,00	0,00	0,00	0,00	312.613.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah	100 %							
522	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	680.000,00	97.071.720,00	0,00	0,00	97.751.720,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79.209.000,00	0,00	0,00	0,00	79.209.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
524	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	542.055.556,00	0,00	0,00	0,00	542.055.556,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 %							
525	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	163.070.000,00	0,00	0,00	0,00	163.070.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
526	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	142.906.000,00	0,00	0,00	0,00	142.906.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
527	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Dinas Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RDTR Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen							
528	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66.29 indeks							
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	66.29 Indeks							
529	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	125.082.000,00	0,00	0,00	0,00	125.082.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
530	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota									
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	175.486.750,00	0,00	0,00	0,00	175.486.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
531	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah									
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen	99.983.000,00	0,00	0,00	0,00	99.983.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
532	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	204 Paket	345.360.000,00	0,00	0,00	0,00	345.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
533	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan	99.986.000,00	0,00	0,00	0,00	99.986.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
534	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	850 Dokumen	538.750.774,00	165.767.400,00	0,00	0,00	704.518.174,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-							
535	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi									
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	32.048.000,00	0,00	0,00	0,00	32.048.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-							
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-							
536	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	275,94 Ha	2.080.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	2.480.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
537	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 Unit	680.000,00	1.451.320.000,00	0,00	0,00	1.452.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %							
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100 %							
538	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	124.998.000,00	0,00	0,00	0,00	124.998.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
539	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha	128.737.000,00	0,00	0,00	0,00	128.737.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-							
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	99.937.000,00	0,00	0,00	0,00	99.937.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-							
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadila	100 %							
541	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	26 Pengaduan	171.952.000,00	0,00	0,00	0,00	171.952.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan sampah	100 %							
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	100 %							
542	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	90 Kelompok	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
543	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	5.050.939.287,00	3.412.802.150,00	0,00	0,00	8.463.741.437,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
544	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
545	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	21516 Ton	1.536.651.200,00	13.348.800,00	0,00	0,00	1.550.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Bidang Lingkungan Hidup	100 %							
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
546	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.988.000,00	0,00	0,00	0,00	44.988.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
547	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
548	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
549	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	9.914.222.744,00	0,00	0,00	0,00	9.914.222.744,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
550	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	49.917.250,00	0,00	0,00	0,00	49.917.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
551	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.614.000,00	0,00	0,00	0,00	61.614.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
552	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	99.858.000,00	0,00	0,00	0,00	99.858.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
553	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.998.873,00	0,00	0,00	0,00	29.998.873,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
554	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	199.826.300,00	0,00	0,00	199.826.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
555	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.992.272,00	0,00	0,00	0,00	59.992.272,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
556	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	199.997.942,00	0,00	0,00	0,00	199.997.942,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
557	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
558	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
559	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
560	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %							
561	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %							
562	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	440.067.252,00	0,00	0,00	0,00	440.067.252,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
563	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.475.537.911,00	0,00	0,00	0,00	18.475.537.911,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
564	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	263.240.000,00	0,00	0,00	0,00	263.240.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
565	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	137.234.000,00	0,00	0,00	0,00	137.234.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
566	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	69.119.700,00	0,00	0,00	0,00	69.119.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-							
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-							
567	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1090 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	43000 Dokumen	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
569	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	300 Orang	93.363.500,00	0,00	0,00	0,00	93.363.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
570	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	48000 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-							
571	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6000 Dokumen	226.315.419,00	0,00	0,00	0,00	226.315.419,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-							
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-							
572	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17426 Dokumen	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-							
573	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	163.029.402,00	0,00	0,00	0,00	163.029.402,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-							
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-							
574	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	28 Dokumen	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
575	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dokumen	160.144.701,00	0,00	0,00	0,00	160.144.701,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 bulan							
576	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1.602.394.436,00	2.768.507.025,00	0,00	0,00	4.370.901.461,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
577	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	669.998.631,00	0,00	0,00	0,00	669.998.631,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
578	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	53.417.847,00	0,00	0,00	0,00	53.417.847,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
579	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	154.315.995,00	0,00	0,00	0,00	154.315.995,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
580	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	161.504.510,00	0,00	0,00	0,00	161.504.510,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
581	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan									
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	15 Dokumen	114.996.688,00	0,00	0,00	0,00	114.996.688,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 bulan							
582	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	91.559.690,00	0,00	0,00	0,00	91.559.690,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
583	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	352.693.000,00	0,00	0,00	0,00	352.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %							
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	12 bulan							
584	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	108.176.708,00	0,00	0,00	0,00	108.176.708,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Jumlah Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 15 Dokumen							
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah Capaian Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen 100 %							
585	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
587	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan							
588	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.985.404.269,00	0,00	0,00	0,00	8.985.404.269,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Diklat PIM dan Bimtek-Bimtek terhadap SDM	100 %							
589	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	37.280.000,00	0,00	0,00	0,00	37.280.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
590	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	97.386.000,00	0,00	0,00	0,00	97.386.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan							
591	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	[object Object]	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	199.953.000,00	0,00	0,00	199.953.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
593	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33.555.360,00	26.444.640,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
594	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
595	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	141.873.000,00	0,00	0,00	0,00	141.873.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
596	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
597	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
598	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
600	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	368.085.029,00	0,00	0,00	0,00	368.085.029,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
601	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.224.744.444,00	0,00	0,00	0,00	1.224.744.444,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
602	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	207.610.000,00	0,00	0,00	0,00	207.610.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
603	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	99.930.600,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	2.349.930.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
604	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	80.008.800,00	0,00	0,00	0,00	80.008.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	8 Desa							
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terpenuhinya Kerjasama antar desa Terpenuhinya Kerjasama antar Desa	8 Desa 8 Desa							
605	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
606	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	58.223.000,00	0,00	0,00	0,00	58.223.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	80 %							
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa	80 % 80 %							
607	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	145.701.198,00	0,00	0,00	0,00	145.701.198,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
608	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	65 Dokumen	323.939.250,00	0,00	0,00	0,00	323.939.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
609	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	196.159.740,00	0,00	0,00	0,00	196.159.740,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
610	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	2972 Orang	5.061.078.240,00	0,00	0,00	0,00	5.061.078.240,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
611	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	229 Dokumen	49.952.000,00	0,00	0,00	0,00	49.952.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
612	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	229 Dokumen	180.035.334,00	0,00	0,00	0,00	180.035.334,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
613	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	2.706.316.944,00	0,00	0,00	0,00	2.706.316.944,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
614	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	229 Dokumen	80.597.000,00	0,00	0,00	0,00	80.597.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
615	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen	100.089.980,00	0,00	0,00	0,00	100.089.980,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
616	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	3 Desa	114.380.600,00	0,00	0,00	0,00	114.380.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
617	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15 Dokumen	124.810.000,00	0,00	0,00	0,00	124.810.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	100 % 150 Keluarga 15 Lembaga							
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	100 %							
618	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	1.066.366.250,00	0,00	0,00	0,00	1.066.366.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
619	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15 Dokumen	49.999.427,00	0,00	0,00	0,00	49.999.427,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
620	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	174.999.850,00	0,00	0,00	0,00	174.999.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
621	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	208.872.000,00	0,00	0,00	0,00	208.872.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
622	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	599.972.047,00	0,00	0,00	0,00	599.972.047,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
623	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	16 Laporan	129.999.800,00	0,00	0,00	0,00	129.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
624	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	15 Dokumen	47.571.000,00	0,00	0,00	0,00	47.571.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
625	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	1.178.507.025,00	0,00	0,00	0,00	1.178.507.025,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
626	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	49.985.700,00	0,00	0,00	0,00	49.985.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
627	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing									
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45 Keluarga	49.999.675,00	0,00	0,00	0,00	49.999.675,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %							
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
628	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
630	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	11 Data	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
631	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.919.344.180,00	0,00	0,00	0,00	4.919.344.180,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pengelolaan administrasi barang milik daerah	100 %							
632	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	43.925.000,00	0,00	0,00	0,00	43.925.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
633	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33.252.000,00	0,00	0,00	0,00	33.252.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
634	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	99.250.000,00	0,00	0,00	0,00	99.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertatanya Pengelolaan Administrasi Umum	100 %							
635	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.787.628,00	0,00	0,00	0,00	29.787.628,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
636	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	181.404.525,00	0,00	0,00	182.084.525,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
637	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.004.582,00	0,00	0,00	0,00	60.004.582,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
638	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.999.135,00	0,00	0,00	0,00	199.999.135,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
639	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	104.925.830,00	0,00	0,00	0,00	104.925.830,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
640	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
641	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.986.000,00	0,00	0,00	0,00	49.986.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
642	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.969.000,00	0,00	0,00	0,00	199.969.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100 %							
643	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	680.000,00	99.936.630,00	0,00	0,00	100.616.630,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoraan	100 %							
644	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.571.396,00	0,00	0,00	0,00	176.571.396,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
645	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	509.856.267,00	0,00	0,00	0,00	509.856.267,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur Berfungsi dengan baik	100 %							
646	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	241.910.000,00	0,00	0,00	0,00	241.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.025.000,00	0,00	0,00	0,00	91.025.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
648	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	30.888.500,00	0,00	0,00	0,00	30.888.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) Jumlah peta persebaran penggunaan alat kontrasepsi Persentase stakeholder yang memahami kajian dampak kependudukan.	2,23 % 93 % 94 %							
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	93 %							
649	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal									
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	6 Kegiatan	66.469.867,00	0,00	0,00	0,00	66.469.867,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-							
650	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga									
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	99.338.000,00	0,00	0,00	0,00	99.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-							
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	90,50 %							
651	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana									
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Unit	156.966.000,00	87.017.000,00	0,00	0,00	243.983.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
652	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	73.466.000,00	0,00	0,00	0,00	73.466.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	94 %							
653	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	133.116.200,00	0,00	0,00	0,00	133.116.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota	98 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	84.395.000,00	0,00	0,00	0,00	84.395.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
655	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	75 Unit	46.020.000,00	729.476.800,00	0,00	0,00	775.496.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
656	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	375 Orang	124.011.000,00	0,00	0,00	0,00	124.011.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
657	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	139.784.498,00	0,00	0,00	0,00	139.784.498,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
658	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak									
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	138.182.700,00	0,00	0,00	0,00	138.182.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pembinaan Kesertan Ber-KB	85 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
659	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	70.523.600,00	0,00	0,00	0,00	70.523.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
660	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	84.150.000,00	0,00	0,00	0,00	84.150.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
661	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	49.291.203,00	0,00	0,00	0,00	49.291.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina Cakupan Peran Serta Organisasi dan Masyarakat Yang di Bina	85 % 94 % 95,07 %							
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95,07 %							
662	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))									
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	176.285.000,00	0,00	0,00	0,00	176.285.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	144 Unit	160.842.320,00	0,00	0,00	0,00	160.842.320,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
664	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	350 Orang	154.528.000,00	0,00	0,00	0,00	154.528.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Yang Dilaksanakan Sangat Tepat	100 %							
665	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
666	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
667	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	38.713.950,00	0,00	0,00	0,00	38.713.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
668	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8.198.999.495,00	0,00	0,00	0,00	8.198.999.495,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada DPPKB Kab. Muba	100 %							
669	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	104.842.400,00	0,00	0,00	0,00	104.842.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
670	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	88.355.691,00	0,00	0,00	0,00	88.355.691,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran (100%)	100 %							
671	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.952.255,00	0,00	0,00	0,00	29.952.255,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
672	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	198.496.210,00	0,00	0,00	199.176.210,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.996.200,00	0,00	0,00	0,00	49.996.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
674	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.980.343,00	0,00	0,00	0,00	199.980.343,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
675	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	84.345.625,00	0,00	0,00	0,00	84.345.625,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
676	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
677	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	49.922.500,00	0,00	0,00	0,00	49.922.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
678	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	237.381.000,00	0,00	0,00	0,00	237.381.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 %							
679	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	680.000,00	97.012.000,00	0,00	0,00	97.692.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Lain-lain PAD Yang Sah
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
681	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	223.182.825,00	0,00	0,00	0,00	223.182.825,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
682	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	297.546.600,00	0,00	0,00	0,00	297.546.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
683	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	224.070.000,00	0,00	0,00	0,00	224.070.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
684	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	63.554.000,00	0,00	0,00	0,00	63.554.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
685	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	97 %							
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Dokumen							
686	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	509.270.000,00	1.265.533.200,00	0,00	0,00	1.774.803.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
687	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	449.634.000,00	0,00	0,00	0,00	449.634.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir	1 Dokumen							
688	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	9.915.300,00	5.089.350,00	0,00	0,00	15.004.650,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Dokumen							
689	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	45.116.000,00	0,00	0,00	0,00	45.116.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
690	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	28.084.000,00	0,00	0,00	0,00	28.084.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
691	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	15.190.000,00	0,00	0,00	0,00	15.190.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
692	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	183.549.000,00	0,00	0,00	0,00	183.549.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
693	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	40.244.000,00	0,00	0,00	0,00	40.244.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-							
694	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	284.148.045,00	0,00	0,00	0,00	284.148.045,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	120.608.000,00	0,00	0,00	0,00	120.608.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
696	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	4.620.000,00	95.460.000,00	0,00	0,00	100.080.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
697	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	800.859.178,00	0,00	0,00	0,00	800.859.178,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen							
698	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	316.398.041,00	3.442.378,00	0,00	0,00	319.840.419,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	89 %							
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
699	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	91.014.000,00	0,00	0,00	0,00	91.014.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabauhan Sungai dan Danau persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik	4 Dokumen 100 %							
700	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	60.402.000,00	0,00	0,00	0,00	60.402.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
701	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau									
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	645.666.050,00	17.760.000,00	0,00	0,00	663.426.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
702	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau									
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1.649.799.000,00	0,00	0,00	0,00	1.649.799.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
703	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	176 Unit	54.495.000,00	181.041.000,00	0,00	0,00	235.536.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	87 %							
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara	1 Dokumen							
704	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter									
			Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	88.860.000,00	0,00	0,00	0,00	88.860.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah	100 %							
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen							
705	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	63.000.150,00	0,00	0,00	0,00	63.000.150,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
706	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	46.999.850,00	0,00	0,00	0,00	46.999.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang							
708	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	6.708.891.232,00	0,00	0,00	0,00	6.708.891.232,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD	1 Dokumen							
709	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	70.135.750,00	0,00	0,00	0,00	70.135.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	2 Dokumen							
710	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen							
711	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
712	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.372.994,00	144.627.006,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.139.200,00	5.860.800,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
714	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
715	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
717	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD	2 Dokumen							
719	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
720	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	5.160.620,00	41.548.188,00	0,00	0,00	46.708.808,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen enyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD	24 Dokumen							
721	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	254.729.655,00	0,00	0,00	0,00	254.729.655,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
722	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.715.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.660.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD	3 Dokumen							
723	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.809.265.000,00	0,00	0,00	0,00	1.809.265.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
724	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	205.919.192,00	0,00	0,00	0,00	205.919.192,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Komunikasi dan Informatika									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100 %							
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi publik pemerintah kab. muba yang menyampaikan informasi kepada masyarakat Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang menyampaikan Informasi Kepada masyarakat	150 media 160 Media							
726	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 Komunitas	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
727	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	333.924.500,00	0,00	0,00	0,00	333.924.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
728	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	583.312.000,00	0,00	0,00	0,00	583.312.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	150 Media	5.557.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.557.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
730	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik									
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	200 Dokumen	882.140.293,00	150.753.207,00	0,00	0,00	1.032.893.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
731	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten									
			Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	845.014.002,00	388.328.740,00	0,00	0,00	1.233.342.742,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	75 %							
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pelayanan pemerintah dan masyarakat melalui teknologi informatika Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika	100 % 100 %							
732	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	507.218.760,00	0,00	0,00	0,00	507.218.760,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
733	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	48 Perangkat Daerah	6.056.657.019,00	257.217.303,00	0,00	0,00	6.313.874.322,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
734	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	18 Program	242.616.000,00	0,00	0,00	0,00	242.616.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	100 %							
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	10 laporan 10 Laporan							
735	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	51.720.000,00	0,00	0,00	0,00	51.720.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
736	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	33.120.000,00	0,00	0,00	0,00	33.120.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
737	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	50.003.000,00	0,00	0,00	0,00	50.003.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran	100 % 100 %							
738	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.452.246.736,00	0,00	0,00	0,00	5.452.246.736,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dinas Meningkaynya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.824.140,00	0,00	0,00	0,00	35.824.140,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
740	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	94.855.000,00	0,00	0,00	0,00	94.855.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
741	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.427,00	0,00	0,00	0,00	30.000.427,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
742	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	200.816.649,00	0,00	0,00	200.816.649,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
743	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.998.117,00	0,00	0,00	0,00	199.998.117,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
744	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	109.252.473,00	0,00	0,00	0,00	109.252.473,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
745	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.950.000,00	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
747	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.051.000,00	0,00	0,00	0,00	200.051.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan mebeleur penunjang kenyamanan kerja Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja	10 unit 10 unit							
748	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	78.531.390,00	0,00	0,00	78.531.390,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya jasa penunjang Urusan pemerintah Daerah	1 laporan 1 Laporan							
749	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	407.931.948,00	0,00	0,00	0,00	407.931.948,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
750	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.287.566.489,00	0,00	0,00	0,00	1.287.566.489,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan bekerja	67 unit							
751	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	331.230.000,00	0,00	0,00	0,00	331.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
752	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	123.711.250,00	200.000.000,00	0,00	0,00	323.711.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
753	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	64 Unit	54.240.000,00	0,00	0,00	0,00	54.240.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-							
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai kan	1 Dokumen							
754	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	162.530.017,00	119.204.758,00	0,00	0,00	281.734.775,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
755	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	604.073.000,00	0,00	0,00	0,00	604.073.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
756	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	310.308.000,00	0,00	0,00	0,00	310.308.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	67.102.000,00	0,00	0,00	0,00	67.102.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100 %							
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemkab muba Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba	100 % 100 %							
758	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
759	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	456.800.401,00	0,00	0,00	0,00	456.800.401,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
760	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	48 Perangkat Daerah	333.135.505,00	62.664.495,00	0,00	0,00	395.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi aktif	120 Koperasi							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	120 koperasi							
761	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	312 Unit Usaha	299.840.000,00	0,00	0,00	0,00	299.840.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
762	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	120 Unit Usaha	153.863.800,00	0,00	0,00	0,00	153.863.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi sehat	80 Koperasi							
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP serta UKM berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kota	80 koperasi							
763	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75 Unit Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	7 Koperasi							
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi	7 koperasi							
764	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	10 Koperasi							
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10 koperasi							
765	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	60 Unit Usaha	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMK yang berdaya saing	400 UMK							
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terpenuhinya Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan , penguatan kelembagaan dan koordinasi	400 UMK							
766	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	3200 Unit Usaha	199.999.800,00	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
767	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
768	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	100 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
769	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro									
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	260 Unit Usaha	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
770	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	3000 Unit Usaha	159.199.800,00	0,00	0,00	0,00	159.199.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
771	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90 Orang	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	25 UMK							
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terpenuhinya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	25 UMK							
772	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	3.368.179.850,00	0,00	0,00	0,00	3.368.179.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98 %							
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
773	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	57.532.000,00	0,00	0,00	0,00	57.532.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
774	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	12.440.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
775	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
776	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.352.480.321,00	0,00	0,00	0,00	4.352.480.321,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
777	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.024.000,00	0,00	0,00	0,00	25.024.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
778	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
780	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
781	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
782	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
783	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	82.957.000,00	0,00	0,00	0,00	82.957.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
784	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
785	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
786	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	163.027.000,00	0,00	0,00	0,00	163.027.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang	100 %							
787	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
788	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	120.370.268,00	0,00	0,00	0,00	120.370.268,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
789	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376.266.666,00	0,00	0,00	0,00	376.266.666,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
790	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	113.210.000,00	0,00	0,00	0,00	113.210.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
791	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	49.987.400,00	0,00	0,00	49.987.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
792	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	33.140.000,00	0,00	0,00	0,00	33.140.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-							
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberian fasilitas/insentif dipenanaman modal	100 %							
793	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	132.904.500,00	0,00	0,00	0,00	132.904.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Dana Bagi Hasil (DBH)
794	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	28 Dokumen	73.072.000,00	0,00	0,00	0,00	73.072.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
795	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko									
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	67.841.000,00	0,00	0,00	0,00	67.841.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	239.488.000,00	0,00	0,00	0,00	239.488.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Minat Investasi	80 %							
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan promosi penanaman modal Presntase Peningkatan Minat Investasi	100 % 80 %							
797	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	624.739.000,00	0,00	0,00	0,00	624.739.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	2600 Jumlah 87 % 88,76 Nilai							
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	2600 Izin dan Non Izin 88,76 Nilai 87 % 100 %							
798	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	153.766.250,00	0,00	0,00	0,00	153.766.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
799	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.600 Pelaku Usaha	364.526.500,00	0,00	0,00	0,00	364.526.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
800	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	13 Pelaku Usaha	111.581.700,00	0,00	0,00	0,00	111.581.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
801	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.003.292.600,00	0,00	0,00	0,00	1.003.292.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi investasi PMDN Nilai Realisasi investasi PMA	1,7 T Rupiah 2,2 T Rupiah							
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi investasi PMA Nilai Realisasi investasi PMDN Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	2,2 T 1,7 T 100 %							
802	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	16 Kegiatan Usaha.	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
803	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
804	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	17 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	3 Dok Dokumen 3 Dokumen							
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data informasi Perizinan dan non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Persentase kesediaan data dan informasi	3 Dokumen 100 %							
805	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	119.604.000,00	0,00	0,00	0,00	119.604.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
806	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	64.999.764,00	0,00	0,00	0,00	64.999.764,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
807	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	19.999.758,00	0,00	0,00	0,00	19.999.758,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	28 Data	43.373.488,00	0,00	0,00	0,00	43.373.488,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah Persentase adminitrasi keuangan perangkat Daerah	100 % 100 %							
809	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	9.507.763.187,00	0,00	0,00	0,00	9.507.763.187,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
810	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	47.417.000,00	0,00	0,00	0,00	47.417.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 % 100 %							
811	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	63.643.640,00	0,00	0,00	0,00	63.643.640,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
812	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	97.784.000,00	0,00	0,00	0,00	97.784.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 %							
813	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.969.087,00	0,00	0,00	0,00	64.969.087,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
814	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.416.000,00	2.185.571.821,00	0,00	0,00	2.190.987.821,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
815	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	99.999.789,00	0,00	0,00	0,00	99.999.789,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
816	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.998.364,00	0,00	0,00	0,00	249.998.364,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
817	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	134.999.491,00	0,00	0,00	0,00	134.999.491,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
818	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
819	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	94.310.000,00	0,00	0,00	0,00	94.310.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
820	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	199.977.000,00	0,00	0,00	0,00	199.977.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %							
821	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	4.322.000,00	270.147.510,00	0,00	0,00	274.469.510,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %							
822	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	814.705.146,00	0,00	0,00	0,00	814.705.146,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
823	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	513.866.667,00	0,00	0,00	0,00	513.866.667,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
824	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	325.990.000,00	0,00	0,00	0,00	325.990.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
825	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	227.556.000,00	0,00	0,00	0,00	227.556.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
826	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	213.187.200,00	0,00	0,00	0,00	213.187.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	36,79 %							
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-							
827	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota									
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	305 Orang	622.485.000,00	0,00	0,00	0,00	622.485.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
828	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	200 Orang	233.216.500,00	0,00	0,00	0,00	233.216.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
829	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	75 Orang	207.637.000,00	0,00	0,00	0,00	207.637.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi yang mendapatkan pembinaan	20 Organisasi							
830	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	20 Organisasi	614.690.000,00	0,00	0,00	0,00	614.690.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	0,30 Unit / 1000 penduduk 18,95 %							
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan	100 %							
831	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	27 Unit	13.200.843.923,00	14.178.122.900,00	0,00	0,00	27.378.966.823,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga yang ditandingkan/ diikuti	40 Cabor							
832	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	12.305.150.399,00	190.350.000,00	0,00	0,00	12.495.500.399,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
833	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	145 Orang	606.710.000,00	99.797.500,00	0,00	0,00	706.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	19 Cabor							
834	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah									
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	150 Orang	70.006.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	85.006.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
835	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	248 Orang	10.972.168.250,00	386.755.000,00	0,00	0,00	11.358.923.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Kerjasama Organisasi Olahraga	2 Organisasi							
836	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota									
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	27.061.098.300,00	0,00	0,00	0,00	27.061.098.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
837	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan	5 Event							
838	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	274.207.960,00	0,00	0,00	0,00	274.207.960,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
839	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan									
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Laporan	1.195.199.879,00	0,00	0,00	0,00	1.195.199.879,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
840	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dokumen	147.410.000,00	0,00	0,00	0,00	147.410.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	30,52 %							
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	30,52 % 30.52 %							
841	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	103.670.500,00	0,00	0,00	0,00	103.670.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
842	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
843	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	245.062.000,00	0,00	0,00	0,00	245.062.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
844	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	3 Laporan	386.424.890,00	0,00	0,00	0,00	386.424.890,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
845	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah									
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	16 Unit	199.997.600,00	0,00	0,00	0,00	199.997.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %							
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang disampaikan tepat waktu	4 Dokumen							
846	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	64.806.000,00	0,00	0,00	0,00	64.806.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
847	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	19.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
848	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	49.819.000,00	0,00	0,00	0,00	49.819.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12 Bulan							
849	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	7.052.807.310,00	0,00	0,00	0,00	7.052.807.310,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
850	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	52.728.750,00	0,00	0,00	0,00	52.728.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan	undefined undefined							
851	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.098.000,00	0,00	0,00	0,00	40.098.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
852	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	94.386.000,00	0,00	0,00	0,00	94.386.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas tata kelola pemerintahan daerah, Meningkatnya Pelayanan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	29.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
854	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	198.211.600,00	0,00	0,00	198.211.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
855	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	44.935.400,00	0,00	0,00	0,00	44.935.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
856	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.999.620,00	0,00	0,00	0,00	199.999.620,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
857	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	109.999.150,00	0,00	0,00	0,00	109.999.150,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
858	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
860	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.996.000,00	0,00	0,00	0,00	199.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaaan barang milik daerah Penyediaan barang milik daerah	100 % 100 %							
861	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	34.219.080,00	0,00	0,00	34.219.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang kantor	12 bulan							
862	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.703.756.472,00	0,00	0,00	0,00	1.703.756.472,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.137.888.889,00	0,00	0,00	0,00	2.137.888.889,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
864	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	328.560.000,00	0,00	0,00	0,00	328.560.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
865	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	176.746.000,00	0,00	0,00	0,00	176.746.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
866	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah objek wisata	69 Unit							
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event-event pariwisata daerah Terlaksanya Event-event pariwisata daerah	6 Event 6 Event							
867	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Lokasi	1.319.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.020.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah pelaku usaha pariwisata	38.408 Orang 459 Orang							
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	42.184 Orang 42184 Orang							
868	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	1.729.791.600,00	0,00	0,00	0,00	1.729.791.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku usaha pariwisata	459 Orang							
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang							
869	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	328.039.250,00	0,00	0,00	0,00	328.039.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,5 % 9 %							
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba Terkelolahnya Perpustakaan di wilayah Kab. Muba	15 kecamatan 15 Kecamatan							
870	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	33 Perpustakaan	98.889.000,00	0,00	0,00	0,00	98.889.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
871	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	40 Dokumen	47.007.828,00	0,00	0,00	0,00	47.007.828,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
872	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4500 Eksemplar	230.050.226,00	181.263.460,00	0,00	0,00	411.313.686,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
873	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Eksemplar	68.363.374,00	0,00	0,00	0,00	68.363.374,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	Dana Bagi Hasil (DBH)
874	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	12 Perpustakaan	55.781.715,00	100.239.317,00	0,00	0,00	156.021.032,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya gemar membaca di wilayah Kab. Muba	15 kecamatan							
875	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	665.719.777,00	0,00	0,00	0,00	665.719.777,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
876	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	541.408.883,00	0,00	0,00	0,00	541.408.883,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
877	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	30 Orang	453.217.333,00	0,00	0,00	0,00	453.217.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
878	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	13 Lokus	71.725.365,00	0,00	0,00	0,00	71.725.365,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan program penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan							
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	12 Bulan							
879	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	64.915.165,00	0,00	0,00	0,00	64.915.165,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
880	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19.997.700,00	0,00	0,00	0,00	19.997.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
881	2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	58 Data	49.991.633,00	0,00	0,00	0,00	49.991.633,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	lancarnya administrasi keuangan PD	12 Bulan							
882	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.572.257.252,00	0,00	0,00	0,00	5.572.257.252,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	lancarnya administrasi kepegawaian PD	12 Bulan							
883	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44 Paket	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
884	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	97.500.000,00	0,00	0,00	0,00	97.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya administrasi umum PD	12 Bulan							
885	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	59.994.835,00	0,00	0,00	0,00	59.994.835,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
886	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.554.929,00	128.419.896,00	0,00	0,00	144.974.825,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
887	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	59.992.503,00	0,00	0,00	0,00	59.992.503,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
888	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	199.998.249,00	0,00	0,00	0,00	199.998.249,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
889	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	19 Paket	109.961.651,00	0,00	0,00	0,00	109.961.651,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
890	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
891	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
892	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.055.030,00	0,00	0,00	0,00	47.055.030,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
893	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	199.993.000,00	0,00	0,00	0,00	199.993.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah	12 Bulan							
894	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Unit	0,00	24.247.100,00	0,00	0,00	24.247.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan							
895	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	183.476.250,00	0,00	0,00	0,00	183.476.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
896	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	397.838.400,00	0,00	0,00	0,00	397.838.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	12 Bulan							
897	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	243.410.000,00	0,00	0,00	0,00	243.410.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
898	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	266.925.000,00	0,00	0,00	0,00	266.925.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
899	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	48.410.000,00	0,00	0,00	0,00	48.410.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan 6 Keg. 82 %							
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolahnya Arsip Statis Kabupaten/Kota Terkelolanya Arsip Statis di Perangkat Daerah	48 PD 48 perangkat daerah 2 Kegiatan							
900	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1500 Arsip	175.654.432,00	52.978.025,00	0,00	0,00	228.632.457,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Tersedianya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan 48 Bulan 48 perangkat daerah							
901	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	352.792.011,00	0,00	0,00	0,00	352.792.011,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
902	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	48 Laporan	174.783.110,00	0,00	0,00	0,00	174.783.110,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	24.434 Ton							
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya	100 %							
903	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	149.473.000,00	0,00	0,00	0,00	149.473.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
904	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	990 Unit	2.393.400.250,00	0,00	0,00	0,00	2.393.400.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil	100 %							
905	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	204.704.100,00	0,00	0,00	0,00	204.704.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
906	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	89.683.000,00	0,00	0,00	0,00	89.683.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	27.349 Ton							
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100 %							
907	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	11 Kelompok	98.230.950,00	0,00	0,00	0,00	98.230.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
908	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	166.861.000,00	0,00	0,00	0,00	166.861.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 %							
909	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit	1.833.384.806,00	5.772.000,00	0,00	0,00	1.839.156.806,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	500 Unit	174.216.000,00	0,00	0,00	0,00	174.216.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat Partisipasi Pokmaswas	78 %							
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	100 %							
911	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	1176 Pelaku Usaha	536.212.000,00	0,00	0,00	0,00	536.212.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Napal	Dana Bagi Hasil (DBH)
912	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	96 Pelaku Usaha	162.548.867,00	0,00	0,00	0,00	162.548.867,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
913	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota									
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	7866 Pelaku Usaha	549.651.090,00	0,00	0,00	0,00	549.651.090,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	54,97 Kg/Kap/Th							
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
914	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	316.710.200,00	0,00	0,00	0,00	316.710.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	100 %							
915	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	805.669.000,00	0,00	0,00	0,00	805.669.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin,	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	
916	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	40 Pelaku Usaha	580.520.950,00	27.100.000,00	0,00	0,00	607.620.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Akuntabe	100 %							
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
917	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	77.219.203,00	0,00	0,00	0,00	77.219.203,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
918	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	18.118.033,00	0,00	0,00	0,00	18.118.033,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
919	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	18.945.000,00	0,00	0,00	0,00	18.945.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
920	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	5.422.861.103,00	0,00	0,00	0,00	5.422.861.103,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
921	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	52.371.000,00	0,00	0,00	0,00	52.371.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
922	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	34.910.000,00	0,00	0,00	0,00	34.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
923	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	100.885.000,00	0,00	0,00	0,00	100.885.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
924	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.724.080,00	0,00	0,00	0,00	65.724.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
925	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	170.057.106,00	0,00	0,00	170.737.106,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
926	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.245.105,00	0,00	0,00	0,00	53.245.105,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
927	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.355.808,00	0,00	0,00	0,00	198.355.808,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
928	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	81.884.353,00	0,00	0,00	0,00	81.884.353,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
929	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
930	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.304.369,00	0,00	0,00	0,00	49.304.369,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
931	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	279.994.000,00	0,00	0,00	0,00	279.994.000,00	[object Object]	Pajak Daerah
932	3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
933	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	680.000,00	81.778.001,00	0,00	0,00	82.458.001,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
934	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.458.600,00	0,00	0,00	0,00	205.458.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
935	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.920.000,00	0,00	0,00	0,00	946.920.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
936	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	340.609.700,00	0,00	0,00	0,00	340.609.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
937	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	69.978.000,00	0,00	0,00	0,00	69.978.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
938	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	40.130.000,00	0,00	0,00	0,00	40.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Pajak Daerah
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-							
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %							
939	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	2.835.495.353,00	0,00	0,00	0,00	2.835.495.353,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
940	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	550.591.200,00	0,00	0,00	0,00	550.591.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
941	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	348.692.000,00	0,00	0,00	0,00	348.692.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
942	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan									
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	2.375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Bailangu Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan 2 Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Terusan Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Panai Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Purwo Agung Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Sari Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh Jaya Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Tanjung Durian Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Karang Waru	Dana Bagi Hasil (DBH)
943	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura									
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	1 Laporan	780.232.200,00	0,00	0,00	0,00	780.232.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-							
944	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan									
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	35.775.000,00	0,00	0,00	0,00	35.775.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-							
945	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2000 Ekor	3.213.902.000,00	0,00	0,00	0,00	3.213.902.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
946	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis	591.322.040,00	277.800.000,00	0,00	0,00	869.122.040,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25 %							
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	100 %							
947	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian									
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	40.414.000,00	233.622.740,00	0,00	0,00	274.036.740,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
948	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	294.134.305,00	2.040.000,00	0,00	0,00	296.174.305,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
949	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air									
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	583.658.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	585.738.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Karang Rejo Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Perumpung Raya	Dana Bagi Hasil (DBH)
950	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya									
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	1.333.705.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	1.337.865.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan 2 Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Terusan	Dana Bagi Hasil (DBH)
951	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit	203.600.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	204.640.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Lumpatan Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-							
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-							
952	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	15 Wilayah	173.376.000,00	0,00	0,00	0,00	173.376.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
953	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	299.734.500,00	0,00	0,00	0,00	299.734.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
954	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	445.404.200,00	0,00	0,00	0,00	445.404.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner	100 %							
955	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	92.725.000,00	0,00	0,00	0,00	92.725.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
956	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner									
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	212.233.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	272.233.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
957	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	20 Orang	337.695.000,00	0,00	0,00	0,00	337.695.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	65,00 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %							
958	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	70 Ha	355.110.000,00	0,00	0,00	0,00	355.110.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	20 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penyuluhan pertanian	100 %							
959	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	2.472.381.952,00	0,00	0,00	0,00	2.472.381.952,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
960	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	1.130.692.835,00	0,00	0,00	0,00	1.130.692.835,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
961	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	396.919.782,00	0,00	0,00	0,00	396.919.782,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %							
962	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
963	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
964	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	68.537.425,00	54.312.300,00	0,00	0,00	122.849.725,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
965	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan	20.178.442.418,00	0,00	0,00	0,00	20.178.442.418,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
966	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14 Dokumen	88.191.250,00	0,00	0,00	0,00	88.191.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
967	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.680.000,00	0,00	0,00	0,00	61.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
968	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
969	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.035.704,00	0,00	0,00	0,00	28.035.704,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
970	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	303.841.965,00	0,00	0,00	303.841.965,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
971	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	56.918.025,00	0,00	0,00	0,00	56.918.025,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
972	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.235.028,00	0,00	0,00	0,00	195.235.028,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
973	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.719.421,00	0,00	0,00	0,00	100.719.421,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
974	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.328.104,00	1.665.000,00	0,00	0,00	39.993.104,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
975	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.976.000,00	0,00	0,00	0,00	49.976.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
976	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.044.000,00	0,00	0,00	0,00	200.044.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
977	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0,00	46.076.100,00	0,00	0,00	46.076.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
978	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	252.985.145,00	0,00	0,00	0,00	252.985.145,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
979	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.732.622.222,00	0,00	0,00	0,00	3.732.622.222,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
980	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	551.880.000,00	0,00	0,00	0,00	551.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
981	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	679.981.000,00	0,00	0,00	0,00	679.981.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
982	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Dinas Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,85 %							
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %							
983	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	230.476.500,00	0,00	0,00	0,00	230.476.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15 Laporan	2.380.978.800,00	0,00	0,00	0,00	2.380.978.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
985	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.538.000,00	0,00	0,00	0,00	100.538.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
986	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman									
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3.195.908.025,00	304.590.000,00	0,00	0,00	3.500.498.025,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,85 % 1,85 %							
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %							
987	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	15 Laporan	200.049.000,00	0,00	0,00	0,00	200.049.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-							
988	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	11 Unit	7.465.707.014,00	0,00	0,00	0,00	7.465.707.014,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Penerimaan Pembiayaan
989	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	299.999.762,00	0,00	0,00	0,00	299.999.762,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,85 %							
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan) Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
990	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	200.247.131,00	0,00	0,00	0,00	200.247.131,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
991	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	914602 Ha	10.691.136.398,00	3.899.350.080,00	0,00	0,00	14.590.486.478,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
992	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Mendapatkan Kejelasan Status Usahanya	2,75 %							
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Perkebunan) yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota TerlaksananyaPenerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %							
993	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian									
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	385.839.000,00	0,00	0,00	0,00	385.839.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh petani	2,75 %							
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan) Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	100 % 100 %							
994	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit	1.348.148.946,00	0,00	0,00	0,00	1.348.148.946,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
995	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	30 Unit	2.122.142.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122.142.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
996	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani									
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	5 Unit	100.412.750,00	0,00	0,00	0,00	100.412.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[deleted]								
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
997	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	63.560.830,00	0,00	0,00	0,00	63.560.830,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
998	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	19.017.000,00	0,00	0,00	0,00	19.017.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
999	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	193.679.000,00	0,00	0,00	0,00	193.679.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	6.262.396.883,00	0,00	0,00	0,00	6.262.396.883,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
1001	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	52.440.000,00	0,00	0,00	0,00	52.440.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1002	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.880.000,00	0,00	0,00	0,00	22.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1003	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	72.616.000,00	0,00	0,00	0,00	72.616.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1004	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.874.729,00	0,00	0,00	0,00	29.874.729,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1005	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	125.315.781,00	0,00	0,00	125.995.781,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1006	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.173.561,00	6.993.000,00	0,00	0,00	50.166.561,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1007	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.540.164,00	0,00	0,00	0,00	199.540.164,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1008	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	111.529.233,00	0,00	0,00	0,00	111.529.233,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1009	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1010	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	36.130.000,00	0,00	0,00	0,00	36.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1011	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	208.595.000,00	0,00	0,00	0,00	208.595.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1012	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	680.000,00	67.608.750,00	0,00	0,00	68.288.750,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
1013	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	191.664.000,00	0,00	0,00	0,00	191.664.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1014	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.178.766.667,00	0,00	0,00	0,00	1.178.766.667,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1015	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	249.890.000,00	0,00	0,00	0,00	249.890.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1016	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	680.000,00	155.613.800,00	0,00	0,00	156.293.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1017	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit	60.449.000,00	0,00	0,00	0,00	60.449.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	22,44 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang terbit	15 Dokumen							
1018	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 Dokumen	141.516.000,00	0,00	0,00	0,00	141.516.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang yang terbit	16 Dokumen							
1019	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	16 Dokumen	71.180.000,00	0,00	0,00	0,00	71.180.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi cara Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	140 Pelaku Usaha							
1020	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	409.572.378,00	0,00	0,00	0,00	409.572.378,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	50,00 %							
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	9 unit							
1021	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit	118.532.000,00	4.005.682.850,00	0,00	0,00	4.124.214.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Mekar Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	100 %							
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan							
1022	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	78.307.000,00	0,00	0,00	0,00	78.307.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1023	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	78.307.000,00	0,00	0,00	0,00	78.307.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	21 Laporan	1.245.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.196.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	2 Laporan							
1025	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	49.402.000,00	0,00	0,00	0,00	49.402.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lais, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume penjualan produk	12,5 %							
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi	264 Pelaku Usaha							
1026	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	1.061.551.500,00	0,00	0,00	0,00	1.061.551.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1027	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	250 Pelaku Usaha	3.717.022.500,00	0,00	0,00	0,00	3.717.022.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1028	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	54.643.000,00	0,00	0,00	0,00	54.643.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	42,57 %							
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Hasil Pelaksanaan Metrologi Legal	3000 unit							
1029	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	226.483.740,00	0,00	0,00	0,00	226.483.740,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1030	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal									
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	800 Orang	146.414.300,00	0,00	0,00	0,00	146.414.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Kemitraan Usaha	8 Mitra Usaha							
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Kemitraan Usaha	100 Pelaku Usaha							
1031	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota									
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	131.511.050,00	0,00	0,00	0,00	131.511.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %							
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan Sangat Tepat	100 %							
1032	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	64.854.080,00	0,00	0,00	0,00	64.854.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1033	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	19.812.378,00	0,00	0,00	0,00	19.812.378,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1034	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	121 Data	49.999.899,00	0,00	0,00	0,00	49.999.899,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %							
1035	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	8.144.103.874,00	0,00	0,00	0,00	8.144.103.874,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %							
1036	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.680.000,00	0,00	0,00	0,00	58.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1037	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	103.608.000,00	0,00	0,00	0,00	103.608.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1038	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.983.187,00	0,00	0,00	0,00	29.983.187,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1039	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0,00	199.227.573,00	0,00	0,00	199.227.573,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1040	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.908.032,00	0,00	0,00	0,00	59.908.032,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1041	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.989.422,00	0,00	0,00	0,00	199.989.422,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1042	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.483.295,00	0,00	0,00	0,00	110.483.295,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1043	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1044	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	199.563.000,00	0,00	0,00	0,00	199.563.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Unit							
1045	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0,00	41.611.680,00	0,00	0,00	41.611.680,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perdagangan dan Perindustrian	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1046	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	457.968.500,00	0,00	0,00	0,00	457.968.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1047	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.729.611.111,00	0,00	0,00	0,00	1.729.611.111,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %							
1048	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	316.860.000,00	0,00	0,00	0,00	316.860.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1049	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	197.532.000,00	0,00	0,00	197.532.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1050	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	41.541.500,00	0,00	0,00	0,00	41.541.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah	1,5 %							
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Industri	141 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1051	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	135.725.042,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	2.042.986.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1052	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	135 Dokumen	960.193.977,00	0,00	0,00	0,00	960.193.977,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	24,50 %							
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pengawasan usaha industri	10 Pelaku Industri							
1053	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	10 Dokumen	59.749.000,00	0,00	0,00	0,00	59.749.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas	32 Unit Usaha							
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang tersedia	1 Dokumen							
1054	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	235.629.000,00	0,00	0,00	0,00	235.629.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Sekretariat Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-							
1055	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	2.026.070.030,00	0,00	0,00	0,00	2.026.070.030,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1056	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	10 Dokumen	296.625.601,00	0,00	0,00	0,00	296.625.601,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1057	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	291.963.725,00	0,00	0,00	0,00	291.963.725,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagaamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin	200 Pasang 845 Orang 50 orang 500 orang 9 hari besar keagamaan 40 orang 15 kecamatan 300 orang 20 orang 20 orang 300 orang 100 orang							
1058	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	13.604.042.630,00	0,00	0,00	0,00	13.604.042.630,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1059	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	161.603.745,00	0,00	0,00	0,00	161.603.745,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1060	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	3.058.291.566,00	0,00	0,00	0,00	3.058.291.566,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananyan Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)	742 peraturan 1400 orang 40 orang 2 kecamatan 100 orang 154 kasus 34 kasus							
1061	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	742 Dokumen	242.762.664,00	0,00	0,00	0,00	242.762.664,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1062	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	210 Kasus	622.433.499,00	0,00	0,00	0,00	622.433.499,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1063	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	86.165.965,00	0,00	0,00	0,00	86.165.965,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen							
1064	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	282.980.250,00	0,00	0,00	0,00	282.980.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1065	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	330.191.498,00	0,00	0,00	0,00	330.191.498,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1066	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 Laporan	48.635.000,00	0,00	0,00	0,00	48.635.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	18 Laporan 8 Dokumen							
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen 2 Laporan 32 BLUD 3 BUMD 1 Kegiatan 14 Kecamatan 4 Laporan							
1067	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	41 Dokumen	240.802.000,00	0,00	0,00	0,00	240.802.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1068	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	18 Laporan	189.868.000,00	0,00	0,00	0,00	189.868.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1069	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	217.043.000,00	0,00	0,00	0,00	217.043.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitasi Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)	15 Laporan 4 Laporan 3 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1070	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	694.325.000,00	0,00	0,00	0,00	694.325.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1071	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	296.606.000,00	0,00	0,00	0,00	296.606.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1072	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	161.392.000,00	0,00	0,00	0,00	161.392.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Terlaksanannya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Terlaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Terlaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Terlaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin	23 orang 1 Kasus 1 Pelayanan 40 Paket 435 Paket 30 Paket							
1073	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	505 Dokumen	634.717.950,00	0,00	0,00	0,00	634.717.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1074	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	274.468.500,00	0,00	0,00	0,00	274.468.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1075	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	23 Orang	207.342.000,00	0,00	0,00	0,00	207.342.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-							
1076	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	31.056.000,00	0,00	0,00	0,00	31.056.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1077	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	444.834.000,00	0,00	0,00	0,00	444.834.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1078	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	154.722.000,00	0,00	0,00	0,00	154.722.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayaninya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	100 % 134 Laporan 16 Laporan 3 Laporan 420 Unit 80 % 85 % 8 Dokumen B Predikat							
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasni Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen								
1079	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	116.932.015,00	0,00	0,00	0,00	116.932.015,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1080	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	108.861.993,00	0,00	0,00	0,00	108.861.993,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1081	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	50.712.528,00	0,00	0,00	0,00	50.712.528,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	Pajak Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200 Dokumen 1 Tahun 1 Laporan 4 Laporan							
1082	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	26.985.081.075,00	0,00	0,00	0,00	26.985.081.075,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1083	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	599.969.992,00	0,00	0,00	0,00	599.969.992,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1084	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	99.567.000,00	0,00	0,00	0,00	99.567.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 % 300 Orang 143 Orang 2 Dokumen 12 Paket							
1085	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	371.130.540,00	0,00	0,00	0,00	371.130.540,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1086	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	99.940.000,00	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1087	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	143 Orang	809.445.000,00	0,00	0,00	0,00	809.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1088	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	100.493.101,00	0,00	0,00	0,00	100.493.101,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Khabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan	26 Paket 100 % 1 Paket 12 Bulan 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 10 Paket 20 Laporan 4 Paket 1 Paket 4 Paket							
1089	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	349.888.373,00	0,00	0,00	0,00	349.888.373,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1090	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			0	68 0	374.509.200,00	2.930.399.643,00	0,00	0,00	3.304.908.843,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1091	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	92.228.875,00	1.407.771.125,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1092	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.276.392.564,00	0,00	0,00	0,00	1.276.392.564,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1093	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	979.453.050,00	0,00	0,00	0,00	979.453.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1094	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1095	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1096	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.915.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1097	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	5.422.175.000,00	0,00	0,00	0,00	5.422.175.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1098	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3.204.275.373,00	272.877.627,00	0,00	0,00	3.477.153.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1099	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1.360.000,00	756.976.792,00	0,00	0,00	758.336.792,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1100	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.544.533.480,00	0,00	0,00	0,00	4.544.533.480,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1101	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.027.837.234,00	0,00	0,00	0,00	10.027.837.234,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	117 Unit 2 Paket 561 unit							
1102	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	117 Unit	5.603.982.400,00	0,00	0,00	0,00	5.603.982.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1103	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	4.663.483.000,00	0,00	0,00	0,00	4.663.483.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah
1104	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	561 Unit	2.082.094.250,00	0,00	0,00	0,00	2.082.094.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH	2 orang 12 Bulan 12 Bulan 2 paket							
1105	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	357.788.640,00	0,00	0,00	0,00	357.788.640,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1106	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	398.440.000,00	0,00	0,00	0,00	398.440.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1107	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1108	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-							
1109	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	3.493.512.380,00	806.487.620,00	0,00	0,00	4.300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1110	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1111	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah TerlaKsananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024	48 Perangkat Daerah 48 Perangkat Daerah 60 Perangkat Daerah BB Predikat 15 Kecamatan 60 Perangkat Daerah 3 Laporan 2 Dokumen 4 Dokumen							
1112	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	691.684.540,00	0,00	0,00	0,00	691.684.540,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pajak Daerah
1113	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	551.169.990,00	0,00	0,00	0,00	551.169.990,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1114	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	1.041.913.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.913.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1115	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	4 0	366.937.643,00	0,00	0,00	0,00	366.937.643,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhinya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati	100 % 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 108 kali 2 Laporan							
1116	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	2.740.360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1117	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2.663.172.071,00	0,00	0,00	0,00	2.663.172.071,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
1118	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	254.531.323,00	0,00	0,00	0,00	254.531.323,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	95 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	90 % 90 %							
1119	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	3.848.848.050,00	0,00	0,00	0,00	3.848.848.050,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1120	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	398.329.463,00	0,00	0,00	0,00	398.329.463,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	90 % 90 %							
1121	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	2.236.591.308,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1122	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	2.236.591.308,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1123	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.359.913.503,00	0,00	0,00	0,00	1.359.913.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1124	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1.359.913.503,00	0,00	0,00	0,00	1.359.913.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1125	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.236.591.308,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	90 % 90 %							
1126	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.236.591.308,00	0,00	0,00	0,00	2.236.591.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	90 %							
1127	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.222.672.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.672.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1128	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1129	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1130	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	7 Dokumen	865.238.499,00	0,00	0,00	0,00	865.238.499,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	90 %							
1131	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	250.550.000,00	0,00	0,00	0,00	250.550.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1132	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	1.971.390.199,00	0,00	0,00	0,00	1.971.390.199,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	90 %							
1133	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	1.575.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	90 % 90 %							
1134	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8.949.101.200,00	0,00	0,00	0,00	8.949.101.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
1135	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	6.789.096.000,00	0,00	0,00	0,00	6.789.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1136	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	57.882.200,00	0,00	0,00	0,00	57.882.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1137	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.217.333,00	0,00	0,00	0,00	21.217.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1138	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	19.336.200,00	0,00	0,00	0,00	19.336.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1139	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	7.694.319.655,00	0,00	0,00	0,00	7.694.319.655,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pendapatan Bagi Hasil
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	90 % 90 %							
1140	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35 Dokumen	372.443.500,00	0,00	0,00	0,00	372.443.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	90 % 90 %							
1141	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.680.000,00	0,00	0,00	0,00	58.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1142	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	94.741.000,00	0,00	0,00	0,00	94.741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1143	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	275.280.000,00	0,00	0,00	0,00	275.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	90 % 90 %							
1144	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	96.955.315,00	0,00	0,00	0,00	96.955.315,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1145	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	680.000,00	305.328.180,00	0,00	0,00	306.008.180,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1146	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	73.413.200,00	879.630.738,00	0,00	0,00	953.043.938,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1147	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.784.438,00	0,00	0,00	0,00	210.784.438,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1148	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	211.676.570,00	0,00	0,00	0,00	211.676.570,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1149	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1150	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	400.500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1151	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	7.457.568.923,00	0,00	0,00	0,00	7.457.568.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 % 90 %							
1152	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	680.000,00	2.044.775.178,00	0,00	0,00	2.045.455.178,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Lain-lain PAD Yang Sah Pajak Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 % 90 %							
1153	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.170.046.459,00	0,00	0,00	0,00	1.170.046.459,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1154	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	4.074.922.222,00	0,00	0,00	0,00	4.074.922.222,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %							
1155	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	224.050.000,00	0,00	0,00	0,00	224.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1156	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	985.500.000,00	0,00	0,00	0,00	985.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1157	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	341.100.000,00	425.982.015,00	0,00	0,00	767.082.015,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1158	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	137 Unit	165.570.000,00	0,00	0,00	0,00	165.570.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	90 % 90 %							
1159	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	26.547.804.780,00	0,00	0,00	0,00	26.547.804.780,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1160	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113.750.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1161	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	90 %							
1162	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11 Laporan	10.012.036.150,00	0,00	0,00	0,00	10.012.036.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1163	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	2.520.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100 %							
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-							
1164	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 Dokumen	553.133.400,00	0,00	0,00	0,00	553.133.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1165	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	48 Berita Acara	40.486.000,00	0,00	0,00	0,00	40.486.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1166	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	48 Berita Acara	846.799.000,00	0,00	0,00	0,00	846.799.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1167	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	976.926.492,00	0,00	0,00	0,00	976.926.492,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									
1168	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	10 Orang	63.277.000,00	0,00	0,00	0,00	63.277.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %							
1169	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	212.980.894,00	0,00	0,00	0,00	212.980.894,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1170	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	399.061.856,00	0,00	0,00	0,00	399.061.856,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-							
1171	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	97.485.139,00	0,00	0,00	0,00	97.485.139,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90 %							
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %							
1172	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	210.056.000,00	0,00	0,00	0,00	210.056.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1173	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	149.987.000,00	0,00	0,00	0,00	149.987.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1174	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	279.137.500,00	0,00	0,00	0,00	279.137.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1175	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	408.910.250,00	0,00	0,00	0,00	408.910.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %							
1176	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	65.598.000,00	0,00	0,00	0,00	65.598.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1177	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	20.770.000,00	0,00	0,00	0,00	20.770.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1178	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	111.544.000,00	0,00	0,00	0,00	111.544.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1179	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	52.995.000,00	0,00	0,00	0,00	52.995.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %							
1180	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	313.992.000,00	0,00	0,00	0,00	313.992.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1181	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	77.985.000,00	0,00	0,00	0,00	77.985.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1182	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	144.751.000,00	0,00	0,00	0,00	144.751.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1183	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	466.304.000,00	0,00	0,00	0,00	466.304.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1184	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	196.399.000,00	0,00	0,00	0,00	196.399.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %							
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							
1185	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	52.540.872,00	0,00	0,00	0,00	52.540.872,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1186	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.464.260,00	0,00	0,00	0,00	17.464.260,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							
1187	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	13.009.695.983,00	0,00	0,00	0,00	13.009.695.983,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %							
1188	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	95.264.000,00	0,00	0,00	0,00	95.264.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1189	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	76.694.000,00	0,00	0,00	0,00	76.694.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1190	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	227.206.000,00	0,00	0,00	0,00	227.206.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1191	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.962.409,00	0,00	0,00	0,00	29.962.409,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1192	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.322.000,00	168.677.820,00	0,00	0,00	172.999.820,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1193	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.992.295,00	0,00	0,00	0,00	59.992.295,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1194	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	249.999.584,00	0,00	0,00	0,00	249.999.584,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1195	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	209.998.153,00	0,00	0,00	0,00	209.998.153,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1196	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1197	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.306.000,00	0,00	0,00	0,00	11.306.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1198	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	330.463.000,00	0,00	0,00	0,00	330.463.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1199	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	4.322.000,00	80.572.680,00	0,00	0,00	84.894.680,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
1200	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	435.508.260,00	0,00	0,00	0,00	435.508.260,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1201	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	774.722.222,00	0,00	0,00	0,00	774.722.222,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Peralatan Gedung kantor	100 % 100 %							
1202	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	444.930.000,00	0,00	0,00	0,00	444.930.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1203	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.060.000,00	0,00	0,00	0,00	199.060.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1204	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	74.850.000,00	0,00	0,00	0,00	74.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti [deleted]	90 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Tersusunnya Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 % 100 %							
1205	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	273.378.346,00	0,00	0,00	0,00	273.378.346,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 % 100 %							
1206	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	159.929.981,00	0,00	0,00	0,00	159.929.981,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-							
1207	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	202.242.387,00	0,00	0,00	0,00	202.242.387,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 % 100 %							
1208	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	149.628.332,00	0,00	0,00	0,00	149.628.332,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1209	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	100.342.332,00	0,00	0,00	0,00	100.342.332,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1210	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	90.068.146,00	0,00	0,00	0,00	90.068.146,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100 %							
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah yang disusun	2 Dokumen							
1211	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1212	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1213	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1214	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	285.000.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1215	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pengelolaan Penatausahan Perbendaharaan Daerah	100 %							
1216	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7 Dokumen	133.404.000,00	0,00	0,00	0,00	133.404.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1217	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	108.587.000,00	0,00	0,00	0,00	108.587.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1218	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen	98.408.900,00	0,00	0,00	0,00	98.408.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1219	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1220	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1221	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1222	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1223	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1224	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1225	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1226	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1227	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1228	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota									
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	33 Lembaga	132.500.000,00	0,00	0,00	0,00	132.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-							
1229	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1230	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	219.100.208,00	0,00	0,00	494.667.382.300,00	494.886.482.508,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1231	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	6.997.200.620,00	0,00	6.997.200.620,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-							
1232	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	299.544.780,00	0,00	0,00	0,00	299.544.780,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1233	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Data Aset Yang Akurat	100 %							
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	1 Laporan							
1234	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	209.211.800,00	0,00	0,00	0,00	209.211.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1235	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	221.627.299,00	0,00	0,00	0,00	221.627.299,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1236	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	158.548.000,00	0,00	0,00	0,00	158.548.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1237	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	449.930.780,00	0,00	0,00	0,00	449.930.780,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1238	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	123.574.950,00	0,00	0,00	0,00	123.574.950,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1239	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	93.260.000,00	0,00	0,00	0,00	93.260.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1240	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	234.499.000,00	0,00	0,00	0,00	234.499.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1241	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	84.999.900,00	0,00	0,00	0,00	84.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1242	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	3 Laporan	314.999.800,00	0,00	0,00	0,00	314.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1243	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	280.802.000,00	0,00	0,00	0,00	280.802.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksankan tepat waktu dan Akuntabel	100 %							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	100 %							
1244	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.054,00	0,00	0,00	0,00	65.000.054,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1245	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	19.999.979,00	0,00	0,00	0,00	19.999.979,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1246	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	11.779.470.311,00	0,00	0,00	0,00	11.779.470.311,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas roda 4 (empat) yang di Asuransikan	13 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1247	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	136.691.000,00	0,00	0,00	0,00	136.691.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %							
1248	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.096.000,00	0,00	0,00	0,00	71.096.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1249	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	149.740.000,00	0,00	0,00	0,00	149.740.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Peranagkat Daerah yang dilaksanakan	100 %							
1250	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.417,00	0,00	0,00	0,00	30.000.417,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1251	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.328.000,00	186.682.500,00	0,00	0,00	200.010.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1252	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	59.995.070,00	0,00	0,00	0,00	59.995.070,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1253	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	270.173.790,00	3.852.810,00	0,00	0,00	274.026.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1254	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	174.632.095,00	0,00	0,00	0,00	174.632.095,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1255	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1256	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.009.000,00	0,00	0,00	0,00	50.009.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1257	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.784.000,00	0,00	0,00	0,00	249.784.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksankan	100 %							
1258	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34 Unit	680.000,00	99.301.488,00	0,00	0,00	99.981.488,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1259	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	445.444.410,00	0,00	0,00	0,00	445.444.410,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1261	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	970.400.000,00	0,00	0,00	0,00	970.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan siap digunakan	100 %							
1262	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.490.000,00	0,00	0,00	0,00	45.490.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1263	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	439.540.000,00	0,00	0,00	0,00	439.540.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1264	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	439.528.990,00	0,00	0,00	0,00	439.528.990,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah
1265	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	71 Unit	76.165.560,00	0,00	0,00	0,00	76.165.560,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,64 %							
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 % 100 % 100 %							
1266	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	478.100.000,00	0,00	0,00	0,00	478.100.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1267	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	324.800.000,00	0,00	0,00	0,00	324.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	427.666.200,00	0,00	0,00	0,00	427.666.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1269	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	47.026.900,00	55.090.900,00	0,00	0,00	102.117.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1270	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	860.000.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1271	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1272	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	270000 Obyek Pajak	264.000.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1273	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	270000 Dokumen	875.500.000,00	0,00	0,00	0,00	875.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1274	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1275	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	90 Dokumen	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1276	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	250 Dokumen	371.216.000,00	0,00	0,00	0,00	371.216.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1277	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1278	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	392.200.000,00	0,00	0,00	0,00	392.200.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1279	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1280	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1281	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1282	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1283	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan sangat tepat Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1284	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	22.017.755.485,00	0,00	0,00	0,00	22.017.755.485,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
1285	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84.220.000,00	0,00	0,00	0,00	84.220.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1286	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
1287	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1288	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	56.465.500,00	143.534.500,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1289	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1290	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1291	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1292	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1293	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1294	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %							
1295	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	16.988.300,00	83.011.700,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1296	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	398.516.267,00	0,00	0,00	0,00	398.516.267,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1297	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	748.988.444,00	0,00	0,00	0,00	748.988.444,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %							
1298	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	186.000.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1299	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	327.970.000,00	0,00	0,00	0,00	327.970.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1300	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	21.893.970,00	316.542.030,00	0,00	0,00	338.436.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1301	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit	49.979.500,00	0,00	0,00	0,00	49.979.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Survey Kepuasan ASN	87,75 %							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-							
1302	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1303	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1304	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1305	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 Lembaga	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1306	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Pengelolaan Kenaikkan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN Terlaksannya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Mutasi dan Promosi	60 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen 100 %							
1307	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	199.999.900,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1308	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	199.999.850,00	0,00	0,00	0,00	199.999.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1309	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	249.999.850,00	0,00	0,00	0,00	249.999.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	40 Orang							
1310	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	1 Orang	2.799.999.700,00	0,00	0,00	0,00	2.799.999.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1311	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	18 Orang	1.039.999.550,00	0,00	0,00	0,00	1.039.999.550,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1312	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen	799.999.800,00	0,00	0,00	0,00	799.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1313	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	14 Orang	199.999.400,00	0,00	0,00	0,00	199.999.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1314	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	2 Dokumen	199.999.800,00	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	160 Orang 1 Laporan 6901 Dokumen 100 % 20 Dokumen 300 Orang 60 Laporan							
1315	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	102.243.000,00	0,00	0,00	0,00	102.243.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1316	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	200 Orang	50.240.000,00	0,00	0,00	0,00	50.240.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1317	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	117.983.700,00	0,00	0,00	0,00	117.983.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1318	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	60 Laporan	120.459.000,00	0,00	0,00	0,00	120.459.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1319	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai									
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	20 Dokumen	30.129.000,00	0,00	0,00	0,00	30.129.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1320	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	153.248.000,00	0,00	0,00	0,00	153.248.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %							
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 % 4 Laporan 2 Dokumen							
1321	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	38.016.000,00	0,00	0,00	0,00	38.016.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1322	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.936.000,00	0,00	0,00	0,00	9.936.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1323	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1324	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	8.901.765.152,00	0,00	0,00	0,00	8.901.765.152,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Tersediannya jaminan barang milik daerah	1 Dokumen 100 %							
1325	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	46.282.500,00	0,00	0,00	0,00	46.282.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Orang 100 % 2 Paket							
1326	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.536.000,00	0,00	0,00	0,00	51.536.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1327	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	161.010.000,00	0,00	0,00	0,00	161.010.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Persediaan	2 Paket							
1328	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.023.558,00	0,00	0,00	0,00	30.023.558,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1329	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	261.029.820,00	0,00	0,00	261.709.820,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1330	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.009.930,00	0,00	0,00	0,00	60.009.930,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1331	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.001.799,00	0,00	0,00	0,00	200.001.799,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1332	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.040.020,00	0,00	0,00	0,00	107.040.020,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1333	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1334	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1335	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %							
1336	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	680.000,00	108.413.700,00	0,00	0,00	109.093.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan 12 Laporan 100 % 12 Laporan							
1337	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	192.329.000,00	0,00	0,00	0,00	192.329.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1338	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492.522.222,00	0,00	0,00	0,00	492.522.222,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	1 Unit 10 Unit 10 Unit 100 % 8 Unit							
1339	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	281.330.000,00	0,00	0,00	0,00	281.330.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1340	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.980.000,00	174.900.000,00	0,00	0,00	224.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1341	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Inspektorat									
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB Persentase Unit Pelayanan Publik Kategori Baik Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Opini terhadap laporan keuangan pemda	70 % 75 % 87 % 90 % WTP Predikat							
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Jumlah Unit Pelayanan Publik Kategori Baik	20 Jumlah 39 Jumlah 0 Jumlah 15 Jumlah							
1342	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	744.999.800,00	0,00	0,00	0,00	744.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1343	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1344	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1345	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	99.999.900,00	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1346	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	75 Laporan	799.999.800,00	0,00	0,00	0,00	799.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1347	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	209.999.800,00	0,00	0,00	0,00	209.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %							
1348	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54 Laporan	829.999.900,00	0,00	0,00	0,00	829.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Level Kapabilitas APIP Nilai Reformasi Birokrasi PEMDA	3,3 Skor 3 Level B Skor							
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terpenuhinya elemen kapabilitas APIP	100 %							
1349	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	184.999.900,00	0,00	0,00	0,00	184.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Nilai RB bernilai Baik Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SPIP level 3	80 % 70 %							
1350	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perangkat daerah	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1351	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 perangkat daerah	374.999.800,00	0,00	0,00	0,00	374.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1352	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	489.999.800,00	0,00	0,00	0,00	489.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1353	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah	125.001.300,00	0,00	0,00	0,00	125.001.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %							
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1354	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	64.999.900,00	0,00	0,00	0,00	64.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1355	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1356	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	34.999.900,00	0,00	0,00	0,00	34.999.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan APIP	100 %							
1357	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	17.064.693.797,00	0,00	0,00	0,00	17.064.693.797,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-							
1358	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	89.316.500,00	0,00	0,00	0,00	89.316.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian APIP	100 %							
1359	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	83.697.560,00	0,00	0,00	0,00	83.697.560,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1360	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	58.599.000,00	0,00	0,00	0,00	58.599.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1361	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	208.584.000,00	0,00	0,00	0,00	208.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum APIP	100 %							
1362	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	24.867.180,00	0,00	0,00	0,00	24.867.180,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1363	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	680.000,00	196.718.900,00	0,00	0,00	197.398.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1364	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	54.725.900,00	0,00	0,00	0,00	54.725.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1365	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket	200.586.904,00	0,00	0,00	0,00	200.586.904,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1366	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	210.075.793,00	0,00	0,00	0,00	210.075.793,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1367	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1368	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	48.776.000,00	0,00	0,00	0,00	48.776.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1369	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	229.574.000,00	0,00	0,00	0,00	229.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1370	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	354.720.000,00	0,00	0,00	0,00	354.720.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1371	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	680.000,00	99.038.000,00	0,00	0,00	99.718.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1372	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	257.199.012,00	0,00	0,00	0,00	257.199.012,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1373	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.644.444,00	0,00	0,00	0,00	430.644.444,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1374	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	488.910.000,00	0,00	0,00	0,00	488.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1375	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.624.000,00	0,00	0,00	0,00	198.624.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1376	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	60.390.000,00	0,00	0,00	0,00	60.390.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
		Kecamatan Sekayu									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sekayu)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
1377	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	570.010.600,00	0,00	0,00	0,00	570.010.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 % 100 % 4 Kelurahan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1378	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16.287.700,00	73.785.483,00	0,00	0,00	90.073.183,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sekayu Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 % 7 Desa/Kelurahan							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Desa/Kelurahan							
1379	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselengaranya Penegakan Peraturan Daerah Terselenggarakan penegakan peraturan daerah	100 % 100 %							
1380	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	113 Laporan	24.929.730,00	0,00	0,00	0,00	24.929.730,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Forkompinda Tingkat Kecamatan	4 Kali							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1381	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	420 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sekayu	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terselenggaranya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 % 100 %							
1382	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	40 Dokumen	49.960.000,00	0,00	0,00	0,00	49.960.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1383	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	4 laporan 3 dokumen 100 % 100 %							
1384	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.695.000,00	0,00	0,00	0,00	14.695.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1385	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.890.000,00	0,00	0,00	0,00	19.890.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	100 % 100 % 100 %							
1386	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	7.260.585.642,00	0,00	0,00	0,00	7.260.585.642,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	3 orang 1 paket 240 dokumen 100 %							
1387	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.702.260,00	0,00	0,00	0,00	51.702.260,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1388	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.195.000,00	0,00	0,00	0,00	49.195.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	30 laporan 240 dokumen 2 paket 2 paket 1 paket 3 paket 1 paket 400 laporan 100 % 100 %							
1389	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.992.205,00	0,00	0,00	0,00	9.992.205,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1390	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	680.000,00	72.587.594,00	0,00	0,00	73.267.594,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1391	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.909.071,00	0,00	0,00	0,00	19.909.071,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1392	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	40.023.558,00	0,00	0,00	0,00	40.023.558,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1393	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.039.208,00	0,00	0,00	0,00	34.039.208,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1394	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.680.000,00	0,00	0,00	0,00	40.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1395	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1396	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	100.037.000,00	0,00	0,00	0,00	100.037.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Tersedianya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit 14 unit 100 % 100 %							
1397	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	680.000,00	48.421.530,00	0,00	0,00	49.101.530,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan 12 laporan 100 % 100 %							
1398	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.317.600,00	0,00	0,00	0,00	134.317.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah
1399	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	767.941.778,00	0,00	0,00	0,00	767.941.778,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1400	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	120.760.000,00	0,00	0,00	0,00	120.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1401	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	68.045.880,00	0,00	0,00	0,00	68.045.880,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1402	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	20.313.000,00	0,00	0,00	0,00	20.313.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kelurahan Serasan Jaya									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan 100 % 100 % 4 Kelurahan							
1403	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	116.794.350,00	33.205.650,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit							
1404	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	349.999.937,00	0,00	0,00	0,00	349.999.937,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1405	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Soak Baru									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan							
1406	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	89.035.249,00	60.964.750,00	0,00	0,00	149.999.999,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit							
1407	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	349.999.949,00	0,00	0,00	0,00	349.999.949,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Balai Agung									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %							
1409	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	77.840.121,00	72.159.879,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1410	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	Dana Bagi Hasil (DBH)
1411	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	347.922.080,00	2.077.920,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Balai Agung	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Kayuara									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1412	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.592.053,00	34.407.947,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit							
1413	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
1414	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Kayu Ara	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Lais									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lais) Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70 % 90 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 % 70 %							
1415	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	470.987.000,00	0,00	0,00	0,00	470.987.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90 % 70 %							
1416	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	22.187.805,00	0,00	0,00	0,00	22.187.805,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	90 %							
1417	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Lais	70 % 85 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada	85 % 70 %							
1418	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lais)	70 % 83 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	70 % 83 %							
1419	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	17.235.000,00	0,00	0,00	0,00	17.235.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lais	70 % 97 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 % 97 %							
1420	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	22.050.000,00	0,00	0,00	0,00	22.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
1421	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	79 % 96,86 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 % 93 %							
1422	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	9.855.000,00	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1423	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 12 Bulan							
1424	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.156.076.912,00	0,00	0,00	0,00	3.156.076.912,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70 % 95 %							
1425	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.130.000,00	0,00	0,00	0,00	25.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1426	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.875.000,00	0,00	0,00	0,00	49.875.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	85 % 97 %							
1427	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.021.636,00	0,00	0,00	0,00	10.021.636,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1428	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	84.628.509,00	0,00	0,00	85.308.509,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1429	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.197.452,00	0,00	0,00	0,00	17.197.452,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1430	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.735.180,00	0,00	0,00	0,00	41.735.180,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1431	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.958.784,00	0,00	0,00	0,00	34.958.784,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1432	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1433	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	30.870.000,00	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1434	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	99.950.000,00	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	70 % 98 %							
1435	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	680.000,00	48.940.832,00	0,00	0,00	49.620.832,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan 100 %							
1436	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	71.521.599,00	0,00	0,00	0,00	71.521.599,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1437	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	172.960.444,00	0,00	0,00	0,00	172.960.444,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	90 % 95 %							
1438	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	86.580.000,00	0,00	0,00	0,00	86.580.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1439	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.904.800,00	0,00	0,00	0,00	74.904.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
1440	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	14.420.000,00	0,00	0,00	0,00	14.420.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lais, Lais	Pajak Daerah
		Kecamatan Babat Toman									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-							
1441	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	508.723.000,00	0,00	0,00	0,00	508.723.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1442	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.251.105,00	0,00	0,00	0,00	9.251.105,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1443	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1444	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1445	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1446	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-							
1447	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1448	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1449	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.992.520,00	0,00	0,00	0,00	14.992.520,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1450	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20.007.361,00	0,00	0,00	0,00	20.007.361,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1451	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.372.082.864,00	0,00	0,00	0,00	3.372.082.864,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
1452	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	20.538.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1453	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	47.355.000,00	0,00	0,00	0,00	47.355.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1454	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.989.800,00	0,00	0,00	0,00	9.989.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1455	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	74.855.292,00	0,00	0,00	74.855.292,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1456	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.016.075,00	0,00	0,00	0,00	20.016.075,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1457	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.997.851,00	0,00	0,00	0,00	39.997.851,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1458	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.999.910,00	0,00	0,00	0,00	34.999.910,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1459	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1460	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00	25.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1461	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.374.000,00	0,00	0,00	0,00	100.374.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1462	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	49.762.632,00	0,00	0,00	49.762.632,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1463	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.336.000,00	0,00	0,00	0,00	75.336.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1464	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	387.905.467,00	0,00	0,00	0,00	387.905.467,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1465	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	123.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1466	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.723.860,00	0,00	0,00	0,00	74.723.860,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1467	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	7.320.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kelurahan Babat									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1468	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	115.270.064,00	34.729.680,00	0,00	0,00	149.999.744,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1469	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	399.999.208,00	0,00	0,00	0,00	399.999.208,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	Dana Bagi Hasil (DBH)
1470	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	292.648.380,00	7.351.419,00	0,00	0,00	299.999.799,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Babat	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kelurahan Mangun Jaya									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1471	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	84.129.321,00	65.870.508,00	0,00	0,00	149.999.829,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1472	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	399.999.769,00	0,00	0,00	0,00	399.999.769,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
1473	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	292.647.750,00	7.351.419,00	0,00	0,00	299.999.169,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Toman, Mangun Jaya	Dana Alokasi Umum (DAU)
		Kecamatan Keluang									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %							
1474	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	496.918.000,00	0,00	0,00	0,00	496.918.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terlaksananaya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1475	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.106.000,00	0,00	0,00	0,00	33.106.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka	100 %							
1476	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	100 %							
1477	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %							
1478	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimcam	100 % 100 %							
1479	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	14.015.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 % 100 %							
1480	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1481	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan dan Perkantoran	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daera Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1482	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.965.200,00	0,00	0,00	0,00	14.965.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1483	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.999.812,00	0,00	0,00	0,00	19.999.812,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1484	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.986.569.938,00	0,00	0,00	0,00	2.986.569.938,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1485	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	20.538.000,00	0,00	0,00	0,00	20.538.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1486	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	44.250.000,00	0,00	0,00	0,00	44.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1487	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.998.436,00	0,00	0,00	0,00	9.998.436,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1488	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.509.600,00	73.388.094,00	0,00	0,00	74.897.694,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1489	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	19.981.554,00	0,00	0,00	0,00	19.981.554,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1490	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	39.999.794,00	0,00	0,00	0,00	39.999.794,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1491	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	34.996.080,00	0,00	0,00	0,00	34.996.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1492	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1493	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1494	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %							
1495	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	48.141.948,00	0,00	0,00	48.141.948,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan 100 %							
1496	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1497	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	253.190.667,00	0,00	0,00	0,00	253.190.667,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1498	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1499	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	74.970.000,00	0,00	0,00	0,00	74.970.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1500	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.130.000,00	0,00	0,00	0,00	21.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kelurahan Keluang									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1501	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	143.929.709,00	5.999.550,00	0,00	0,00	149.929.259,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang	Pajak Daerah
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1502	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	347.593.088,00	0,00	0,00	0,00	347.593.088,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1503	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	352.477.528,00	0,00	0,00	0,00	352.477.528,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Keluang	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Sanga Desa									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %							
1504	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	476.500.000,00	0,00	0,00	0,00	476.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %							
1505	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.524.000,00	0,00	0,00	0,00	13.524.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1506	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-							
1507	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sanga Desa	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %							
1508	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	ersentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1509	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	12.225.000,00	0,00	0,00	0,00	12.225.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
1510	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sanga Desa	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %							
1511	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	13.628.499,00	0,00	0,00	0,00	13.628.499,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
1512	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1513	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33.795.000,00	0,00	0,00	0,00	33.795.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1514	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	100 %							
1515	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.463.094.014,00	0,00	0,00	0,00	3.463.094.014,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %							
1516	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1517	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.355.000,00	0,00	0,00	0,00	42.355.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Adminstrasi Umum Kecamatan	100 %							
1518	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.988.530,00	0,00	0,00	0,00	9.988.530,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1519	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	680.000,00	96.606.852,00	0,00	0,00	97.286.852,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1520	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	13.724.040,00	0,00	0,00	0,00	13.724.040,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1521	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	38.485.330,00	0,00	0,00	0,00	38.485.330,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1522	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	42.662.850,00	0,00	0,00	0,00	42.662.850,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1523	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1524	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1525	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	104.126.000,00	0,00	0,00	0,00	104.126.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %							
1526	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	680.000,00	32.567.400,00	0,00	0,00	33.247.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
1527	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.621.400,00	0,00	0,00	0,00	44.621.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1528	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	429.882.400,00	0,00	0,00	0,00	429.882.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
1529	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	120.880.000,00	0,00	0,00	0,00	120.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1530	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.880.000,00	0,00	0,00	0,00	34.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
1531	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Pajak Daerah
		Kelurahan Ngulak I									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %							
1532	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.588.543,00	0,00	0,00	0,00	149.588.543,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kec. Sanga Desa	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan	100 % 100 %							
1533	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Alokasi Umum (DAU)
1534	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	278.374.605,00	20.757.000,00	0,00	0,00	299.131.605,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak I	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Ngulak									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	100 %							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 % 100 %							
1535	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	149.708.288,00	0,00	0,00	0,00	149.708.288,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100 %							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan Persentase Pemberdayaan Kelurahan ditingkat kecamatan	100 % 100 %							
1536	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	349.575.000,00	0,00	0,00	0,00	349.575.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	Dana Bagi Hasil (DBH)
1537	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	349.281.278,00	0,00	0,00	0,00	349.281.278,00	Kab. Musi Banyuasin, Sanga Desa, Ngulak	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Plakat Tinggi									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	8 Dokumen							
1538	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen	522.224.000,00	0,00	0,00	0,00	522.224.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	12 Laporan							
1539	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.776.000,00	0,00	0,00	0,00	12.776.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pemenuhan Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan							
1540	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.125.000,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasi Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Plakat Tinggi	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %							
1541	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Plakat Tinggi	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %							
1542	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi) Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 % 65 % 75 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	75 % 65 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1543	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Plakat TInggi	100 % 70 % 75 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 % 75 %							
1544	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
1545	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Plakat Tinggi)	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen/ Laporan							
1546	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1547	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan							
1548	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.894.204.525,00	0,00	0,00	0,00	1.894.204.525,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kemampuan aparatur	100 %							
1549	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	12.714.000,00	0,00	0,00	0,00	12.714.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1550	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.460.000,00	0,00	0,00	0,00	45.460.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %							
1551	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	9.995.449,00	0,00	0,00	0,00	9.995.449,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1552	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	680.000,00	72.814.496,00	0,00	0,00	73.494.496,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1553	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket	19.993.556,00	0,00	0,00	0,00	19.993.556,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1554	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	39.993.744,00	0,00	0,00	0,00	39.993.744,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1555	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	34.999.424,00	0,00	0,00	0,00	34.999.424,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1556	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1557	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	41.510.000,00	0,00	0,00	0,00	41.510.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1558	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	120.543.291,00	0,00	0,00	0,00	120.543.291,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %							
1559	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	680.000,00	49.170.780,00	0,00	0,00	49.850.780,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1560	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.001.536,00	0,00	0,00	0,00	75.001.536,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1561	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Laporan	226.820.622,00	0,00	0,00	0,00	226.820.622,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %							
1562	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00	0,00	0,00	0,00	118.260.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1563	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.870.000,00	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
1564	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	13.290.000,00	0,00	0,00	0,00	13.290.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Plakat Tinggi, Sido Rahayu	Pajak Daerah
		Kecamatan Batanghari Leko									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %							
1565	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	519.854.000,00	0,00	0,00	0,00	519.854.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							
1566	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.530.000,00	0,00	0,00	0,00	8.530.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1567	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (Kec. Batanghari Leko)	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %							
1568	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Kec. Batanghari Leko)	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Penerapan PERDA Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %							
1569	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16 Laporan	14.412.000,00	0,00	0,00	0,00	14.412.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Batanghari Leko)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1570	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	11.712.000,00	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Batanghari Leko	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa Yang dibina Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1571	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1572	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16 Laporan	13.292.000,00	0,00	0,00	0,00	13.292.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1573	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	Pajak Daerah
1574	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Tanah Abang	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1575	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.291.490.536,00	0,00	0,00	0,00	2.291.490.536,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1576	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	16.328.000,00	0,00	0,00	0,00	16.328.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1577	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	47.941.000,00	0,00	0,00	0,00	47.941.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1578	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.275.500,00	0,00	0,00	0,00	14.275.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1579	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	680.000,00	77.587.285,00	0,00	0,00	78.267.285,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1580	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	19.999.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1581	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.998.300,00	0,00	0,00	0,00	39.998.300,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1582	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.986.000,00	0,00	0,00	0,00	34.986.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1583	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1584	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1585	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.012.000,00	0,00	0,00	0,00	100.012.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %							
1586	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	680.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00	44.930.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Administrasi Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1587	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.429.500,00	0,00	0,00	0,00	79.429.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1588	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	203.321.333,00	0,00	0,00	0,00	203.321.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1589	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1590	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.270.000,00	0,00	0,00	0,00	56.270.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1591	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Batang Hari Leko, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kecamatan Sungai Keruh									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100 % 100 %							
1592	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	466.300.000,00	0,00	0,00	0,00	466.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan PATEN Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							
1593	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.610.000,00	0,00	0,00	0,00	25.610.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1594	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Keruh	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggaranya penegakan peraturan daerah	100 %							
1595	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Keruh)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Forkompinda Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimda tingkat Kecamatan	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1596	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	20.006.000,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Keruh	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah	10 Dokumen 100 %							
1597	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen	20.580.000,00	0,00	0,00	0,00	20.580.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1598	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	20.006.000,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evalusai kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1599	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.166.000,00	0,00	0,00	0,00	10.166.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1600	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	15.150.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1601	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.267.058.537,00	0,00	0,00	0,00	2.267.058.537,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1602	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	14.372.000,00	0,00	0,00	0,00	14.372.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1603	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	52.355.000,00	0,00	0,00	0,00	52.355.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1604	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5.081.100,00	0,00	0,00	0,00	5.081.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1605	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	680.000,00	88.155.930,00	0,00	0,00	88.835.930,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1606	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	10.229.600,00	0,00	0,00	0,00	10.229.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1607	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	50.049.972,00	0,00	0,00	0,00	50.049.972,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1608	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35.000.200,00	0,00	0,00	0,00	35.000.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1609	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1610	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1611	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.244.000,00	0,00	0,00	0,00	102.244.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1612	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	680.000,00	19.230.000,00	0,00	0,00	19.910.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %							
1613	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	35.129.058,00	0,00	0,00	0,00	35.129.058,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1614	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	171.506.489,00	0,00	0,00	0,00	171.506.489,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1615	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	120.760.000,00	0,00	0,00	0,00	120.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1616	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.062.000,00	0,00	0,00	0,00	75.062.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1617	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Keruh, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kecamatan Sungai Lilin									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
1618	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	537.584.000,00	0,00	0,00	0,00	537.584.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %							
1619	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.176.000,00	0,00	0,00	0,00	7.176.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %							
1620	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Sungai Lilin	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan	100 % 100 %							
1621	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Sungai Lilin)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 % 100 %							
1622	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Sungai Lilin	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 % 100 %							
1623	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1624	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dilaksanakan Tepat Waktu Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1625	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.760.000,00	0,00	0,00	0,00	22.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1626	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 % 100 %							
1627	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.340.579.804,00	0,00	0,00	0,00	3.340.579.804,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor	100 %							
1628	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.133.744,00	0,00	0,00	0,00	11.133.744,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1629	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	702.200,00	82.027.335,00	0,00	0,00	82.729.535,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1630	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.279.052,00	0,00	0,00	0,00	16.279.052,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1631	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.037.397,00	0,00	0,00	0,00	60.037.397,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1632	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.628.800,00	0,00	0,00	0,00	29.628.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1633	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	29.280.000,00	0,00	0,00	0,00	29.280.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1634	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	81.690.000,00	0,00	0,00	0,00	81.690.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1635	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	133.880.000,00	0,00	0,00	0,00	133.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 % 100 %							
1636	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	680.000,00	5.983.511,00	0,00	0,00	6.663.511,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhanan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
1637	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.851.620,00	0,00	0,00	0,00	71.851.620,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1638	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	333.466.933,00	0,00	0,00	0,00	333.466.933,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 % 100 %							
1639	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	122.260.000,00	0,00	0,00	0,00	122.260.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1640	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.680.000,00	0,00	0,00	0,00	48.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1641	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15.860.000,00	0,00	0,00	0,00	15.860.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kelurahan Sungai Lilin									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %							
1642	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	124.364.550,00	25.635.450,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	100 % 100 %							
1643	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	Dana Bagi Hasil (DBH)
1644	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Sungai Lilin Jaya									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kelurahan	100 % 100 % 100 %							
1645	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111.462.354,00	38.537.646,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan	100 % 100 %							
1646	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1647	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sungai Lilin, Sungai Lilin Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Bayung Lencir									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	7 kegiatan							
1648	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	499.347.000,00	0,00	0,00	0,00	499.347.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan terlasananya pelayanan PATEN	100 % 12 bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1649	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	29.182.600,00	0,00	0,00	0,00	29.182.600,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1650	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penegakan peraturan daerah kecamatan bayung lencir	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terlaksananya penegakan peraturan kepala daerah	100 % 1 tahun							
1651	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Bayung Lencir)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan (Bayung Lencir Terlaksananya Forkopimda tingkat Kecamatan	100 % 12 bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1652	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Bayung Lencir	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang dibina terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 % 21 Desa							
1653	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1654	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	16.565.000,00	0,00	0,00	0,00	16.565.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peresentase kualitas pelayanan masyarakat	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggara nya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 12 bulan 100 %							
1655	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	14.974.000,00	0,00	0,00	0,00	14.974.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1656	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	19.680.000,00	0,00	0,00	0,00	19.680.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daera Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 1 tahun							
1657	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.847.999.918,00	0,00	0,00	0,00	2.847.999.918,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah Terselenggaran ya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya admnistrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 4 orang 100 %							
1658	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	19.560.000,00	0,00	0,00	0,00	19.560.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1659	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	40.460.000,00	0,00	0,00	0,00	40.460.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1660	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.936.150,00	0,00	0,00	0,00	9.936.150,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1661	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0,00	78.914.451,00	0,00	0,00	78.914.451,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1662	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.001.090,00	0,00	0,00	0,00	20.001.090,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1663	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	39.980.758,00	0,00	0,00	0,00	39.980.758,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1664	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	34.976.100,00	0,00	0,00	0,00	34.976.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1665	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1666	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1667	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.940.000,00	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1668	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	48.433.407,00	0,00	0,00	48.433.407,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1669	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.115.000,00	0,00	0,00	0,00	83.115.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1670	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303.328.800,00	0,00	0,00	0,00	303.328.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1671	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	85.460.000,00	0,00	0,00	0,00	85.460.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1672	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.774.000,00	0,00	0,00	0,00	74.774.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1673	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	24.620.000,00	0,00	0,00	0,00	24.620.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kelurahan Bayung Lencir									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1674	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	121.727.065,00	28.272.477,00	0,00	0,00	149.999.542,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1675	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	341.755.919,00	7.281.600,00	0,00	0,00	349.037.519,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1676	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	345.981.052,00	3.996.000,00	0,00	0,00	349.977.052,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kelurahan Bayung Lencir Indah									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-							
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1677	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	119.213.415,00	30.760.764,00	0,00	0,00	149.974.179,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-							
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-							
1678	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	341.835.976,00	8.158.500,00	0,00	0,00	349.994.476,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir Indah	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1679	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	349.949.700,00	0,00	0,00	0,00	349.949.700,00	Kab. Musi Banyuasin, Bayung Lencir, Bayung Lencir Indah	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Kecamatan Lalan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 % 100 %							
1680	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19 Dokumen	755.380.000,00	0,00	0,00	0,00	755.380.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							
1681	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %							
1682	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec. Lalan)	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %							
1683	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-							
1684	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lalan)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-							
1685	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27 Orang	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Jumlah Desa yang dibina (Kec. Lalan)	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 % 100 %							
1686	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	27 Dokumen	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1687	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	27 Laporan	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat, Persentase pemenuhan layanan administrasi, Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinnerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1688	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1689	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1690	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	2.591.798.099,00	0,00	0,00	0,00	2.591.798.099,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1691	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	18.582.000,00	0,00	0,00	0,00	18.582.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1692	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.230.000,00	0,00	0,00	0,00	50.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1693	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9.999.500,00	0,00	0,00	0,00	9.999.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1694	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	680.000,00	74.074.100,00	0,00	0,00	74.754.100,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1695	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	17.093.900,00	0,00	0,00	0,00	17.093.900,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1696	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	39.967.020,00	0,00	0,00	0,00	39.967.020,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1697	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1698	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1699	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1700	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.929.000,00	0,00	0,00	0,00	99.929.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %							
1701	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	680.000,00	49.124.000,00	0,00	0,00	49.804.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1702	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	23.630.167,00	0,00	0,00	0,00	23.630.167,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1703	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.141.867,00	0,00	0,00	0,00	97.141.867,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1704	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.920.000,00	0,00	0,00	0,00	36.920.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1705	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.823.000,00	0,00	0,00	0,00	74.823.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1706	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.990.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lalan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kecamatan Tungkal Jaya									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintaj di tingkat kecamatan	100 % 100 %							
1707	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	428.236.000,00	0,00	0,00	0,00	428.236.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Persentase Penyelenggaraaan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1708	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	19.375.000,00	0,00	0,00	0,00	19.375.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
1709	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Tungkal Jaya	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelenggaraan kegiatan koordinasi penerapan perda	100 % 100 %							
1710	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya) Persentase Penyelesaian Konflik di wilayah kecamatan	100 % 85 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Tungkal Jaya)	85 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1711	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70 Orang	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Tungkal Jaya	100 % 85 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Jumlah Desa Yang Dibina	100 % 85 %							
1712	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1713	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	55.929.000,00	0,00	0,00	0,00	55.929.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan penganggran evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %							
1714	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.797.550,00	0,00	0,00	0,00	10.797.550,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1715	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.906.825,00	0,00	0,00	0,00	8.906.825,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100 %							
1716	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.467.078.162,00	0,00	0,00	0,00	2.467.078.162,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
1717	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.670.000,00	0,00	0,00	0,00	14.670.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1718	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20.230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.230.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %							
1719	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.925.065,00	0,00	0,00	0,00	9.925.065,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1720	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	87.540.927,00	0,00	0,00	88.220.927,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1721	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.992.545,00	0,00	0,00	0,00	17.992.545,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1722	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.768.328,00	0,00	0,00	0,00	37.768.328,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1723	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.592.800,00	0,00	0,00	0,00	28.592.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1724	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1725	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1726	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.874.000,00	0,00	0,00	0,00	123.874.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %							
1727	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	680.000,00	42.885.960,00	0,00	0,00	43.565.960,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %							
1728	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	113.916.000,00	0,00	0,00	0,00	113.916.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1729	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.914.400,00	0,00	0,00	0,00	157.914.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase saranan dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 %							
1730	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1731	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1732	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6.710.000,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Tungkal Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kecamatan Lawang Wetan									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) [deleted]	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 % 100 %							
1733	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	471.700.000,00	0,00	0,00	0,00	471.700.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1734	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	40.860.000,00	0,00	0,00	0,00	40.860.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1735	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
1736	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. lawang Wetan	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda	100 %							
1737	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan) Persentase Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1738	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Lawang Wetan	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang Dibina Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Lawang Wetan)	100 % 100 %							
1739	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4 Dokumen	15.540.000,00	0,00	0,00	0,00	15.540.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1740	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1741	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1742	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	12.510.000,00	0,00	0,00	0,00	12.510.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1743	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.792.156.872,00	0,00	0,00	0,00	2.792.156.872,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Peningkatan Kualitas Kepegawaian	100 % 100 %							
1744	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	21.218.000,00	0,00	0,00	0,00	21.218.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1745	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %							
1746	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.696.998,00	0,00	0,00	0,00	7.696.998,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1747	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	53.268.056,00	0,00	0,00	53.948.056,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1748	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	13.089.356,00	0,00	0,00	0,00	13.089.356,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1749	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.016.661,00	0,00	0,00	0,00	46.016.661,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1750	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.982.000,00	0,00	0,00	0,00	31.982.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1751	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	41.360.000,00	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1752	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	25.880.000,00	0,00	0,00	0,00	25.880.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1753	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	142.640.000,00	0,00	0,00	0,00	142.640.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1754	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	680.000,00	34.765.200,00	0,00	0,00	35.445.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %							
1755	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.798.325,00	0,00	0,00	0,00	71.798.325,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1756	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	307.417.244,00	0,00	0,00	0,00	307.417.244,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 % 100 %							
1757	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	118.260.000,00	0,00	0,00	0,00	118.260.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1758	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	43.190.000,00	0,00	0,00	0,00	43.190.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
1759	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	23.530.000,00	0,00	0,00	0,00	23.530.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Lawang Wetan, Ulak Paceh	Pajak Daerah
		Kecamatan Babat Supat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
1760	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	492.852.000,00	0,00	0,00	0,00	492.852.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-							
1761	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.099.200,00	0,00	0,00	0,00	33.099.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1762	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kecamatan Babat Supat	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi Penerapan Perda	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1763	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Babat Supat)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik diwilayah Kecamatan	100 %							
1764	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	7.747.000,00	0,00	0,00	0,00	7.747.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Babat Supat	100 % 65 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Desa yang dibina	65 %							
1765	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3 Dokumen	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1766	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-							
1767	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	9.999.948,00	0,00	0,00	0,00	9.999.948,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1768	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1769	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.979.448.753,00	0,00	0,00	0,00	1.979.448.753,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %							
1770	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	9.780.000,00	0,00	0,00	0,00	9.780.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1771	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	49.959.000,00	0,00	0,00	0,00	49.959.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	100 %							
1772	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	9.996.927,00	0,00	0,00	0,00	9.996.927,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1773	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 Paket	0,00	54.356.968,00	0,00	0,00	54.356.968,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1774	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	19.994.874,00	0,00	0,00	0,00	19.994.874,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1775	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	24.683.349,00	0,00	0,00	0,00	24.683.349,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1776	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.043.720,00	0,00	0,00	0,00	14.043.720,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1777	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1778	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.070.000,00	0,00	0,00	0,00	40.070.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1779	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.319.000,00	0,00	0,00	0,00	151.319.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %							
1780	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	25.330.261,00	0,00	0,00	25.330.261,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemunuhan Layanan Administrasi	100 %							
1781	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.626.244,00	0,00	0,00	0,00	111.626.244,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1782	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	172.960.444,00	0,00	0,00	0,00	172.960.444,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %							
1783	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.840.000,00	0,00	0,00	0,00	78.840.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1784	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	149.792.000,00	0,00	0,00	0,00	149.792.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Babat Supat, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1785	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	11.590.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
		Kecamatan Jirak Jaya									
	7	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01	KECAMATAN									
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Jirak Jaya)	100 %							
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggeraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 % 100 %							
1786	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	483.354.000,00	0,00	0,00	0,00	483.354.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 % 100 %							
1787	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.031.000,00	0,00	0,00	0,00	19.031.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-							
1788	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %							
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %							
1789	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Jirak	100 %							
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terselenggarakan penegakan peraturan daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah	100 % 100 %							
1790	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec.Jirak Jaya)	100 %							
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Forkompinda tingkat kecamatan Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan	100 % 100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1791	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	13.815.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Jirak Jaya	100 %							
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Penyelenggraan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %							
1792	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Dokumen	14.160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.160.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1793	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	14.160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.160.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dan perkantoran	100 %							
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1794	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1795	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1796	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.206.893.144,00	0,00	0,00	0,00	1.206.893.144,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kemampuan aparatur Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1797	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.824.000,00	0,00	0,00	0,00	7.824.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1798	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	100 % 100 %							
1799	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.997.200,00	0,00	0,00	0,00	9.997.200,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1800	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	680.000,00	67.893.483,00	0,00	0,00	68.573.483,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1801	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.999.500,00	0,00	0,00	0,00	19.999.500,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1802	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.050.800,00	0,00	0,00	0,00	40.050.800,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1803	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	36.275.400,00	0,00	0,00	0,00	36.275.400,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1804	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material									
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1805	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1806	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %							
1807	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	680.000,00	54.691.920,00	0,00	0,00	55.371.920,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1808	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.460.000,00	0,00	0,00	0,00	38.460.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1809	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.098.578,00	0,00	0,00	0,00	218.098.578,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %							
1810	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.040.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1811	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	74.992.000,00	0,00	0,00	0,00	74.992.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1812	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Jirak Jaya, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati

H. SANDI FAHLEPI

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	611.300.636.807,00	1.799.823.500,00	0,00	0,00	613.100.460.307,00
1	01	1	02	Kesehatan	500.160.315.008,00	13.636.799.774,00	0,00	0,00	513.797.114.782,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.699.754.949,00	428.571.999,00	0,00	0,00	34.128.326.948,00
1	01	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.715.569.121,00	405.745.150,00	0,00	0,00	12.121.314.271,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	29.659.325.688,00	622.393.052,00	0,00	0,00	30.281.718.740,00
1	01	1	06	Sosial	8.786.968.296,00	297.561.000,00	0,00	0,00	9.084.529.296,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	7.402.209.016,00	219.148.490,00	0,00	0,00	7.621.357.506,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.037.985.248,00	145.138.945,00	0,00	0,00	6.183.124.193,00
1	01	2	09	Pangan	6.959.578.730,00	217.607.730,00	0,00	0,00	7.177.186.460,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	30.330.787.944,00	299.826.300,00	0,00	0,00	30.630.614.244,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.726.788.029,00	5.744.904.665,00	0,00	0,00	22.471.692.694,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.729.610.578,00	281.341.155,00	0,00	0,00	20.010.951.733,00
1	01	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.030.622.884,00	3.295.508.210,00	0,00	0,00	13.326.131.094,00
1	01	2	15	Perhubungan	11.720.673.643,00	192.035.994,00	0,00	0,00	11.912.709.637,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	8.562.100.580,00	479.348.039,00	0,00	0,00	9.041.448.619,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.761.447.255,00	274.987.400,00	0,00	0,00	6.036.434.655,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	12.834.277.581,00	2.455.719.331,00	0,00	0,00	15.289.996.912,00
1	01	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	12.411.656.491,00	232.430.680,00	0,00	0,00	12.644.087.171,00
1	01	2	20	Statistik	1.144.013.017,00	119.204.758,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	2	23	Perpustakaan	7.734.271.597,00	152.666.996,00	0,00	0,00	7.886.938.593,00
1	01	2	24	Kearsipan	703.229.553,00	52.978.025,00	0,00	0,00	756.207.578,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	8.148.953.354,00	251.835.107,00	0,00	0,00	8.400.788.461,00
1	01	3	27	Pertanian	35.498.617.809,00	761.426.696,00	0,00	0,00	36.260.044.505,00
1	01	3	30	Perdagangan	11.609.016.278,00	438.371.253,00	0,00	0,00	12.047.387.531,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	114.637.078.253,00	6.174.512.807,00	0,00	0,00	120.811.591.060,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	103.157.715.594,00	3.655.716.111,00	0,00	0,00	106.813.431.705,00
1	01	5	01	Perencanaan	22.036.879.569,00	249.250.500,00	0,00	0,00	22.286.130.069,00
1	01	5	02	Keuangan	58.020.422.659,00	888.015.928,00	6.997.200.620,00	494.667.382.300,00	560.573.021.507,00
1	01	5	03	Kepegawaian	18.230.742.731,00	544.343.520,00	0,00	0,00	18.775.086.251,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	975.589.524,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00
1	01	6	01	Inspektorat	25.325.343.690,00	295.756.900,00	0,00	0,00	25.621.100.590,00
1	01	7	01	Kecamatan	77.645.953.605,00	2.651.702.395,00	0,00	0,00	80.297.656.000,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	17.363.840.028,00	306.182.800,00	0,00	0,00	17.670.022.828,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8.070.556.763,00	5.916.105.058,00	0,00	0,00	13.986.661.821,00
2	03	1	06	Sosial	1.177.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.715.000,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	123.261.040.198,00	317.894.602.357,00	0,00	0,00	441.155.642.555,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	5.696.154.175,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	6.784.506.175,00
3	04	2	09	Pangan	4.120.367.045,00	0,00	0,00	0,00	4.120.367.045,00
3	04	2	15	Perhubungan	15.236.941.614,00	9.249.255.928,00	0,00	0,00	24.486.197.542,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	15.157.882.574,00	796.299.250,00	0,00	0,00	15.954.181.824,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.814.083.250,00	0,00	0,00	0,00	5.814.083.250,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	18	Penanaman Modal	3.310.815.550,00	0,00	0,00	0,00	3.310.815.550,00
3	04	2	21	Persandian	1.219.935.906,00	62.664.495,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	8.061.265.213,00	32.872.000,00	0,00	0,00	8.094.137.213,00
3	04	3	27	Pertanian	47.869.376.693,00	4.784.682.820,00	0,00	0,00	52.654.059.513,00
3	04	3	30	Perdagangan	7.529.638.468,00	4.005.682.850,00	0,00	0,00	11.535.321.318,00
3	04	3	31	Perindustrian	1.391.297.019,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	3.298.558.057,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.527.066.912,00	0,00	0,00	0,00	15.527.066.912,00
4	05	2	10	Pertanahan	385.880.000,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	11.620.591.011,00	5.443.238.350,00	0,00	0,00	17.063.829.361,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.795.004.600,00	0,00	0,00	0,00	8.795.004.600,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22.155.249.000,00	56.122.971.206,00	0,00	0,00	78.278.220.206,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	68.844.098.830,00	12.121.817.649,00	0,00	0,00	80.965.916.479,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.757.369.388,00	816.493.800,00	0,00	0,00	2.573.863.188,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	3.376.850.850,00	0,00	0,00	0,00	3.376.850.850,00
8				PENDIDIKAN					
8	10	1	01	Pendidikan	14.544.943.350,00	30.121.540.581,00	0,00	0,00	44.666.483.931,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	71.050.978.201,00	14.870.025.400,00	0,00	0,00	85.921.003.601,00
8	10	2	22	Kebudayaan	4.119.860.850,00	329.100.000,00	0,00	0,00	4.448.960.850,00
8	10	2	23	Perpustakaan	2.232.163.501,00	281.502.777,00	0,00	0,00	2.513.666.278,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	1	06	Sosial	62.740.536.591,00	41.250.000,00	0,00	0,00	62.781.786.591,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.702.752.796,00	0,00	0,00	0,00	2.702.752.796,00
9	11	3	32	Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
				TOTAL	**2.384.132.390.457,00**	**523.070.692.769,00**	**6.997.200.620,00**	**494.667.382.300,00**	**3.408.867.666.146,00**

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	446.083.600,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.025.386.200,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.887.200.750,00
		Total	12.323.570.550,00
2.	Literasi dan Numerasi	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.387.500.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.579.082.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	506.850.000,00
		Total	5.473.432.000,00
3.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.800.000.000,00
		Total	2.400.000.000,00
4.	Kekhususan PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.290.583.700,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	324.547.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	723.310.800,00
		Total	2.338.441.500,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan	22.535.444.050,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85.884.666,00
		Total	85.884.666,00
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00
		Total	50.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.256.000,00
		Total	109.256.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136.505.000,00
		Total	136.505.000,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.232.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Total	74.232.000,00
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	83.673.000,00
		Total	83.673.000,00
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.778.000,00
		Total	46.778.000,00
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84.493.000,00
		Total	84.493.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	36.240.000,00
		Total	36.240.000,00
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.980.000,00
		Total	49.980.000,00
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	57.865.000,00
		Total	57.865.000,00
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	62.040.000,00
		Total	62.040.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	876.946.666,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	6.495.004.600,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.300.000.000,00
		Total	8.795.004.600,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99.434.000,00
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	42.160.000,00
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.842.902.712,00
		Total	9.637.066.912,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	18.432.071.512,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.435.523.050,00
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
		Total	5.485.523.050,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.485.523.050,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	421.425.000,00
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.715.250,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	145.886.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	276.950.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	165.557.000,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	230.520.000,00
		Total	1.279.053.250,00
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	147.480.590,00
		Total	147.480.590,00
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	234.323.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	930.623.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.576.907.321,00
		Total	2.741.853.321,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	593.932.000,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	222.954.700,00
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	950.810.000,00
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	51.850.000,00
		Total	2.653.306.700,00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	643.389.000,00
		Total	643.389.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.465.082.861,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	403.292.700,00
		Penyediaan Permakanan	1.711.924.000,00
		Total	2.115.216.700,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	367.767.000,00
		Total	367.767.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial	2.482.983.700,00

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	613.100.460.307,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	281.250.000.000,00	44.666.483.931,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	513.797.114.782,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	269.250.000.000,00	79.586.229.799,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.850.000.000,00	917.594.700,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	250.000.000,00	196.237.000,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.200.000.000,00	265.854.980,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	34.128.326.948,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.000.000.000,00	19.647.010.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.000.000.000,00	8.795.004.600,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	25.000.000.000,00	9.637.066.912,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.000.000.000,00	18.338.765.186,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	10.000.000.000,00	0,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	80.000.000.000,00	88.251.252.238,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.000.000.000,00	2.987.632.400,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	250.000.000.000,00	310.830.982.731,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	930.000.000,00	1.100.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.000.000.000,00	5.890.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	12.121.314.271,00
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	40.000.000.000,00	7.885.133.450,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	30.000.000.000,00	0,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	85.000.000.000,00	19.710.000.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.500.000.000,00	50.683.086.756,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	30.281.718.740,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.500.000.000,00	2.484.450.710,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.999.200.000,00	6.503.822.111,00
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.086.100.000,00	4.998.389.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	9.084.529.296,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.563.000.000,00	13.279.506.370,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.106.000.000,00	2.115.216.700,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	104.899.000.000,00	47.387.063.521,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	704.000.000,00	1.177.715.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	7.621.357.506,00
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	750.000.000,00	418.587.050,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.000.000.000,00	4.644.780.600,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.000.000.000,00	978.035.525,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	450.000.000,00	743.103.000,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	6.183.124.193,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.350.000.000,00	934.046.550,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	450.000.000,00	272.961.246,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	800.000.000,00	0,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000,00	156.533.000,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.000.000.000,00	492.805.500,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.000.000.000,00	846.406.500,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	7.177.186.460,00
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.850.000.000,00	0,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.957.865.000,00	3.741.363.738,00
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000,00	81.902.388,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	200.000.000,00	297.100.919,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	536.000.000,00	0,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.500.000.000,00	10.000.000.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	30.630.614.244,00
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	250.000.000,00	800.000.000,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	900.000.000,00	1.582.463.924,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.000.000.000,00	3.932.000.000,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	852.000.000,00	253.735.000,00
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	125.000.000,00	0,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	370.000.000,00	99.937.000,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000,00	0,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000,00	171.952.000,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.000.000.000,00	10.223.741.437,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	15.007.275.142,00
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.000.000.000,00	719.678.919,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	700.000.000,00	423.029.402,00
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.800.000.000,00	6.213.532.523,00
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	200.000.000,00	108.176.708,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	7.233.395.673,00
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.500.000.000,00	0,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	300.000.000,00	138.223.000,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.500.000.000,00	9.083.060.286,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.000.000.000,00	3.556.272.774,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	13.326.131.094,00
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	269.000.000,00	165.807.867,00
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.824.000.000,00	1.916.400.001,00
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	400.000.000,00	491.655.320,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	11.912.709.637,00
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.550.000.000,00	21.697.160.492,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	750.000.000,00	2.700.177.050,00
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	2.500.000.000,00	88.860.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	9.041.448.619,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.500.000.000,00	8.890.472.742,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.000.000.000,00	7.063.709.082,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	6.036.434.655,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.350.000.000,00	453.703.800,00
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.000.000,00	350.000.000,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	460.000.000,00	450.000.000,00
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.000.000.000,00	892.199.600,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.000.000.000,00	3.368.179.850,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	15.289.996.912,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	335.000.000,00	513.305.500,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.009.000.000,00	624.739.000,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.195.000.000,00	1.633.167.050,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.015.000.000,00	420.000.000,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.000.000.000,00	119.604.000,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	12.644.087.171,00
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.698.000.000,00	1.678.028.500,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	39.471.167.434,00	80.807.820.111,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.372.000.000,00	3.435.154.990,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.096.000.000,00	1.263.217.775,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	679.000.000,00	1.282.600.401,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.500.000.000,00	3.528.249.850,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	700.000.000,00	275.000.000,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.000.000.000,00	299.995.000,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.500.000.000,00	345.716.000,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	7.886.938.593,00
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.000.000.000,00	2.513.666.278,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.000.000.000,00	756.207.578,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	8.400.788.461,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.000.000.000,00	2.837.260.350,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.712.000.000,00	2.278.464.756,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.700.000.000,00	1.248.411.957,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.250.000.000,00	1.730.000.150,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.475.000.000,00	1.319.020.000,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.175.000.000,00	1.729.791.600,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.308.000.000,00	328.039.250,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	36.260.044.505,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	26.400.000.000,00	17.221.301.118,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.950.000.000,00	10.664.209.821,00
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.300.000.000,00	1.621.167.700,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.410.000.000,00	15.190.843.609,00
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	550.000.000,00	385.839.000,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.950.000.000,00	7.570.698.265,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	12.047.387.531,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	535.000.000,00	622.268.378,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.800.000.000,00	4.124.214.850,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.350.000.000,00	1.451.212.000,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.225.000.000,00	4.833.217.000,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	660.000.000,00	372.898.040,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	500.000.000,00	131.511.050,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.000.000.000,00	3.003.180.057,00
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	175.000.000,00	59.749.000,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	350.000.000,00	235.629.000,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	750.000.000,00	300.000.000,00
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100.000.000,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	96.212.648.437,00
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18.675.000.000,00	21.051.766.173,00
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.211.000.000,00	3.547.176.450,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	68.076.654.056,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.298.000.000,00	38.736.777.649,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	16.597.551.538,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.823.000.000,00	3.190.149.781,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.368.000.000,00	2.498.428.750,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	41.588.871.170,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	464.173.000.000,00	511.017.096.808,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.490.000.000,00	2.171.453.529,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.200.000.000,00	5.795.600.000,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	11.480.785.701,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.450.000.000,00	7.294.300.550,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.750.000.000,00	975.589.524,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	20.521.100.590,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.545.000.000,00	3.599.999.200,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.145.000.000,00	1.500.000.800,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01		KECAMATAN		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	60.061.922.818,00
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.440.000.000,00	10.111.920.876,00
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.450.000.000,00	9.097.015.077,00
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	825.000.000,00	247.321.730,00
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.003.000.005,00	240.525.000,00
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.057.000.005,00	538.950.499,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.511.733.000.000,00	7.048.876.931,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	850.000.000,00	2.049.958.635,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.126.000.000,00	7.321.187.372,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	325.000.000,00	150.062.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	325.000.000,00	399.937.890,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	858.000.000,00	700.000.000,00

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	683.169.724.091,00	668.321.874.088,00	668.321.874.088,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	671.834.794.241,00	657.766.944.238,00	657.766.944.238,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	671.834.794.241,00	657.766.944.238,00	657.766.944.238,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.866.483.931,00	44.666.483.931,00	44.666.483.931,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.048.335.800,00	25.002.335.800,00	25.002.335.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00	3.364.900.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	337.050.000,00	337.050.000,00	337.050.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.484.000.000,00	3.234.000.000,00	3.234.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	2.400.300.000,00	1.889.300.000,00	1.889.300.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.579.082.000,00	1.579.082.000,00	1.579.082.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	341.066.850,00	341.066.850,00	341.066.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.925.386.200,00	5.025.386.200,00	5.025.386.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	506.850.000,00	506.850.000,00	506.850.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.522.200.750,00	2.887.200.750,00	2.887.200.750,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.737.500.000,00	3.387.500.000,00	3.387.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.580.726.231,00	14.926.726.231,00	14.926.726.231,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00	1.107.450.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	718.187.050,00	918.187.050,00	918.187.050,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	600.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	481.950.000,00	481.950.000,00	481.950.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	3.024.000.000,00	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.055.787.200,00	1.055.787.200,00	1.055.787.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	152.648.700,00	152.648.700,00	152.648.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	199.999.700,00	199.999.700,00	199.999.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.228.203.581,00	1.428.203.581,00	1.428.203.581,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.512.500.000,00	2.012.500.000,00	2.012.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4.768.358.100,00	4.268.358.100,00	4.268.358.100,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.310.000.000,00	910.000.000,00	910.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	723.310.800,00	723.310.800,00	723.310.800,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.290.583.700,00	1.290.583.700,00	1.290.583.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	89.916.600,00	89.916.600,00	89.916.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	424.547.000,00	324.547.000,00	324.547.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	469.063.800,00	469.063.800,00	469.063.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	446.083.600,00	446.083.600,00	446.083.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22.980.200,00	22.980.200,00	22.980.200,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	627.968.310.310,00	613.100.460.307,00	613.100.460.307,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.999.700,00	224.999.700,00	224.999.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	99.999.700,00	99.999.700,00	99.999.700,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	559.572.083.470,00	550.078.483.467,00	550.078.483.467,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	559.572.083.470,00	550.078.483.467,00	550.078.483.467,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	186.383.000,00	186.383.000,00	186.383.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	88.998.000,00	88.998.000,00	88.998.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.385.000,00	97.385.000,00	97.385.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.185.140,00	989.185.140,00	989.185.140,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.993.640,00	29.993.640,00	29.993.640,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.191.500,00	199.191.500,00	199.191.500,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	543.432.000,00	543.432.000,00	543.432.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.800.000,00	442.800.000,00	442.800.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.632.000,00	100.632.000,00	100.632.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.016.332.400,00	58.142.082.400,00	58.142.082.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.040.582.400,00	3.040.582.400,00	3.040.582.400,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.975.750.000,00	55.101.500.000,00	55.101.500.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.405.894.600,00	2.905.894.600,00	2.905.894.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	535.499.600,00	535.499.600,00	535.499.600,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.608.000,00	2.230.608.000,00	2.230.608.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	139.787.000,00	139.787.000,00	139.787.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.228.960.850,00	4.448.960.850,00	4.448.960.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.228.960.850,00	4.448.960.850,00	4.448.960.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.308.249.850,00	3.528.249.850,00	3.528.249.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	326.408.000,00	326.408.000,00	326.408.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	326.408.000,00	326.408.000,00	326.408.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.981.841.850,00	3.201.841.850,00	3.201.841.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3.113.591.850,00	2.333.591.850,00	2.333.591.850,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	868.250.000,00	868.250.000,00	868.250.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	299.995.000,00	299.995.000,00	299.995.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	299.995.000,00	299.995.000,00	299.995.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	299.995.000,00	299.995.000,00	299.995.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	345.716.000,00	345.716.000,00	345.716.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	345.716.000,00	345.716.000,00	345.716.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	345.716.000,00	345.716.000,00	345.716.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00
1.01.2.22.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00	6.105.969.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000						Dinas Kesehatan	352.310.459.657,00	334.276.542.332,00	334.276.542.332,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	352.310.459.657,00	334.276.542.332,00	334.276.542.332,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	352.310.459.657,00	334.276.542.332,00	334.276.542.332,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.886.229.870,00	64.586.229.870,00	64.586.229.870,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.285.809.250,00	15.485.809.250,00	15.485.809.250,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.900.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.572.630.400,00	1.572.630.400,00	1.572.630.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	142.178.850,00	142.178.850,00	142.178.850,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.850.000.000,00	8.850.000.000,00	8.850.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	321.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.974.443.620,00	48.474.443.620,00	48.474.443.620,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	85.884.666,00	85.884.666,00	85.884.666,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.256.000,00	109.256.000,00	109.256.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136.505.000,00	136.505.000,00	136.505.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	74.232.000,00	74.232.000,00	74.232.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	83.673.000,00	83.673.000,00	83.673.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	46.778.000,00	46.778.000,00	46.778.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	84.493.000,00	84.493.000,00	84.493.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	36.240.000,00	36.240.000,00	36.240.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	49.980.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	57.865.000,00	57.865.000,00	57.865.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	62.040.000,00	62.040.000,00	62.040.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	199.983.000,00	199.983.000,00	199.983.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	122.390.500,00	122.390.500,00	122.390.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	48.430.000,00	48.430.000,00	48.430.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	92.207.000,00	92.207.000,00	92.207.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	34.262.000,00	34.262.000,00	34.262.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	69.030.000,00	69.030.000,00	69.030.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	298.293.900,00	298.293.900,00	298.293.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.000.000.000,00	42.500.000.000,00	42.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	105.301.900,00	105.301.900,00	105.301.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.664.738.654,00	3.664.738.654,00	3.664.738.654,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	69.595.000,00	69.595.000,00	69.595.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	49.064.000,00	49.064.000,00	49.064.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	51.489.000,00	51.489.000,00	51.489.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	58.892.000,00	58.892.000,00	58.892.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	33.820.000,00	33.820.000,00	33.820.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	155.968.000,00	155.968.000,00	155.968.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	155.968.000,00	155.968.000,00	155.968.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	470.009.000,00	470.009.000,00	470.009.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	470.009.000,00	470.009.000,00	470.009.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	917.594.700,00	917.594.700,00	917.594.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	39.695.000,00	39.695.000,00	39.695.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	39.695.000,00	39.695.000,00	39.695.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	283.398.000,00	283.398.000,00	283.398.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	283.398.000,00	283.398.000,00	283.398.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.501.700,00	594.501.700,00	594.501.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	594.501.700,00	594.501.700,00	594.501.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	196.237.000,00	196.237.000,00	196.237.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	64.720.000,00	64.720.000,00	64.720.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	64.720.000,00	64.720.000,00	64.720.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98.317.000,00	98.317.000,00	98.317.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	98.317.000,00	98.317.000,00	98.317.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	265.854.980,00	265.854.980,00	265.854.980,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.912.000,00	91.912.000,00	91.912.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	91.912.000,00	91.912.000,00	91.912.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.928.000,00	87.928.000,00	87.928.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	87.928.000,00	87.928.000,00	87.928.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.014.980,00	86.014.980,00	86.014.980,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	86.014.980,00	86.014.980,00	86.014.980,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	284.044.543.107,00	268.310.625.782,00	268.310.625.782,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.156.000,00	209.156.000,00	209.156.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	84.156.000,00	84.156.000,00	84.156.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.494.111.287,00	239.768.555.073,00	239.768.555.073,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	252.494.111.287,00	239.768.555.073,00	239.768.555.073,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	109.441.000,00	109.441.000,00	109.441.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	79.441.000,00	79.441.000,00	79.441.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.322.000,00	383.322.000,00	383.322.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	283.322.000,00	283.322.000,00	283.322.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.990.100,00	689.990.100,00	689.990.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.994.100,00	59.994.100,00	59.994.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.996.000,00	74.996.000,00	74.996.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.101.980.720,00	26.093.619.609,00	26.093.619.609,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.624.287.120,00	1.624.287.120,00	1.624.287.120,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.277.693.600,00	24.269.332.489,00	24.269.332.489,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.542.000,00	956.542.000,00	956.542.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	696.660.000,00	696.660.000,00	696.660.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.992.000,00	189.992.000,00	189.992.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.890.000,00	69.890.000,00	69.890.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001						Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002						Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003						Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004						Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0005						Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006						Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007						Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	859.000.000,00	859.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	859.000.000,00	859.000.000,00	859.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008						Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	641.408.000,00	641.408.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	641.408.000,00	641.408.000,00	641.408.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009						Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010						Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011						Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012						Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013						Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0013	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014						Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0014	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015						Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016						Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0016	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0017						Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	932.395.500,00	932.395.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0017	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	932.395.500,00	932.395.500,00	932.395.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0018						Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0018	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0019						Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0019	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0020						Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0020	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0021						Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0021	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022						Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0022	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023						Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	934.886.000,00	934.886.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0023	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	934.886.000,00	934.886.000,00	934.886.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024						Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0024	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025						Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026						Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027						Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0027	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028						Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0028	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029						Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0029	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0030						Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031						Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	605.263.500,00	605.263.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0031	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	605.263.500,00	605.263.500,00	605.263.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0101						Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	149.999.999.929,00	149.999.999.929,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00	9.999.999.929,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0101	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.012.231.730,00	389.116.319.679,00	389.116.319.679,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	362.722.231.730,00	371.596.319.679,00	371.596.319.679,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.247.010.000,00	19.647.010.000,00	19.647.010.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.497.010.000,00	18.897.010.000,00	18.897.010.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.847.010.000,00	3.997.010.000,00	3.997.010.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.340.000.000,00	4.590.000.000,00	4.590.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	303.432.677.731,00	310.830.982.731,00	310.830.982.731,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	303.432.677.731,00	310.830.982.731,00	310.830.982.731,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.284.000.010,00	4.284.000.010,00	4.284.000.010,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	213.157.667.894,00	222.155.972.894,00	222.155.972.894,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	40.761.009.827,00	40.161.009.827,00	40.161.009.827,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	30.450.000.000,00	30.450.000.000,00	30.450.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00	5.890.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	825.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.052.543.999,00	34.128.326.948,00	34.128.326.948,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.860.667,00	139.860.667,00	139.860.667,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	54.860.667,00	54.860.667,00	54.860.667,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.956.300.537,00	14.364.480.153,00	14.364.480.153,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.956.300.537,00	14.364.480.153,00	14.364.480.153,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.484.000,00	175.484.000,00	175.484.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.484.000,00	75.484.000,00	75.484.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.021.561.329,00	1.021.561.329,00	1.021.561.329,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.561.329,00	331.561.329,00	331.561.329,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.526.617.346,00	17.194.220.679,00	17.194.220.679,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.424.807.346,00	14.424.807.346,00	14.424.807.346,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.101.810.000,00	2.769.413.333,00	2.769.413.333,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.032.720.120,00	1.032.720.120,00	1.032.720.120,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	646.970.000,00	646.970.000,00	646.970.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	276.878.000,00	276.878.000,00	276.878.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.872.120,00	108.872.120,00	108.872.120,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.290.000.000,00	17.520.000.000,00	17.520.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.290.000.000,00	17.520.000.000,00	17.520.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.290.000.000,00	17.520.000.000,00	17.520.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.290.000.000,00	17.520.000.000,00	17.520.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.890.000.000,00	8.070.000.000,00	8.070.000.000,00
1.03.2.15.0.00.04.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	9.400.000.000,00	9.450.000.000,00	9.450.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	195.972.939.276,00	228.409.255.813,00	228.409.255.813,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.2.10.05.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	192.672.939.276,00	218.409.255.813,00	218.409.255.813,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121.416.464.850,00	128.009.721.336,00	128.009.721.336,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.944.398.600,00	8.795.004.600,00	8.795.004.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.944.398.600,00	8.795.004.600,00	8.795.004.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	5.644.398.600,00	6.495.004.600,00	6.495.004.600,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.087.479.912,00	9.637.066.912,00	9.637.066.912,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.087.479.912,00	9.637.066.912,00	9.637.066.912,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	42.160.000,00	42.160.000,00	42.160.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	99.434.000,00	99.434.000,00	99.434.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	477.570.200,00	477.570.200,00	477.570.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.293.315.712,00	8.842.902.712,00	8.842.902.712,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13.665.701.700,00	18.338.765.186,00	18.338.765.186,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.665.701.700,00	18.338.765.186,00	18.338.765.186,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	13.365.701.700,00	18.038.765.186,00	18.038.765.186,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	88.931.252.238,00	88.251.252.238,00	88.251.252.238,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	88.931.252.238,00	88.251.252.238,00	88.251.252.238,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	88.531.252.238,00	87.851.252.238,00	87.851.252.238,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.787.632.400,00	2.987.632.400,00	2.987.632.400,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.787.632.400,00	2.987.632.400,00	2.987.632.400,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.787.632.400,00	2.987.632.400,00	2.987.632.400,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	71.256.474.426,00	90.399.534.477,00	90.399.534.477,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.885.133.450,00	7.885.133.450,00	7.885.133.450,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.435.523.050,00	5.435.523.050,00	5.435.523.050,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.435.523.050,00	5.435.523.050,00	5.435.523.050,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.399.610.400,00	2.399.610.400,00	2.399.610.400,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	2.399.610.400,00	2.399.610.400,00	2.399.610.400,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	16.710.000.000,00	19.710.000.000,00	19.710.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	16.710.000.000,00	19.710.000.000,00	19.710.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	16.710.000.000,00	19.710.000.000,00	19.710.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	34.158.186.250,00	50.683.086.756,00	50.683.086.756,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	34.158.186.250,00	50.683.086.756,00	50.683.086.756,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.108.186.250,00	50.633.086.756,00	50.633.086.756,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.503.154.726,00	12.121.314.271,00	12.121.314.271,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.474.936.256,00	8.192.841.256,00	8.192.841.256,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.474.936.256,00	8.192.841.256,00	8.192.841.256,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.295.000,00	92.295.000,00	92.295.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	92.295.000,00	92.295.000,00	92.295.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.548.000,00	148.548.000,00	148.548.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48.548.000,00	48.548.000,00	48.548.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.000.000,00	890.000.000,00	890.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.475.000,00	1.565.729.545,00	1.565.729.545,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.000.000,00	552.000.000,00	552.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.113.475.000,00	1.013.729.545,00	1.013.729.545,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	961.900.470,00	961.900.470,00	961.900.470,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649.100.200,00	649.100.200,00	649.100.200,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	245.199.150,00	245.199.150,00	245.199.150,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.601.120,00	67.601.120,00	67.601.120,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.300.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000,00	9.900.000.000,00	9.900.000.000,00
1.04.1.03.2.10.05.0000	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.069.761.264,00	14.866.072.375,00	14.866.072.375,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.069.761.264,00	14.866.072.375,00	14.866.072.375,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.069.761.264,00	14.866.072.375,00	14.866.072.375,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.749.997.071,00	5.899.997.071,00	5.899.997.071,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	102.637.550,00	102.637.550,00	102.637.550,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	102.637.550,00	102.637.550,00	102.637.550,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.929.513.321,00	2.929.513.321,00	2.929.513.321,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	1.576.907.321,00	1.576.907.321,00	1.576.907.321,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	234.323.000,00	234.323.000,00	234.323.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	187.660.000,00	187.660.000,00	187.660.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	930.623.000,00	930.623.000,00	930.623.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.146.024.700,00	2.146.024.700,00	2.146.024.700,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	51.850.000,00	51.850.000,00	51.850.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	950.810.000,00	950.810.000,00	950.810.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	102.950.000,00	102.950.000,00	102.950.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	154.954.700,00	154.954.700,00	154.954.700,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	51.700.000,00	51.700.000,00	51.700.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	833.760.000,00	833.760.000,00	833.760.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	571.821.500,00	721.821.500,00	721.821.500,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	299.741.000,00	449.741.000,00	449.741.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	210.080.500,00	210.080.500,00	210.080.500,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.319.764.193,00	8.966.075.304,00	8.966.075.304,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.806.214,00	129.806.214,00	129.806.214,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.872.000,00	19.872.000,00	19.872.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.934.214,00	49.934.214,00	49.934.214,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.166.885.878,00	4.009.985.878,00	4.009.985.878,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.166.885.878,00	4.009.985.878,00	4.009.985.878,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	185.375.000,00	185.375.000,00	185.375.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	185.375.000,00	185.375.000,00	185.375.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.285.560,00	185.285.560,00	185.285.560,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.418.560,00	35.418.560,00	35.418.560,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.867.000,00	149.867.000,00	149.867.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	674.276.411,00	674.276.411,00	674.276.411,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.958.300,00	19.958.300,00	19.958.300,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.248.678,00	149.248.678,00	149.248.678,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.946.458,00	39.946.458,00	39.946.458,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.991.994,00	149.991.994,00	149.991.994,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.981,00	85.000.981,00	85.000.981,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.130.000,00	150.130.000,00	150.130.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.248.340,00	278.248.340,00	278.248.340,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	78.928.340,00	78.928.340,00	78.928.340,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.320.000,00	199.320.000,00	199.320.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.505.764.790,00	2.308.975.901,00	2.308.975.901,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.164.790,00	302.164.790,00	302.164.790,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.253.600.000,00	2.006.811.111,00	2.006.811.111,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.122.000,00	1.194.122.000,00	1.194.122.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00	1.019.450.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.792.000,00	149.792.000,00	149.792.000,00
1.05.0.00.0.00.08.0000	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.880.000,00	24.880.000,00	24.880.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	30.653.108.613,00	29.402.308.186,00	29.402.308.186,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.484.450.710,00	2.484.450.710,00	2.484.450.710,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.798.665.250,00	1.798.665.250,00	1.798.665.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	196.500.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.846.000,00	98.846.000,00	98.846.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	165.557.000,00	165.557.000,00	165.557.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	176.850.000,00	176.850.000,00	176.850.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	145.886.000,00	145.886.000,00	145.886.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	276.950.000,00	276.950.000,00	276.950.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	421.425.000,00	421.425.000,00	421.425.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	47.416.000,00	47.416.000,00	47.416.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	230.520.000,00	230.520.000,00	230.520.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.715.250,00	38.715.250,00	38.715.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	685.785.460,00	685.785.460,00	685.785.460,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	88.973.460,00	88.973.460,00	88.973.460,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	54.912.000,00	54.912.000,00	54.912.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	541.900.000,00	541.900.000,00	541.900.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	603.825.040,00	603.825.040,00	603.825.040,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	44.843.040,00	44.843.040,00	44.843.040,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	44.843.040,00	44.843.040,00	44.843.040,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	558.982.000,00	558.982.000,00	558.982.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	490.982.000,00	490.982.000,00	490.982.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.998.389.000,00	4.998.389.000,00	4.998.389.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.998.389.000,00	4.998.389.000,00	4.998.389.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	643.389.000,00	643.389.000,00	643.389.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00	4.355.000.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.566.443.863,00	21.315.643.436,00	21.315.643.436,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.761.000,00	137.761.000,00	137.761.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.985.000,00	66.985.000,00	66.985.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.448.000,00	38.448.000,00	38.448.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	32.328.000,00	32.328.000,00	32.328.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.088.906.475,00	11.702.794.937,00	11.702.794.937,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.088.906.475,00	11.702.794.937,00	11.702.794.937,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.093.250,00	121.093.250,00	121.093.250,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	121.093.250,00	121.093.250,00	121.093.250,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.609.900,00	226.609.900,00	226.609.900,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	132.758.900,00	132.758.900,00	132.758.900,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.851.000,00	93.851.000,00	93.851.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	811.979.488,00	811.979.488,00	811.979.488,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.397.874,00	8.397.874,00	8.397.874,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.909.034,00	208.909.034,00	208.909.034,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.808.486,00	52.808.486,00	52.808.486,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.603.223,00	161.603.223,00	161.603.223,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.138.871,00	113.138.871,00	113.138.871,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.080.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.042.000,00	212.042.000,00	212.042.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.867.050.888,00	7.002.361.999,00	7.002.361.999,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.350.888,00	67.350.888,00	67.350.888,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.799.700.000,00	6.935.011.111,00	6.935.011.111,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.313.042.862,00	1.313.042.862,00	1.313.042.862,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.230.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.121.950.000,00	1.121.950.000,00	1.121.950.000,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.662.862,00	94.662.862,00	94.662.862,00
1.05.1.04.0.00.07.0000	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.883.625.819,00	17.670.022.828,00	17.670.022.828,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.06.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.883.625.819,00	17.670.022.828,00	17.670.022.828,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.883.625.819,00	17.670.022.828,00	17.670.022.828,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.049.958.635,00	2.049.958.635,00	2.049.958.635,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.049.958.635,00	2.049.958.635,00	2.049.958.635,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.815.870.270,00	1.815.870.270,00	1.815.870.270,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	209.887.365,00	209.887.365,00	209.887.365,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24.201.000,00	24.201.000,00	24.201.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.321.187.372,00	7.321.187.372,00	7.321.187.372,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.321.187.372,00	7.321.187.372,00	7.321.187.372,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	7.521.458.372,00	6.521.458.372,00	6.521.458.372,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150.139.000,00	150.139.000,00	150.139.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	151.340.000,00	151.340.000,00	151.340.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	498.250.000,00	498.250.000,00	498.250.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	150.062.000,00	150.062.000,00	150.062.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	150.062.000,00	150.062.000,00	150.062.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150.062.000,00	150.062.000,00	150.062.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	399.937.890,00	399.937.890,00	399.937.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	399.937.890,00	399.937.890,00	399.937.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	399.937.890,00	399.937.890,00	399.937.890,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	84.250.000,00	84.250.000,00	84.250.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130.750.000,00	130.750.000,00	130.750.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.262.479.922,00	7.048.876.931,00	7.048.876.931,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.412.700,00	126.412.700,00	126.412.700,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	36.412.700,00	36.412.700,00	36.412.700,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.020.850.422,00	4.848.069.653,00	4.848.069.653,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.020.850.422,00	4.848.069.653,00	4.848.069.653,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.902.500,00	36.902.500,00	36.902.500,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.902.500,00	36.902.500,00	36.902.500,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.480.000,00	126.480.000,00	126.480.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.230.000,00	34.230.000,00	34.230.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	917.558.100,00	917.558.100,00	917.558.100,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.638.100,00	27.638.100,00	27.638.100,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.490.800,00	197.490.800,00	197.490.800,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.389.200,00	44.389.200,00	44.389.200,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.040.000,00	335.040.000,00	335.040.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.692.000,00	108.692.000,00	108.692.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	108.692.000,00	108.692.000,00	108.692.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.776.200,00	480.953.978,00	480.953.978,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.876.200,00	131.876.200,00	131.876.200,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.900.000,00	349.077.778,00	349.077.778,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.808.000,00	403.808.000,00	403.808.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.910.000,00	246.910.000,00	246.910.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.258.000,00	142.258.000,00	142.258.000,00
1.05.8.01.0.00.06.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000						Dinas Sosial	73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	73.044.030.887,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	73.044.030.887,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	73.397.068.408,00	73.044.030.887,00	73.044.030.887,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	13.279.506.370,00	13.279.506.370,00	13.279.506.370,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	175.107.000,00	175.107.000,00	175.107.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	175.107.000,00	175.107.000,00	175.107.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.222.000,00	11.222.000,00	11.222.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	11.222.000,00	11.222.000,00	11.222.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	13.093.177.370,00	13.093.177.370,00	13.093.177.370,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	378.631.000,00	378.631.000,00	378.631.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.551.495.000,00	9.551.495.000,00	9.551.495.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.702.695.670,00	1.702.695.670,00	1.702.695.670,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400.050.700,00	1.400.050.700,00	1.400.050.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	60.305.000,00	60.305.000,00	60.305.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00	2.115.216.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	1.711.924.000,00	1.711.924.000,00	1.711.924.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	403.292.700,00	403.292.700,00	403.292.700,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00	47.387.063.521,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	342.959.800,00	342.959.800,00	342.959.800,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	47.044.103.721,00	47.044.103.721,00	47.044.103.721,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.177.715.000,00	1.177.715.000,00	1.177.715.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	367.767.000,00	367.767.000,00	367.767.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	367.767.000,00	367.767.000,00	367.767.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	809.948.000,00	809.948.000,00	809.948.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	809.948.000,00	809.948.000,00	809.948.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.437.566.817,00	9.084.529.296,00	9.084.529.296,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.983.000,00	130.983.000,00	130.983.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.811.000,00	66.811.000,00	66.811.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	44.852.000,00	44.852.000,00	44.852.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.489.706.052,00	6.251.712.975,00	6.251.712.975,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.489.706.052,00	6.251.712.975,00	6.251.712.975,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.321.000,00	138.321.000,00	138.321.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.778.000,00	40.778.000,00	40.778.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.543.000,00	97.543.000,00	97.543.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.072.125,00	892.072.125,00	892.072.125,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.075.000,00	27.075.000,00	27.075.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	187.021.000,00	187.021.000,00	187.021.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.996.200,00	59.996.200,00	59.996.200,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177.513.750,00	177.513.750,00	177.513.750,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.329.675,00	101.329.675,00	101.329.675,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.132.500,00	49.132.500,00	49.132.500,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.004.000,00	250.004.000,00	250.004.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.186.574.640,00	1.071.530.196,00	1.071.530.196,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.675.440,00	113.675.440,00	113.675.440,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.899.200,00	957.854.756,00	957.854.756,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.550.000,00	500.550.000,00	500.550.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.330.000,00	281.330.000,00	281.330.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.940.000,00	149.940.000,00	149.940.000,00
1.06.0.00.0.00.09.0000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.280.000,00	69.280.000,00	69.280.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000						Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.387.378.681,00	14.705.863.681,00	14.705.863.681,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.087.378.681,00	14.405.863.681,00	14.405.863.681,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.087.378.681,00	14.405.863.681,00	14.405.863.681,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	418.587.050,00	418.587.050,00	418.587.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	418.587.050,00	418.587.050,00	418.587.050,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	418.587.050,00	418.587.050,00	418.587.050,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	7.044.780.600,00	4.644.780.600,00	4.644.780.600,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.924.818.600,00	4.524.818.600,00	4.524.818.600,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5.766.572.000,00	3.366.572.000,00	3.366.572.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1.158.246.600,00	1.158.246.600,00	1.158.246.600,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.962.000,00	119.962.000,00	119.962.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	119.962.000,00	119.962.000,00	119.962.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	978.035.525,00	978.035.525,00	978.035.525,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	257.679.925,00	257.679.925,00	257.679.925,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	257.679.925,00	257.679.925,00	257.679.925,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	630.252.700,00	630.252.700,00	630.252.700,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	51.928.000,00	51.928.000,00	51.928.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	273.501.000,00	273.501.000,00	273.501.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	304.823.700,00	304.823.700,00	304.823.700,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	90.102.900,00	90.102.900,00	90.102.900,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	90.102.900,00	90.102.900,00	90.102.900,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	743.103.000,00	743.103.000,00	743.103.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	337.940.000,00	337.940.000,00	337.940.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	337.940.000,00	337.940.000,00	337.940.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	405.163.000,00	405.163.000,00	405.163.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	228.034.000,00	228.034.000,00	228.034.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	177.129.000,00	177.129.000,00	177.129.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.902.872.506,00	7.621.357.506,00	7.621.357.506,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.299.000,00	122.299.000,00	122.299.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.360.000,00	62.360.000,00	62.360.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	40.619.000,00	40.619.000,00	40.619.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.833.556.998,00	5.607.708.665,00	5.607.708.665,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.833.556.998,00	5.607.708.665,00	5.607.708.665,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.590.000,00	17.590.000,00	17.590.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.519.000,00	149.519.000,00	149.519.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.164.000,00	37.164.000,00	37.164.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.355.000,00	112.355.000,00	112.355.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.883.940,00	695.883.940,00	695.883.940,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.963.364,00	19.963.364,00	19.963.364,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.724.490,00	132.724.490,00	132.724.490,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.602.400,00	39.602.400,00	39.602.400,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.785.356,00	135.785.356,00	135.785.356,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.764.430,00	85.764.430,00	85.764.430,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.308.400,00	45.308.400,00	45.308.400,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.735.500,00	196.735.500,00	196.735.500,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.104.000,00	87.104.000,00	87.104.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	87.104.000,00	87.104.000,00	87.104.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.206.568,00	729.539.901,00	729.539.901,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.658.568,00	250.658.568,00	250.658.568,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.548.000,00	478.881.333,00	478.881.333,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.713.000,00	211.713.000,00	211.713.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.350.000,00	89.350.000,00	89.350.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.873.000,00	96.873.000,00	96.873.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.490.000,00	25.490.000,00	25.490.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.07.3.32.5.06.10.0000	3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.077.558.745,00	8.885.876.989,00	8.885.876.989,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.077.558.745,00	8.885.876.989,00	8.885.876.989,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.077.558.745,00	8.885.876.989,00	8.885.876.989,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	934.046.550,00	934.046.550,00	934.046.550,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	233.487.250,00	233.487.250,00	233.487.250,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	233.487.250,00	233.487.250,00	233.487.250,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	700.559.300,00	700.559.300,00	700.559.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	185.060.000,00	185.060.000,00	185.060.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	515.499.300,00	515.499.300,00	515.499.300,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	272.961.246,00	272.961.246,00	272.961.246,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	63.251.246,00	63.251.246,00	63.251.246,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.251.246,00	63.251.246,00	63.251.246,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	209.710.000,00	209.710.000,00	209.710.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	209.710.000,00	209.710.000,00	209.710.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	156.533.000,00	156.533.000,00	156.533.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.533.000,00	156.533.000,00	156.533.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	156.533.000,00	156.533.000,00	156.533.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	492.805.500,00	492.805.500,00	492.805.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	248.500.000,00	248.500.000,00	248.500.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	248.500.000,00	248.500.000,00	248.500.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	244.305.500,00	244.305.500,00	244.305.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.747.500,00	150.747.500,00	150.747.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.558.000,00	93.558.000,00	93.558.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	846.406.500,00	846.406.500,00	846.406.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	645.563.000,00	645.563.000,00	645.563.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	645.563.000,00	645.563.000,00	645.563.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.843.500,00	200.843.500,00	200.843.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.843.500,00	200.843.500,00	200.843.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.374.805.949,00	6.183.124.193,00	6.183.124.193,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.744.500,00	116.744.500,00	116.744.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.931.000,00	64.931.000,00	64.931.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.808.000,00	19.808.000,00	19.808.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	32.005.500,00	32.005.500,00	32.005.500,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.645.463.425,00	4.485.038.425,00	4.485.038.425,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.645.463.425,00	4.485.038.425,00	4.485.038.425,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.399.000,00	131.399.000,00	131.399.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.274.000,00	32.274.000,00	32.274.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.125.000,00	99.125.000,00	99.125.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.837.364,00	676.837.364,00	676.837.364,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.912.850,00	19.912.850,00	19.912.850,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.494.440,00	113.494.440,00	113.494.440,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.130.900,00	40.130.900,00	40.130.900,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.360.275,00	125.360.275,00	125.360.275,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.150.899,00	95.150.899,00	95.150.899,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.788.000,00	222.788.000,00	222.788.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.968.340,00	24.968.340,00	24.968.340,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.968.340,00	24.968.340,00	24.968.340,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.862.320,00	400.605.564,00	400.605.564,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.665.920,00	101.665.920,00	101.665.920,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.196.400,00	298.939.644,00	298.939.644,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.531.000,00	347.531.000,00	347.531.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.100.000,00	200.100.000,00	200.100.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.101.000,00	115.101.000,00	115.101.000,00
2.08.0.00.0.00.11.0000	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.330.000,00	32.330.000,00	32.330.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000						Dinas Ketahanan Pangan	11.533.147.949,00	11.297.553.505,00	11.297.553.505,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.533.147.949,00	11.297.553.505,00	11.297.553.505,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.741.363.738,00	3.741.363.738,00	3.741.363.738,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.968.451.288,00	1.968.451.288,00	1.968.451.288,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	256.556.000,00	256.556.000,00	256.556.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	596.173.000,00	596.173.000,00	596.173.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	598.508.700,00	598.508.700,00	598.508.700,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	265.790.200,00	265.790.200,00	265.790.200,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	67.679.545,00	67.679.545,00	67.679.545,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	62.960.000,00	62.960.000,00	62.960.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	47.983.843,00	47.983.843,00	47.983.843,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	185.785.000,00	185.785.000,00	185.785.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	139.380.000,00	139.380.000,00	139.380.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	46.405.000,00	46.405.000,00	46.405.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.587.127.450,00	1.587.127.450,00	1.587.127.450,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	136.964.450,00	136.964.450,00	136.964.450,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.450.163.000,00	1.450.163.000,00	1.450.163.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	81.902.388,00	81.902.388,00	81.902.388,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	81.902.388,00	81.902.388,00	81.902.388,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	81.902.388,00	81.902.388,00	81.902.388,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	297.100.919,00	297.100.919,00	297.100.919,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	297.100.919,00	297.100.919,00	297.100.919,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80.998.000,00	80.998.000,00	80.998.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	66.450.900,00	66.450.900,00	66.450.900,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	149.652.019,00	149.652.019,00	149.652.019,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.412.780.904,00	7.177.186.460,00	7.177.186.460,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.971.800,00	156.971.800,00	156.971.800,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.098.200,00	79.098.200,00	79.098.200,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.784.600,00	38.784.600,00	38.784.600,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	39.089.000,00	39.089.000,00	39.089.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.144.636.531,00	4.973.986.531,00	4.973.986.531,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.144.636.531,00	4.973.986.531,00	4.973.986.531,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.730.000,00	40.730.000,00	40.730.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.730.000,00	40.730.000,00	40.730.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.565.000,00	94.565.000,00	94.565.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.020.000,00	30.020.000,00	30.020.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.545.000,00	64.545.000,00	64.545.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	861.540.853,00	861.540.853,00	861.540.853,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.965.373,00	29.965.373,00	29.965.373,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.216.010,00	121.216.010,00	121.216.010,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.913.584,00	57.913.584,00	57.913.584,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.839.136,00	149.839.136,00	149.839.136,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.999.750,00	99.999.750,00	99.999.750,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.994.000,00	49.994.000,00	49.994.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.613.000,00	312.613.000,00	312.613.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.751.720,00	97.751.720,00	97.751.720,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	97.751.720,00	97.751.720,00	97.751.720,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.209.000,00	621.264.556,00	621.264.556,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.209.000,00	79.209.000,00	79.209.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607.000.000,00	542.055.556,00	542.055.556,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.376.000,00	330.376.000,00	330.376.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.070.000,00	163.070.000,00	163.070.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.906.000,00	142.906.000,00	142.906.000,00
2.09.0.00.0.00.12.0000	2	09	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000						Dinas Lingkungan Hidup	48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	47.694.443.605,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	48.047.109.119,00	47.694.443.605,00	47.694.443.605,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.582.463.924,00	1.582.463.924,00	1.582.463.924,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.550.415.924,00	1.550.415.924,00	1.550.415.924,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	125.082.000,00	125.082.000,00	125.082.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	175.486.750,00	175.486.750,00	175.486.750,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	99.983.000,00	99.983.000,00	99.983.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	345.360.000,00	345.360.000,00	345.360.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	99.986.000,00	99.986.000,00	99.986.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	704.518.174,00	704.518.174,00	704.518.174,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	32.048.000,00	32.048.000,00	32.048.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	32.048.000,00	32.048.000,00	32.048.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00	3.932.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00	2.480.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00	1.452.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	253.735.000,00	253.735.000,00	253.735.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.735.000,00	253.735.000,00	253.735.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	124.998.000,00	124.998.000,00	124.998.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	128.737.000,00	128.737.000,00	128.737.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	99.937.000,00	99.937.000,00	99.937.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.937.000,00	99.937.000,00	99.937.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	99.937.000,00	99.937.000,00	99.937.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	171.952.000,00	171.952.000,00	171.952.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	171.952.000,00	171.952.000,00	171.952.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	171.952.000,00	171.952.000,00	171.952.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.673.741.437,00	10.223.741.437,00	10.223.741.437,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	9.673.741.437,00	10.223.741.437,00	10.223.741.437,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	7.913.741.437,00	8.463.741.437,00	8.463.741.437,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.533.279.758,00	30.630.614.244,00	30.630.614.244,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.988.000,00	129.988.000,00	129.988.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.988.000,00	44.988.000,00	44.988.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.243.622.744,00	9.914.222.744,00	9.914.222.744,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.243.622.744,00	9.914.222.744,00	9.914.222.744,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.917.250,00	49.917.250,00	49.917.250,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.917.250,00	49.917.250,00	49.917.250,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.472.000,00	161.472.000,00	161.472.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.614.000,00	61.614.000,00	61.614.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.858.000,00	99.858.000,00	99.858.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	889.815.387,00	889.815.387,00	889.815.387,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.998.873,00	29.998.873,00	29.998.873,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.826.300,00	199.826.300,00	199.826.300,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.272,00	59.992.272,00	59.992.272,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.997.942,00	199.997.942,00	199.997.942,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.488.870.677,00	18.915.605.163,00	18.915.605.163,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	440.067.252,00	440.067.252,00	440.067.252,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.048.803.425,00	18.475.537.911,00	18.475.537.911,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.593.700,00	469.593.700,00	469.593.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.240.000,00	263.240.000,00	263.240.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.234.000,00	137.234.000,00	137.234.000,00
2.11.0.00.0.00.13.0000	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.119.700,00	69.119.700,00	69.119.700,00
2.12.0.00.0.00.14.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.792.577.096,00	22.471.692.694,00	22.471.692.694,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.792.577.096,00	22.471.692.694,00	22.471.692.694,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	719.678.919,00	719.678.919,00	719.678.919,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	493.363.500,00	493.363.500,00	493.363.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	93.363.500,00	93.363.500,00	93.363.500,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	226.315.419,00	226.315.419,00	226.315.419,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	226.315.419,00	226.315.419,00	226.315.419,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	423.029.402,00	423.029.402,00	423.029.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	163.029.402,00	163.029.402,00	163.029.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	163.029.402,00	163.029.402,00	163.029.402,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6.213.532.523,00	6.213.532.523,00	6.213.532.523,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	244.144.701,00	244.144.701,00	244.144.701,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	160.144.701,00	160.144.701,00	160.144.701,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00	4.370.901.461,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.154.233.671,00	1.154.233.671,00	1.154.233.671,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	669.998.631,00	669.998.631,00	669.998.631,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	53.417.847,00	53.417.847,00	53.417.847,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	154.315.995,00	154.315.995,00	154.315.995,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	161.504.510,00	161.504.510,00	161.504.510,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	114.996.688,00	114.996.688,00	114.996.688,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	444.252.690,00	444.252.690,00	444.252.690,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91.559.690,00	91.559.690,00	91.559.690,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	352.693.000,00	352.693.000,00	352.693.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	108.176.708,00	108.176.708,00	108.176.708,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	108.176.708,00	108.176.708,00	108.176.708,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	108.176.708,00	108.176.708,00	108.176.708,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.328.159.544,00	15.007.275.142,00	15.007.275.142,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.354.133.115,00	8.985.404.269,00	8.985.404.269,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.354.133.115,00	8.985.404.269,00	8.985.404.269,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.666.000,00	134.666.000,00	134.666.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.280.000,00	37.280.000,00	37.280.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.386.000,00	97.386.000,00	97.386.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.021.826.000,00	1.021.826.000,00	1.021.826.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.953.000,00	199.953.000,00	199.953.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	141.873.000,00	141.873.000,00	141.873.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.744.985.029,00	1.592.829.473,00	1.592.829.473,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.085.029,00	368.085.029,00	368.085.029,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.376.900.000,00	1.224.744.444,00	1.224.744.444,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.437.549.400,00	2.637.549.400,00	2.637.549.400,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	207.610.000,00	207.610.000,00	207.610.000,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.149.930.600,00	2.349.930.600,00	2.349.930.600,00
2.12.0.00.0.00.14.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.008.800,00	80.008.800,00	80.008.800,00
2.13.4.01.0.00.15.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	20.010.951.733,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.245.192.209,00	20.010.951.733,00	20.010.951.733,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	138.223.000,00	138.223.000,00	138.223.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	138.223.000,00	138.223.000,00	138.223.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	58.223.000,00	58.223.000,00	58.223.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.083.060.286,00	9.083.060.286,00	9.083.060.286,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.083.060.286,00	9.083.060.286,00	9.083.060.286,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	145.701.198,00	145.701.198,00	145.701.198,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	323.939.250,00	323.939.250,00	323.939.250,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	196.159.740,00	196.159.740,00	196.159.740,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.061.078.240,00	5.061.078.240,00	5.061.078.240,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	49.952.000,00	49.952.000,00	49.952.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	180.035.334,00	180.035.334,00	180.035.334,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.706.316.944,00	2.706.316.944,00	2.706.316.944,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	80.597.000,00	80.597.000,00	80.597.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	100.089.980,00	100.089.980,00	100.089.980,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	114.380.600,00	114.380.600,00	114.380.600,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	124.810.000,00	124.810.000,00	124.810.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00	3.556.272.774,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1.066.366.250,00	1.066.366.250,00	1.066.366.250,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	49.999.427,00	49.999.427,00	49.999.427,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	174.999.850,00	174.999.850,00	174.999.850,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	208.872.000,00	208.872.000,00	208.872.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	599.972.047,00	599.972.047,00	599.972.047,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	129.999.800,00	129.999.800,00	129.999.800,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	47.571.000,00	47.571.000,00	47.571.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.178.507.025,00	1.178.507.025,00	1.178.507.025,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	49.985.700,00	49.985.700,00	49.985.700,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	49.999.675,00	49.999.675,00	49.999.675,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.467.636.149,00	7.233.395.673,00	7.233.395.673,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.092.351.323,00	4.919.344.180,00	4.919.344.180,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.092.351.323,00	4.919.344.180,00	4.919.344.180,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.925.000,00	43.925.000,00	43.925.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.502.000,00	132.502.000,00	132.502.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.252.000,00	33.252.000,00	33.252.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.250.000,00	99.250.000,00	99.250.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.756.700,00	866.756.700,00	866.756.700,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.787.628,00	29.787.628,00	29.787.628,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.084.525,00	182.084.525,00	182.084.525,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.004.582,00	60.004.582,00	60.004.582,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.999.135,00	199.999.135,00	199.999.135,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.925.830,00	104.925.830,00	104.925.830,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.986.000,00	49.986.000,00	49.986.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.969.000,00	199.969.000,00	199.969.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.616.630,00	100.616.630,00	100.616.630,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.616.630,00	100.616.630,00	100.616.630,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.660.996,00	686.427.663,00	686.427.663,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.571.396,00	176.571.396,00	176.571.396,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571.089.600,00	509.856.267,00	509.856.267,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.823.500,00	363.823.500,00	363.823.500,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.910.000,00	241.910.000,00	241.910.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.025.000,00	91.025.000,00	91.025.000,00
2.13.4.01.0.00.15.0000	2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.888.500,00	30.888.500,00	30.888.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000						Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	16.190.029.996,00	15.899.994.282,00	15.899.994.282,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.190.029.996,00	15.899.994.282,00	15.899.994.282,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	165.807.867,00	165.807.867,00	165.807.867,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	66.469.867,00	66.469.867,00	66.469.867,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	66.469.867,00	66.469.867,00	66.469.867,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.338.000,00	99.338.000,00	99.338.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	99.338.000,00	99.338.000,00	99.338.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.916.400.001,00	1.916.400.001,00	1.916.400.001,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	317.449.000,00	317.449.000,00	317.449.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	243.983.000,00	243.983.000,00	243.983.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	73.466.000,00	73.466.000,00	73.466.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	133.116.200,00	133.116.200,00	133.116.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	133.116.200,00	133.116.200,00	133.116.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.261.869.998,00	1.261.869.998,00	1.261.869.998,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	84.395.000,00	84.395.000,00	84.395.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	775.496.800,00	775.496.800,00	775.496.800,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	124.011.000,00	124.011.000,00	124.011.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	139.784.498,00	139.784.498,00	139.784.498,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	138.182.700,00	138.182.700,00	138.182.700,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	203.964.803,00	203.964.803,00	203.964.803,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.523.600,00	70.523.600,00	70.523.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	84.150.000,00	84.150.000,00	84.150.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	49.291.203,00	49.291.203,00	49.291.203,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	491.655.320,00	491.655.320,00	491.655.320,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	491.655.320,00	491.655.320,00	491.655.320,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	176.285.000,00	176.285.000,00	176.285.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	160.842.320,00	160.842.320,00	160.842.320,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	154.528.000,00	154.528.000,00	154.528.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.616.166.808,00	13.326.131.094,00	13.326.131.094,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.713.950,00	123.713.950,00	123.713.950,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	38.713.950,00	38.713.950,00	38.713.950,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.455.635.209,00	8.198.999.495,00	8.198.999.495,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.455.635.209,00	8.198.999.495,00	8.198.999.495,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.198.091,00	193.198.091,00	193.198.091,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	104.842.400,00	104.842.400,00	104.842.400,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.355.691,00	88.355.691,00	88.355.691,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.754.133,00	890.754.133,00	890.754.133,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.952.255,00	29.952.255,00	29.952.255,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.176.210,00	199.176.210,00	199.176.210,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.996.200,00	49.996.200,00	49.996.200,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.980.343,00	199.980.343,00	199.980.343,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.345.625,00	84.345.625,00	84.345.625,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.922.500,00	49.922.500,00	49.922.500,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.381.000,00	237.381.000,00	237.381.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.097.692.000,00	3.097.692.000,00	3.097.692.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	97.692.000,00	97.692.000,00	97.692.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.129.425,00	520.729.425,00	520.729.425,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.182.825,00	223.182.825,00	223.182.825,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.946.600,00	297.546.600,00	297.546.600,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.044.000,00	301.044.000,00	301.044.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.070.000,00	224.070.000,00	224.070.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.554.000,00	63.554.000,00	63.554.000,00
2.14.0.00.0.00.16.0000	2	14	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000						Dinas Perhubungan	17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.878.907.179,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.878.907.179,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.417.892.492,00	4.177.160.492,00	4.177.160.492,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.465.169.200,00	2.224.437.200,00	2.224.437.200,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.015.535.200,00	1.774.803.200,00	1.774.803.200,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	449.634.000,00	449.634.000,00	449.634.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	15.004.650,00	15.004.650,00	15.004.650,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.004.650,00	15.004.650,00	15.004.650,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	312.183.000,00	312.183.000,00	312.183.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45.116.000,00	45.116.000,00	45.116.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28.084.000,00	28.084.000,00	28.084.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	15.190.000,00	15.190.000,00	15.190.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	183.549.000,00	183.549.000,00	183.549.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.244.000,00	40.244.000,00	40.244.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.305.695.223,00	1.305.695.223,00	1.305.695.223,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	284.148.045,00	284.148.045,00	284.148.045,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	120.608.000,00	120.608.000,00	120.608.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100.080.000,00	100.080.000,00	100.080.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	800.859.178,00	800.859.178,00	800.859.178,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	319.840.419,00	319.840.419,00	319.840.419,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	319.840.419,00	319.840.419,00	319.840.419,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.059.445.050,00	2.700.177.050,00	2.700.177.050,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	91.014.000,00	91.014.000,00	91.014.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	91.014.000,00	91.014.000,00	91.014.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	968.431.050,00	2.609.163.050,00	2.609.163.050,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	60.402.000,00	60.402.000,00	60.402.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	422.694.050,00	663.426.050,00	663.426.050,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	249.799.000,00	1.649.799.000,00	1.649.799.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	235.536.000,00	235.536.000,00	235.536.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	88.860.000,00	88.860.000,00	88.860.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	88.860.000,00	88.860.000,00	88.860.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	88.860.000,00	88.860.000,00	88.860.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.346.858.208,00	11.912.709.637,00	11.912.709.637,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.000.150,00	63.000.150,00	63.000.150,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	46.999.850,00	46.999.850,00	46.999.850,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.932.019.803,00	6.708.891.232,00	6.708.891.232,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.932.019.803,00	6.708.891.232,00	6.708.891.232,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.135.750,00	70.135.750,00	70.135.750,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.135.750,00	70.135.750,00	70.135.750,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.708.808,00	208.708.808,00	208.708.808,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	46.708.808,00	46.708.808,00	46.708.808,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.181.409.655,00	1.970.389.655,00	1.970.389.655,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.729.655,00	254.729.655,00	254.729.655,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.926.680.000,00	1.715.660.000,00	1.715.660.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.039.584.192,00	2.039.584.192,00	2.039.584.192,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.809.265.000,00	1.809.265.000,00	1.809.265.000,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.919.192,00	205.919.192,00	205.919.192,00
2.15.0.00.0.00.17.0000	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000						Dinas Komunikasi dan Informatika	27.932.900.112,00	27.541.448.619,00	27.541.448.619,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.387.081.936,00	24.995.630.443,00	24.995.630.443,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	8.890.472.742,00	8.890.472.742,00	8.890.472.742,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.890.472.742,00	8.890.472.742,00	8.890.472.742,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	333.924.500,00	333.924.500,00	333.924.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	583.312.000,00	583.312.000,00	583.312.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.557.000.000,00	5.557.000.000,00	5.557.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1.032.893.500,00	1.032.893.500,00	1.032.893.500,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	1.233.342.742,00	1.233.342.742,00	1.233.342.742,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.063.709.082,00	7.063.709.082,00	7.063.709.082,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.063.709.082,00	7.063.709.082,00	7.063.709.082,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	507.218.760,00	507.218.760,00	507.218.760,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	6.313.874.322,00	6.313.874.322,00	6.313.874.322,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	242.616.000,00	242.616.000,00	242.616.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.432.900.112,00	9.041.448.619,00	9.041.448.619,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.843.000,00	134.843.000,00	134.843.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.720.000,00	51.720.000,00	51.720.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.120.000,00	33.120.000,00	33.120.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.003.000,00	50.003.000,00	50.003.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.685.564.918,00	5.452.246.736,00	5.452.246.736,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.685.564.918,00	5.452.246.736,00	5.452.246.736,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.679.140,00	130.679.140,00	130.679.140,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.824.140,00	35.824.140,00	35.824.140,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.855.000,00	94.855.000,00	94.855.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	840.468.666,00	840.468.666,00	840.468.666,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.427,00	30.000.427,00	30.000.427,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.816.649,00	200.816.649,00	200.816.649,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.998.117,00	199.998.117,00	199.998.117,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.252.473,00	109.252.473,00	109.252.473,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.051.000,00	200.051.000,00	200.051.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.531.390,00	78.531.390,00	78.531.390,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	78.531.390,00	78.531.390,00	78.531.390,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.853.631.748,00	1.695.498.437,00	1.695.498.437,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.931.948,00	407.931.948,00	407.931.948,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.445.699.800,00	1.287.566.489,00	1.287.566.489,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.181.250,00	709.181.250,00	709.181.250,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.230.000,00	331.230.000,00	331.230.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.711.250,00	323.711.250,00	323.711.250,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.240.000,00	54.240.000,00	54.240.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00	1.263.217.775,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	281.734.775,00	281.734.775,00	281.734.775,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	604.073.000,00	604.073.000,00	604.073.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	310.308.000,00	310.308.000,00	310.308.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	67.102.000,00	67.102.000,00	67.102.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00	1.282.600.401,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	456.800.401,00	456.800.401,00	456.800.401,00
2.16.2.20.2.21.18.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	395.800.000,00	395.800.000,00	395.800.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.728.636.953,00	11.850.517.905,00	11.850.517.905,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.728.636.953,00	11.850.517.905,00	11.850.517.905,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	453.703.800,00	453.703.800,00	453.703.800,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	453.703.800,00	453.703.800,00	453.703.800,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	299.840.000,00	299.840.000,00	299.840.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	153.863.800,00	153.863.800,00	153.863.800,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	892.199.600,00	892.199.600,00	892.199.600,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	892.199.600,00	892.199.600,00	892.199.600,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	199.999.800,00	199.999.800,00	199.999.800,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	159.199.800,00	159.199.800,00	159.199.800,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	173.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.048.179.850,00	3.368.179.850,00	3.368.179.850,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.048.179.850,00	3.368.179.850,00	3.368.179.850,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.048.179.850,00	3.368.179.850,00	3.368.179.850,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.234.553.703,00	6.036.434.655,00	6.036.434.655,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.972.000,00	104.972.000,00	104.972.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.532.000,00	57.532.000,00	57.532.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.506.066.035,00	4.352.480.321,00	4.352.480.321,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.066.035,00	4.352.480.321,00	4.352.480.321,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.024.000,00	125.024.000,00	125.024.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.024.000,00	25.024.000,00	25.024.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.984.000,00	685.984.000,00	685.984.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	82.957.000,00	82.957.000,00	82.957.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.027.000,00	163.027.000,00	163.027.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.170.268,00	496.636.934,00	496.636.934,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.370.268,00	120.370.268,00	120.370.268,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.800.000,00	376.266.666,00	376.266.666,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.337.400,00	196.337.400,00	196.337.400,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000,00	113.210.000,00	113.210.000,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.987.400,00	49.987.400,00	49.987.400,00
2.17.0.00.0.00.19.0000	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.140.000,00	33.140.000,00	33.140.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.043.425.795,00	18.600.812.462,00	18.600.812.462,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.043.425.795,00	18.600.812.462,00	18.600.812.462,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	513.305.500,00	513.305.500,00	513.305.500,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	273.817.500,00	273.817.500,00	273.817.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	132.904.500,00	132.904.500,00	132.904.500,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	73.072.000,00	73.072.000,00	73.072.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	67.841.000,00	67.841.000,00	67.841.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	239.488.000,00	239.488.000,00	239.488.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	239.488.000,00	239.488.000,00	239.488.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	624.739.000,00	624.739.000,00	624.739.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	624.739.000,00	624.739.000,00	624.739.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	624.739.000,00	624.739.000,00	624.739.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.633.167.050,00	1.633.167.050,00	1.633.167.050,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.633.167.050,00	1.633.167.050,00	1.633.167.050,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	153.766.250,00	153.766.250,00	153.766.250,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	364.526.500,00	364.526.500,00	364.526.500,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	111.581.700,00	111.581.700,00	111.581.700,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	1.003.292.600,00	1.003.292.600,00	1.003.292.600,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	119.604.000,00	119.604.000,00	119.604.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	119.604.000,00	119.604.000,00	119.604.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	119.604.000,00	119.604.000,00	119.604.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.732.610.245,00	15.289.996.912,00	15.289.996.912,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.373.010,00	128.373.010,00	128.373.010,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.999.764,00	64.999.764,00	64.999.764,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.758,00	19.999.758,00	19.999.758,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	43.373.488,00	43.373.488,00	43.373.488,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.889.143.187,00	9.507.763.187,00	9.507.763.187,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.889.143.187,00	9.507.763.187,00	9.507.763.187,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.417.000,00	47.417.000,00	47.417.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.417.000,00	47.417.000,00	47.417.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.427.640,00	161.427.640,00	161.427.640,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63.643.640,00	63.643.640,00	63.643.640,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.784.000,00	97.784.000,00	97.784.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.075.241.552,00	3.075.241.552,00	3.075.241.552,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.969.087,00	64.969.087,00	64.969.087,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.190.987.821,00	2.190.987.821,00	2.190.987.821,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.999.789,00	99.999.789,00	99.999.789,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.998.364,00	249.998.364,00	249.998.364,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	134.999.491,00	134.999.491,00	134.999.491,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.310.000,00	94.310.000,00	94.310.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.977.000,00	199.977.000,00	199.977.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274.469.510,00	274.469.510,00	274.469.510,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	274.469.510,00	274.469.510,00	274.469.510,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.389.805.146,00	1.328.571.813,00	1.328.571.813,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	814.705.146,00	814.705.146,00	814.705.146,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	575.100.000,00	513.866.667,00	513.866.667,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	766.733.200,00	766.733.200,00	766.733.200,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.990.000,00	325.990.000,00	325.990.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.556.000,00	227.556.000,00	227.556.000,00
2.18.4.01.0.00.20.0000	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	213.187.200,00	213.187.200,00	213.187.200,00
2.19.3.26.0.00.21.0000						Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	94.705.372.923,00	101.941.941.622,00	101.941.941.622,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	91.328.522.073,00	98.565.090.772,00	98.565.090.772,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.678.028.500,00	1.678.028.500,00	1.678.028.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.063.338.500,00	1.063.338.500,00	1.063.338.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	622.485.000,00	622.485.000,00	622.485.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	233.216.500,00	233.216.500,00	233.216.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	207.637.000,00	207.637.000,00	207.637.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	614.690.000,00	614.690.000,00	614.690.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	614.690.000,00	614.690.000,00	614.690.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	73.037.820.111,00	80.807.820.111,00	80.807.820.111,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.368.966.823,00	27.378.966.823,00	27.378.966.823,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	20.368.966.823,00	27.378.966.823,00	27.378.966.823,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.202.007.899,00	13.202.007.899,00	13.202.007.899,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	12.495.500.399,00	12.495.500.399,00	12.495.500.399,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	706.507.500,00	706.507.500,00	706.507.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.443.929.250,00	11.443.929.250,00	11.443.929.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	85.006.000,00	85.006.000,00	85.006.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	11.358.923.250,00	11.358.923.250,00	11.358.923.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	26.406.098.300,00	27.166.098.300,00	27.166.098.300,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	26.301.098.300,00	27.061.098.300,00	27.061.098.300,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.616.817.839,00	1.616.817.839,00	1.616.817.839,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	274.207.960,00	274.207.960,00	274.207.960,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1.195.199.879,00	1.195.199.879,00	1.195.199.879,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	147.410.000,00	147.410.000,00	147.410.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.435.154.990,00	3.435.154.990,00	3.435.154.990,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	3.435.154.990,00	3.435.154.990,00	3.435.154.990,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	103.670.500,00	103.670.500,00	103.670.500,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	245.062.000,00	245.062.000,00	245.062.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	386.424.890,00	386.424.890,00	386.424.890,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	199.997.600,00	199.997.600,00	199.997.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.177.518.472,00	12.644.087.171,00	12.644.087.171,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.505.000,00	134.505.000,00	134.505.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.806.000,00	64.806.000,00	64.806.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.880.000,00	19.880.000,00	19.880.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.819.000,00	49.819.000,00	49.819.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.322.127.500,00	7.052.807.310,00	7.052.807.310,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.322.127.500,00	7.052.807.310,00	7.052.807.310,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.728.750,00	52.728.750,00	52.728.750,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.728.750,00	52.728.750,00	52.728.750,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.484.000,00	134.484.000,00	134.484.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.098.000,00	40.098.000,00	40.098.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.386.000,00	94.386.000,00	94.386.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.141.670,00	873.141.670,00	873.141.670,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.211.600,00	198.211.600,00	198.211.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.935.400,00	44.935.400,00	44.935.400,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.999.620,00	199.999.620,00	199.999.620,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.999.150,00	109.999.150,00	109.999.150,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.996.000,00	199.996.000,00	199.996.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.219.080,00	34.219.080,00	34.219.080,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	34.219.080,00	34.219.080,00	34.219.080,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.105.756.472,00	3.841.645.361,00	3.841.645.361,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00	1.703.756.472,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.402.000.000,00	2.137.888.889,00	2.137.888.889,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.556.000,00	520.556.000,00	520.556.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.560.000,00	328.560.000,00	328.560.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.746.000,00	176.746.000,00	176.746.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.250.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.376.850.850,00	3.376.850.850,00	3.376.850.850,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.376.850.850,00	3.376.850.850,00	3.376.850.850,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00	1.319.020.000,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00	1.729.791.600,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	328.039.250,00	328.039.250,00	328.039.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	328.039.250,00	328.039.250,00	328.039.250,00
2.19.3.26.0.00.21.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	328.039.250,00	328.039.250,00	328.039.250,00
2.23.2.24.0.00.22.0000						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.445.162.449,00	11.156.812.449,00	11.156.812.449,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.445.162.449,00	11.156.812.449,00	11.156.812.449,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.688.954.871,00	10.400.604.871,00	10.400.604.871,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.513.666.278,00	2.513.666.278,00	2.513.666.278,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	781.594.920,00	781.594.920,00	781.594.920,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	98.889.000,00	98.889.000,00	98.889.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	47.007.828,00	47.007.828,00	47.007.828,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	411.313.686,00	411.313.686,00	411.313.686,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	68.363.374,00	68.363.374,00	68.363.374,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	156.021.032,00	156.021.032,00	156.021.032,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.732.071.358,00	1.732.071.358,00	1.732.071.358,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	665.719.777,00	665.719.777,00	665.719.777,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541.408.883,00	541.408.883,00	541.408.883,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	453.217.333,00	453.217.333,00	453.217.333,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	71.725.365,00	71.725.365,00	71.725.365,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.175.288.593,00	7.886.938.593,00	7.886.938.593,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.904.498,00	134.904.498,00	134.904.498,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.915.165,00	64.915.165,00	64.915.165,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.997.700,00	19.997.700,00	19.997.700,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.991.633,00	49.991.633,00	49.991.633,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.811.907.252,00	5.572.257.252,00	5.572.257.252,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.811.907.252,00	5.572.257.252,00	5.572.257.252,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.500.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.500.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.970.093,00	885.970.093,00	885.970.093,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.994.835,00	59.994.835,00	59.994.835,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.974.825,00	144.974.825,00	144.974.825,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.503,00	59.992.503,00	59.992.503,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.998.249,00	199.998.249,00	199.998.249,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.961.651,00	109.961.651,00	109.961.651,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.055.030,00	47.055.030,00	47.055.030,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.993.000,00	199.993.000,00	199.993.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.247.100,00	24.247.100,00	24.247.100,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	24.247.100,00	24.247.100,00	24.247.100,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	630.014.650,00	581.314.650,00	581.314.650,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.476.250,00	183.476.250,00	183.476.250,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446.538.400,00	397.838.400,00	397.838.400,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.745.000,00	558.745.000,00	558.745.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.410.000,00	243.410.000,00	243.410.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.925.000,00	266.925.000,00	266.925.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.410.000,00	48.410.000,00	48.410.000,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	756.207.578,00	756.207.578,00	756.207.578,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	756.207.578,00	756.207.578,00	756.207.578,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	228.632.457,00	228.632.457,00	228.632.457,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	228.632.457,00	228.632.457,00	228.632.457,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	527.575.121,00	527.575.121,00	527.575.121,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	352.792.011,00	352.792.011,00	352.792.011,00
2.23.2.24.0.00.22.0000	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	174.783.110,00	174.783.110,00	174.783.110,00
3.25.0.00.0.00.23.0000						Dinas Perikanan	15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.494.925.674,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.494.925.674,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.753.042.341,00	16.494.925.674,00	16.494.925.674,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.212.260.350,00	2.837.260.350,00	2.837.260.350,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.917.873.250,00	2.542.873.250,00	2.542.873.250,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	149.473.000,00	149.473.000,00	149.473.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.768.400.250,00	2.393.400.250,00	2.393.400.250,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	294.387.100,00	294.387.100,00	294.387.100,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	204.704.100,00	204.704.100,00	204.704.100,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	89.683.000,00	89.683.000,00	89.683.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.873.464.756,00	2.278.464.756,00	2.278.464.756,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	265.091.950,00	265.091.950,00	265.091.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	98.230.950,00	98.230.950,00	98.230.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	166.861.000,00	166.861.000,00	166.861.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.608.372.806,00	2.013.372.806,00	2.013.372.806,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.434.156.806,00	1.839.156.806,00	1.839.156.806,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	174.216.000,00	174.216.000,00	174.216.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00	1.248.411.957,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	536.212.000,00	536.212.000,00	536.212.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	162.548.867,00	162.548.867,00	162.548.867,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	549.651.090,00	549.651.090,00	549.651.090,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.730.000.150,00	1.730.000.150,00	1.730.000.150,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	316.710.200,00	316.710.200,00	316.710.200,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	316.710.200,00	316.710.200,00	316.710.200,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.413.289.950,00	1.413.289.950,00	1.413.289.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	805.669.000,00	805.669.000,00	805.669.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	607.620.950,00	607.620.950,00	607.620.950,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.688.905.128,00	8.400.788.461,00	8.400.788.461,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.282.236,00	114.282.236,00	114.282.236,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.219.203,00	77.219.203,00	77.219.203,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.118.033,00	18.118.033,00	18.118.033,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	18.945.000,00	18.945.000,00	18.945.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.609.097.770,00	5.422.861.103,00	5.422.861.103,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.609.097.770,00	5.422.861.103,00	5.422.861.103,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.371.000,00	52.371.000,00	52.371.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.795.000,00	135.795.000,00	135.795.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.910.000,00	34.910.000,00	34.910.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.885.000,00	100.885.000,00	100.885.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.924.821,00	989.924.821,00	989.924.821,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.724.080,00	65.724.080,00	65.724.080,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.737.106,00	170.737.106,00	170.737.106,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.245.105,00	53.245.105,00	53.245.105,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.355.808,00	198.355.808,00	198.355.808,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	81.884.353,00	81.884.353,00	81.884.353,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.304.369,00	49.304.369,00	49.304.369,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.994.000,00	279.994.000,00	279.994.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.458.001,00	82.458.001,00	82.458.001,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	82.458.001,00	82.458.001,00	82.458.001,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.258.600,00	1.152.378.600,00	1.152.378.600,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.458.600,00	205.458.600,00	205.458.600,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048.800.000,00	946.920.000,00	946.920.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.717.700,00	450.717.700,00	450.717.700,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340.609.700,00	340.609.700,00	340.609.700,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.978.000,00	69.978.000,00	69.978.000,00
3.25.0.00.0.00.23.0000	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.130.000,00	40.130.000,00	40.130.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.934.134.992,00	46.549.807.214,00	46.549.807.214,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	46.934.134.992,00	46.549.807.214,00	46.549.807.214,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.468.809.793,00	11.008.809.793,00	11.008.809.793,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.950.010.753,00	6.890.010.753,00	6.890.010.753,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.755.495.353,00	2.835.495.353,00	2.835.495.353,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	550.591.200,00	550.591.200,00	550.591.200,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	348.692.000,00	348.692.000,00	348.692.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.515.000.000,00	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	780.232.200,00	780.232.200,00	780.232.200,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	35.775.000,00	35.775.000,00	35.775.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	35.775.000,00	35.775.000,00	35.775.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4.483.024.040,00	4.083.024.040,00	4.083.024.040,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.613.902.000,00	3.213.902.000,00	3.213.902.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	869.122.040,00	869.122.040,00	869.122.040,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.548.454.045,00	2.698.454.045,00	2.698.454.045,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.548.454.045,00	2.698.454.045,00	2.698.454.045,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	274.036.740,00	274.036.740,00	274.036.740,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	146.174.305,00	296.174.305,00	296.174.305,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	585.738.000,00	585.738.000,00	585.738.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.337.865.000,00	1.337.865.000,00	1.337.865.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	204.640.000,00	204.640.000,00	204.640.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.621.167.700,00	1.621.167.700,00	1.621.167.700,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	473.110.500,00	473.110.500,00	473.110.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	173.376.000,00	173.376.000,00	173.376.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.734.500,00	299.734.500,00	299.734.500,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	445.404.200,00	445.404.200,00	445.404.200,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	445.404.200,00	445.404.200,00	445.404.200,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	702.653.000,00	702.653.000,00	702.653.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	92.725.000,00	92.725.000,00	92.725.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	272.233.000,00	272.233.000,00	272.233.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	337.695.000,00	337.695.000,00	337.695.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	355.110.000,00	355.110.000,00	355.110.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	355.110.000,00	355.110.000,00	355.110.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	355.110.000,00	355.110.000,00	355.110.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.999.994.569,00	3.999.994.569,00	3.999.994.569,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.999.994.569,00	3.999.994.569,00	3.999.994.569,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2.472.381.952,00	2.472.381.952,00	2.472.381.952,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.130.692.835,00	1.130.692.835,00	1.130.692.835,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	396.919.782,00	396.919.782,00	396.919.782,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.940.598.885,00	26.866.271.107,00	26.866.271.107,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.849.725,00	207.849.725,00	207.849.725,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	122.849.725,00	122.849.725,00	122.849.725,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.786.192.418,00	20.178.442.418,00	20.178.442.418,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.786.192.418,00	20.178.442.418,00	20.178.442.418,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	88.191.250,00	88.191.250,00	88.191.250,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88.191.250,00	88.191.250,00	88.191.250,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.680.000,00	103.680.000,00	103.680.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.680.000,00	61.680.000,00	61.680.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.763.247,00	974.763.247,00	974.763.247,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.035.704,00	28.035.704,00	28.035.704,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.841.965,00	303.841.965,00	303.841.965,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.918.025,00	56.918.025,00	56.918.025,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.235.028,00	195.235.028,00	195.235.028,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.719.421,00	100.719.421,00	100.719.421,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	39.993.104,00	39.993.104,00	39.993.104,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.976.000,00	49.976.000,00	49.976.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.044.000,00	200.044.000,00	200.044.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.076.100,00	46.076.100,00	46.076.100,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	46.076.100,00	46.076.100,00	46.076.100,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.452.185.145,00	3.985.607.367,00	3.985.607.367,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.985.145,00	252.985.145,00	252.985.145,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.199.200.000,00	3.732.622.222,00	3.732.622.222,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.661.000,00	1.281.661.000,00	1.281.661.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.880.000,00	551.880.000,00	551.880.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.981.000,00	679.981.000,00	679.981.000,00
3.27.0.00.0.00.24.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000						Dinas Perkebunan	42.116.030.137,00	42.364.296.804,00	42.364.296.804,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.712.491.325,00	6.212.491.325,00	6.212.491.325,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.111.455.300,00	2.611.455.300,00	2.611.455.300,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	230.476.500,00	230.476.500,00	230.476.500,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.880.978.800,00	2.380.978.800,00	2.380.978.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.601.036.025,00	3.601.036.025,00	3.601.036.025,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100.538.000,00	100.538.000,00	100.538.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	3.500.498.025,00	3.500.498.025,00	3.500.498.025,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.495.755.776,00	7.965.755.776,00	7.965.755.776,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	200.049.000,00	200.049.000,00	200.049.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	200.049.000,00	200.049.000,00	200.049.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	7.295.706.776,00	7.765.706.776,00	7.765.706.776,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.995.707.014,00	7.465.707.014,00	7.465.707.014,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	299.999.762,00	299.999.762,00	299.999.762,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	14.235.733.609,00	14.835.733.609,00	14.835.733.609,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	14.235.733.609,00	14.835.733.609,00	14.835.733.609,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.247.131,00	200.247.131,00	200.247.131,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13.990.486.478,00	14.590.486.478,00	14.590.486.478,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	385.839.000,00	385.839.000,00	385.839.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	385.839.000,00	385.839.000,00	385.839.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	385.839.000,00	385.839.000,00	385.839.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.570.703.696,00	3.570.703.696,00	3.570.703.696,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.570.703.696,00	3.570.703.696,00	3.570.703.696,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.348.148.946,00	1.348.148.946,00	1.348.148.946,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.122.142.000,00	2.122.142.000,00	2.122.142.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	100.412.750,00	100.412.750,00	100.412.750,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.715.506.731,00	9.393.773.398,00	9.393.773.398,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.256.830,00	276.256.830,00	276.256.830,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.560.830,00	63.560.830,00	63.560.830,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.017.000,00	19.017.000,00	19.017.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	193.679.000,00	193.679.000,00	193.679.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.441.996.883,00	6.262.396.883,00	6.262.396.883,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.441.996.883,00	6.262.396.883,00	6.262.396.883,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	52.440.000,00	52.440.000,00	52.440.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.496.000,00	95.496.000,00	95.496.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.880.000,00	22.880.000,00	22.880.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.616.000,00	72.616.000,00	72.616.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	801.831.468,00	801.831.468,00	801.831.468,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.874.729,00	29.874.729,00	29.874.729,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.995.781,00	125.995.781,00	125.995.781,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.166.561,00	50.166.561,00	50.166.561,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.540.164,00	199.540.164,00	199.540.164,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.529.233,00	111.529.233,00	111.529.233,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.130.000,00	36.130.000,00	36.130.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.595.000,00	208.595.000,00	208.595.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.288.750,00	68.288.750,00	68.288.750,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	68.288.750,00	68.288.750,00	68.288.750,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.512.564.000,00	1.370.430.667,00	1.370.430.667,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.664.000,00	191.664.000,00	191.664.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.900.000,00	1.178.766.667,00	1.178.766.667,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.632.800,00	466.632.800,00	466.632.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.890.000,00	249.890.000,00	249.890.000,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.293.800,00	156.293.800,00	156.293.800,00
3.27.0.00.0.00.25.0000	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.449.000,00	60.449.000,00	60.449.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000						Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.694.645.421,00	26.881.266.906,00	26.881.266.906,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	27.396.087.364,00	23.582.708.849,00	23.582.708.849,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	622.268.378,00	622.268.378,00	622.268.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	141.516.000,00	141.516.000,00	141.516.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	141.516.000,00	141.516.000,00	141.516.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	71.180.000,00	71.180.000,00	71.180.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	71.180.000,00	71.180.000,00	71.180.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	409.572.378,00	409.572.378,00	409.572.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	409.572.378,00	409.572.378,00	409.572.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.902.788.850,00	4.124.214.850,00	4.124.214.850,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.902.788.850,00	4.124.214.850,00	4.124.214.850,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.902.788.850,00	4.124.214.850,00	4.124.214.850,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.451.212.000,00	1.451.212.000,00	1.451.212.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	78.307.000,00	78.307.000,00	78.307.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	78.307.000,00	78.307.000,00	78.307.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.323.503.000,00	1.323.503.000,00	1.323.503.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	78.307.000,00	78.307.000,00	78.307.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.245.196.000,00	1.245.196.000,00	1.245.196.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.402.000,00	49.402.000,00	49.402.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	49.402.000,00	49.402.000,00	49.402.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	6.390.752.626,00	4.833.217.000,00	4.833.217.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.390.752.626,00	4.833.217.000,00	4.833.217.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	1.621.821.776,00	1.061.551.500,00	1.061.551.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	4.714.287.850,00	3.717.022.500,00	3.717.022.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	54.643.000,00	54.643.000,00	54.643.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	372.898.040,00	372.898.040,00	372.898.040,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	372.898.040,00	372.898.040,00	372.898.040,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	226.483.740,00	226.483.740,00	226.483.740,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	146.414.300,00	146.414.300,00	146.414.300,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	131.511.050,00	131.511.050,00	131.511.050,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	131.511.050,00	131.511.050,00	131.511.050,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	131.511.050,00	131.511.050,00	131.511.050,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.524.656.420,00	12.047.387.531,00	12.047.387.531,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.666.357,00	134.666.357,00	134.666.357,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.854.080,00	64.854.080,00	64.854.080,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.812.378,00	19.812.378,00	19.812.378,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	49.999.899,00	49.999.899,00	49.999.899,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.407.983.874,00	8.144.103.874,00	8.144.103.874,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.407.983.874,00	8.144.103.874,00	8.144.103.874,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.288.000,00	162.288.000,00	162.288.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.680.000,00	58.680.000,00	58.680.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.608.000,00	103.608.000,00	103.608.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	821.204.509,00	821.204.509,00	821.204.509,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.983.187,00	29.983.187,00	29.983.187,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.227.573,00	199.227.573,00	199.227.573,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.908.032,00	59.908.032,00	59.908.032,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.989.422,00	199.989.422,00	199.989.422,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110.483.295,00	110.483.295,00	110.483.295,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.563.000,00	199.563.000,00	199.563.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.611.680,00	41.611.680,00	41.611.680,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	41.611.680,00	41.611.680,00	41.611.680,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.968.500,00	2.187.579.611,00	2.187.579.611,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457.968.500,00	457.968.500,00	457.968.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.943.000.000,00	1.729.611.111,00	1.729.611.111,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.933.500,00	555.933.500,00	555.933.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.860.000,00	316.860.000,00	316.860.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.532.000,00	197.532.000,00	197.532.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.541.500,00	41.541.500,00	41.541.500,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.298.558.057,00	3.298.558.057,00	3.298.558.057,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.003.180.057,00	3.003.180.057,00	3.003.180.057,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.003.180.057,00	3.003.180.057,00	3.003.180.057,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2.042.986.080,00	2.042.986.080,00	2.042.986.080,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	960.193.977,00	960.193.977,00	960.193.977,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	59.749.000,00	59.749.000,00	59.749.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	59.749.000,00	59.749.000,00	59.749.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	59.749.000,00	59.749.000,00	59.749.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	235.629.000,00	235.629.000,00	235.629.000,00
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	235.629.000,00	235.629.000,00	235.629.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.30.3.31.0.00.26.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	235.629.000,00	235.629.000,00	235.629.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000						Sekretariat Daerah	122.387.070.714,00	120.811.591.060,00	120.811.591.060,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	122.387.070.714,00	120.811.591.060,00	120.811.591.060,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	122.387.070.714,00	120.811.591.060,00	120.811.591.060,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.682.116.173,00	21.051.766.173,00	21.051.766.173,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	2.640.009.356,00	2.614.659.356,00	2.614.659.356,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.042.720.030,00	2.026.070.030,00	2.026.070.030,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	305.325.601,00	296.625.601,00	296.625.601,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	291.963.725,00	291.963.725,00	291.963.725,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.393.937.941,00	16.823.937.941,00	16.823.937.941,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.174.042.630,00	13.604.042.630,00	13.604.042.630,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	161.603.745,00	161.603.745,00	161.603.745,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.058.291.566,00	3.058.291.566,00	3.058.291.566,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	986.362.128,00	951.362.128,00	951.362.128,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	242.762.664,00	242.762.664,00	242.762.664,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	657.433.499,00	622.433.499,00	622.433.499,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	86.165.965,00	86.165.965,00	86.165.965,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	661.806.748,00	661.806.748,00	661.806.748,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	282.980.250,00	282.980.250,00	282.980.250,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	330.191.498,00	330.191.498,00	330.191.498,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	48.635.000,00	48.635.000,00	48.635.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.591.113.450,00	3.547.176.450,00	3.547.176.450,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	682.716.000,00	647.713.000,00	647.713.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	251.150.000,00	240.802.000,00	240.802.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	199.874.000,00	189.868.000,00	189.868.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	231.692.000,00	217.043.000,00	217.043.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.152.323.000,00	1.152.323.000,00	1.152.323.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	694.325.000,00	694.325.000,00	694.325.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	296.606.000,00	296.606.000,00	296.606.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	161.392.000,00	161.392.000,00	161.392.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.116.528.450,00	1.116.528.450,00	1.116.528.450,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	634.717.950,00	634.717.950,00	634.717.950,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	274.468.500,00	274.468.500,00	274.468.500,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	207.342.000,00	207.342.000,00	207.342.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	639.546.000,00	630.612.000,00	630.612.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	39.990.000,00	31.056.000,00	31.056.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	444.834.000,00	444.834.000,00	444.834.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	154.722.000,00	154.722.000,00	154.722.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.113.841.091,00	96.212.648.437,00	96.212.648.437,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.506.536,00	276.506.536,00	276.506.536,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.932.015,00	116.932.015,00	116.932.015,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.861.993,00	108.861.993,00	108.861.993,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.712.528,00	50.712.528,00	50.712.528,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.248.369.380,00	26.985.081.075,00	26.985.081.075,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.248.369.380,00	26.985.081.075,00	26.985.081.075,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	699.536.992,00	699.536.992,00	699.536.992,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	599.969.992,00	599.969.992,00	599.969.992,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.567.000,00	99.567.000,00	99.567.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.381.008.641,00	1.381.008.641,00	1.381.008.641,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	371.130.540,00	371.130.540,00	371.130.540,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	99.940.000,00	99.940.000,00	99.940.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	809.445.000,00	809.445.000,00	809.445.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.493.101,00	100.493.101,00	100.493.101,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.070.869.953,00	18.938.497.830,00	18.938.497.830,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	349.888.373,00	349.888.373,00	349.888.373,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.296.560.533,00	3.304.908.843,00	3.304.908.843,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.271.852.997,00	1.276.392.564,00	1.276.392.564,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	979.453.050,00	979.453.050,00	979.453.050,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000.000,00	5.915.000.000,00	5.915.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.482.435.000,00	5.422.175.000,00	5.422.175.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.216.752.364,00	4.235.489.792,00	4.235.489.792,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.464.313.000,00	3.477.153.000,00	3.477.153.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	752.439.364,00	758.336.792,00	758.336.792,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.957.100.368,00	14.572.370.714,00	14.572.370.714,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.694.533.480,00	4.544.533.480,00	4.544.533.480,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.262.566.888,00	10.027.837.234,00	10.027.837.234,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.389.099.650,00	12.349.559.650,00	12.349.559.650,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.643.522.400,00	5.603.982.400,00	5.603.982.400,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.663.483.000,00	4.663.483.000,00	4.663.483.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.082.094.250,00	2.082.094.250,00	2.082.094.250,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.364.828.640,00	1.364.828.640,00	1.364.828.640,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	357.788.640,00	357.788.640,00	357.788.640,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	398.440.000,00	398.440.000,00	398.440.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00	7.100.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	2.701.705.173,00	2.651.705.173,00	2.651.705.173,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	741.684.540,00	691.684.540,00	691.684.540,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	551.169.990,00	551.169.990,00	551.169.990,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.041.913.000,00	1.041.913.000,00	1.041.913.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	366.937.643,00	366.937.643,00	366.937.643,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.708.063.394,00	5.658.063.394,00	5.658.063.394,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.740.360.000,00	2.740.360.000,00	2.740.360.000,00
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.713.172.071,00	2.663.172.071,00	2.663.172.071,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.5.02.0.00.27.0000	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	254.531.323,00	254.531.323,00	254.531.323,00
4.02.0.00.0.00.28.0000						Sekretariat DPRD	104.546.316.626,00	106.813.431.705,00	106.813.431.705,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	104.546.316.626,00	106.813.431.705,00	106.813.431.705,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	41.950.970.888,00	38.736.777.649,00	38.736.777.649,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.247.177.513,00	4.247.177.513,00	4.247.177.513,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.848.848.050,00	3.848.848.050,00	3.848.848.050,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	398.329.463,00	398.329.463,00	398.329.463,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	9.429.600.930,00	9.429.600.930,00	9.429.600.930,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	1.359.913.503,00	1.359.913.503,00	1.359.913.503,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	1.359.913.503,00	1.359.913.503,00	1.359.913.503,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00	2.236.591.308,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.107.860.326,00	3.287.910.499,00	3.287.910.499,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00	1.222.672.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	685.188.326,00	865.238.499,00	865.238.499,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.221.940.199,00	2.221.940.199,00	2.221.940.199,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	250.550.000,00	250.550.000,00	250.550.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.971.390.199,00	1.971.390.199,00	1.971.390.199,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.109.371.412,00	1.575.360.000,00	1.575.360.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.109.371.412,00	1.575.360.000,00	1.575.360.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	19.598.429.200,00	15.738.197.200,00	15.738.197.200,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.809.333.200,00	8.949.101.200,00	8.949.101.200,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.789.096.000,00	6.789.096.000,00	6.789.096.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.595.345.738,00	68.076.654.056,00	68.076.654.056,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.435.733,00	98.435.733,00	98.435.733,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.882.200,00	57.882.200,00	57.882.200,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.217.333,00	21.217.333,00	21.217.333,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	19.336.200,00	19.336.200,00	19.336.200,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.927.526.798,00	7.694.319.655,00	7.694.319.655,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.927.526.798,00	7.694.319.655,00	7.694.319.655,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	372.443.500,00	372.443.500,00	372.443.500,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	372.443.500,00	372.443.500,00	372.443.500,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	428.701.000,00	428.701.000,00	428.701.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.680.000,00	58.680.000,00	58.680.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.741.000,00	94.741.000,00	94.741.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	275.280.000,00	275.280.000,00	275.280.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.016.080.003,00	9.676.537.364,00	9.676.537.364,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.955.315,00	96.955.315,00	96.955.315,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.008.180,00	306.008.180,00	306.008.180,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	226.842.500,00	953.043.938,00	953.043.938,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.784.438,00	210.784.438,00	210.784.438,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	211.676.570,00	211.676.570,00	211.676.570,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.500.000,00	400.500.000,00	400.500.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.523.313.000,00	7.457.568.923,00	7.457.568.923,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.604.219.300,00	2.045.455.178,00	2.045.455.178,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	1.604.219.300,00	2.045.455.178,00	2.045.455.178,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.744.646.459,00	5.244.968.681,00	5.244.968.681,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.170.046.459,00	1.170.046.459,00	1.170.046.459,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.574.600.000,00	4.074.922.222,00	4.074.922.222,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.142.202.015,00	2.142.202.015,00	2.142.202.015,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.050.000,00	224.050.000,00	224.050.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985.500.000,00	985.500.000,00	985.500.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	767.082.015,00	767.082.015,00	767.082.015,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.570.000,00	165.570.000,00	165.570.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	27.729.054.780,00	27.841.554.780,00	27.841.554.780,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.547.804.780,00	26.547.804.780,00	26.547.804.780,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.001.250.000,00	1.113.750.000,00	1.113.750.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	12.532.036.150,00	12.532.036.150,00	12.532.036.150,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	10.012.036.150,00	10.012.036.150,00	10.012.036.150,00
4.02.0.00.0.00.28.0000	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.870.247.371,00	23.261.719.593,00	23.261.719.593,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	23.870.247.371,00	23.261.719.593,00	23.261.719.593,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01				PERENCANAAN	22.894.657.847,00	22.286.130.069,00	22.286.130.069,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.190.149.781,00	3.190.149.781,00	3.190.149.781,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.417.344.892,00	2.417.344.892,00	2.417.344.892,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	553.133.400,00	553.133.400,00	553.133.400,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.486.000,00	40.486.000,00	40.486.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	846.799.000,00	846.799.000,00	846.799.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	976.926.492,00	976.926.492,00	976.926.492,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.277.000,00	63.277.000,00	63.277.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	63.277.000,00	63.277.000,00	63.277.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	612.042.750,00	612.042.750,00	612.042.750,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	212.980.894,00	212.980.894,00	212.980.894,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	399.061.856,00	399.061.856,00	399.061.856,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	97.485.139,00	97.485.139,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	97.485.139,00	97.485.139,00	97.485.139,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.498.428.750,00	2.498.428.750,00	2.498.428.750,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.048.090.750,00	1.048.090.750,00	1.048.090.750,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	210.056.000,00	210.056.000,00	210.056.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	149.987.000,00	149.987.000,00	149.987.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.137.500,00	279.137.500,00	279.137.500,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	408.910.250,00	408.910.250,00	408.910.250,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	250.907.000,00	250.907.000,00	250.907.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.598.000,00	65.598.000,00	65.598.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.770.000,00	20.770.000,00	20.770.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	111.544.000,00	111.544.000,00	111.544.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	52.995.000,00	52.995.000,00	52.995.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.199.431.000,00	1.199.431.000,00	1.199.431.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	313.992.000,00	313.992.000,00	313.992.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	77.985.000,00	77.985.000,00	77.985.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	144.751.000,00	144.751.000,00	144.751.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	466.304.000,00	466.304.000,00	466.304.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	196.399.000,00	196.399.000,00	196.399.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.206.079.316,00	16.597.551.538,00	16.597.551.538,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.005.132,00	70.005.132,00	70.005.132,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.540.872,00	52.540.872,00	52.540.872,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.464.260,00	17.464.260,00	17.464.260,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.525.445.983,00	13.009.695.983,00	13.009.695.983,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.525.445.983,00	13.009.695.983,00	13.009.695.983,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.264.000,00	95.264.000,00	95.264.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.264.000,00	95.264.000,00	95.264.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.900.000,00	303.900.000,00	303.900.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.694.000,00	76.694.000,00	76.694.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	227.206.000,00	227.206.000,00	227.206.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.104.721.261,00	1.104.721.261,00	1.104.721.261,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.962.409,00	29.962.409,00	29.962.409,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.999.820,00	172.999.820,00	172.999.820,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.992.295,00	59.992.295,00	59.992.295,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.999.584,00	249.999.584,00	249.999.584,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	209.998.153,00	209.998.153,00	209.998.153,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.306.000,00	11.306.000,00	11.306.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.463.000,00	330.463.000,00	330.463.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.894.680,00	84.894.680,00	84.894.680,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	84.894.680,00	84.894.680,00	84.894.680,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.303.008.260,00	1.210.230.482,00	1.210.230.482,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.508.260,00	435.508.260,00	435.508.260,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	867.500.000,00	774.722.222,00	774.722.222,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.840.000,00	718.840.000,00	718.840.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.930.000,00	444.930.000,00	444.930.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.060.000,00	199.060.000,00	199.060.000,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.850.000,00	74.850.000,00	74.850.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	975.589.524,00	975.589.524,00	975.589.524,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	975.589.524,00	975.589.524,00	975.589.524,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	273.378.346,00	273.378.346,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	273.378.346,00	273.378.346,00	273.378.346,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	159.929.981,00	159.929.981,00	159.929.981,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	159.929.981,00	159.929.981,00	159.929.981,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	202.242.387,00	202.242.387,00	202.242.387,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	202.242.387,00	202.242.387,00	202.242.387,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	340.038.810,00	340.038.810,00	340.038.810,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	149.628.332,00	149.628.332,00	149.628.332,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.342.332,00	100.342.332,00	100.342.332,00
5.01.5.05.0.00.44.0000	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.068.146,00	90.068.146,00	90.068.146,00
5.02.0.00.0.00.45.0000						Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	523.808.236.191,00	522.899.586.811,00	522.899.586.811,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02				KEUANGAN	523.808.236.191,00	522.899.586.811,00	522.899.586.811,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	502.913.927.188,00	502.611.127.808,00	504.911.127.808,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	340.399.900,00	340.399.900,00	340.399.900,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	133.404.000,00	133.404.000,00	133.404.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	108.587.000,00	108.587.000,00	108.587.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	98.408.900,00	98.408.900,00	98.408.900,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.162.500.000,00	1.162.500.000,00	1.162.500.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	132.500.000,00	132.500.000,00	132.500.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	499.986.482.508,00	499.683.683.128,00	501.983.683.128,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	494.886.482.508,00	494.886.482.508,00	494.886.482.508,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000,00	4.697.200.620,00	6.997.200.620,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	424.544.780,00	424.544.780,00	424.544.780,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	299.544.780,00	299.544.780,00	299.544.780,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.171.453.529,00	2.171.453.529,00	2.171.453.529,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.171.453.529,00	2.171.453.529,00	2.171.453.529,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	209.211.800,00	209.211.800,00	209.211.800,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	221.627.299,00	221.627.299,00	221.627.299,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.548.000,00	158.548.000,00	158.548.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	449.930.780,00	449.930.780,00	449.930.780,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	123.574.950,00	123.574.950,00	123.574.950,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	93.260.000,00	93.260.000,00	93.260.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	234.499.000,00	234.499.000,00	234.499.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84.999.900,00	84.999.900,00	84.999.900,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	314.999.800,00	314.999.800,00	314.999.800,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	280.802.000,00	280.802.000,00	280.802.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.722.855.474,00	18.117.005.474,00	15.817.005.474,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.033,00	85.000.033,00	85.000.033,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.054,00	65.000.054,00	65.000.054,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.979,00	19.999.979,00	19.999.979,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.269.020.311,00	11.779.470.311,00	11.779.470.311,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.269.020.311,00	11.779.470.311,00	11.779.470.311,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	136.691.000,00	136.691.000,00	136.691.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	136.691.000,00	136.691.000,00	136.691.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.836.000,00	220.836.000,00	220.836.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	71.096.000,00	71.096.000,00	71.096.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.740.000,00	149.740.000,00	149.740.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.457.682,00	1.078.457.682,00	1.078.457.682,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.417,00	30.000.417,00	30.000.417,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.010.500,00	200.010.500,00	200.010.500,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.995.070,00	59.995.070,00	59.995.070,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	274.026.600,00	274.026.600,00	274.026.600,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	174.632.095,00	174.632.095,00	174.632.095,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.009.000,00	50.009.000,00	50.009.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.784.000,00	249.784.000,00	249.784.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.599.981.488,00	2.599.981.488,00	99.981.488,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	99.981.488,00	99.981.488,00	99.981.488,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.144.410,00	1.415.844.410,00	1.415.844.410,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.444.410,00	445.444.410,00	445.444.410,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.086.700.000,00	970.400.000,00	970.400.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.724.550,00	800.724.550,00	1.000.724.550,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.490.000,00	45.490.000,00	45.490.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	439.540.000,00	439.540.000,00	439.540.000,00
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.528.990,00	239.528.990,00	439.528.990,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.45.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.165.560,00	76.165.560,00	76.165.560,00
5.02.0.00.0.00.46.0000						Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.393.021.252,00	31.567.465.696,00	31.567.465.696,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.795.600.000,00	5.795.600.000,00	5.795.600.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.795.600.000,00	5.795.600.000,00	5.795.600.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	478.100.000,00	478.100.000,00	478.100.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	324.800.000,00	324.800.000,00	324.800.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	427.666.200,00	427.666.200,00	427.666.200,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	102.117.800,00	102.117.800,00	102.117.800,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	875.500.000,00	875.500.000,00	875.500.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	371.216.000,00	371.216.000,00	371.216.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	392.200.000,00	392.200.000,00	392.200.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.597.421.252,00	25.771.865.696,00	25.771.865.696,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.757.955.485,00	22.017.755.485,00	22.017.755.485,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.757.955.485,00	22.017.755.485,00	22.017.755.485,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.220.000,00	234.220.000,00	234.220.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84.220.000,00	84.220.000,00	84.220.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.860.267,00	1.147.504.711,00	1.147.504.711,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.516.267,00	398.516.267,00	398.516.267,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	834.344.000,00	748.988.444,00	748.988.444,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.385.500,00	902.385.500,00	902.385.500,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.970.000,00	327.970.000,00	327.970.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	338.436.000,00	338.436.000,00	338.436.000,00
5.02.0.00.0.00.46.0000	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.979.500,00	49.979.500,00	49.979.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.185.655.743,00	18.775.086.251,00	18.775.086.251,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	19.185.655.743,00	18.775.086.251,00	18.775.086.251,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.294.300.550,00	7.294.300.550,00	7.294.300.550,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00	1.030.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	649.999.600,00	649.999.600,00	649.999.600,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	199.999.900,00	199.999.900,00	199.999.900,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.999.850,00	199.999.850,00	199.999.850,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	249.999.850,00	249.999.850,00	249.999.850,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	5.039.998.250,00	5.039.998.250,00	5.039.998.250,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	2.799.999.700,00	2.799.999.700,00	2.799.999.700,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.039.999.550,00	1.039.999.550,00	1.039.999.550,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	799.999.800,00	799.999.800,00	799.999.800,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	199.999.400,00	199.999.400,00	199.999.400,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	199.999.800,00	199.999.800,00	199.999.800,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	574.302.700,00	574.302.700,00	574.302.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	102.243.000,00	102.243.000,00	102.243.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	50.240.000,00	50.240.000,00	50.240.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	117.983.700,00	117.983.700,00	117.983.700,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	120.459.000,00	120.459.000,00	120.459.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	30.129.000,00	30.129.000,00	30.129.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	153.248.000,00	153.248.000,00	153.248.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.891.355.193,00	11.480.785.701,00	11.480.785.701,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.952.000,00	62.952.000,00	62.952.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.016.000,00	38.016.000,00	38.016.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.936.000,00	9.936.000,00	9.936.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.252.956.866,00	8.901.765.152,00	8.901.765.152,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.252.956.866,00	8.901.765.152,00	8.901.765.152,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.282.500,00	46.282.500,00	46.282.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	46.282.500,00	46.282.500,00	46.282.500,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.546.000,00	212.546.000,00	212.546.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.536.000,00	51.536.000,00	51.536.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.010.000,00	161.010.000,00	161.010.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	938.785.127,00	938.785.127,00	938.785.127,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.023.558,00	30.023.558,00	30.023.558,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261.709.820,00	261.709.820,00	261.709.820,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.009.930,00	60.009.930,00	60.009.930,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.001.799,00	200.001.799,00	200.001.799,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.040.020,00	107.040.020,00	107.040.020,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.093.700,00	109.093.700,00	109.093.700,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	109.093.700,00	109.093.700,00	109.093.700,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.229.000,00	684.851.222,00	684.851.222,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.329.000,00	192.329.000,00	192.329.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.900.000,00	492.522.222,00	492.522.222,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.510.000,00	524.510.000,00	524.510.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.330.000,00	281.330.000,00	281.330.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.880.000,00	224.880.000,00	224.880.000,00
5.03.0.00.0.00.47.0000	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000						Inspektorat	26.466.377.003,00	25.621.100.590,00	25.621.100.590,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	26.466.377.003,00	25.621.100.590,00	25.621.100.590,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	26.466.377.003,00	25.621.100.590,00	25.621.100.590,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.599.999.200,00	3.599.999.200,00	3.599.999.200,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.769.999.300,00	2.769.999.300,00	2.769.999.300,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	744.999.800,00	744.999.800,00	744.999.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	799.999.800,00	799.999.800,00	799.999.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	209.999.800,00	209.999.800,00	209.999.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	829.999.900,00	829.999.900,00	829.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	829.999.900,00	829.999.900,00	829.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.500.000.800,00	1.500.000.800,00	1.500.000.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	184.999.900,00	184.999.900,00	184.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	184.999.900,00	184.999.900,00	184.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	1.315.000.900,00	1.315.000.900,00	1.315.000.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	374.999.800,00	374.999.800,00	374.999.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	489.999.800,00	489.999.800,00	489.999.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	125.001.300,00	125.001.300,00	125.001.300,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.366.377.003,00	20.521.100.590,00	20.521.100.590,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.999.600,00	119.999.600,00	119.999.600,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.999.900,00	64.999.900,00	64.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	34.999.900,00	34.999.900,00	34.999.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.858.014.654,00	17.064.693.797,00	17.064.693.797,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.858.014.654,00	17.064.693.797,00	17.064.693.797,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.316.500,00	89.316.500,00	89.316.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	89.316.500,00	89.316.500,00	89.316.500,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.880.560,00	350.880.560,00	350.880.560,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	83.697.560,00	83.697.560,00	83.697.560,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	58.599.000,00	58.599.000,00	58.599.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.584.000,00	208.584.000,00	208.584.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.006.004.677,00	1.006.004.677,00	1.006.004.677,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.867.180,00	24.867.180,00	24.867.180,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.398.900,00	197.398.900,00	197.398.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.725.900,00	54.725.900,00	54.725.900,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.586.904,00	200.586.904,00	200.586.904,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	210.075.793,00	210.075.793,00	210.075.793,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.776.000,00	48.776.000,00	48.776.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.574.000,00	229.574.000,00	229.574.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	454.438.000,00	454.438.000,00	454.438.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.720.000,00	354.720.000,00	354.720.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	99.718.000,00	99.718.000,00	99.718.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.799.012,00	687.843.456,00	687.843.456,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	257.199.012,00	257.199.012,00	257.199.012,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.600.000,00	430.644.444,00	430.644.444,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.924.000,00	747.924.000,00	747.924.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	488.910.000,00	488.910.000,00	488.910.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.624.000,00	198.624.000,00	198.624.000,00
6.01.0.00.0.00.44.0000	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.390.000,00	60.390.000,00	60.390.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000						Kecamatan Sekayu	11.450.185.633,00	9.724.469.839,00	9.724.469.839,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	11.450.185.633,00	9.724.469.839,00	9.724.469.839,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01				KECAMATAN	11.450.185.633,00	9.724.469.839,00	9.724.469.839,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	660.083.783,00	660.083.783,00	660.083.783,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	570.010.600,00	570.010.600,00	570.010.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	570.010.600,00	570.010.600,00	570.010.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	90.073.183,00	90.073.183,00	90.073.183,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90.073.183,00	90.073.183,00	90.073.183,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.400.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.400.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.400.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.929.730,00	24.929.730,00	24.929.730,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.929.730,00	24.929.730,00	24.929.730,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24.929.730,00	24.929.730,00	24.929.730,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	49.960.000,00	49.960.000,00	49.960.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.225.212.120,00	8.899.496.326,00	8.899.496.326,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.585.000,00	34.585.000,00	34.585.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.695.000,00	14.695.000,00	14.695.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.890.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.495.379.214,00	7.260.585.642,00	7.260.585.642,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.495.379.214,00	7.260.585.642,00	7.260.585.642,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.897.260,00	100.897.260,00	100.897.260,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.702.260,00	51.702.260,00	51.702.260,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.195.000,00	49.195.000,00	49.195.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.948.636,00	342.948.636,00	342.948.636,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.205,00	9.992.205,00	9.992.205,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.267.594,00	73.267.594,00	73.267.594,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.909.071,00	19.909.071,00	19.909.071,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.023.558,00	40.023.558,00	40.023.558,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.039.208,00	34.039.208,00	34.039.208,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.680.000,00	40.680.000,00	40.680.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.037.000,00	100.037.000,00	100.037.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.101.530,00	49.101.530,00	49.101.530,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.101.530,00	49.101.530,00	49.101.530,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993.181.600,00	902.259.378,00	902.259.378,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.317.600,00	134.317.600,00	134.317.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	858.864.000,00	767.941.778,00	767.941.778,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.118.880,00	209.118.880,00	209.118.880,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.760.000,00	120.760.000,00	120.760.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.045.880,00	68.045.880,00	68.045.880,00
7.01.0.00.0.00.29.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.313.000,00	20.313.000,00	20.313.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0001						Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	849.999.937,00	849.999.937,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.999.937,00	699.999.937,00	699.999.937,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.999.937,00	699.999.937,00	699.999.937,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.999.937,00	349.999.937,00	349.999.937,00
7.01.0.00.0.00.29.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0002						Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	849.999.948,00	849.999.948,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.999.999,00	149.999.999,00	149.999.999,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.999.999,00	149.999.999,00	149.999.999,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.999,00	149.999.999,00	149.999.999,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.999.949,00	699.999.949,00	699.999.949,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.999.949,00	699.999.949,00	699.999.949,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.999.949,00	349.999.949,00	349.999.949,00
7.01.0.00.0.00.29.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003						Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0003	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004						Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0004	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000						Kecamatan Lais	4.800.229.366,00	4.671.575.953,00	4.671.575.953,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	498.124.805,00	498.124.805,00	498.124.805,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	470.987.000,00	470.987.000,00	470.987.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	470.987.000,00	470.987.000,00	470.987.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.187.805,00	22.187.805,00	22.187.805,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.187.805,00	22.187.805,00	22.187.805,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.650.000,00	22.650.000,00	22.650.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.235.000,00	17.235.000,00	17.235.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.235.000,00	17.235.000,00	17.235.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	17.235.000,00	17.235.000,00	17.235.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	22.050.000,00	22.050.000,00	22.050.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25.650.000,00	25.650.000,00	25.650.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.214.519.561,00	4.085.866.148,00	4.085.866.148,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.735.000,00	24.735.000,00	24.735.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.855.000,00	9.855.000,00	9.855.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.266.174.769,00	3.156.076.912,00	3.156.076.912,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.266.174.769,00	3.156.076.912,00	3.156.076.912,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.005.000,00	75.005.000,00	75.005.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.130.000,00	25.130.000,00	25.130.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.875.000,00	49.875.000,00	49.875.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.041.561,00	360.041.561,00	360.041.561,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.021.636,00	10.021.636,00	10.021.636,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.308.509,00	85.308.509,00	85.308.509,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.197.452,00	17.197.452,00	17.197.452,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.735.180,00	41.735.180,00	41.735.180,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.958.784,00	34.958.784,00	34.958.784,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.870.000,00	30.870.000,00	30.870.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.950.000,00	99.950.000,00	99.950.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.620.832,00	49.620.832,00	49.620.832,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.620.832,00	49.620.832,00	49.620.832,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.037.599,00	244.482.043,00	244.482.043,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.521.599,00	71.521.599,00	71.521.599,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.516.000,00	172.960.444,00	172.960.444,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.904.800,00	175.904.800,00	175.904.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.580.000,00	86.580.000,00	86.580.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.904.800,00	74.904.800,00	74.904.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.420.000,00	14.420.000,00	14.420.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000						Kecamatan Babat Toman	7.005.429.070,00	5.111.810.737,00	5.111.810.737,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	522.974.105,00	522.974.105,00	522.974.105,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	508.723.000,00	508.723.000,00	508.723.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	508.723.000,00	508.723.000,00	508.723.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.251.105,00	9.251.105,00	9.251.105,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.251.105,00	9.251.105,00	9.251.105,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.720.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.720.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.720.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.712.424.965,00	4.538.806.632,00	4.538.806.632,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.881,00	34.999.881,00	34.999.881,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.992.520,00	14.992.520,00	14.992.520,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.007.361,00	20.007.361,00	20.007.361,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.501.167.864,00	3.372.082.864,00	3.372.082.864,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.501.167.864,00	3.372.082.864,00	3.372.082.864,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.893.000,00	67.893.000,00	67.893.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.538.000,00	20.538.000,00	20.538.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.355.000,00	47.355.000,00	47.355.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.282.928,00	345.282.928,00	345.282.928,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.800,00	9.989.800,00	9.989.800,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.855.292,00	74.855.292,00	74.855.292,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.016.075,00	20.016.075,00	20.016.075,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.997.851,00	39.997.851,00	39.997.851,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.910,00	34.999.910,00	34.999.910,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.050.000,00	25.050.000,00	25.050.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.374.000,00	100.374.000,00	100.374.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.762.632,00	49.762.632,00	49.762.632,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.762.632,00	49.762.632,00	49.762.632,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.774.800,00	463.241.467,00	463.241.467,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.336.000,00	75.336.000,00	75.336.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.438.800,00	387.905.467,00	387.905.467,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.543.860,00	205.543.860,00	205.543.860,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.723.860,00	74.723.860,00	74.723.860,00
7.01.0.00.0.00.31.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0001						Kelurahan Babat	849.998.751,00	849.998.751,00	849.998.751,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.999.744,00	149.999.744,00	149.999.744,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.999.744,00	149.999.744,00	149.999.744,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.744,00	149.999.744,00	149.999.744,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.999.007,00	699.999.007,00	699.999.007,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.999.007,00	699.999.007,00	699.999.007,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.999.208,00	399.999.208,00	399.999.208,00
7.01.0.00.0.00.31.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.999.799,00	299.999.799,00	299.999.799,00
7.01.0.00.0.00.31.0002						Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	849.998.767,00	849.998.767,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.999.829,00	149.999.829,00	149.999.829,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.999.829,00	149.999.829,00	149.999.829,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.829,00	149.999.829,00	149.999.829,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.998.938,00	699.998.938,00	699.998.938,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.998.938,00	699.998.938,00	699.998.938,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	399.999.769,00	399.999.769,00	399.999.769,00
7.01.0.00.0.00.31.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.999.169,00	299.999.169,00	299.999.169,00
7.01.0.00.0.00.32.0000						Kecamatan Keluang	6.992.481.456,00	4.541.453.123,00	4.541.453.123,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	535.019.000,00	535.019.000,00	535.019.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	496.918.000,00	496.918.000,00	496.918.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	496.918.000,00	496.918.000,00	496.918.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.106.000,00	33.106.000,00	33.106.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.106.000,00	33.106.000,00	33.106.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.300.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.015.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.015.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	14.015.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.112.497.456,00	3.961.469.123,00	3.961.469.123,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.965.012,00	34.965.012,00	34.965.012,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.965.200,00	14.965.200,00	14.965.200,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.812,00	19.999.812,00	19.999.812,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.109.764.938,00	2.986.569.938,00	2.986.569.938,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.109.764.938,00	2.986.569.938,00	2.986.569.938,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.788.000,00	64.788.000,00	64.788.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.538.000,00	20.538.000,00	20.538.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.250.000,00	44.250.000,00	44.250.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.873.558,00	344.873.558,00	344.873.558,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.436,00	9.998.436,00	9.998.436,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.897.694,00	74.897.694,00	74.897.694,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.981.554,00	19.981.554,00	19.981.554,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.794,00	39.999.794,00	39.999.794,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.996.080,00	34.996.080,00	34.996.080,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.024.000,00	307.190.667,00	307.190.667,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	281.024.000,00	253.190.667,00	253.190.667,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.940.000,00	174.940.000,00	174.940.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000,00	74.970.000,00	74.970.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.130.000,00	21.130.000,00	21.130.000,00
7.01.0.00.0.00.32.0001						Kelurahan Keluang	849.999.875,00	849.999.875,00	849.999.875,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.929.259,00	149.929.259,00	149.929.259,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.070.616,00	700.070.616,00	700.070.616,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.070.616,00	700.070.616,00	700.070.616,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	347.593.088,00	347.593.088,00	347.593.088,00
7.01.0.00.0.00.32.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	352.477.528,00	352.477.528,00	352.477.528,00
7.01.0.00.0.00.33.0000						Kecamatan Sanga Desa	6.746.589.886,00	5.231.826.315,00	5.231.826.315,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	494.924.000,00	494.924.000,00	494.924.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	476.500.000,00	476.500.000,00	476.500.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	476.500.000,00	476.500.000,00	476.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.524.000,00	13.524.000,00	13.524.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.524.000,00	13.524.000,00	13.524.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.350.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.350.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.005.000,00	25.005.000,00	25.005.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.005.000,00	25.005.000,00	25.005.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.128.499,00	39.128.499,00	39.128.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39.128.499,00	39.128.499,00	39.128.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.628.499,00	13.628.499,00	13.628.499,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.819.232.387,00	4.654.468.816,00	4.654.468.816,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.285.000,00	48.285.000,00	48.285.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.795.000,00	33.795.000,00	33.795.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.490.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.577.757.585,00	3.463.094.014,00	3.463.094.014,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.757.585,00	3.463.094.014,00	3.463.094.014,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.955.000,00	57.955.000,00	57.955.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.355.000,00	42.355.000,00	42.355.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.273.602,00	399.273.602,00	399.273.602,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.988.530,00	9.988.530,00	9.988.530,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.286.852,00	97.286.852,00	97.286.852,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.724.040,00	13.724.040,00	13.724.040,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.485.330,00	38.485.330,00	38.485.330,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.662.850,00	42.662.850,00	42.662.850,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.126.000,00	104.126.000,00	104.126.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.247.400,00	33.247.400,00	33.247.400,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	33.247.400,00	33.247.400,00	33.247.400,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.603.800,00	474.503.800,00	474.503.800,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.621.400,00	44.621.400,00	44.621.400,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.982.400,00	429.882.400,00	429.882.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.110.000,00	178.110.000,00	178.110.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.880.000,00	120.880.000,00	120.880.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.880.000,00	34.880.000,00	34.880.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0001						Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	848.720.148,00	848.720.148,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.588.543,00	149.588.543,00	149.588.543,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.588.543,00	149.588.543,00	149.588.543,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.588.543,00	149.588.543,00	149.588.543,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.131.605,00	699.131.605,00	699.131.605,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.131.605,00	699.131.605,00	699.131.605,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.131.605,00	299.131.605,00	299.131.605,00
7.01.0.00.0.00.33.0002						Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	848.564.566,00	848.564.566,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.708.288,00	149.708.288,00	149.708.288,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.708.288,00	149.708.288,00	149.708.288,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.708.288,00	149.708.288,00	149.708.288,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	698.856.278,00	698.856.278,00	698.856.278,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	698.856.278,00	698.856.278,00	698.856.278,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.575.000,00	349.575.000,00	349.575.000,00
7.01.0.00.0.00.33.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.281.278,00	349.281.278,00	349.281.278,00
7.01.0.00.0.00.34.0000						Kecamatan Plakat Tinggi	4.055.446.567,00	3.452.126.423,00	3.452.126.423,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	540.125.000,00	540.125.000,00	540.125.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	522.224.000,00	522.224.000,00	522.224.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	522.224.000,00	522.224.000,00	522.224.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.776.000,00	12.776.000,00	12.776.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.776.000,00	12.776.000,00	12.776.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.125.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.975.321.567,00	2.872.001.423,00	2.872.001.423,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.971.311.691,00	1.894.204.525,00	1.894.204.525,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.971.311.691,00	1.894.204.525,00	1.894.204.525,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.174.000,00	58.174.000,00	58.174.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.714.000,00	12.714.000,00	12.714.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.460.000,00	45.460.000,00	45.460.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.529.960,00	380.529.960,00	380.529.960,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.449,00	9.995.449,00	9.995.449,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.494.496,00	73.494.496,00	73.494.496,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.993.556,00	19.993.556,00	19.993.556,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.993.744,00	39.993.744,00	39.993.744,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.999.424,00	34.999.424,00	34.999.424,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.510.000,00	41.510.000,00	41.510.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.543.291,00	120.543.291,00	120.543.291,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.850.780,00	49.850.780,00	49.850.780,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.850.780,00	49.850.780,00	49.850.780,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.035.136,00	301.822.158,00	301.822.158,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.001.536,00	75.001.536,00	75.001.536,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	253.033.600,00	226.820.622,00	226.820.622,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.420.000,00	162.420.000,00	162.420.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.260.000,00	118.260.000,00	118.260.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.870.000,00	30.870.000,00	30.870.000,00
7.01.0.00.0.00.34.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.290.000,00	13.290.000,00	13.290.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000						Kecamatan Batanghari Leko	4.838.096.621,00	3.838.838.954,00	3.838.838.954,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	533.384.000,00	533.384.000,00	533.384.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	519.854.000,00	519.854.000,00	519.854.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	519.854.000,00	519.854.000,00	519.854.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.530.000,00	8.530.000,00	8.530.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	900.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	900.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	900.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.412.000,00	14.412.000,00	14.412.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.412.000,00	14.412.000,00	14.412.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.412.000,00	14.412.000,00	14.412.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.712.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.712.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.712.000,00	11.712.000,00	11.712.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.492.000,00	20.492.000,00	20.492.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.492.000,00	20.492.000,00	20.492.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13.292.000,00	13.292.000,00	13.292.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.358.096.621,00	3.258.838.954,00	3.258.838.954,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.368.145.536,00	2.291.490.536,00	2.291.490.536,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.145.536,00	2.291.490.536,00	2.291.490.536,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.269.000,00	64.269.000,00	64.269.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.328.000,00	16.328.000,00	16.328.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47.941.000,00	47.941.000,00	47.941.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.528.585,00	352.528.585,00	352.528.585,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.275.500,00	14.275.500,00	14.275.500,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.267.285,00	78.267.285,00	78.267.285,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.998.300,00	39.998.300,00	39.998.300,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.986.000,00	34.986.000,00	34.986.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.012.000,00	100.012.000,00	100.012.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.930.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	44.930.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.353.500,00	282.750.833,00	282.750.833,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.429.500,00	79.429.500,00	79.429.500,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.924.000,00	203.321.333,00	203.321.333,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.870.000,00	197.870.000,00	197.870.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.000.000,00	126.000.000,00	126.000.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.270.000,00	56.270.000,00	56.270.000,00
7.01.0.00.0.00.35.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000						Kecamatan Sungai Keruh	3.824.643.711,00	3.729.241.886,00	3.729.241.886,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	497.310.000,00	497.310.000,00	497.310.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	466.300.000,00	466.300.000,00	466.300.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	466.300.000,00	466.300.000,00	466.300.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.610.000,00	25.610.000,00	25.610.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.610.000,00	25.610.000,00	25.610.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21.650.000,00	21.650.000,00	21.650.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.006.000,00	20.006.000,00	20.006.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.006.000,00	20.006.000,00	20.006.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.006.000,00	20.006.000,00	20.006.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.586.000,00	40.586.000,00	40.586.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.586.000,00	40.586.000,00	40.586.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.580.000,00	20.580.000,00	20.580.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	20.006.000,00	20.006.000,00	20.006.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.245.091.711,00	3.149.689.886,00	3.149.689.886,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.316.000,00	25.316.000,00	25.316.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.166.000,00	10.166.000,00	10.166.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.150.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.342.049.251,00	2.267.058.537,00	2.267.058.537,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.342.049.251,00	2.267.058.537,00	2.267.058.537,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.727.000,00	66.727.000,00	66.727.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.372.000,00	14.372.000,00	14.372.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.355.000,00	52.355.000,00	52.355.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.240.802,00	357.240.802,00	357.240.802,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.081.100,00	5.081.100,00	5.081.100,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.835.930,00	88.835.930,00	88.835.930,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.229.600,00	10.229.600,00	10.229.600,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.049.972,00	50.049.972,00	50.049.972,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.200,00	35.000.200,00	35.000.200,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.244.000,00	102.244.000,00	102.244.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.910.000,00	19.910.000,00	19.910.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	19.910.000,00	19.910.000,00	19.910.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.046.658,00	206.635.547,00	206.635.547,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.129.058,00	35.129.058,00	35.129.058,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.917.600,00	171.506.489,00	171.506.489,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.802.000,00	206.802.000,00	206.802.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.760.000,00	120.760.000,00	120.760.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.062.000,00	75.062.000,00	75.062.000,00
7.01.0.00.0.00.36.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000,00	10.980.000,00	10.980.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000						Kecamatan Sungai Lilin	5.147.360.634,00	4.992.630.396,00	4.992.630.396,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	549.760.000,00	549.760.000,00	549.760.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	537.584.000,00	537.584.000,00	537.584.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	537.584.000,00	537.584.000,00	537.584.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.176.000,00	7.176.000,00	7.176.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.176.000,00	7.176.000,00	7.176.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.567.360.634,00	4.412.630.396,00	4.412.630.396,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.610.000,00	28.610.000,00	28.610.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.760.000,00	22.760.000,00	22.760.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.456.343.375,00	3.340.579.804,00	3.340.579.804,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.456.343.375,00	3.340.579.804,00	3.340.579.804,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.658.528,00	444.658.528,00	444.658.528,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.133.744,00	11.133.744,00	11.133.744,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.729.535,00	82.729.535,00	82.729.535,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.279.052,00	16.279.052,00	16.279.052,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.037.397,00	60.037.397,00	60.037.397,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.628.800,00	29.628.800,00	29.628.800,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	29.280.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	81.690.000,00	81.690.000,00	81.690.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.880.000,00	133.880.000,00	133.880.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.663.511,00	6.663.511,00	6.663.511,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	6.663.511,00	6.663.511,00	6.663.511,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.285.220,00	405.318.553,00	405.318.553,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.851.620,00	71.851.620,00	71.851.620,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.433.600,00	333.466.933,00	333.466.933,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.800.000,00	186.800.000,00	186.800.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.260.000,00	122.260.000,00	122.260.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.680.000,00	48.680.000,00	48.680.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.860.000,00	15.860.000,00	15.860.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.37.0001						Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002						Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.37.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000						Kecamatan Bayung Lencir	4.636.058.274,00	4.491.388.274,00	4.491.388.274,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	533.529.600,00	533.529.600,00	533.529.600,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	499.347.000,00	499.347.000,00	499.347.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	499.347.000,00	499.347.000,00	499.347.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.182.600,00	29.182.600,00	29.182.600,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.182.600,00	29.182.600,00	29.182.600,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.965.000,00	25.965.000,00	25.965.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.965.000,00	25.965.000,00	25.965.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	16.565.000,00	16.565.000,00	16.565.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.055.823.674,00	3.911.153.674,00	3.911.153.674,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.654.000,00	34.654.000,00	34.654.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.974.000,00	14.974.000,00	14.974.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.680.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.959.269.918,00	2.847.999.918,00	2.847.999.918,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.959.269.918,00	2.847.999.918,00	2.847.999.918,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.020.000,00	60.020.000,00	60.020.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19.560.000,00	19.560.000,00	19.560.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.460.000,00	40.460.000,00	40.460.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.748.549,00	348.748.549,00	348.748.549,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.936.150,00	9.936.150,00	9.936.150,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.914.451,00	78.914.451,00	78.914.451,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.090,00	20.001.090,00	20.001.090,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.980.758,00	39.980.758,00	39.980.758,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.976.100,00	34.976.100,00	34.976.100,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.940.000,00	99.940.000,00	99.940.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.433.407,00	48.433.407,00	48.433.407,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	48.433.407,00	48.433.407,00	48.433.407,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.843.800,00	386.443.800,00	386.443.800,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.115.000,00	83.115.000,00	83.115.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	336.728.800,00	303.328.800,00	303.328.800,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.854.000,00	184.854.000,00	184.854.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.460.000,00	85.460.000,00	85.460.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.774.000,00	74.774.000,00	74.774.000,00
7.01.0.00.0.00.38.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.620.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.38.0001						Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	849.014.113,00	849.014.113,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.999.542,00	149.999.542,00	149.999.542,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.999.542,00	149.999.542,00	149.999.542,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.999.542,00	149.999.542,00	149.999.542,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.014.571,00	699.014.571,00	699.014.571,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.014.571,00	699.014.571,00	699.014.571,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.037.519,00	349.037.519,00	349.037.519,00
7.01.0.00.0.00.38.0001	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.977.052,00	349.977.052,00	349.977.052,00
7.01.0.00.0.00.38.0002						Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	849.918.355,00	849.918.355,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.974.179,00	149.974.179,00	149.974.179,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	149.974.179,00	149.974.179,00	149.974.179,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	149.974.179,00	149.974.179,00	149.974.179,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	699.944.176,00	699.944.176,00	699.944.176,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	699.944.176,00	699.944.176,00	699.944.176,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	349.994.476,00	349.994.476,00	349.994.476,00
7.01.0.00.0.00.38.0002	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.949.700,00	349.949.700,00	349.949.700,00
7.01.0.00.0.00.39.0000						Kecamatan Lalan	7.763.292.886,00	4.164.662.653,00	4.164.662.653,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	789.080.000,00	789.080.000,00	789.080.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	755.380.000,00	755.380.000,00	755.380.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	755.380.000,00	755.380.000,00	755.380.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.700.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.500.000.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.580.000,00	18.580.000,00	18.580.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.580.000,00	18.580.000,00	18.580.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.290.000,00	9.290.000,00	9.290.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.433.292.886,00	3.334.662.653,00	3.334.662.653,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.679.160.599,00	2.591.798.099,00	2.591.798.099,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.679.160.599,00	2.591.798.099,00	2.591.798.099,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.812.000,00	68.812.000,00	68.812.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.582.000,00	18.582.000,00	18.582.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.230.000,00	50.230.000,00	50.230.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.743.520,00	341.743.520,00	341.743.520,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.500,00	9.999.500,00	9.999.500,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.754.100,00	74.754.100,00	74.754.100,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.093.900,00	17.093.900,00	17.093.900,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.967.020,00	39.967.020,00	39.967.020,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.929.000,00	99.929.000,00	99.929.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	49.804.000,00	49.804.000,00	49.804.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.039.767,00	120.772.034,00	120.772.034,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.630.167,00	23.630.167,00	23.630.167,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.409.600,00	97.141.867,00	97.141.867,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.733.000,00	136.733.000,00	136.733.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.920.000,00	36.920.000,00	36.920.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.823.000,00	74.823.000,00	74.823.000,00
7.01.0.00.0.00.39.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.990.000,00	24.990.000,00	24.990.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000						Kecamatan Tungkal Jaya	4.783.936.133,00	4.684.002.562,00	4.684.002.562,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	452.611.000,00	452.611.000,00	452.611.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	428.236.000,00	428.236.000,00	428.236.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	428.236.000,00	428.236.000,00	428.236.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.375.000,00	19.375.000,00	19.375.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	79.749.000,00	79.749.000,00	79.749.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.749.000,00	79.749.000,00	79.749.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	55.929.000,00	55.929.000,00	55.929.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.203.936.133,00	4.104.002.562,00	4.104.002.562,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.704.375,00	19.704.375,00	19.704.375,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.797.550,00	10.797.550,00	10.797.550,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.906.825,00	8.906.825,00	8.906.825,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.550.311.733,00	2.467.078.162,00	2.467.078.162,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.311.733,00	2.467.078.162,00	2.467.078.162,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.900.000,00	34.900.000,00	34.900.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.670.000,00	14.670.000,00	14.670.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.373.665,00	381.373.665,00	381.373.665,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.925.065,00	9.925.065,00	9.925.065,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.220.927,00	88.220.927,00	88.220.927,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.992.545,00	17.992.545,00	17.992.545,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.768.328,00	37.768.328,00	37.768.328,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.592.800,00	28.592.800,00	28.592.800,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.874.000,00	123.874.000,00	123.874.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.565.960,00	43.565.960,00	43.565.960,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	43.565.960,00	43.565.960,00	43.565.960,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.530.400,00	271.830.400,00	271.830.400,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.916.000,00	113.916.000,00	113.916.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.614.400,00	157.914.400,00	157.914.400,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.550.000,00	885.550.000,00	885.550.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
7.01.0.00.0.00.40.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000						Kecamatan Lawang Wetan	5.889.169.839,00	4.418.768.712,00	4.418.768.712,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	517.510.000,00	517.510.000,00	517.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	471.700.000,00	471.700.000,00	471.700.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	471.700.000,00	471.700.000,00	471.700.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.860.000,00	40.860.000,00	40.860.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.860.000,00	40.860.000,00	40.860.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.343.462.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.343.462.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.343.462.000,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.540.000,00	27.540.000,00	27.540.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.540.000,00	27.540.000,00	27.540.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.540.000,00	15.540.000,00	15.540.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.967.057.839,00	3.840.118.712,00	3.840.118.712,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.490.000,00	29.490.000,00	29.490.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.510.000,00	12.510.000,00	12.510.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.883.840.443,00	2.792.156.872,00	2.792.156.872,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.883.840.443,00	2.792.156.872,00	2.792.156.872,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.218.000,00	56.218.000,00	56.218.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.218.000,00	21.218.000,00	21.218.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.613.071,00	362.613.071,00	362.613.071,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.696.998,00	7.696.998,00	7.696.998,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.948.056,00	53.948.056,00	53.948.056,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.089.356,00	13.089.356,00	13.089.356,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.016.661,00	46.016.661,00	46.016.661,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.982.000,00	31.982.000,00	31.982.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	41.360.000,00	41.360.000,00	41.360.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.880.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.640.000,00	142.640.000,00	142.640.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.445.200,00	35.445.200,00	35.445.200,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	35.445.200,00	35.445.200,00	35.445.200,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.471.125,00	379.215.569,00	379.215.569,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.798.325,00	71.798.325,00	71.798.325,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	342.672.800,00	307.417.244,00	307.417.244,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.980.000,00	184.980.000,00	184.980.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.260.000,00	118.260.000,00	118.260.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.190.000,00	43.190.000,00	43.190.000,00
7.01.0.00.0.00.41.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.530.000,00	23.530.000,00	23.530.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000						Kecamatan Babat Supat	3.644.159.642,00	3.548.719.688,00	3.548.719.688,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530.901.200,00	530.901.200,00	530.901.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	492.852.000,00	492.852.000,00	492.852.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	492.852.000,00	492.852.000,00	492.852.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.099.200,00	33.099.200,00	33.099.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33.099.200,00	33.099.200,00	33.099.200,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.747.000,00	7.747.000,00	7.747.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.747.000,00	7.747.000,00	7.747.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.747.000,00	7.747.000,00	7.747.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.520.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.520.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.064.231.442,00	2.968.791.488,00	2.968.791.488,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.999.948,00	24.999.948,00	24.999.948,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.948,00	9.999.948,00	9.999.948,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.056.333.151,00	1.979.448.753,00	1.979.448.753,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.056.333.151,00	1.979.448.753,00	1.979.448.753,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.739.000,00	59.739.000,00	59.739.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.959.000,00	49.959.000,00	49.959.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.464.838,00	354.464.838,00	354.464.838,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.996.927,00	9.996.927,00	9.996.927,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.356.968,00	54.356.968,00	54.356.968,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.994.874,00	19.994.874,00	19.994.874,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.683.349,00	24.683.349,00	24.683.349,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.043.720,00	14.043.720,00	14.043.720,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.070.000,00	40.070.000,00	40.070.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.319.000,00	151.319.000,00	151.319.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.330.261,00	25.330.261,00	25.330.261,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	25.330.261,00	25.330.261,00	25.330.261,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.142.244,00	284.586.688,00	284.586.688,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.626.244,00	111.626.244,00	111.626.244,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.516.000,00	172.960.444,00	172.960.444,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.222.000,00	240.222.000,00	240.222.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.792.000,00	149.792.000,00	149.792.000,00
7.01.0.00.0.00.42.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.590.000,00	11.590.000,00	11.590.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.43.0000						Kecamatan Jirak Jaya	3.878.748.239,00	2.649.926.025,00	2.649.926.025,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	507.385.000,00	507.385.000,00	507.385.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	483.354.000,00	483.354.000,00	483.354.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	483.354.000,00	483.354.000,00	483.354.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.031.000,00	19.031.000,00	19.031.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.031.000,00	19.031.000,00	19.031.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.147.999.992,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.147.999.992,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.147.999.992,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.815.000,00	13.815.000,00	13.815.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.815.000,00	13.815.000,00	13.815.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.815.000,00	13.815.000,00	13.815.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.320.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.320.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.160.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.150.748.247,00	2.069.926.025,00	2.069.926.025,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.263.593.144,00	1.206.893.144,00	1.206.893.144,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.263.593.144,00	1.206.893.144,00	1.206.893.144,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.824.000,00	57.824.000,00	57.824.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.824.000,00	7.824.000,00	7.824.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.896.383,00	339.896.383,00	339.896.383,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.200,00	9.997.200,00	9.997.200,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.573.483,00	68.573.483,00	68.573.483,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.999.500,00	19.999.500,00	19.999.500,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.050.800,00	40.050.800,00	40.050.800,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.275.400,00	36.275.400,00	36.275.400,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.371.920,00	55.371.920,00	55.371.920,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	55.371.920,00	55.371.920,00	55.371.920,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.680.800,00	256.558.578,00	256.558.578,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.460.000,00	38.460.000,00	38.460.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.220.800,00	218.098.578,00	218.098.578,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.432.000,00	128.432.000,00	128.432.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.040.000,00	42.040.000,00	42.040.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.992.000,00	74.992.000,00	74.992.000,00
7.01.0.00.0.00.43.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
						TOTAL	**3.422.653.775.772,00**	**3.408.867.666.146,00**	**3.408.867.666.146,00**

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	316.710.200,00	0,00	0,00	0,00	316.710.200,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	892.199.600,00	0,00	0,00	0,00	892.199.600,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	453.703.800,00	0,00	0,00	0,00	453.703.800,00
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.368.179.850,00	0,00	0,00	0,00	3.368.179.850,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
8	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	513.305.500,00	0,00	0,00	0,00	513.305.500,00
9	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000.000,00
10	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.067.544.381,00	2.455.719.331,00	0,00	0,00	14.523.263.712,00
11	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	624.739.000,00	0,00	0,00	0,00	624.739.000,00
12	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	235.629.000,00	0,00	0,00	0,00	235.629.000,00
13	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	4.833.217.000,00	0,00	0,00	0,00	4.833.217.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
14	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59.749.000,00	0,00	0,00	0,00	59.749.000,00
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	131.511.050,00	0,00	0,00	0,00	131.511.050,00
16	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	118.532.000,00	4.005.682.850,00	0,00	0,00	4.124.214.850,00
17	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.095.919.019,00	1.907.261.038,00	0,00	0,00	3.003.180.057,00
18	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	622.268.378,00	0,00	0,00	0,00	622.268.378,00
19	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.451.212.000,00	0,00	0,00	0,00	1.451.212.000,00
20	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	372.898.040,00	0,00	0,00	0,00	372.898.040,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.520.630.200,00	5.376.379.800,00	0,00	0,00	18.897.010.000,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52.601.712.510,00	258.229.270.221,00	0,00	0,00	310.830.982.731,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.839.070.000,00	7.680.930.000,00	0,00	0,00	17.520.000.000,00
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.890.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000.000,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	2.501.376.050,00	198.801.000,00	0,00	0,00	2.700.177.050,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Dinas Perhubungan	88.860.000,00	0,00	0,00	0,00	88.860.000,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	2.807.635.564,00	1.369.524.928,00	0,00	0,00	4.177.160.492,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.987.632.400,00	0,00	0,00	0,00	2.987.632.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.220.885.088,00	37.030.367.150,00	0,00	0,00	88.251.252.238,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.637.066.912,00	0,00	0,00	0,00	9.637.066.912,00
32	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	780.180.000,00	17.258.585.186,00	0,00	0,00	18.038.765.186,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
33	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.795.004.600,00	0,00	0,00	0,00	8.795.004.600,00
34	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	590.000.000,00	7.295.133.450,00	0,00	0,00	7.885.133.450,00
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.855.249.000,00	48.827.837.756,00	0,00	0,00	50.683.086.756,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.715.569.121,00	305.745.150,00	0,00	0,00	12.021.314.271,00
37	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	385.880.000,00	9.614.120.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
38	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.710.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
39	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
40	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	1.248.411.957,00	0,00	0,00	0,00	1.248.411.957,00
41	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	2.272.692.756,00	5.772.000,00	0,00	0,00	2.278.464.756,00
42	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	2.837.260.350,00	0,00	0,00	0,00	2.837.260.350,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
43	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	1.386.189.950,00	27.100.000,00	0,00	0,00	1.413.289.950,00
44	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	10.936.383.529,00	3.899.350.080,00	0,00	0,00	14.835.733.609,00
45	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	7.965.755.776,00	0,00	0,00	0,00	7.965.755.776,00
46	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	5.907.901.325,00	304.590.000,00	0,00	0,00	6.212.491.325,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
47	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan	3.570.703.696,00	0,00	0,00	0,00	3.570.703.696,00
48	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Perkebunan	385.839.000,00	0,00	0,00	0,00	385.839.000,00
49	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	355.110.000,00	0,00	0,00	0,00	355.110.000,00
50	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1.561.167.700,00	60.000.000,00	0,00	0,00	1.621.167.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
51	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.455.511.305,00	242.942.740,00	0,00	0,00	2.698.454.045,00
52	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	10.731.009.793,00	277.800.000,00	0,00	0,00	11.008.809.793,00
53	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3.999.994.569,00	0,00	0,00	0,00	3.999.994.569,00
54	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00
55	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	13.279.506.370,00	0,00	0,00	0,00	13.279.506.370,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
56	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	1.177.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.177.715.000,00
57	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	47.345.813.521,00	41.250.000,00	0,00	0,00	47.387.063.521,00
58	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	1.711.924.000,00	0,00	0,00	0,00	1.711.924.000,00
59	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	403.292.700,00	0,00	0,00	0,00	403.292.700,00
60	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.062.000,00	0,00	0,00	0,00	150.062.000,00
61	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	399.937.890,00	0,00	0,00	0,00	399.937.890,00
62	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.049.958.635,00	0,00	0,00	0,00	2.049.958.635,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
63	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
64	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.321.187.372,00	0,00	0,00	0,00	7.321.187.372,00
65	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.742.694.131,00	306.182.800,00	0,00	0,00	7.048.876.931,00
66	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	423.029.402,00	0,00	0,00	0,00	423.029.402,00
67	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	719.678.919,00	0,00	0,00	0,00	719.678.919,00
68	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.445.025.498,00	2.768.507.025,00	0,00	0,00	6.213.532.523,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
69	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.176.708,00	0,00	0,00	0,00	108.176.708,00
70	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.030.877.502,00	2.976.397.640,00	0,00	0,00	15.007.275.142,00
71	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Plakat Tinggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Plakat Tinggi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
73	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Plakat Tinggi	2.750.016.147,00	121.985.276,00	0,00	0,00	2.872.001.423,00
74	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Plakat Tinggi	17.901.000,00	0,00	0,00	0,00	17.901.000,00
75	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
76	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	265.854.980,00	0,00	0,00	0,00	265.854.980,00
77	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	57.506.935.493,00	7.079.294.377,00	0,00	0,00	64.586.229.870,00
78	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	917.594.700,00	0,00	0,00	0,00	917.594.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
79	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	267.323.596.313,00	297.039.369,00	0,00	0,00	267.620.635.682,00
80	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	196.237.000,00	0,00	0,00	0,00	196.237.000,00
81	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	81.902.388,00	0,00	0,00	0,00	81.902.388,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
82	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	297.100.919,00	0,00	0,00	0,00	297.100.919,00
83	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	3.741.363.738,00	0,00	0,00	0,00	3.741.363.738,00
84	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	492.805.500,00	0,00	0,00	0,00	492.805.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
85	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.046.550,00	0,00	0,00	0,00	934.046.550,00
86	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	156.533.000,00	0,00	0,00	0,00	156.533.000,00
87	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	846.406.500,00	0,00	0,00	0,00	846.406.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
88	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	272.961.246,00	0,00	0,00	0,00	272.961.246,00
89	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.729.791.600,00	0,00	0,00	0,00	1.729.791.600,00
90	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	65.937.794.711,00	14.870.025.400,00	0,00	0,00	80.807.820.111,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
91	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.678.028.500,00	0,00	0,00	0,00	1.678.028.500,00
92	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	3.435.154.990,00	0,00	0,00	0,00	3.435.154.990,00
93	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	328.039.250,00	0,00	0,00	0,00	328.039.250,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
94	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.319.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.020.000,00
95	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	52.728.750,00	0,00	0,00	0,00	52.728.750,00
96	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	299.995.000,00	0,00	0,00	0,00	299.995.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
97	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00
98	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.105.969.000,00	0,00	0,00	0,00	6.105.969.000,00
99	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.544.943.350,00	30.121.540.581,00	0,00	0,00	44.666.483.931,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
100	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.716.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	345.716.000,00
101	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.329.149.850,00	199.100.000,00	0,00	0,00	3.528.249.850,00
102	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.078.483.467,00	0,00	0,00	0,00	550.078.483.467,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
103	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	491.655.320,00	0,00	0,00	0,00	491.655.320,00
104	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.099.906.201,00	816.493.800,00	0,00	0,00	1.916.400.001,00
105	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	165.807.867,00	0,00	0,00	0,00	165.807.867,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
106	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	793.226.857,00	100.239.317,00	0,00	0,00	893.466.174,00
107	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	743.103.000,00	0,00	0,00	0,00	743.103.000,00
108	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.556.428.600,00	1.088.352.000,00	0,00	0,00	4.644.780.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
109	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
110	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	978.035.525,00	0,00	0,00	0,00	978.035.525,00
111	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	418.587.050,00	0,00	0,00	0,00	418.587.050,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
112	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Air Balui	544.737.150,00	60.526.350,00	0,00	0,00	605.263.500,00
113	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Babat Toman	2.396.536.200,00	266.281.800,00	0,00	0,00	2.662.818.000,00
114	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Balai Agung	3.284.530.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	3.734.530.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
115	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bandar Agung	959.859.950,00	169.387.050,00	0,00	0,00	1.129.247.000,00
116	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bayung Lencir	4.029.028.000,00	660.342.000,00	0,00	0,00	4.689.370.000,00
117	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Berojaya Timur	912.397.500,00	101.377.500,00	0,00	0,00	1.013.775.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
118	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Bukit Selabu	513.126.400,00	128.281.600,00	0,00	0,00	641.408.000,00
119	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Cinta Karya	1.024.835.800,00	176.078.200,00	0,00	0,00	1.200.914.000,00
120	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Gardu Harapan	792.535.500,00	139.860.000,00	0,00	0,00	932.395.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
121	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Jirak	1.381.756.800,00	22.506.200,00	0,00	0,00	1.404.263.000,00
122	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Karang Mukti	1.556.339.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	1.780.339.000,00
123	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Karya Maju	1.620.413.157,00	201.100.843,00	0,00	0,00	1.821.514.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
124	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lais	2.514.506.768,00	268.627.732,00	0,00	0,00	2.783.134.500,00
125	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lubuk Bintialo	730.150.000,00	128.850.000,00	0,00	0,00	859.000.000,00
126	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Lumpatan	2.475.768.000,00	373.550.000,00	0,00	0,00	2.849.318.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
127	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Mekar jaya	841.397.400,00	93.488.600,00	0,00	0,00	934.886.000,00
128	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Ngulak	2.007.905.000,00	280.940.000,00	0,00	0,00	2.288.845.000,00
129	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Peninggalan	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
130	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sido Rahayu	829.864.574,00	202.680.426,00	0,00	0,00	1.032.545.000,00
131	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sri Gunung	1.177.957.000,00	130.250.000,00	0,00	0,00	1.308.207.000,00
132	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Suka Damai	862.541.600,00	215.635.400,00	0,00	0,00	1.078.177.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
133	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Suka Jaya	1.253.372.516,00	219.640.484,00	0,00	0,00	1.473.013.000,00
134	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sumber Harum	1.065.623.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	1.190.623.000,00
135	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Sungai Lilin	2.647.935.700,00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.947.935.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
136	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tanah Abang	1.411.539.750,00	249.095.250,00	0,00	0,00	1.660.635.000,00
137	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tanjung Kerang	1.552.361.800,00	156.805.000,00	0,00	0,00	1.709.166.800,00
138	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Tebing Bulang	2.058.749.300,00	363.308.700,00	0,00	0,00	2.422.058.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
139	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Teluk Kijing	1.109.355.280,00	151.275.720,00	0,00	0,00	1.260.631.000,00
140	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Puskesmas Ulak Paceh	2.262.565.700,00	399.276.300,00	0,00	0,00	2.661.842.000,00
141	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	2.144.616.728,00	355.383.272,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
142	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir	22.480.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
143	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	5.600.359.929,00	4.399.640.000,00	0,00	0,00	9.999.999.929,00
144	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	140.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
145	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	2.212.500.000,00	287.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
146	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin	24.437.500.000,00	4.312.500.000,00	0,00	0,00	28.750.000.000,00
147	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
148	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.037.985.248,00	145.138.945,00	0,00	0,00	6.183.124.193,00
149	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	12.358.927.741,00	232.430.680,00	0,00	0,00	12.591.358.421,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1.438.936.644,00	181.263.460,00	0,00	0,00	1.620.200.104,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	703.229.553,00	52.978.025,00	0,00	0,00	756.207.578,00
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	7.734.271.597,00	152.666.996,00	0,00	0,00	7.886.938.593,00
153	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lais	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
154	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.376.839.750,00	1.523.157.321,00	0,00	0,00	5.899.997.071,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
155	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.540.618.286,00	425.457.018,00	0,00	0,00	8.966.075.304,00
156	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	253.735.000,00	0,00	0,00	0,00	253.735.000,00
157	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	171.952.000,00	0,00	0,00	0,00	171.952.000,00
158	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	2.080.680.000,00	1.851.320.000,00	0,00	0,00	3.932.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
159	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	6.797.590.487,00	3.426.150.950,00	0,00	0,00	10.223.741.437,00
160	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	1.416.696.524,00	165.767.400,00	0,00	0,00	1.582.463.924,00
161	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	99.937.000,00	0,00	0,00	0,00	99.937.000,00
162	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	30.330.787.944,00	299.826.300,00	0,00	0,00	30.630.614.244,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
163	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
164	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	689.990.100,00	0,00	0,00	0,00	689.990.100,00
165	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.222.153.340,00	1.799.823.500,00	0,00	0,00	63.021.976.840,00
166	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	39.393.950,00	198.496.210,00	0,00	0,00	237.890.160,00
167	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perkebunan	9.038.242.067,00	355.531.331,00	0,00	0,00	9.393.773.398,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
168	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	8.786.968.296,00	297.561.000,00	0,00	0,00	9.084.529.296,00
169	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
170	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lais	22.650.000,00	0,00	0,00	0,00	22.650.000,00
171	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lais	47.700.000,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00
172	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lais	3.952.296.807,00	133.569.341,00	0,00	0,00	4.085.866.148,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
173	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lais	493.174.805,00	0,00	0,00	0,00	493.174.805,00
174	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lais	17.235.000,00	0,00	0,00	0,00	17.235.000,00
175	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.761.447.255,00	274.987.400,00	0,00	0,00	6.036.434.655,00
176	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.699.754.949,00	428.571.999,00	0,00	0,00	34.128.326.948,00
177	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.083.060.286,00	0,00	0,00	0,00	9.083.060.286,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
178	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.556.272.774,00	0,00	0,00	0,00	3.556.272.774,00
179	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	138.223.000,00	0,00	0,00	0,00	138.223.000,00
180	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.952.054.518,00	281.341.155,00	0,00	0,00	7.233.395.673,00
181	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.633.167.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.167.050,00
182	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	119.604.000,00	0,00	0,00	0,00	119.604.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
183	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	766.733.200,00	0,00	0,00	0,00	766.733.200,00
184	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.609.016.278,00	438.371.253,00	0,00	0,00	12.047.387.531,00
185	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	1.121.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.950.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	7.294.300.550,00	0,00	0,00	0,00	7.294.300.550,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.936.442.181,00	544.343.520,00	0,00	0,00	11.480.785.701,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	2.171.453.529,00	0,00	0,00	0,00	2.171.453.529,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.246.544.888,00	0,00	6.997.200.620,00	494.667.382.300,00	504.911.127.808,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	15.527.168.676,00	289.836.798,00	0,00	0,00	15.817.005.474,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.740.509.100,00	55.090.900,00	0,00	0,00	5.795.600.000,00
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	25.228.777.466,00	543.088.230,00	0,00	0,00	25.771.865.696,00
195	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.498.428.750,00	0,00	0,00	0,00	2.498.428.750,00
196	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	975.589.524,00	0,00	0,00	0,00	975.589.524,00
197	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.348.301.038,00	249.250.500,00	0,00	0,00	16.597.551.538,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
198	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.190.149.781,00	0,00	0,00	0,00	3.190.149.781,00
199	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	6.959.578.730,00	217.607.730,00	0,00	0,00	7.177.186.460,00
200	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.806.491.779,00	257.217.303,00	0,00	0,00	7.063.709.082,00
201	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.351.390.795,00	539.081.947,00	0,00	0,00	8.890.472.742,00
202	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.562.100.580,00	479.348.039,00	0,00	0,00	9.041.448.619,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
203	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.219.935.906,00	62.664.495,00	0,00	0,00	1.282.600.401,00
204	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.144.013.017,00	119.204.758,00	0,00	0,00	1.263.217.775,00
205	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	9.991.228.934,00	3.097.012.000,00	0,00	0,00	13.088.240.934,00
206	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	11.720.673.643,00	192.035.994,00	0,00	0,00	11.912.709.637,00
207	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	8.148.953.354,00	251.835.107,00	0,00	0,00	8.400.788.461,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
208	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	26.375.375.742,00	405.895.365,00	0,00	0,00	26.781.271.107,00
209	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.402.209.016,00	219.148.490,00	0,00	0,00	7.621.357.506,00
210	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	20.225.343.690,00	295.756.900,00	0,00	0,00	20.521.100.590,00
211	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	3.599.999.200,00	0,00	0,00	0,00	3.599.999.200,00
212	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	1.500.000.800,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
213	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Babat Supat	13.760.000,00	0,00	0,00	0,00	13.760.000,00
214	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Babat Supat	27.520.000,00	0,00	0,00	0,00	27.520.000,00
215	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Babat Supat	2.889.104.259,00	79.687.229,00	0,00	0,00	2.968.791.488,00
216	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Babat Supat	530.901.200,00	0,00	0,00	0,00	530.901.200,00
217	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Babat Supat	7.747.000,00	0,00	0,00	0,00	7.747.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
218	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Babat Toman	12.780.000,00	0,00	0,00	0,00	12.780.000,00
219	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Babat Toman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Babat Toman	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00
221	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Babat Toman	4.414.188.708,00	124.617.924,00	0,00	0,00	4.538.806.632,00
222	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Babat Toman	522.974.105,00	0,00	0,00	0,00	522.974.105,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
223	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Babat Toman	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00
224	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	14.412.000,00	0,00	0,00	0,00	14.412.000,00
225	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Batanghari Leko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Batanghari Leko	20.492.000,00	0,00	0,00	0,00	20.492.000,00
227	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Batanghari Leko	3.121.401.669,00	121.837.285,00	0,00	0,00	3.243.238.954,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
228	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Batanghari Leko	533.384.000,00	0,00	0,00	0,00	533.384.000,00
229	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Batanghari Leko	11.712.000,00	0,00	0,00	0,00	11.712.000,00
230	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bayung Lencir	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
231	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bayung Lencir	25.965.000,00	0,00	0,00	0,00	25.965.000,00
232	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bayung Lencir	3.783.805.816,00	127.347.858,00	0,00	0,00	3.911.153.674,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
233	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bayung Lencir	533.529.600,00	0,00	0,00	0,00	533.529.600,00
234	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bayung Lencir	11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	11.740.000,00
235	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Jirak Jaya	30.480.000,00	0,00	0,00	0,00	30.480.000,00
236	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Jirak Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Jirak Jaya	28.320.000,00	0,00	0,00	0,00	28.320.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
238	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Jirak Jaya	1.947.340.622,00	122.585.403,00	0,00	0,00	2.069.926.025,00
239	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Jirak Jaya	507.385.000,00	0,00	0,00	0,00	507.385.000,00
240	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Jirak Jaya	13.815.000,00	0,00	0,00	0,00	13.815.000,00
241	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Keluang	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
242	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Keluang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
243	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Keluang	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
244	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Keluang	3.839.939.081,00	121.530.042,00	0,00	0,00	3.961.469.123,00
245	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Keluang	535.019.000,00	0,00	0,00	0,00	535.019.000,00
246	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Keluang	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	14.015.000,00
247	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lalan	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
248	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lalan	18.580.000,00	0,00	0,00	0,00	18.580.000,00
250	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lalan	3.211.464.553,00	123.198.100,00	0,00	0,00	3.334.662.653,00
251	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lalan	789.080.000,00	0,00	0,00	0,00	789.080.000,00
252	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lalan	9.290.000,00	0,00	0,00	0,00	9.290.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
253	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
254	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Lawang Wetan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Lawang Wetan	27.540.000,00	0,00	0,00	0,00	27.540.000,00
256	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Lawang Wetan	3.752.085.456,00	88.033.256,00	0,00	0,00	3.840.118.712,00
257	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Lawang Wetan	517.510.000,00	0,00	0,00	0,00	517.510.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
258	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Lawang Wetan	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
259	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Plakat Tinggi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
260	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Plakat Tinggi	522.224.000,00	0,00	0,00	0,00	522.224.000,00
261	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sanga Desa	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00
262	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sanga Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
263	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sanga Desa	39.128.499,00	0,00	0,00	0,00	39.128.499,00
264	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sanga Desa	4.525.294.564,00	129.174.252,00	0,00	0,00	4.654.468.816,00
265	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sanga Desa	494.924.000,00	0,00	0,00	0,00	494.924.000,00
266	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sanga Desa	25.005.000,00	0,00	0,00	0,00	25.005.000,00
267	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sekayu	24.929.730,00	0,00	0,00	0,00	24.929.730,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
268	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Sekayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sekayu	99.960.000,00	0,00	0,00	0,00	99.960.000,00
270	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sekayu	8.778.487.202,00	121.009.124,00	0,00	0,00	8.899.496.326,00
271	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sekayu	586.298.300,00	73.785.483,00	0,00	0,00	660.083.783,00
272	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sekayu	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
273	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Keruh	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00
274	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Keruh	40.586.000,00	0,00	0,00	0,00	40.586.000,00
275	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Keruh	3.042.303.956,00	107.385.930,00	0,00	0,00	3.149.689.886,00
276	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Keruh	497.310.000,00	0,00	0,00	0,00	497.310.000,00
277	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Keruh	20.006.000,00	0,00	0,00	0,00	20.006.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
278	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00
279	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Sungai Lilin	20.160.000,00	0,00	0,00	0,00	20.160.000,00
280	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Sungai Lilin	4.324.619.550,00	88.010.846,00	0,00	0,00	4.412.630.396,00
281	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Sungai Lilin	549.760.000,00	0,00	0,00	0,00	549.760.000,00
282	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Sungai Lilin	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
283	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00
284	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Tungkal Jaya	79.749.000,00	0,00	0,00	0,00	79.749.000,00
285	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tungkal Jaya	3.973.575.675,00	130.426.887,00	0,00	0,00	4.104.002.562,00
286	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tungkal Jaya	452.611.000,00	0,00	0,00	0,00	452.611.000,00
287	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tungkal Jaya	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	23.820.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
288	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Babat	692.647.588,00	7.351.419,00	0,00	0,00	699.999.007,00
289	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Babat	115.270.064,00	34.729.680,00	0,00	0,00	149.999.744,00
290	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Balai Agung	347.922.080,00	352.077.920,00	0,00	0,00	700.000.000,00
291	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Balai Agung	77.840.121,00	72.159.879,00	0,00	0,00	150.000.000,00
292	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bayung Lencir	687.736.971,00	11.277.600,00	0,00	0,00	699.014.571,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
293	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bayung Lencir	121.727.065,00	28.272.477,00	0,00	0,00	149.999.542,00
294	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Bayung Lencir Indah	691.785.676,00	8.158.500,00	0,00	0,00	699.944.176,00
295	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Bayung Lencir Indah	119.213.415,00	30.760.764,00	0,00	0,00	149.974.179,00
296	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kayuara	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
297	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Kayuara	115.592.053,00	34.407.947,00	0,00	0,00	150.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
298	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Keluang	700.070.616,00	0,00	0,00	0,00	700.070.616,00
299	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Keluang	143.929.709,00	5.999.550,00	0,00	0,00	149.929.259,00
300	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mangun Jaya	692.647.519,00	7.351.419,00	0,00	0,00	699.998.938,00
301	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Mangun Jaya	84.129.321,00	65.870.508,00	0,00	0,00	149.999.829,00
302	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngulak	698.856.278,00	0,00	0,00	0,00	698.856.278,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
303	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngulak	149.708.288,00	0,00	0,00	0,00	149.708.288,00
304	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Ngulak I	678.374.605,00	20.757.000,00	0,00	0,00	699.131.605,00
305	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Ngulak I	149.588.543,00	0,00	0,00	0,00	149.588.543,00
306	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Serasan Jaya	699.999.937,00	0,00	0,00	0,00	699.999.937,00
307	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Serasan Jaya	116.794.350,00	33.205.650,00	0,00	0,00	150.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
308	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Soak Baru	699.999.949,00	0,00	0,00	0,00	699.999.949,00
309	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Soak Baru	89.035.249,00	60.964.750,00	0,00	0,00	149.999.999,00
310	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Lilin	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
311	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sungai Lilin	124.364.550,00	25.635.450,00	0,00	0,00	150.000.000,00
312	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
313	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Sungai Lilin Jaya	111.462.354,00	38.537.646,00	0,00	0,00	150.000.000,00
314	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Satuan Polisi Pamong Praja	603.825.040,00	0,00	0,00	0,00	603.825.040,00
315	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja	643.389.000,00	4.355.000.000,00	0,00	0,00	4.998.389.000,00
316	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	2.446.502.973,00	37.947.737,00	0,00	0,00	2.484.450.710,00
317	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	19.996.757.402,00	196.936.034,00	0,00	0,00	20.193.693.436,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
318	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	21.051.766.173,00	0,00	0,00	0,00	21.051.766.173,00
319	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	90.038.135.630,00	6.174.512.807,00	0,00	0,00	96.212.648.437,00
320	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	3.547.176.450,00	0,00	0,00	0,00	3.547.176.450,00
321	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	38.736.777.649,00	0,00	0,00	0,00	38.736.777.649,00
322	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Prioritas Daerah 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	64.420.937.945,00	3.655.716.111,00	0,00	0,00	68.076.654.056,00
TOTAL					**2.384.132.390.457,00**	**523.070.692.769,00**	**6.997.200.620,00**	**494.667.382.300,00**	**3.408.867.666.146,00**

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024
Pj Bupati



H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN X PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

A . PNS

GOLONGAN / RUANG	ESELON							NON ESELON				JUMLAH
	I	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JFT KESEHATAN	JFT PENDIDIKAN	JFT LAINNYA	STAF	
GOLONGAN IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOLONGAN IV/d	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GOLONGAN IV/c	0	0	26	0	1	0	0	6	2	4	1	40
GOLONGAN IV/b	0	0	4	45	3	0	0	18	498	61	0	629
GOLONGAN IV/a	0	0	0	19	87	33	1	25	351	94	31	641
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**1**	**31**	**64**	**91**	**33**	**1**	**49**	**851**	**159**	**32**	**1312**
GOLONGAN III/d	0	0	0	4	48	109	24	236	726	217	207	1571
GOLONGAN III/c	0	0	0	0	5	59	47	189	347	80	325	1052
GOLONGAN III/b	0	0	0	0	0	27	31	227	419	47	349	1100
GOLONGAN III/a	0	0	0	0	0	0	10	120	91	19	371	611
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**4**	**53**	**195**	**112**	**772**	**1583**	**363**	**1252**	**4334**
GOLONGAN II/d	0	0	0	0	0	0	0	94	18	14	146	272
GOLONGAN II/c	0	0	0	0	0	0	0	19	9	0	146	174
GOLONGAN II/b	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	69	82
GOLONGAN II/a	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	26	29
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116**	**33**	**21**	**387**	**557**
GOLONGAN I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
GOLONGAN I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
GOLONGAN I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
GOLONGAN I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26**	**26**
TOTAL	**0**	**1**	**31**	**68**	**144**	**228**	**113**	**937**	**2467**	**543**	**1697**	**6229**

B . PPPK

GOLONGAN	TEKNIS	KESEHATAN	NDIDIK	JUMLAH
X	0	170	0	170
IX	86	130	3232	3448
VII	43	1050	0	1093
V	27	0	0	27
TOTAL	**156**	**1350**	**3232**	**4738**

Sekayu, 27 Desember 2024

H. SANDI FAHLEPI

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 09 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Musi Banyuasin, 27 Desember 2024

Pj Bupati

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XII **PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH (Rp.)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN LALU (Rp.)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (Rp.)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (Rp.)	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN (Rp.)	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI (Rp.)	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI (Rp.)	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2013	Dinas Perkebunan	Nota Kesepakatan Kerja-sama antara Pemkab. Muba dengan Bank Sumsel No. 415.42 / 013 / disbun / 2002 dan no. 036/dir/III/2002	Non Permanen	2.092.056.977,00	2.092.056.977,00	-	2.092.056.977,00	-	-	-	2.092.056.977,00
JUMLAH NON PERMANEN (DANA BERGULIR)					**2.092.056.977,00**	**2.092.056.977,00**	**-**	**2.092.056.977,00**	**-**	**-**	**-**	**2.092.056.977,00**
2	2013	PDAM Kab. Muba.	Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PDAM Tirta Randik Kab. Muba.	Permanen	708.357.685.624,41	535.532.685.624,58	28.100.000.000,00	563.632.685.624,58	144.724.999.999,83	-	-	563.632.685.624,58
3	2013	BPDSS	Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada PT. Bank Pem-bangunan Daerah Sumsel-Babel.	Permanen	129.051.643.431,23	119.051.643.431,23	5.000.000.000,00	124.051.643.431,23	5.000.000.000,00	19.065.474.112,22	-	124.051.643.431,23
4	2022	PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA	SK Bupati no. 716/KPTS-BPKAD/2022 tanggal. 07-12-2022	Permanen	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-
5		**PT.PETROMUBA HOLDING**			**687.404.425.927,24**	**443.828.576.289,00**	**2.000.000.000,00**	**445.828.576.289,00**	**241.575.849.638,24**	**-**	**-**	**445.828.576.289,00**
	2013	PT. Petro Muba	Perda No. 7 Tahun 2017 tanggal 4 September 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penambahan Pe-nyertaan Modal Daerah Kab. Muba kepada Perseroan Terbatas PETRO MUBA	Permanen	4.080.966.560,00	16.630.966.560,00	-	16.630.966.560,00	(12.550.000.000,00)	-	-	16.630.966.560,00
	2013	PT. Muba Link		Permanen	176.475.710.679,00	110.635.680.679,00	1.000.000.000,00	111.635.680.679,00	64.840.030.000,00	-	-	111.635.680.679,00
	2013	PT. Muba Electric Power		Permanen	456.843.247.188,24	314.022.429.050,00	-	314.022.429.050,00	142.820.818.138,24	-	-	314.022.429.050,00
	2013	PT. Muba Sarana		Permanen	42.494.920.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	39.494.920.000,00	-	-	3.000.000.000,00
	2013	PT. Kilang Muba		Permanen	6.609.581.500,00	-	-	-	6.609.581.500,00	-	-	-
	2019	PT. Perkebunan Muba Lestari	SK Bupati no. 770/KPTS-BPKAD/2019	Permanen	900.000.000,00	539.500.000,00	-	539.500.000,00	360.500.000,00	-	-	539.500.000,00
JUMLAH PERMANEN (PENYERTAAN MODAL)					**1.525.813.754.982,88**	**1.098.412.905.344,81**	**36.100.000.000,00**	**1.133.512.905.344,81**	**391.300.849.638,07**	**19.065.474.112,22**	**-**	**1.133.512.905.344,81**
JUMLAH KESELURUHAN					**1.527.905.811.959,88**	**1.100.504.962.321,81**	**36.100.000.000,00**	**1.135.604.962.321,81**	**391.300.849.638,07**	**19.065.474.112,22**	**-**	**1.135.604.962.321,81**

Sekayu, 27 Desember 2024

Pj BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

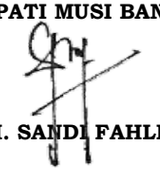
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset Tidak Berwujud	223.711.509.997,90	0,00	0,00	223.711.509.997,90
2	Aset Lain-lain	125.246.486.737,62	0,00	0,00	125.246.486.737,62
Jumlah		**348.957.996.735,52**	**0,00**	**0,00**	**348.957.996.735,52**

Sekayu,27 Desember 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XIII **PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI 2024		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	TANAH	532.640.227.948,49	11.237.783.365,00	0,00	543.878.011.313,49
2	PERALATAN DAN MESIN	1.382.659.857.852,82	34.104.202.148,00	375.670.000,00	1.416.388.390.000,82
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.155.731.205.006,34	0,00	0,00	3.155.731.205.006,34
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	9.451.608.697.807,24	0,00	0,00	9.451.608.697.807,24
5	ASET TETAP LAINNYA	84.408.139.489,25	0,00	0,00	84.408.139.489,25
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	79.673.206.627,05	0,00	0,00	79.673.206.627,05
	JUMLAH	**14.686.721.334.731,20**	**45.341.985.513,00**	**375.670.000,00**	**14.731.687.650.244,20**

Sekayu, 27 Desember 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

,

-

14.731.687.650.244,20

LAMPIRAN XIV **PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	KODE KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN 2021, TAHUN 2022, DAN TAHUN 2023			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D AKHIR TAHUN 2023	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
			NIHIL				
Jumlah			-	-	-	-	-

Sekayu,27 Desember 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XV **PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2024**
NOMOR : 9 TAHUN 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER KE KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-

NIHIL

Sekayu, 27 Desember 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI

LAMPIRAN XVI **PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2025**
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 27 Desember 2024

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
PER AGUSTUS DESEMBER 2024

NO.	SUMBER PINJAMAN DAERAH	DASAR HUKUM PINJAMAN DAERAH	TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI	JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp)	JANGKA WAKTU PINJAMAN (Tahun)	PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%)	TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN	JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI		JUMLAH SISA PEMBAYARAN	
								POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	Bunga (Rp)	POKOK PINJAMAN DAERAH (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					NIHIL						
2											
JUMLAH				-	-	-	-	-	-	-	-

Sekayu, 27 Desember 2024
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI